

**FAKTOR PENENTU INVESTASI SWASTA DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA
DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA
(Studi Pada 26 Propinsi di Indonesia periode 1990 -2006)**

*DETERMINANT OF FACTORS OF PRIVATE INVESTMENT AND THE
EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH, EMPLOYMENT,
AND INCOME DISTRIBUTION IN INDONESIA
(Studies at 26 Provinces in Indonesia, the period 1990-2006)*

**Oleh :
INDRA SUHENDRA
L3E04.160**

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Ekonomi
Pada Universitas Padjadjaran
Dengan Wibawa Rektor Universitas Padjadjaran
Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Ir., D.E.A.
Sesuai dengan Keputusan Senat Komisi I / Guru Besar Universitas
Dipertahankan pada tanggal 04 November 2009
Di Universitas Padjadjaran



**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
TAHUN 2009**

**FAKTOR PENENTU INVESTASI SWASTA DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI, KESEMPATAN KERJA
DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI INDONESIA
(Studi Pada 26 Propinsi di Indonesia periode 1990 -2006)**

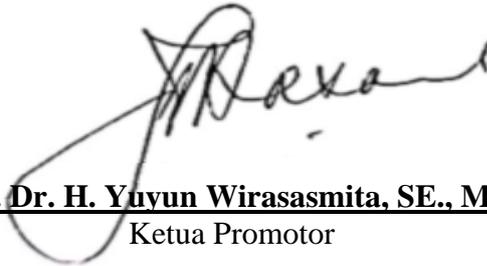
*DETERMINANT OF FACTORS OF PRIVATE INVESTMENT AND THE
EFFECTS ON ECONOMIC GROWTH, EMPLOYMENT,
AND INCOME DISTRIBUTION IN INDONESIA
(Studies at 26 Provinces in Indonesia, the period 1990-2006)*

**Oleh :
INDRA SUHENDRA
L3E04.160**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna
memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Ekonomi ini
telah disetujui oleh Tim Promotor
Pada tanggal seperti tertera di bawah ini :

Bandung, Oktober 2009

Tim Promotor



Prof. Dr. H. Yuyun Wirasasmita, SE., MSc.
Ketua Promotor



Prof. Dr. H. Usman Hardi, SE., MS.
Anggota Promotor



Nury Effendi, SE., MA., Ph.D.
Anggota Promotor

DALIL-DALIL
INDRA SUHENDRA
L3E04.160

1. Semakin besar investasi pemerintah di bidang infrastruktur dan berbagai penyediaan insentif bagi sektor swasta, semakin mendukung tumbuh kembangnya investasi swasta di Indonesia
2. Investasi swasta yang meningkat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio)
3. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki tenaga kerja, semakin tinggi pula modal manusia yang dimilikinya
4. Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang apabila dibiarkan akan mereduksi pertumbuhan ekonomi dan memperparah ketimpangan distribusi pendapatan
5. Sukses dan keberhasilan adalah sebuah pilihan yang datang tidak dengan sendirinya, maka harus diperjuangkan secara serius, kerja keras, berpikir ke depan dan penuh pengorbanan
6. Kebiasaan perilaku baik dan jujur dalam mengerjakan hal kecil dimasa lalu cenderung akan berulang manakala dipercaya mengerjakan hal yang besar di masa depan
7. Keberhasilan penyelesaian pendidikan di perguruan tinggi, lebih banyak ditentukan oleh tekad dan kemampuan mengelola internal pribadi diri sendiri

PERNYATAAN PROGRAM DOKTOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Doktor, baik di Universitas Padjadjaran maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor, Oponen Ahli dan Guru Besar.
3. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, Oktober 2009
Yang membuat pernyataan,



Indra Suhendra
NPM: L3E04.160

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari berbagai variabel makro ekonomi terhadap investasi swasta. Data penelitian yang digunakan adalah data panel untuk 26 provinsi selama periode 1990-2007. Data tersebut diperoleh dari sumber resmi pemerintah.

Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, investasi pemerintah, inflasi, ketersediaan kredit investasi, dan nilai tukar terhadap investasi swasta. Disamping itu, juga akan diuji pengaruh dari investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan.

Metode penelitian survey dengan pendekatan eksplanatori telah digunakan untuk penelitian ini. Sedangkan untuk analisis data, telah digunakan analisis *Two Stages Least Square* (2SLS) dengan pendekatan model efek random, terutama ditujukan untuk meneliti pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan di Indonesia.

Kesimpulan penelitian adalah, Pertama, suatu peningkatan dalam investasi pemerintah, pertumbuhan ekonomi, depresiasi nilai tukar dan ketersediaan kredit investasi akan meningkatkan investasi swasta. Sedangkan peningkatan dalam inflasi dan tingkat bunga akan menurunkan investasi swasta. Kedua, investasi swasta berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, serta berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan.

Kata Kunci : distribusi pendapatan, investasi swasta, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi

ABSTRACT

This study was conducted to analyze the effect of various macroeconomic variables on private investment. The research data used is panel data for 26 provinces during the period 1990-2007. The data is obtained from official government sources.

The purpose of the study was to examine the effect of economic growth, interest rates, government investment, inflation, availability of investment credit, and exchange rates on private investment. In addition, it will also examine the effect of private investment on economic growth, employment opportunities and income distribution.

Survey research method with explanatory approach has been used for this research. As for data analysis, Two Stages Least Square (2SLS) analysis has been used with a random effects model approach, primarily aimed at examining the effect of private investment on economic growth, employment opportunities and income distribution in Indonesia.

The conclusions of the study include, First, an increase in government investment, economic growth, exchange rate depreciation and the availability of investment credit will increase private investment. Meanwhile, an increase in inflation and interest rates will reduce private investment. Second, private investment has a positive effect on economic growth and employment opportunities, and has a negative effect on income distribution.

Keyword: *economic growth, employment, income distribution and private investment*

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur ke-Hadirat Allah SWT, *Rabb* semesta alam, dengan rahmat dan hidayah-Nya, ilmu yang bermanfaat serta bimbingan dan petunjuk yang selalu menyertai dari-Nya, maka promovendus dapat menyelesaikan Naskah Disertasi ini.

Naskah Disertasi ini berjudul : **“Faktor Penentu Investasi Swasta dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Distribusi Pendapatan di Indonesia”**, disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna memperoleh gelar Doktor Bidang Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Promovendus mengakui dan menyadari sepenuhnya bahwa seluruh proses belajar dan penulisan naskah disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak terlepas dari bimbingan dan arahan Tim Promotor, saran dan masukan dari Tim Oponen dan Guru Besar serta pihak-pihak lain yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas.

Atas dasar itulah, dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya, perkenankanlah pada kesempatan ini promovendus menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ketua Tim Promotor dan Anggota Tim Promotor, yaitu; Bapak Prof.Dr.H. Yuyun Wirasasmita, SE., MSc., Bapak Prof.Dr.H. Usman Hardi, SE., MS. dan Bapak Nury Effendi, SE., MA., Ph.D., yang dengan penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengoreksi, berdiskusi serta memberikan wawasan dan petunjuk kepada promovendus dalam penulisan naskah disertasi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan promovendus sampaikan kepada yang terhormat; Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Rilam, SE., MS., Ibu Prof. Armida S. Alisjahbana, SE., MA., Ph.D., Ibu Prof. Dr. Hj. Rina Indriastuti, SE., MSIE., Bapak Kodrat Wibowo, SE., MA., Ph.D., sebagai oponen ahli, dan Prof.Ir.H. Tuhpawana P. Sendjaja, Ph.D., selaku representasi Guru Besar, atas semua masukan, koreksi dan saran ilmiah dalam rangka perbaikan Naskah Disertasi sehingga naskah disertasi ini menjadi lebih terarah dan bermanfaat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi, juga promovendus sampaikan kepada yang terhormat; Bapak Prof. Dr. H. Ganjar Kurnia, Ir, DEA., selaku Rektor Universitas Padjadjaran Bandung, Bapak Prof. Dr. Ir. Mahfud Arifin, MS., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung, Ibu Prof. Dr. Hj. Erni Tisnawati Sule, SE., MS., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung dan Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Rilam, SE.,MS., selaku Koordinator Program S3 Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung.

Tidak lupa pula promovendus ucapan terima kasih kepada Ibu Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. selaku Gubernur Banten dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten yang telah memberikan bantuan beasiswa pendidikan. Ucapan terima kasih juga promovendus sampaikan kepada yang terhormat, Bapak Prof. Dr. Ir. Rahman Abdullah, M.Sc., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Bapak H.Wawan Prahyawan, SE, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta Bapak Dr. H. Moh. Kuswanto, Drs., MS., selaku Ketua Prodi IESP Fakultas Ekonomi Universitas

Sultan Ageng Tirtayasa, tempat dimana promovendus mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Ucapan terima kasih juga promovendus sampaikan kepada pimpinan Pusat Data BKPM Jakarta, perpustakaan BPS Jakarta dan Bandung, perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran dan perpustakaan Bank Indonesia Jakarta dan Bandung, terutama atas izin dan kemudahan memperoleh data penelitian dan referensi guna memperlancar penyelesaian penulisan disertasi ini. Terima kasih juga promovendus sampaikan kepada Keluarga Besar Bapak Eko Susilo, SE., MM., selaku Pimpinan ASC Group dan PT Ligar Serang Banten, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada promovendus sebagai tenaga ahli dalam berbagai kegiatan riset di Daerah maupun di Pusat. Juga kepada *tim begadang* (Produksi) di Divisi Manajemen Konsultan, Bpk. Ibnu Sutowo, A.Md, Bpk Gatot Emantoro, A.Md., Ibu Santi Kushendi, A.Md., dan Kang Dadan yang selalu memberikan motivasi dan mendorong promovendus untuk segera menyelesaikan naskah disertasi ini.

Teristimewa, promovendus sampaikan sembah sujud dan puji syukur kepada Ayahanda Aning Suhendar dan Ibunda R.A. N.B. Rachmat Natasapradja, yang telah melahirkan, membesarkan, mengasuh, mendidik dengan sabar, tulus ikhlas dan tanpa terputus mendoakan promovendus hingga sekarang. Beliauulah yang telah memberikan semuanya bagi promovendus dari awal hingga kini, tak terhitung dan takkan terbayar, yang telah promovendus rasakan. Juga ucapan terima kasih kepada saudara-saudaraku, Kakak, Lina Sudarlinah, SE dan suami Dedi, Adik; Andri Suhendri dan isteri Rini Nuraeni yang telah mendukung secara materil maupun moril kepada promovendus. Juga promovendus sampaikan sembah sujud kepada mertua Bapak H. Abdul Mudjib Hasyim (Alm.) dan Ibu Hj.

Muslichatun, yang tak henti dimanapun beliau berada, terus berdo'a memberikan dorongan moril kepada promovendus sehingga promovendus terus semangat.

Khusus teruntuk keluargaku tercinta, promovendus ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada isteri tercinta; Navik Istikomah, SE, MSi., yang dengan cinta, kasih sayang, perhatian, do'a serta kesabaran, terus-menerus memberi semangat, mendukung dan mendorong promovendus agar dapat menyelesaikan disertasi ini, juga kepada anak-anakku Athillah Razzani Nahendra Putra dan Aqiela Hamizzani Mahendra Putra, yang selalu memberikan suasana segar dan gembira dikala promovendus merasa jenuh.

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Paman promovendus, Dr.Ahmad Yani Rusdiani, SE., MSi., yang dengan perhatiannya telah banyak membantu promovendus, terutama dari sisi dukungan pendanaan dan diskusi-diskusi ilmiahnya. Terima kasih juga promovendus sampaikan kepada sepupu penulis yaitu; Tono Maulana Mindo Hartono dan Hendra Lesmana, yang telah banyak menemani promovendus, dari mulai mencari data penelitian, mencari bahan kepustakaan dan saat menyusun disertasi, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Promovendus haturkan terima kasih pula kepada rekan-rekan Angkatan 2004 Program Doktor Pascasarjana Universitas Padjadjaran, terutama rekan-rekan Bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan atas kekompakan dan dukungan morilnya kepada promovendus, khususnya kepada Bapak Agus Salim, SE.,MSi., terima kasih banyak atas dukungan moril dan materialnya.

Promovendus menyadari masih banyak pihak yang belum dapat promovendus sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan tenaga, pikiran dan fasilitas sehingga promovendus dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk naskah disertasi ini. Untuk itu, promovendus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Atas semua kebaikan, perhatian, amal ibadah dan motivasi yang diberikan kepada promovendus, semoga mendapat balasan dari Allah Yang Maha Kuasa. Promovendus sangat menyadari apa yang telah ditulis dalam disertasi ini, hanyalah setetes ilmu dari samudra ilmu yang Allah ciptakan, sehingga segala kekurangan dan ketidaksempurnaan di dalam Disertasi ini masih sangat terbuka. Namun demikian, dari setetes ilmu ini semoga dapat mengurangi sedikit dahaga bagi pengembangan ilmu berikutnya. Akhirnya semoga disertasi ini bermanfaat dan memberikan manfaat bagi kita semua, juga bagi pengembangan ilmu, khususnya ilmu ekonomi. Amin

Walhamdulillahilaaahirobbil 'aalamiin

Bandung, Oktober 2009

Promovendus,

Indra Suhendra
NPM: L3E04.160

BAB I

PENDAHULUAN

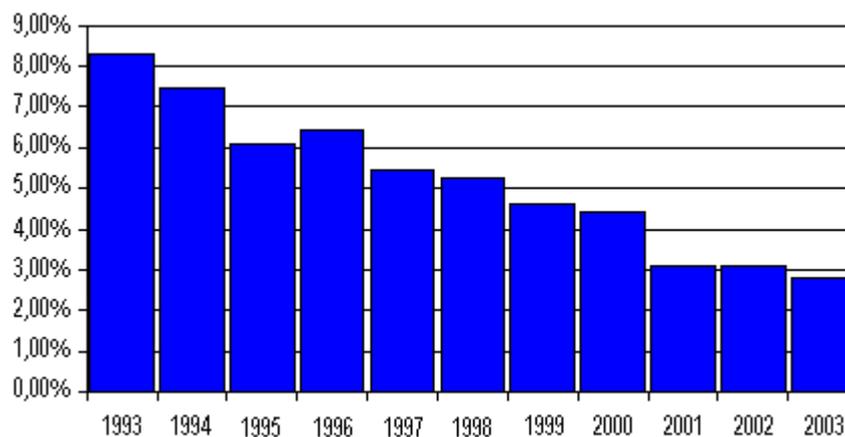
1.1. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan satu bagian penting dari pembangunan ekonomi, terutama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi, akan tersedia berbagai sarana produksi, yang dapat dioptimalkan dalam menghasilkan output dan nilai tambah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan investasi sendiri secara umum dapat dilakukan oleh dua sektor utama, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta. Sebagian besar investasi pemerintah umumnya dialokasikan untuk membiayai pembangunan fisik maupun non fisik yang tidak dapat dibiayai dan dilaksanakan oleh masyarakat. Pada saat ini, kemampuan dan kapasitas pemerintah untuk membangun sarana produksi dan infrastruktur, umumnya relatif terbatas untuk direalisasikan. Hal demikian terkait dengan kelangkaan modal di sektor pemerintah.

Kelangkaan modal di sektor pemerintah menyebabkan rendahnya dukungan infrastruktur fisik sebagai penggerak dunia usaha dan berlangsungnya kegiatan ekonomi. Pembiayaan defisit fiskal Indonesia yang berbasis utang membawa konsekuensi semakin menurunnya anggaran pembangunan (lihat Gambar 1.1.). Padahal dalam rangka kegiatan ekonomi Indonesia, anggaran pembangunan merupakan salah satu kunci alokasi pembangunan infrastruktur fisik yang akan

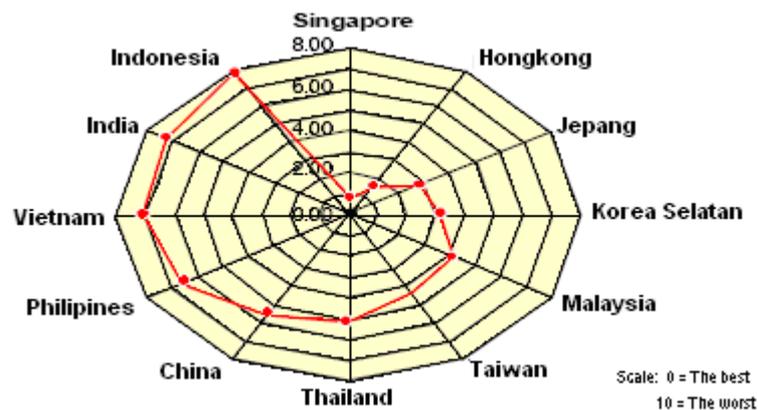
menunjang kelancaran dunia usaha. Infrastruktur yang memadai merupakan salah satu bentuk insentif yang dapat mendorong daya tarik investasi dan industri di Indonesia. Secara umum, pilihan usaha (investasi dan industri) akan jatuh pada preferensi dan persepsi pelaku usaha terhadap ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang ada dalam suatu wilayah tertentu (Tulus Tambunan, 2007).



Sumber : Nota Keuangan (diolah)

Gambar 1.1.
Perkembangan Anggaran Pembangunan (% terhadap GDP)

Rendahnya dukungan infrastruktur fisik, kerap kali menjadi kelemahan daya saing makroekonomi Indonesia. Dalam konteks global, Indonesia mendapatkan preferensi terburuk diantara negara-negara di dunia. Pada Gambar 1.2. dapat dikatakan bahwa dalam skala 1-10, Indonesia menempati persepsi terburuk, jauh bila dibandingkan dengan India, Vietnam, Philipina, China dan Thailand. Apalagi jika dibandingkan dengan *The Asian's Tiger* seperti Korea Selatan, Jepang, Hongkong dan Singapura.



Sumber : Klaus-Peter Kriegsmann - Asian Development Bank, 2003

Gambar 1.2.
Persepsi Pada Kualitas Infrastruktur Fisik

Rendahnya tingkat investasi dari sisi pemerintah merupakan disinsentif bagi terciptanya investasi swasta. Investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan institusi pemerintah yang baik dan upaya-upaya lainnya untuk dapat mendorong terciptanya investasi swasta tidak banyak dapat diharapkan, mengingat rendahnya investasi pemerintah itu sendiri. Investasi pemerintah seyogyanya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi swasta. Akibatnya, sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997, baik investasi pemerintah maupun swasta mengalami penurunan yang sangat drastis.

Kegiatan investasi swasta sendiri, umumnya dapat dilakukan melalui penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Adapun perkembangan investasi swasta di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1.
Perkembangan Realisasi Investasi Swasta di Indonesia
Periode 1991 – 2007 (dalam Milyar Rupiah dan Persen)

Tahun	PMDN		PMA		Investasi Swasta		
	Proyek	Nilai (Rp Miliar)	Proyek	Nilai (Rp Milyar)	Proyek	Nilai (Rp Milyar)	Growth (%)
1991	265	4.201	149	1.969	414	6.170	55,85
1992	225	5.420	155	3.787	380	9.207	49,22
1993	304	8.712	183	11.893	487	20.605	123,80
1994	582	13.916	392	8.294	974	22.210	7,79
1995	375	13.968	287	15.460	662	29.428	32,50
1996	450	20.265	357	11.033	807	31.298	6,35
1997	345	19.174	331	16.151	676	35.325	12,87
1998	296	18.584	412	40.252	708	58.836	66,56
1999	248	17.495	504	58.267	752	75.762	28,77
2000	300	24.622	638	107.529	938	132.151	74,43
2001	160	10.998	454	36.425	614	47.423	(64,11)
2002	108	12.582	442	27.595	550	40.177	(15,28)
2003	120	11.890	569	46.139	689	58.029	44,43
2004	130	15.265	548	43.045	678	58.310	0,48
2005	215	30.724	907	80.187	1122	110.911	90,21
2006	164	20.649	867	54.790	1031	75.439	(31,98)
2007	124	34.879	775	111.196	899	146.075	93,63
Jumlah	4.411	290.586	7.970	674.012	12.381	964.598	-

Sumber : Laporan Realisasi Investasi, BKPM Jakarta, 2008

Berdasarkan Tabel 1.1. terlihat bahwa investasi swasta selama periode 1991 sebagai awal penelitian hingga tahun 2000 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dan puncaknya pada tahun 2000. Hal ini terkait dengan dapat direalisasikannya 72,77 persen dari total persetujuan PMA pada tahun 2000, dan sisanya berasal dari realisasi PMDN.

Sedangkan sejak tahun 2001 hingga tahun 2007 sebagai akhir dari periode penelitian, perkembangan investasi swasta menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif (kadang meningkat dan bahkan menurun) mengikuti kondisi dan gejala

perekonomian yang terjadi pada saat itu. Menurut BKPM (2008), fluktuatif tingkat investasi swasta di Indonesia, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah masih tingginya risiko investasi di Indonesia. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masalah yang timbul akibat lemahnya stabilitas keamanan dan sosial di Indonesia. Fakta di lapangan memperkuat hal ini. Misalnya pada periode tahun 2001 dan 2002, terdapat berbagai macam isu keamanan nasional yang tidak kondusif (berbagai peristiwa Bom) dan ketidakpastian politik yang mewarnai perekonomian Indonesia pada periode tersebut, yaitu proses *impeachment* dan Sidang Istimewa terhadap kepemimpinan nasional (*melengserkan* Gus Dur).

Ketidakpastian kondisi politik dan suhu politik yang makin meningkat oleh beberapa investor ditafsirkan sebagai kondisi yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Peristiwa-peristiwa tersebut telah menjadi sentimen yang negatif bagi investor, terutama investor asing, karena dipandang akan memberikan risiko dan efek negatif yang serius bagi investasi mereka manakala mereka melakukan investasi di Indonesia pada saat itu. Tidak semua investor domestik maupun asing yang bersedia menanggung risiko akibat ketidakpastian yang diakibatkan oleh suhu politik yang memanas dan risiko akibat faktor keamanan yang tidak kondusif.

Menurut Tulus Tambunan (2007), adanya gejolak tersebut telah berakibat pada kondisi makro ekonomi secara keseluruhan, seperti berpengaruh pada tingkat bunga, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar. Pada tahun 2001, tingkat bunga nominal sebesar 17,82 persen, tingkat inflasi meningkat dari 9,35

persen menjadi 12,55 persen, nilai tukar rupiah pada 2001 terdepresiasi sebesar 8,39 persen menjadi sebesar Rp10.400,- per dollar dan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 4,92 persen menjadi 1,62 persen (Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2006).

Kondisi tersebut secara makro telah menyebabkan penurunan yang cukup signifikan terhadap kemampuan para pelaku ekonomi dalam menciptakan nilai tambah di seluruh wilayah, yang pada akhirnya berdampak balik pada investasi swasta, dimana nilai investasi swasta pada tahun 2001 mengalami penurunan sebesar 64,11 persen menjadi Rp47.423 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp132.151 miliar. Kondisi investasi swasta yang kurang menggembirakan berlanjut pada tahun berikutnya, dimana realisasi investasi pada tahun 2002 sebesar Rp40.177 miliar atau mengalami penurunan sebesar 15,28 persen jika dibandingkan dengan tahun 2001.

Sementara itu, selepas tahun 2005, berdasarkan jumlah proyek PMA dan PMDN, memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Hal ini menandakan bahwa Indonesia cenderung semakin kurang menarik bagi PMA dan PMDN. Dalam perspektif persaingan global, tingginya tingkat risiko investasi di Indonesia menyebabkan terbatasnya aliran modal luar negeri untuk berpindah ke Indonesia atau tidak melihat Indonesia sebagai daerah tujuan investasi. Tabel 1.2. memperlihatkan kondisi tersebut;

Dalam kawasan ASEAN sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.2., Indonesia pun masih tertinggal dengan negara-negara utama ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Singapura, khususnya dalam menarik PMA dari luar

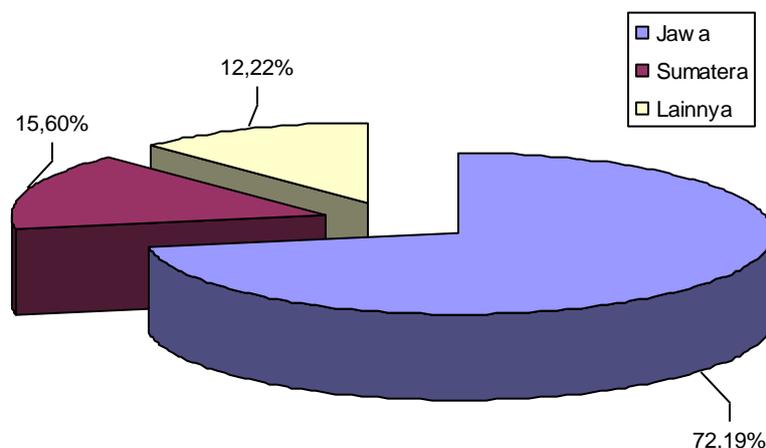
ASEAN (ASEAN-ekstra). Bahkan untuk periode 2005-2006, persentase pertumbuhan arus masuk neto PMA ke Indonesia negatif dibandingkan negara-negara anggota lainnya, terkecuali Myanmar.

Tabel 1.2.
Arus Masuk Neto PMA, ASEAN-Intra dan ASEAN –Ekstra, 2004-2006,
Per 31 Agustus 2007 (dalam Juta Dollar AS)

Negara	2004			2005			2006			Perubahan, 2004-2005 (%)			Perubahan, 2005-2006 (%)		
	ASEAN-Intra	ASEAN-Ekstra	<i>inflow Netto</i>	ASEAN-Intra	ASEAN-Ekstra	<i>inflow Netto</i>	ASEAN-Intra	ASEAN-Ekstra	<i>inflow Netto</i>	ASEAN-Intra	ASEAN-Ekstra	<i>inflow Netto</i>	ASEAN-Intra	ASEAN-Ekstra	<i>inflow Netto</i>
Brunei	19,7	192,4	212,0	19,4	269,1	288,5	9,7	423,8	433,5	(1,2)	39,9	36,1	(50,0)	57,5	50,2
Kamboja	31,9	99,5	131,4	129,2	252,0	381,2	155,5	327,7	483,2	304,8	153,4	190,2	20,4	30,0	26,8
Indonesia	204,2	1.690,3	1.894,5	883,3	7.452,7	8.336,0	1.524,5	4.031,7	5.556,2	332,5	340,9	340,0	72,6	(45,9)	(33,3)
Laos, PDR	7,8	9,2	16,9	6,7	21,0	27,7	10,6	176,8	187,4	(13,8)	129,4	63,8	58,0	740,2	575,8
Malaysia	980,2	3.643,7	4.623,9	572,9	3.391,9	3.964,8	467,8	5.591,9	6.059,7	(41,6)	(6,9)	(14,3)	(18,3)	64,9	52,8
Myanmar	9,3	9,3	241,8	251,1	38,4	197,5	235,9	27,8	143,0	31,9	(18,3)	(6,1)	(27,5)	(41,7)	(39,4)
Filipina	71,1	616,7	687,8	12,7	1.841,3	1.854,0	(95,6)	2.440,6	2.345,0	(82,1)	198,6	169,6	(852,7)	32,5	26,5
Singapura	548,0	19.279,5	19.827,5	1.175,6	13.826,3	15.001,9	1.137,7	22.917,7	24.055,4	114,5	(28,3)	(24,3)	(3,2)	65,8	60,3
Thailand	688,7	5.173,3	5.862,0	762,2	8.194,8	8.957,0	2.822,1	7.933,9	10.756,1	10,7	58,4	52,8	270,2	(3,2)	20,1
Vietnam	242,9	1.367,2	1.610,1	164,7	1.856,1	2.020,8	181,9	2.178,1	2.360,0	(32,2)	35,8	25,5	10,4	17,3	16,8
ASEAN	2.803,8	32.313,5	35.117,2	3.765,1	37.302,7	41.067,8	6.242,1	46.137,4	52.379,5	34,3	15,4	16,9	65,8	23,7	27,5

Sumber : *Database PMA ASEAN, 2007*

Dilihat dari variasi investasi swasta yang masuk ke Indonesia selama periode 1990 – 2007, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1. terlihat bahwa terdapat ketimpangan dalam sebarannya, dimana propinsi di Pulau Jawa masih dominan dan menjadi daya tarik bagi investor domestik maupun asing sebagai tujuan investasi PMA dan PMDN, diikuti oleh Pulau Sumatera dan sisanya pulau lainnya di Indonesia.



Gambar 1.3.
Sebaran Realisasi Investasi Swasta Periode 1990-2007

Ketersediaan infrastruktur yang lebih baik di Pulau Jawa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan investor menanamkan investasinya di propinsi yang ada di Pulau Jawa. Disamping infrastruktur, faktor penentu lainnya adalah kondisi makroekonomi yang relatif lebih stabil pada propinsi di Pulau Jawa dibandingkan dengan propinsi lainnya. Kondisi ekonomi yang mempengaruhi investasi swasta diantaranya adalah tingkat bunga, inflasi dan nilai tukar (Makmun, 2004). Disamping variabel tersebut, beberapa ahli mengatakan bahwa investasi swasta juga dipengaruhi oleh investasi pemerintah, kredit investasi untuk sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi. Ahli ekonomi yang mengatakan hal dimaksud adalah Ribeiro dan Teixeira (2001) dan Jongwanich dan Kohpaiboon (2006).

Terkait dengan peran investasi (swasta maupun pemerintah) dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, secara umum telah menjadi pusat perhatian para ekonom. Perhatian tersebut menjadi kian intensif setelah ditemukannya berbagai fakta empiris tentang peran dari investasi (swasta maupun pemerintah) di sejumlah negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Misalnya saja dari Khan dan Reinhart (1990), Cullison (1993), Sturm, Kuper, dan Haan (1996), Lachler dan Aschauer (1998), Gylfason dan Zoega (2000), Krishna (2004) M'Amanja dan Morrisey (2006), Schularick dan Steger (2007).

Fenomena pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut juga diduga terjadi di Indonesia. Dugaan tersebut dapat dilihat dari besarnya kontribusi sektor industri manufaktur selaku kontributor terbesar pembentukan PDB Nasional, yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 27,92 persen per tahun selama periode 2004 – 2007.

Tabel 1.3.
Perkembangan PDB Industri Manufaktur dan Kontribusinya
Terhadap PDB Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2000
(Dalam Milyar Rupiah dan Persen)

No	Uraian	2004	2005	2006	2007
1.	PDB Industri Manufaktur	469.952,4	491.561,4	514.100,3	538.084,6
2.	PDB Nasional	1.656.516,8	1.750.815,2	1.847.126,7	1.963.091,8
3.	Kontribusi Industri	28,37%	28,08%	27,83%	27,41%

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia, berbagai edisi

Besarnya kontribusi industri manufaktur terhadap PDB menandakan adanya pengaruh investasi swasta yang sebagian besar terserap di sektor industri/sekunder (lihat Tabel 1.4.) dalam menciptakan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah bagi sektor tersebut.

Tabel 1.4.
Perkembangan Realisasi Investasi Swasta di Indonesia
Menurut Sektor Periode 2002 – 2007
(dalam Milyar Rupiah)

Tahun	PMA (dalam Milyar Rupiah)						PMDN (dalam Milyar Rupiah)					
	Primer		Sekunder		Tersier		Primer		Sekunder		Tersier	
	Projek	Nilai	Projek	Nilai	Projek	Nilai	Projek	Nilai	Projek	Nilai	Projek	Nilai
2002	15	916,35	235	13.846,17	192	12.832,48	8	979,40	77	9.968,90	23	1.633,70
2003	20	2265,40	284	14.223,20	265	29.650,40	13	610,00	85	6.229,40	22	3.316,60
2004	26	2757,99	246	26.972,67	276	13.314,34	11	975,50	96	10.517,90	23	3.771,30
2005	43	3645,73	536	31.799,25	328	44.742,02	31	5.577,20	147	20.999,20	37	4.155,80
2006	39	4764,13	461	33.580,74	367	16.445,13	27	3.599,80	98	13.012,70	39	4.036,50
2007	21	2842,03	540	101.404,01	214	6.949,96	13	4.377,40	99	26.289,80	12	4.211,50

Sumber : BKPM RI, 2007

Saat investasi swasta dilakukan pada suatu wilayah di Indonesia, pengaruh yang diharapkan tidak semata-mata hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pengaruh investasi swasta diharapkan juga dapat menetes atau menjalar pada peningkatan kesempatan kerja dan distribusi pendapatan di wilayah atau daerah tersebut. Merupakan suatu hal yang lazim, apabila

keberadaan investasi swasta diharapkan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi yang dapat memberikan pengaruh positif bagi kesempatan kerja di masing-masing wilayah sehingga masyarakat dapat bekerja dan memperoleh pendapatan dari tambahan kesempatan kerja tersebut.

Pengaruh investasi swasta yang membawa dampak positif terhadap kesempatan kerja tidak dapat dipungkiri, fakta tersebut dikemukakan dalam hasil empiris Bromstrom dan Kokko (1997), Fitzroy dan Funke (1999) dan Jayaraman dan Singh (2007), yang mengatakan bahwa investasi swasta yang dilakukan dapat menambah kesempatan kerja di tempat tujuan investasi. Namun demikian, keberadaan investasi di Indonesia sendiri ternyata belum sepenuhnya dapat menanggulangi masalah ketenagakerjaan. Hal ini terkait dengan *supply* tenaga kerja yang tercipta tiap tahun tidak dapat dipenuhi oleh penciptaan kesempatan kerja yang dihasilkan tiap tahunnya.

Tabel 1.5.
Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja pada Investasi Swasta di Indonesia
Menurut Sektor Periode 2002 – 2007 (dalam Orang dan Persen)

No	Sektor	PMA			PMDN			Total		
		Projek	Tenaga kerja	Share	Projek	Tenaga Kerja	Share	Projek	Tenaga Kerja	Share
1.	Primer	164	87.899	11,19%	103	106.623	25,64%	267	194.522	16,19%
2.	Sekunder	2.302	538.351	68,51%	602	273.897	65,85%	2.904	812.248	67,59%
3.	Tersier	1.642	159.526	20,30%	156	35.410	8,51%	1.798	194.936	16,22%
Total		4.108	785.776	100,00%	861	415.930	100,00%	4.969	1.201.706	100,00%

Sumber : BKPM RI, 2007

Berdasarkan data yang diperoleh dari BKPM RI sebagaimana pada Tabel 1.5., diketahui bahwa selama periode 2002 – 2007, keberadaan investasi swasta di Indonesia secara nyata telah menyerap sebanyak 1.201.706 orang pekerja.

Sebarannya yaitu sebanyak 194.522 orang (16,19 persen) tersebar di sektor primer, sebanyak 812.248 orang (67,59 persen) di sektor sekunder dan sebanyak 194.936 orang (16,22 persen) di sektor tersier.

Seyogyanya, peningkatan dalam investasi swasta tidak saja diharapkan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Lebih dari itu, investasi swasta diharapkan berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan dan perbaikan kualitas hidup masyarakatnya, terutama dalam rangka meningkatkan distribusi pendapatan di Indonesia. Dalam studi empiris Karbasi dan Mojarad (2008), dinyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan dimana dalam hal ini distribusi pendapatan diukur menggunakan gini rasio.

Distribusi pendapatan diartikan sebagai merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah (nasional dan regional) di kalangan penduduknya. Terdapat berbagai kriteria atau tolak ukur untuk menilai pemerataan distribusi pendapatan, salah satunya adalah Rasio Gini. Menurut Todaro (2003), koefisien Gini merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan umum dalam pola pembagian pendapatan. Secara kuantitatif, nilai gini rasio yang mendekati nol mencerminkan kesenjangan yang semakin mengecil dan sebaliknya, apabila nilainya mendekati satu mengandung arti kesenjangan makin melebar. Nilai gini rasio di bawah 0,35, menggambarkan keadaan distribusi pendapatan yang merata secara relatif. Nilai gini rasio antara 0,35 – 0,50, mencerminkan distribusi pendapatan dengan tingkat pemerataan sedang dan apabila nilai gini rasio di atas 0,50, menggambarkan keadaan distribusi pendapatan dengan tidakmerataan yang tinggi.

Selama periode 1993 – 2007, sebagaimana Tabel 1.6., angka gini rasio Indonesia memperlihatkan nilai yang berfluktuatif dan tidak terlalu banyak berubah, mencerminkan bahwa distribusi pendapatan nasional di tanah air tidak senantiasa membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 1993, nilai gini rasio Indonesia sebesar 0,3999 dan kemudian menurun menjadi 0,3927 pada tahun 1996. Nilai koefisien Gini yang sebesar angka tersebut, menunjukkan tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang sedang. Memasuki tahun 1998, gini rasio Indonesia memperlihatkan kecenderungan yang membesar menjadi 0,4137. Berdasarkan angka gini rasio tersebut, menunjukkan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan relatif meningkat. Pada tahun 1999 dan sesudahnya, dengan angka-angka koefisien Gini yang lebih besar dari tahun 1998, dapat disimpulkan bahwa distribusi pendapatan sesudah periode tahun 1998, lebih buruk dan ketidakmerataannya relatif lebih besar.

Tabel 1.6.
Koefisien Gini Indonesia Tahun 1993 – 2005
(dalam indeks gini)

Tahun	Koefisien Gini
1993	0,3999
1994	0,3736
1995	0,3859
1996	0,3927
1997	0,3969
1998	0,4137
1999	0,4193
2000	0,4135
2001	0,4203
2002	0,4238
2003	0,4086
2004	0,4233
2005	0,4263
2006	0,4293
2007	0,4323

Sumber : BPS (berbagai tahun edisi)

Berdasarkan uraian di atas, tema sentral dari penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor penentu perkembangan investasi swasta di Indonesia dan sejauh mana pengaruh perkembangan investasi swasta tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan di Indonesia selama periode 1990 hingga 2007. Sedangkan objek kajian difokuskan pada masing-masing Propinsi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, secara eksplisit telah dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, investasi pemerintah, tingkat inflasi, ketersediaan kredit investasi dan nilai tukar diduga merupakan variabel yang akan menjadi faktor penentu dalam menentukan investasi swasta di Indonesia. Sedangkan perkembangan investasi swasta sendiri sangat penting artinya bagi pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan di Indonesia.

Oleh karenanya, dalam kaitan tersebut maka akan dilakukan penelitian tentang faktor penentu perkembangan investasi swasta dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan di Indonesia. Beberapa masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh faktor penentu perkembangan investasi swasta terhadap investasi swasta di Indonesia selama periode penelitian.
2. Bagaimana pengaruh investasi swasta, modal manusia, investasi pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode penelitian.

3. Bagaimana pengaruh investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah riil terhadap kesempatan kerja di Indonesia selama periode penelitian.
4. Bagaimana pengaruh investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, investasi publik pemerintah, tingkat inflasi dan pengangguran terhadap distribusi pendapatan di Indonesia selama periode penelitian.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Merujuk kepada permasalahan yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran yang tepat dan jelas mengenai faktor penentu investasi swasta di Indonesia dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan di Indonesia selama periode penelitian.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai maksud tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengkaji faktor-faktor apa yang menentukan perkembangan investasi swasta terhadap investasi swasta di Indonesia selama periode penelitian.
2. Untuk mengkaji pengaruh investasi swasta, modal manusia, investasi pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode penelitian.
3. Untuk mengkaji pengaruh investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah riil terhadap kesempatan kerja di Indonesia selama periode penelitian.

4. Untuk mengkaji pengaruh investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, investasi pemerintah, tingkat inflasi dan pengangguran terhadap distribusi pendapatan di Indonesia selama periode penelitian.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian diharapkan dapat memperoleh manfaat, terutama untuk :

1. Secara toeritis, kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu, yaitu :
 - a. Mengembangkan model faktor penentu perkembangan investasi swasta di Indonesia.
 - b. Mengembangkan model faktor penentu perkembangan investasi swasta yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan.
 - c. Mendeskripsikan secara empiris tentang perkembangan investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan di Indonesia, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Secara praktis, terdapat 3 (tiga) kegunaan hasil penelitian ini, yaitu :
 - a. Sebagai masukan bagi pengambil kebijakan (Pemerintah Propinsi di Indonesia) dalam upaya menggerakkan dan mendorong perkembangan investasi swasta pada masing-masing Propinsi di Indonesia, terutama untuk selalu mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, investasi pemerintah, inflasi, ketersediaan kredit investasi dan nilai tukar.

- b. Diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk merancang kebijakan dalam mengelola variabel makroekonomi yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan.
- c. Hasil penelitian dan keterbatasan yang dikemukakan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan (*reference*) bagi peneliti lain, untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang berhubungan dengan tema penelitian di atas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

Dalam subbab ini, akan dikemukakan mengenai kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan variabel penelitian, sebagaimana berikut:

2.1.1. Investasi

Acosta, Pablo dan Andres Roza (2005) menyatakan bahwa investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi saat ini untuk memperbesar konsumsi di masa yang akan datang. Investasi (pembelian barang-barang modal) meliputi penambahan stok modal atau barang modal di suatu negara, seperti pembangunan, peralatan produksi dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Record dan Davies (2007) menyatakan pula bahwa investasi merupakan alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di negara sedang berkembang dan berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja.

Investasi menurut Makmun (2004) adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa yang akan datang. Dalam investasi ada 2 (dua) tujuan utama yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada.

Sementara itu, menurut Mankiw (2001), investasi (*investment*) dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada (*net additional to existing capital stock*). Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*) atau pembentukan modal (*capital formation*).

Menurut Mankiw, terdapat tiga jenis pengeluaran investasi, yaitu investasi tetap bisnis (*business fixed investment*) mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Investasi residensial (*residential investment*) mencakup rumah baru untuk tempat tinggal dan untuk disewakan. Investasi persediaan (*inventory investment*) mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan dan persediaan, barang dalam proses produksi dan barang jadi.

Untuk mengungkap lebih jauh tentang investasi, beberapa teori berikut ini dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan variabel penentu investasi, diantaranya adalah :

□ Teori Investasi dari Keynes

John Maynard Keynes mendasarkan teori tentang permintaan investasi atas konsep marginal kapital (*marginal efficiency of capital* atau *MEC*). *MEC* dapat didefinisikan sebagai tingkat perolehan bersih yang diharapkan (*expected net rate of return*) atas pengeluaran tambahan kapital. *MEC* juga dapat diartikan tingkat diskonto (*discount rate*) yang menyatakan aliran perolehan yang diharapkan di masa depan dengan biaya sekarang dari kapital tambahan. *MEC* dapat dirumuskan dalam formula sebagai berikut:

$$C_k = \frac{R_1}{(1 + MEC)^1} + \frac{R_2}{(1 + MEC)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1 + MEC)^n} \quad (2.1.)$$

Dimana; R merupakan perolehan yang diharapkan (*expected return*) dari sudut proyek dan C_k adalah biaya sekarang (*current cost*) dari modal tambahan. Keputusan investasi sangat tergantung pada perbandingan antara *present value* (PV) disatu pihak dan *current cost of additional capital* (C_k) dilain pihak. Apabila $PV > C_k$, maka diputuskan investasi dilakukan, sebaliknya kalau $PV < C_k$ diputuskan investasi tidak dilakukan.

$$PV = \frac{R_1}{(1+i)^1} + \frac{R_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+i)^n} \quad (2.2)$$

Persamaan investasi di atas dapat ditulis kembali dalam formula:

$$\frac{R_1}{(1+i)^1} + \frac{R_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+i)^n} > \frac{R_1}{(1+MEC)^1} + \frac{R_2}{(1+MEC)^2} + \dots + \frac{R_n}{(1+MEC)^n} \quad (2.3)$$

Dengan demikian, berdasarkan teori ini, suatu investasi tergantung dari tingkat *discount rate* (tingkat diskonto) yang menyatakan aliran perolehan yang diharapkan di masa depan dengan biaya sekarang dari kapital tambahan. Semakin besar *present value* dari perolehan bersih yang diharapkan atas pengeluaran tambahan kapital dibandingkan dengan tingkat biaya yang dikeluarkan saat ini, maka akan semakin besar permintaan investasi.

Mendasarkan pada teori ini, permintaan investasi (I_t) tergantung dari tingkat *return* (R), tingkat bunga (i) dan biaya modal yang dikeluarkan (*cost*, C_k), atau diformulasikan dalam bentuk fungsi menjadi :

$$I_t = f(R, i, C_k) \quad (2.4)$$

Apabila tingkat bunga turun akan menyebabkan permintaan investasi meningkat dan hal yang sebaliknya akan berlaku kalau tingkat bunga mengalami kenaikan (Mankiw, 2001).

□ Teori Dana Internal

Sementara itu, dalam *teori dana internal* (*internal fund theory of investment*) menyatakan bahwa stok kapital yang diinginkan dan juga investasi, bergantung pada tingkat keuntungan. Jan Tinbergen (dalam Mankiw, 2001), menyatakan bahwa keuntungan yang terjadi (*realized profit*) secara akurat

merefleksikan keuntungan yang diharapkan (*expected profit*). Mengingat investasi bergantung pada keuntungan yang diharapkan, maka investasi berhubungan secara positif dengan *realized profit*.

Sedangkan keuntungan yang diharapkan di masa akan datang, menurut Agrawal, P. (2001) dicerminkan oleh tingkat suku bunga riil dan tingkat risiko yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Dalam beberapa hasil empiris, tingkat inflasi sering digunakan sebagai proksi dari tingkat risiko. Sementara itu, untuk investor luar negeri (PMA) disamping faktor bunga dan inflasi, perubahan kurs juga merupakan faktor yang diperhatikan dalam risiko. Perubahan nilai tukar (depresiasi dan apresiasi) akan mempengaruhi besarnya investasi yang akan ditanamkan di suatu wilayah investasi (regional atau nasional).

$$I_t = f(i, INF, ER) \quad (2.5)$$

Dengan demikian, menurut teori dana internal, permintaan akan investasi (I_t) merupakan fungsi dari tingkat bunga (i), inflasi (INF) dan nilai tukar (ER).

□ Teori Neo Klasik

Teori neo klasik (neoclassical theory of investment) merupakan teori tentang akumulasi kapital optimal. Menurut Teori neo klasik, stok kapital yang diinginkan ditentukan oleh output dan harga jasa kapital relatif terhadap output. Harga jasa kapital pada gilirannya bergantung pada barang-barang modal, tingkat bunga dan perlakuan pajak atas pendapatan perusahaan. Dengan demikian, menurut teori neo-klasik perubahan dalam jumlah dan harga dari kapital relatif terhadap output, akan mengubah atau mempengaruhi stok kapital yang diinginkan dan investasi.

Oleh kerennanya, kenaikan dalam pengeluaran pemerintah atau penurunan dalam pajak pendapatan perusahaan akan mendorong investasi melalui dampaknya atas permintaan agregat dan selanjutnya terhadap output. Perlakuan atas pendapatan perusahaan merupakan hal penting. Menurut teori neo klasik, pajak perusahaan penting disebabkan pengaruhnya atas harga dan jasa kapital, karena akan berpengaruh terhadap ketersediaan dana internal (Mankiw, 2001).

Dengan demikian, menurut teori ini perubahan dalam output (Y), harga barang-barang modal (k), tingkat bunga (i) dan perlakuan pajak atas pendapatan perusahaan (Tx), akan mempengaruhi investasi atau stok kapital yang diinginkan (I_t). Dirumuskan dalam suatu fungsi matematis menjadi ;

$$I_t = f(Y, k, i, Tx) \quad (2.6)$$

□ Teori 'q' Tobin

Teori 'q' Tobin sebagai gagasan dari James Tobin (dalam Romer, 2006), menyatakan bahwa stok kapital yang diinginkan (*desired capital stock*) dan juga investasi berhubungan positif dengan q, yaitu rasio nilai pasar (*market value*) dari modal terpasang (*installed capital*) perusahaan dengan biaya penggantian (*replacement cost*) dari modal terpasang perusahaan atau secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$I = I(q) \quad (2.7)$$

dimana kalau q meningkat, maka I akan meningkat pula.

Hubungan q dengan nilai pasar dari perusahaan dan biaya penggantian dari aset perusahaan, dapat dinyatakan, sebagai berikut:

$$q = \frac{\text{Nilai pasar dari modal terpasang}}{\text{Biaya penggantian dari modal terpasang}} \quad (2.8)$$

dimana *nominator* q adalah nilai pasar dari modal terpasang perusahaan yang ditentukan oleh pasar saham, sedangkan *denominator* adalah harga modal jika dibeli hari ini. Jika $q > 1$ maka nilai pasar dari modal terpasang akan menjadi lebih besar daripada biaya pengantiannya (*replacement cost*). Dalam kondisi yang demikian, para manajer akan meningkatkan nilai pasar dari modal terpasang perusahaan mereka dengan membeli lebih banyak modal. Sebaliknya, jika $q < 1$ maka nilai pasar dari modal terpasang akan menjadi lebih kecil dari biaya pengantiannya. Dalam kondisi yang demikian, para manajer tidak akan mengganti modal (Romer, 2006).

Teori q Tobin bergantung pada keuntungan sekarang dan keuntungan masa depan yang diperkirakan (*current and future expected profit*) dari modal terpasang. Jika produk marginal modal (*marginal product of capital*) atau $MP_K >$ biaya modal, maka perusahaan akan menghasilkan keuntungan atas modal terpasangnya, apabila $MP_K <$ biaya modal, maka perusahaan akan mengalami kerugian atas modal terpasangnya dan menunjukkan nilai q yang rendah.

Mengingat harga pasar cenderung bergerak berlawanan dengan pergerakan didalam nilai q , akan cenderung menunjukkan perubahan dengan arah yang berlawanan dengan perubahan didalam tingkat bunga tersebut. Oleh karenanya, teori q tentang investasi adalah konsisten dengan model dimana investasi secara fungsional berhubungan dengan tingkat bunga, sebagaimana ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut:

$$I = I(i) \quad (2.9)$$

dimana apabila tingkat bunga (i) naik, maka investasi (I) akan mengalami penurunan (Jhingan, 2000).

Beberapa studi terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan variabel penentu investasi swasta, antara lain oleh:

1. Chhibber dan Wijnbergen (1988) dalam penelitiannya mengkaji faktor penentu investasi swasta di negara Turki. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa investasi swasta di negara Turki ditentukan oleh tingkat penggunaan kapasitas, tingkat bunga riil, ketersediaan kredit untuk sektor swasta dan komposisi investasi sektor publik. Tingkat penggunaan kapasitas, investasi pemerintah dan ketersediaan kredit untuk sektor swasta mempunyai pengaruh positif terhadap investasi swasta, sedangkan tingkat bunga riil berpengaruh negatif terhadap investasi swasta.
2. Carruth, Dickerson dan Henley (1997), yang meneliti tentang faktor penentu investasi agregat di United Kingdom (Inggris), menemukan bukti empiris bahwa terdapat 4 (empat) variabel yang berpengaruh terhadap pembentukan modal (investasi), yaitu pertumbuhan ekonomi, keuntungan/profit, tingkat bunga riil dan harga emas internasional. Variabel PDB riil dan keuntungan/profit memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan modal, sedangkan tingkat bunga riil dan harga emas internasional memiliki pengaruh negatif terhadap pembentukan modal (investasi) di negara Inggris.
3. Studi empiris Dehn (2000) terhadap 44 negara berkembang dalam mengkaji faktor penentu investasi swasta di negara-negara berkembang. Kesimpulan dari hasil studinya adalah bahwa faktor penentu investasi swasta di negara berkembang adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga riil domestik, tingkat harga riil dari barang modal dan ketersediaan kredit sektor swasta.

Variabel pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan kredit untuk swasta berpengaruh positif terhadap investasi swasta, sedangkan tingkat bunga riil domestik dan tingkat harga riil dari barang modal memiliki pengaruh negatif terhadap investasi swasta di negara-negara berkembang.

4. Seruvatu dan Jayamaran (2001), yang meneliti tentang faktor penentu investasi swasta di negara Fiji. Variabel penelitiannya dibedakan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu:
 - a) Berdasarkan faktor-faktor neoklasik dari investasi, yang terdiri dari dua variabel, yaitu; tingkat PDB riil dan tingkat bunga riil.
 - b) Berdasarkan faktor-faktor yang berhubungan dengan kebijakan, terdiri dari; investasi sektor publik, kredit sektor swasta, nilai tukar riil, tingkat inflasi, biaya tenaga kerja per unit dan utang luar negeri.
 - c) Berdasarkan faktor-faktor keterbukaan ekonomi, yang terdiri dari; cadangan luar negeri (*external reserves*) dan indeks *term of trade*.

Berdasarkan 3 (tiga) kelompok di atas, kecuali utang luar negeri, semua variabel digunakan dalam penelitian, mempengaruhi investasi swasta di negara tersebut. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa investasi publik, PDB riil dan kredit sektor swasta secara signifikan berpengaruh positif terhadap investasi swasta. Untuk variabel tingkat bunga riil, tingkat inflasi dan biaya tenaga kerja per unit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap investasi swasta di negara Fiji. Sedangkan variabel lainnya yaitu nilai tukar dan indeks *term of trade* secara signifikan berpengaruh terhadap investasi swasta.

5. Ribeiro dan Teixeira (2001), yang menguji faktor penentu investasi swasta di Brazil. Variabel yang digunakannya adalah pertumbuhan ekonomi, investasi publik, kredit untuk sektor swasta, inflasi dan nilai tukar. Hasil yang didapat adalah bahwa pertumbuhan ekonomi, investasi publik dan kredit untuk sektor swasta berpengaruh positif terhadap investasi swasta, sedangkan variabel inflasi dan nilai tukar memberikan pengaruh yang negatif terhadap investasi swasta di Brazil.
6. Agrawal (2001), yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta di negara; Korea, Malaysia, Thailand dan Indonesia, menemukan bukti empiris bahwa variabel tingkat bunga riil, *term of trade*, aliran masuk modal asing swasta dan nilai tukar, seluruhnya berpengaruh terhadap investasi swasta di keempat negara tersebut.
7. Roberts (2003), telah melakukan penelitian tentang model investasi dengan pendekatan fundamental. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan VAR, didapatkan bukti empiris bahwa GDP riil dan investasi publik berpengaruh positif terhadap investasi swasta, sedangkan inflasi dan tingkat bunga berpengaruh terhadap investasi swasta.
8. Susi Suwarsih (2004), yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi investasi swasta di Indonesia. Dalam model investasinya dengan menggunakan regresi berganda, **Susi Suwarsih (2004)** menggunakan variabel tabungan masyarakat, akselerasi pendapatan, arus modal keluar, nilai tukar rupiah dan tingkat bunga, yang diduga memiliki pengaruh terhadap investasi swasta. Kesimpulan penelitian yang didapat adalah kecuali variabel bunga dan nilai tukar, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap investasi swasta.

9. Ouattara (2004), yang meneliti tentang model investasi swasta di Senegal. Dalam model investasinya dengan menggunakan uji kointegrasi, Ouattara (2004) menggunakan variabel investasi sektor publik, pertumbuhan ekonomi, kredit sektor swasta, bantuan luar negeri (*aid*) dan *term of trade*, yang diduga berpengaruh terhadap investasi swasta. Berdasarkan hasil pengujian, variabel investasi sektor publik, PDB riil dan bantuan luar negeri (*aid*) berpengaruh positif terhadap investasi swasta, sedangkan variabel kredit sektor swasta dan *term of trade* berpengaruh negatif terhadap investasi swasta.
10. Valila dan Mehrotra (2005), mengamati dan mengevaluasi faktor penentu dari investasi publik dalam jangka panjang di Eropa periode 1970 – 2003, yang dilakukan terhadap 14 negara maju di Eropa, yaitu Austria, Belanda, Prancis, Jerman, Denmark, Finlandia, Italia, Swedia, Belgia, Inggris, Spanyol, Irlandia, Yunani dan Portugal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa investasi publik dalam jangka panjang secara signifikan dipengaruhi oleh PDB riil, tingkat bunga pinjaman, kebijakan anggaran dan pertimbangan keberlanjutan fiskal (utang luar negeri).
11. Acosta dan Roza (2005), melakukan studi mengenai faktor penentu investasi swasta di Negara Argentina, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang periode 1970–2000. Studi ini mempertimbangkan variabel makroekonomi yang secara potensial dapat berpengaruh terhadap keputusan investasi di Argentina, seperti; GDP riil, investasi publik, liberalisasi perdagangan (diukur oleh rasio ekspor-impor terhadap PDB), nilai tukar riil, utang luar negeri (% PDB), kredit untuk sektor swasta (% PDB) dan tingkat inflasi. Dalam jangka panjang (uji kointegrasi), hasil studi menemukan adanya pengaruh negatif yang signifikan secara statistik dari liberalisasi perdagangan

dan utang luar negeri terhadap investasi swasta, sedangkan variabel GDP riil dan kredit untuk sektor swasta berpengaruh positif terhadap investasi swasta di Argentina. Sementara dalam jangka pendek (*uji error correction model*), hasil studi menemukan bukti empiris bahwa investasi publik, nilai tukar dan inflasi secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap investasi swasta, sedangkan variabel PDB riil, kredit untuk sektor swasta dan utang luar negeri secara signifikan berpengaruh positif terhadap investasi swasta.

12. Lesotlho (2006), meneliti faktor penentu investasi swasta di Botswana periode 1976-2003, dimana investasi swasta di Botswana dipengaruhi oleh variabel tingkat bunga, pertumbuhan *output* (PDB), investasi publik, kredit bank untuk sektor swasta, inflasi, nilai tukar riil dan tingkat perdagangan. Kesimpulan yang dihasilkan oleh peneliti adalah; (1) dalam jangka pendek, variabel investasi publik berpengaruh secara negatif terhadap investasi swasta, sedangkan variabel kredit bank untuk sektor swasta, tingkat bunga riil dan nilai tukar secara signifikan berpengaruh positif terhadap investasi swasta, dan; (2) kecuali variabel investasi publik yang berpengaruh negatif, variabel pertumbuhan PDB, kredit bank untuk sektor swasta, inflasi, tingkat bunga dan nilai tukar riil secara signifikan mempengaruhi investasi swasta secara positif dalam jangka panjang.
13. Jongwanich dan Kohpaiboon (2006), menganalisis pola dan faktor penentu investasi swasta di Thailand selama periode 1970–1999. Studi ini mempertimbangkan pengaruh variabel pertumbuhan PDB, pertumbuhan biaya modal riil, ketersediaan pendanaan, investasi publik, inflasi, *term of trade*, nilai tukar riil dan *output gap* terhadap investasi swasta. Variabel inflasi dan investasi publik mempunyai dampak negatif terhadap investasi swasta.

Sedangkan pertumbuhan PDB, pertumbuhan biaya modal riil, ketersediaan pendanaan, *term of trade*, nilai tukar riil, dan *output gap* memiliki pengaruh positif terhadap investasi swasta di Thailand.

14. Record dan Davies (2007), melakukan penelitian mengenai faktor penentu investasi dan dampak investasi sektor swasta di Malawi untuk periode 1994 hingga 2004. Dalam studinya faktor penentu investasi meliputi variabel; *employee, profit, owner Asian, owner European, manager education, foreign ownership, etc.* Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap investasi swasta di Malawi. Dalam penelitian Record dan Davies (2007), dikaji juga mengenai pengaruh investasi dan variabel lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dan tenaga kerja secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
15. Khan dan Khan (2007), dalam penelitiannya tentang faktor penentu investasi di Pakistan untuk periode 1972 hingga 2005, menggunakan variabel PDB Riil, tingkat bunga riil, investasi publik, kredit investasi, utang luar negeri dan nilai tukar. Hasil penelitiannya adalah; (1) berdasarkan pengujian kointegrasi diketahui bahwa variabel investasi publik dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan berpengaruh positif terhadap investasi swasta, sedangkan variabel tingkat bunga riil, kredit investasi, utang luar negeri dan nilai tukar berpengaruh negatif terhadap investasi swasta, dan; (2) berdasarkan pengujian *error correction model* diketahui bahwa hanya variabel pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif terhadap investasi swasta di Pakistan, sedangkan variabel investasi publik, tingkat bunga riil, kredit investasi, utang luar negeri dan nilai tukar berpengaruh negatif terhadap investasi swasta.

16. Tutik Wursi Arliani (2007), dalam penelitiannya tentang faktor penentu investasi swasta di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode 1980 hingga 2004, menggunakan variabel PDRB, kapasitas sambungan listrik, panjang jalan dan suku bunga kredit investasi. Hasil penelitiannya adalah; (1) PDRB dan kapasitas sambungan listrik berpengaruh positif terhadap investasi, dan; (2) variabel panjang jalan dan suku bunga investasi berpengaruh negatif terhadap investasi swasta.
17. Wiwin Setyari, dkk. (2008), dalam penelitiannya tentang faktor penentu investasi swasta di Indonesia periode 1989-2005, menggunakan variabel nilai tukar, investasi pemerintah, PDRB, suku bunga kredit dan inflasi. Hasil penelitiannya adalah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel nilai tukar, investasi pemerintah dan tingkat suku bunga terhadap investasi swasta di Indonesia, sedangkan variabel PDB dan inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi swasta di Indonesia.
18. Dwi Tantiasti (2008), yang meneliti tentang faktor penentu investasi swasta di Indonesia untuk periode 1988 hingga 2007, menggunakan variabel infrastruktur, suku bunga dan PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan infrastruktur suku bunga berpengaruh positif terhadap investasi swasta di Indonesia, sedangkan suku bunga berpengaruh negatif terhadap investasi swasta di Indonesia

Apabila ditampilkan dalam matrik penelitian terdahulu tentang faktor penentu investasi swasta, sebagaimana tampak pada Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1.
Matrik Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Investasi Swasta

No.	Nama Penulis	Judul	Periode	Lokasi	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Chhibber dan Wijnbergen (1988)	<i>Public Policy and Private Investment in Turkey</i>	1970-1986	Turki	<ul style="list-style-type: none"> ● Penggunaan kapasitas ● Tingkat bunga riil ● Ketersediaan kredit untuk sektor swasta ● Investasi pemerintah ● Investasi swasta 	2SLS	<ul style="list-style-type: none"> ● Penggunaan kapasitas dan ketersediaan kredit untuk sektor swasta berpengaruh positif terhadap investasi swasta ● Tingkat bunga riil berpengaruh negatif terhadap investasi swasta ● Investasi pemerintah berpengaruh positif terhadap investasi swasta
2.	Carruth, Dickirson, dan Henley (1998)	<i>Econometric Modelling of UK Aggregate Investment: The Role of Profits and Uncertainty</i>	1963:1-1995:4	Inggris	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan Ekonomi ● Keuntungan/ profit ● Tingkat bunga riil ● Harga emas internasional ● Pembentukan modal (investasi) 	<i>Error Correction Model</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil analisisnya mengindikasikan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan keuntungan/profit memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan modal ● Tingkat bunga riil dan harga emas internasional memiliki pengaruh negatif terhadap pembentukan modal (investasi)
3.	Dehn (2000)	<i>Private Investment in Developing Countries: The Effects of Commodity Shocks and Uncertainty</i>	1971-1992	44 negara berkembang	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan ekonomi ● Tingkat bunga riil domestik ● Tingkat harga riil dari barang modal ● Ketersediaan kredit sektor swasta ● Investasi swasta 	<i>GARCH</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Variabel pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan kredit untuk swasta berpengaruh positif terhadap investasi swasta ● Tingkat bunga riil domestik dan tingkat harga riil dari barang modal memiliki pengaruh negatif terhadap investasi swasta
4.	Seruvatu dan Jayaraman (2001)	<i>Determinants of Private Investment in Fiji</i>	1966-2000	Fiji	<ul style="list-style-type: none"> ● Tingkat PDB riil ● Tingkat bunga riil ● Investasi pemerintah ● Kredit sektor swasta ● Nilai tukar riil ● Tingkat inflasi ● Biaya tenaga kerja/unit ● Cadangan luar negeri ● Indeks <i>term of trade</i> ● Investasi swasta 	<i>Error Correction Model</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi pemerintah, PDB riil, dan kredit sektor swasta secara signifikan berpengaruh positif terhadap investasi swasta ● Tingkat bunga riil, tingkat inflasi dan biaya tenaga kerja per unit secara signifikan berpengaruh negatif terhadap investasi swasta ● Sedangkan variabel nilai tukar dan indeks <i>term of trade</i> secara signifikan berpengaruh terhadap investasi swasta

Lanjutan Tabel 2.1.

No.	Nama Penulis	Judul	Periode	Lokasi	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
5.	Ribeiro dan Teixeira (2001)	<i>An Econometric Analysis of Private Sector Investment in Brazil</i>	1956-1996	Brazil	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan ekonomi ● Investasi publik ● Kredit untuk sektor swasta ● Inflasi ● Nilai tukar ● Investasi swasta 	<i>ECM dan Cointegration</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan ekonomi, investasi publik dan kredit untuk sektor swasta berpengaruh positif terhadap investasi swasta ● Sedangkan variabel inflasi dan nilai tukar memberikan pengaruh yang negatif terhadap investasi
6.	Agrawal (2001)	<i>Interest Rates and Investment Levels: An Empirical Evaluation of McKinnon, Stiglitz, & Neo-structuralist Hypotheses</i>	1960-1996	Korea, Malaysia, Thailand, dan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi publik ● Tingkat bunga riil ● <i>Term of trade</i> ● Aliran masuk modal asing swasta ● Nilai tukar ● Investasi swasta 	<i>Dynamic OLS dan ECM</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Variabel investasi publik, tingkat bunga riil, <i>term of trade</i>, aliran masuk modal asing swasta dan nilai tukar berpengaruh terhadap investasi swasta
7.	Roberts (2003)	<i>Modeling Aggregate Investment: A Fundamentalist Approach</i>	1965:Q1 hingga 2001:Q4	Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> ● GDP riil ● Inflasi ● Investasi publik ● Tingkat bunga ● Investasi swasta 	VAR	<ul style="list-style-type: none"> ● PDB riil, inflasi, investasi publik, dan tingkat bunga mempengaruhi investasi swasta di Amerika Serikat
8.	Susi Suwarsih (2004)	Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia	1985-2001	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● Tabungan masyarakat ● Akselerasi pendapatan ● Arus modal keluar ● Nilai tukar rupiah ● Tingkat bunga ● Investasi swasta 	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecuali variabel tingkat bunga dan nilai tukar, seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap investasi swasta di Indonesia
9.	Ouattara (2004)	<i>Modelling the Long Run Determinants of Private Investment in Senegal</i>	1970-2000	Senegal	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi sektor publik ● Pertumbuhan ekonomi ● Kredit sektor swasta ● Bantuan luar negeri (<i>aid</i>) ● <i>Term of trade</i> ● Investasi swasta 	<i>Johansen Cointegration</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Variabel investasi sektor publik, pertumbuhan ekonomi dan bantuan luar negeri (<i>aid</i>) berpengaruh positif terhadap investasi swasta ● Variabel kredit sektor swasta dan <i>term of trade</i> berpengaruh negatif terhadap investasi swasta

Lanjutan Tabel 2.1.

No.	Nama Penulis	Judul	Periode	Lokasi	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
10.	Valila dan Mehrotra (2005)	<i>Evolution and Determinants of Public Investment in Europe</i>	1970-2003	14 negara Eropa	<ul style="list-style-type: none"> ● PDB riil ● Tingkat bunga pinjaman ● Kebijakan anggaran ● Pertimbangan keberlanjutan fiskal (utang luar negeri) ● Investasi publik 	<i>Johansen Cointegrasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi publik dalam jangka panjang secara signifikan dipengaruhi oleh PDB riil, tingkat bunga pinjaman, kebijakan anggaran, dan pertimbangan keberlanjutan fiskal (utang luar negeri).
11.	Acosta dan Roza (2005)	<i>Sort and Long Run Determinants of Private Investment in Argentina</i>	1970-2000	Argentina	<ul style="list-style-type: none"> ● PDB riil ● Investasi publik ● Liberalisasi perdagangan ● Nilai tukar riil ● Utang luar negeri ● Kredit untuk sektor swasta ● Tingkat inflasi ● Investasi swasta 	<i>Johansen Cointegration dan ECM</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Jangka panjang, liberalisasi perdagangan dan ULN berpengaruh terhadap investasi swasta, sedangkan variabel PDB riil dan kredit untuk sektor swasta berpengaruh positif terhadap investasi swasta. ● Jangka pendek, investasi publik, nilai tukar dan inflasi signifikan berpengaruh negatif terhadap investasi swasta, sedangkan variabel PDB riil, kredit untuk sektor swasta dan ULN signifikan berpengaruh positif terhadap investasi swasta
12.	Lesotho (2006)	<i>An Investigation of the Determinants of Private Investment: The Case of Botswana</i>	1976-2003	Botswana	<ul style="list-style-type: none"> ● Tingkat bunga ● Pertumbuhan PDB ● Investasi publik ● Kredit untuk sektor swasta ● Inflasi ● Nilai tukar riil ● Tingkat perdagangan ● Investasi swasta 	<i>Johansen Cointegration dan ECM</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Jangka pendek, investasi publik berpengaruh negatif terhadap investasi swasta, sedangkan kredit bank untuk sektor swasta, tingkat bunga riil dan nilai tukar signifikan berpengaruh positif terhadap investasi swasta ● Jangka panjang, kecuali investasi publik yang berpengaruh negatif, variabel pertumbuhan PDB, kredit bank untuk sektor swasta, inflasi, tingkat bunga dan nilai tukar riil signifikan mempengaruhi investasi swasta
13.	Jongwanich dan Kohpaiboon (2006)	<i>Private Investment: Trends and Determinants in Thailand</i>	1970-1999	Thailand	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan PDB ● Biaya modal riil ● Ketersediaan pendanaan ● Investasi publik ● Inflasi ● <i>Term of trade</i> ● Nilai tukar riil ● <i>Output gap</i> 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> ● Variabel inflasi dan investasi publik mempunyai dampak negatif terhadap investasi swasta di Thailand ● Sedangkan variabel pertumbuhan PDB, pertumbuhan biaya modal riil, ketersediaan pendanaan, <i>term of trade</i>, nilai tukar riil dan <i>output gap</i> memiliki pengaruh positif terhadap investasi swasta di Thailand

Lanjutan Tabel 2.1.

No.	Nama Penulis	Judul	Periode	Lokasi	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
14.	Record dan Davies (2007)	<i>Determinants and Impact of Private Sector Investment in Malawi: Evidence from the 2006 Investment Climate Survey</i>	1994-2004	Malawi	<ul style="list-style-type: none"> ● Employee ● Profit ● Owner asian ● Owner european ● Manager education ● Foreign ownership ● Private investment ● Economic growth 	<i>Johansen Cointegration dan ECM</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Employee, profit, owner Asian, owner European, manager education and foreign ownership have significantly influences on private investment. ● Employee and Private Investment have significantly influences on economic growth
15.	Khan dan Khan (2007)	<i>What Determines Private Investment? The Case of Pakistan</i>	1972-2005	Pakistan	<ul style="list-style-type: none"> ● PDB riil ● Tingkat bunga riil ● Investasi publik ● Kredit investasi ● Utang luar negeri ● Nilai tukar ● Investasi swasta 	<i>Cointegration dan ECM</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Jangka panjang; investasi publik dan <i>growth</i> berpengaruh positif terhadap investasi swasta, sedangkan tingkat bunga riil, kredit investasi, utang luar negeri dan nilai tukar berpengaruh negatif terhadap investasi swasta, ● Jangka pendek; pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap investasi swasta, sedangkan investasi swasta, tingkat bunga riil, kredit investasi, utang luar negeri, dan nilai tukar berpengaruh negatif terhadap investasi swasta
16.	Tutik Wursi Arliani (2007)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Propinsi DIY	1980-2004	Yogyakarta Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● PDRB ● Kapasitas sambangan listrik ● Panjang jalan ● Suku bunga investasi ● Investasi swasta 	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penelitian menunjukkan PDRB dan kapasitas sambangan listrik berpengaruh positif terhadap investasi ● Panjang jalan dan suku bunga investasi berpengaruh negatif terhadap investasi swasta
17.	Wiwin Setyari dkk. (2008)	Determinan Investasi Swasta di Indonesia	1989-2005	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● Nilai tukar ● Investasi pemerintah ● PDB/PDRB ● Tingkat suku bunga ● Inflasi ● Investasi swasta 	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel nilai tukar, investasi pemerintah dan tingkat suku bunga terhadap investasi swasta di Indonesia ● Sedangkan variabel PDB dan inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi swasta di Indonesia
18.	Dwi Tantiasti (2008)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia	1988-2007	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● Infrastruktur (investasi pemerintah) ● Suku bunga ● PDB/PDRB ● Investasi swasta 	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB, infrastruktur dan suku bunga berpengaruh positif terhadap investasi swasta di Indonesia

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini menekankan pada tiga hal, yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis. *Output* per kapita mengkaitkan aspek *output total* (PDB) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian (*self generating*). Pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan *output total* (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak (Gylfason dan Zoega, 2000).

Pertumbuhan ekonomi pada umumnya diukur dari kenaikan PDB, dimana PDB secara umum tidak lain adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian dalam satu tahun. Secara formal, pertumbuhan ekonomi dihitung dengan rumus:

$$Y = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\% \quad (2.10)$$

Dimana; Y adalah pertumbuhan ekonomi, PDB_t adalah nilai PDB tahun berjalan, dan PDB_{t-1} adalah nilai PDB satu tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dalam nilai absolut selanjutnya dapat dinyatakan dalam nilai nominal berdasarkan harga berlaku dan nilai riil berdasarkan harga konstan. Berdasarkan harga berlaku, nilai barang dan jasa yang dihasilkan dihitung berdasarkan harga pasar pada tahun

bersangkutan, yang berarti kenaikan harga-harga (efek inflasi) turut dihitung. Sedangkan berdasarkan harga konstan, nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada "tahun dasar" (IHK=100), yang berarti tidak dipengaruhi oleh perubahan harga (Tulus Tambunan, 2007).

Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dalam nilai nominal (PDB harga berlaku), pertumbuhan ekonomi dalam nilai riil (PDB harga konstan) lebih menunjukkan pertumbuhan output yang sebenarnya sehingga lebih tepat digunakan untuk menganalisis kinerja ekonomi suatu negara

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi serta bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan. Terdapat banyak teori pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak satupun teori yang komprehensif yang dapat menjadi standar baku, karena masing-masing teori memiliki kekhasan sendiri-sendiri sesuai dengan latarbelakang teori tersebut. Dalam penelitian ini akan dipaparkan Teori Pertumbuhan Baru (*new growth theory*) atau lebih dikenal dengan Model Pertumbuhan Endogen (*endogenous growth model*), yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

Ada dua tipe Teori Pertumbuhan Baru, yaitu (1) *Human Capital Model* dan (2) Model Penelitian dan Pengembangan (*Research & Development Model*). *Human Capital Model* menitikberatkan pada akumulasi modal dalam berbagai bentuk modal fisik, modal manusia, tenaga kerja efektif dan lain sebagainya, yang menghasilkan pertumbuhan *endogen*. Modal manusia yang dimaksud disini yaitu : kemampuan, keterampilan dan pengetahuan per pekerja. Asumsi yang dikemukakan berkaitan dengan Model Modal Manusia, diantaranya adalah output

diproduksi dengan menggunakan tiga input yaitu modal (K), modal manusia (H), dan A adalah tenaga kerja efektif. Implikasi dari *Human Capital Model* dalam jangka panjang adalah bahwa investasi modal fisik dan modal manusia sangat penting dan merupakan faktor penentu utama untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sedangkan *Research & Development Model* lebih menekankan pada kemajuan teknologi yang akan menghasilkan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pertumbuhan endogen.

Bila dihubungkan dengan tujuan penelitian, maka diantara kedua tipe Model Pertumbuhan Endogen tersebut, pendekatan yang lebih tepat digunakan adalah *Human Capital Model*, karena sesuai dengan tujuan penelitian, titik berat model pertumbuhan ekonomi adalah hendak mengkaji modal fisik (K), peran modal manusia (*human capital*) dan tenaga kerja (TK), sehingga sangat beralasan apabila digunakan sebagai pedoman untuk menganalisis pengaruh modal manusia, modal fisik (investasi swasta dan pemerintah) dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Beberapa studi terdahulu yang dilakukan oleh para ahli ekonomi untuk mengkaji pengaruh modal fisik (investasi pemerintah dan swasta), modal manusia (*human capital*) dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, diantaranya dapat dilihat dari hasil studi empiris berikut:

1. Khan dan Reinhart (1990), melakukan studi terhadap lebih 24 negara berkembang dengan menggunakan data *time series* periode tahun 1970 hingga 1979, untuk mengetahui pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam studinya, disamping variabel investasi swasta yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dipertimbangkan juga untuk memasukkan variabel eksogen lain dalam modelnya, seperti misalnya; variabel pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan ekspor, pertumbuhan impor, investasi publik dan total investasi. Hasil studi menemukan adanya pengaruh negatif secara statistik dari investasi publik terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengaruh yang positif dari variabel pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan ekspor, pertumbuhan impor, investasi swasta dan total investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Cullison (1993), meneliti dampak pengeluaran pemerintah dalam investasi publik terhadap PDB per kapita di Amerika Serikat periode data tahun 1955 hingga 1992. Dalam penelitiannya, Cullison membagi pengeluaran pemerintah dalam investasi publik ke dalam 21 item pengeluaran, diantaranya untuk bidang; pendidikan, pertanian, keamanan, sipil, aktivitas komersial, energi, kesehatan dan rumah sakit, pelatihan tenaga kerja, pembayaran bunga dan lainnya. Dengan menggunakan uji *granger causality test*, didapatkan hasil perhitungan bahwa pengeluaran pemerintah dalam investasi publik memiliki pengaruh positif (tapi tidak signifikan) terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat.
3. Sturm, Kuper dan Haan (1996), mengenai pertumbuhan ekonomi di Belanda periode 1953 hingga 1991, telah digunakan variabel tenaga kerja, investasi pemerintah (G), investasi swasta (K) dan tingkat penggunaan kapasitas (CU), untuk diketahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa selama periode penelitian, seluruh variabel memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Belanda.

4. Sinha dan Sinha (1997), yang mengkaji mengenai keterkaitan antara keterbukaan (*openness*), investasi dan pertumbuhan ekonomi di 15 (lima belas negara) negara di Asia, mencakup; Banglades, China, Hongkong, India, Indonesia, Iran, Irak, Israel, Jepang, Jordania, Myanmar, Pakistan, Filipina, Singapura dan Korea Selatan untuk periode 1950 hingga 1992. Variabel yang digunakan adalah PDB riil, keterbukaan, investasi swasta dan tenaga kerja. Hasil penelitiannya menemukan bukti empiris, sebagai berikut :
- (1) Kecuali di Jordania dan Indonesia, variabel keterbukaan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap PDB riil, di hampir seluruh negara.
 - (2) Kecuali di Myanmar dan Pakistan, variabel investasi swasta memiliki pengaruh positif terhadap PDB riil, di hampir seluruh negara.
 - (3) Variabel tenaga kerja memiliki dua arah pengaruh terhadap PDB riil, di negara China, Hongkong, Indonesia, Israel, Jordania, Myanmar dan Filipina, tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDB riil, sedangkan di luar negara tersebut, tenaga kerja memiliki pengaruh negatif terhadap PDB riil.
5. Lachler dan Aschauer (1998), melakukan penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi di Meksiko selama periode 1980 hingga 1996. Dalam studinya digunakan variabel-variabel total investasi, investasi swasta, investasi publik, tenaga kerja, konsumsi pemerintah, modal manusia, rasio utang terhadap PDB dan variabel efektivitas depresiasi. Dengan menggunakan analisis regresi berganda terhadap model penelitian, didapatkan bukti empiris bahwa kecuali rasio utang terhadap PDB dan konsumsi publik (pemerintah) yang berpengaruh negatif, seluruh variabel memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Meksiko.

6. Sinha (1999), yang mengkaji mengenai keterkaitan antara ketidakstabilan ekspor, investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi di 9 (sembilan) negara, yang mencakup; India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Filipina, Srilangka dan Thailand untuk periode 1948 hingga 1997. Variabel yang digunakan adalah PDB riil, ekspor barang dan jasa riil, standar deviasi ekspor, investasi swasta dan tenaga kerja. Kesimpulan penelitian menemukan hasil, sebagai berikut: (1) variabel ekspor barang dan jasa riil, di hampir seluruh negara (kecuali Filipina), memiliki pengaruh positif terhadap GDP riil, (2) variabel deviasi ekspor yang menunjukkan ketidakstabilan ekspor, kecuali di negara Filipina dan Malaysia, memberikan pengaruh yang positif terhadap PDB riil di hampir seluruh negara selama periode penelitian, (3) variabel investasi (pembentukan modal) memiliki pengaruh yang positif terhadap PDB riil pada semua negara yang dijadikan objek penelitian dan (4) variabel tenaga kerja, kecuali di negara Myanmar, memberikan pengaruh yang positif terhadap PDB riil di hampir seluruh negara selama periode penelitian.
7. Gylfason dan Zoega (2000), yang mengamati keterkaitan antara sumber alam, investasi dan pertumbuhan ekonomi di 85 negara untuk periode 1965 hingga 1998, menemukan bukti empiris bahwa investasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa disamping investasi, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk, pendidikan (*human capital*), kelimpahan sumber daya alam dan seperangkat institusi yang relevan.

8. Hasil penelitian Krishna (2004), dikemukakan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi India periode 1960-2000 adalah investasi swasta, konsumsi perkapita energi, tingkat melek huruf dan proporsi listrik masuk desa.
9. Hasil penelitian M'Amanja dan Morrisey (2006), mengenai investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kenya periode tahun 1964 hingga 2002, telah digunakan variabel investasi swasta, investasi pemerintah, bantuan luar negeri dan impor, untuk diketahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa selama periode penelitian, variabel investasi swasta, investasi pemerintah dan impor memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kenya. Sedangkan variabel bantuan luar negeri memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kenya.
10. Schularick dan Steger (2007), dengan memasukkan variabel integrasi finansial sebagai variabel independen yang diduga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, disamping variabel pertumbuhan penduduk, modal manusia dan investasi swasta. Dengan menggunakan data 24 negara di dunia periode 1980 hingga 2002, diperoleh kesimpulan empiris bahwa selama periode penelitian, variabel pertumbuhan penduduk dan integrasi finansial memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel modal manusia dan investasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian.

Apabila ditampilkan dalam matrik penelitian terdahulu tentang pengaruh modal fisik (investasi swasta dan pemerintah), modal manusia dan tenaga kerja, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut :

Tabel 2.2.
Matrik Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Pertumbuhan Ekonomi

No.	Nama Penulis	Judul	Periode	Lokasi	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Khan dan Reinhart (1990)	<i>Private Investment and Economic Growth in Developing Countries</i>	1970-1979	24 negara	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi swasta ● Pertumbuhan tenaga kerja ● Pertumbuhan ekspor ● Pertumbuhan impor ● Investasi publik ● Total investasi ● Pertumbuhan ekonomi 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya pengaruh negatif secara statistik dari investasi publik terhadap pertumbuhan ekonomi, dan; ● Pengaruh yang positif dari variabel pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan ekspor, pertumbuhan impor, investasi swasta dan total investasi terhadap pertumbuhan ekonomi
2.	Cullison (1993)	<i>Public Investment and Economic Growth</i>	1955-1992	Amerika Serikat	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi publik ● Pertumbuhan ekonomi 	<i>Granger Causality Test</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengeluaran pemerintah dalam investasi publik memiliki pengaruh positif (tidak signifikan) terhadap pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat.
3.	Sturm, Kuper, dan Haan (1996)	<i>Modelling Government Investment and Economic Growth on a Macro Level: a Review</i>	1953-1991	Belanda	<ul style="list-style-type: none"> ● Tenaga kerja ● Investasi pemerintah ● Investasi swasta ● Tingkat penggunaan kapasitas ● PDB riil 	<i>Kointegrasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Seluruh variabel memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Belanda.
4.	Sinha dan Sinha (1997)	<i>Openness, Investment and Economic Growth in Asia</i>	1950-1992	15 negara	<ul style="list-style-type: none"> ● Keterbukaan ● Investasi ● Tenaga kerja ● PDB riil 	<i>OLS dan ARMA</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Kecuali di Jordania dan Indonesia, variabel keterbukaan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap PDB riil, di hampir seluruh negara. ● Kecuali di Myanmar dan Pakistan, variabel investasi memiliki pengaruh positif terhadap PDB riil, di hampir seluruh Negara ● Variabel tenaga kerja memiliki dua arah pengaruh terhadap PDB riil. Di negara China, Hongkong, Indonesia, Israel, Jordania, Myanmar, dan Filipina, tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap PDB riil, sedangkan di luar negara tersebut, tenaga kerja memiliki pengaruh negatif terhadap PDB riil

Lanjutan Tabel 2.2.

No.	Nama Penulis	Judul	Periode	Lokasi	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
5.	Lachler dan Aschauer (1998)	<i>Public Investment and Economic Growth</i>	1980-1996	Meksiko	<ul style="list-style-type: none"> ● Total investasi ● Investasi swasta ● Investasi publik ● Tenaga kerja ● Konsumsi publik ● Modal manusia ● Rasio utang/PDB ● Efektifitas depresiasi ● Pertumbuhan ekonomi 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Rasio utang terhadap PDB dan konsumsi publik (pemerintah) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. ● Total investasi, investasi swasta, investasi publik, tenaga kerja, konsumsi pemerintah, modal manusia dan variabel efektivitas depresiasi memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
6.	Sinha (1999)	<i>Export Instability, Investment and Economic Growth in Asian Countries: a Time Series Analysis</i>	1948-1997	9 negara	<ul style="list-style-type: none"> ● Ekspor barang & jasa ● Standar deviasi ekspor ● Investasi ● Tenaga kerja ● PDB riil 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Variabel ekspor barang dan jasa riil, di hampir seluruh negara (kecuali Filipina), memiliki pengaruh positif terhadap PDB riil ● Kecuali di negara Filipina dan Malaysia, deviasi ekspor memberikan pengaruh yang positif terhadap PDB riil, di hampir seluruh negara ● Investasi (pembentukan modal) memiliki pengaruh yang positif terhadap PDB riil, pada semua negara ● Tenaga kerja, kecuali di negara Myanmar, memberikan pengaruh yang positif terhadap PDB riil, di hampir seluruh negara
7.	Gylfason dan Zoega (2000)	<i>Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment</i>	1965-1998	85 negara	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi ● Pendapatan per kapita ● Pertumbuhan penduduk ● Pendidikan ● Kemelimpahan SDA ● Institusi ● Pertumbuhan ekonomi 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Variabel investasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. ● Disamping investasi, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk, pendidikan, kemelimpahan sumber daya alam dan seperangkat institusi yang relevan

Lanjutan Tabel 2.2.

No.	Nama Penulis	Judul	Periode	Lokasi	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
8.	Krishna (2004)	<i>Patterns and Determinants of Economic Growth in Indian States</i>	1960-2000	India	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi swasta ● Konsumsi per kapita ● Tingkat melek huruf ● Proporsi listrik masuk desa ● Pertumbuhan ekonomi 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Variabel investasi swasta, konsumsi per kapita energi, tingkat melek huruf dan proporsi listrik masuk desa memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
9.	M'Amanja dan Morrisey (2006)	<i>Foreign Aid, Investment, and Economic Growth in Kenya: A Time Series Approach</i>	1964-2002	Kenya	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi swasta ● Investasi pemerintah ● Bantuan luar negeri ● Impor ● Pertumbuhan ekonomi 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Variabel investasi swasta, investasi pemerintah dan impor memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. ● Variabel bantuan luar negeri memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi
10.	Schularick dan Steger (2007)	<i>Financial Integration, Investment, and Economic Growth. Evidence from Two Eras of Financial Globalization</i>	1980-2002	24 negara	<ul style="list-style-type: none"> ● Integrasi finansial ● Pertumbuhan penduduk ● Modal manusia ● Investasi ● Pertumbuhan ekonomi 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> ● Variabel pertumbuhan penduduk dan integrasi finansial memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi ● Variabel modal manusia dan investasi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

2.1.3. Kesempatan Kerja

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh modal fisik, modal manusia dan tenaga kerja, maka selanjutnya akan terjadi *multiplier*, dimana para pelaku ekonomi, terutama para investor (PMA dan PMDN) akan meningkatkan investasinya dalam berbagai bentuk, misalnya modal fisik yang tentunya akan berdampak pada meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi, seperti modal, tenaga kerja, tanah dan *skill*. Dalam konteks peningkatan permintaan tenaga kerja, hal itu berarti secara agregat investasi dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kesempatan kerja (Branson, 1989)

Menurut Blanchard (2000), dikatakan bahwa kesempatan kerja sebagai banyaknya orang yang bekerja pada berbagai sektor perekonomian. Menurutnya, kesempatan kerja atau permintaan kerja merupakan permintaan turunan (*derived demand*) dari permintaan konsumen atas produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu unit usaha sehingga permintaan tenaga kerja terkait dengan permintaan barang dari unit usaha tersebut. Biasanya sulit untuk memperoleh data tentang kesempatan kerja maka untuk keperluan praktis umumnya jumlah kesempatan kerja didekati dengan banyaknya lapangan pekerjaan yang terisi dan tercermin dari jumlah penduduk yang bekerja (*employed*).

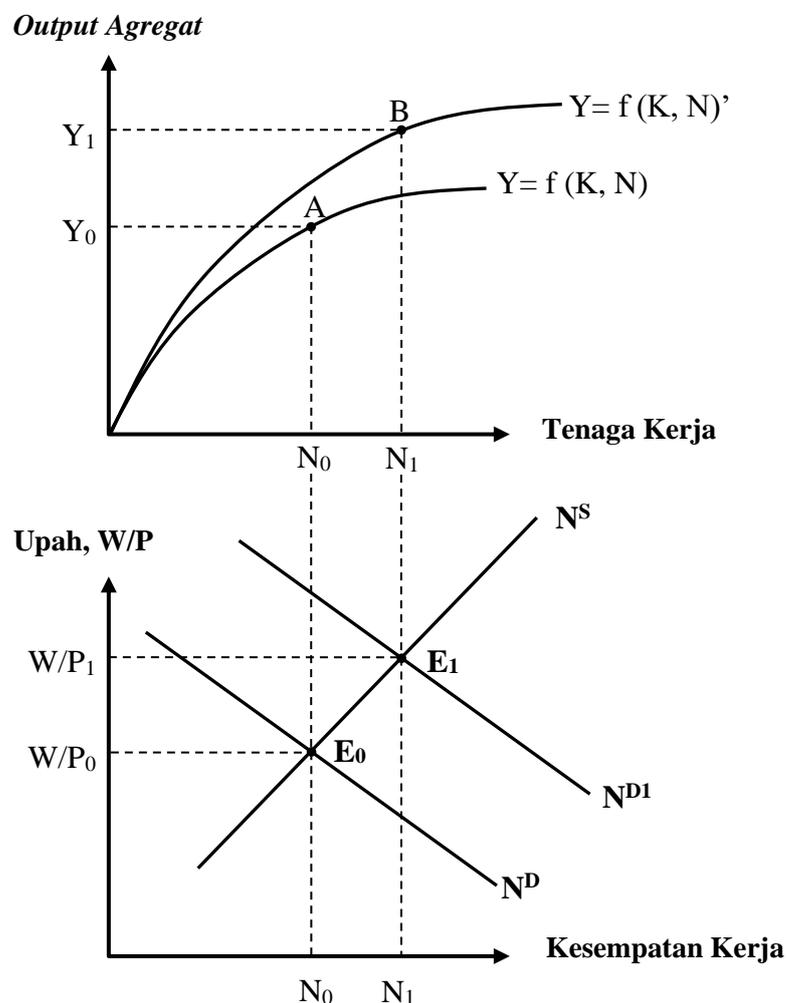
Model ekonomi klasik menyatakan bahwa dalam perekonomian tidak terdapat kekurangan permintaan agregat, sehingga kesempatan kerja penuh akan selalu tercapai dalam perekonomian. Pengangguran merupakan masalah yang bersifat sementara. Sekiranya ada kurang kesempatan kerja, sistem pasar dengan sendirinya melakukan penyesuaian-penyesuaian sehingga akhirnya kesempatan kerja penuh tercapai kembali. Hal tersebut salah satunya ditunjang oleh fleksibilitas upah yang akan mengembalikan keseimbangan di pasaran tenaga kerja (Mankiw, 2001).

Menurut pandangan klasik bahwa perekonomian tidak akan kekurangan permintaan agregat, yang berarti segala barang yang diproduksi akan dapat dijual, sedangkan tingkat produksi nasional dan kegiatan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Atas dasar tersebut jumlah produksi (*output*) sebagai dasar untuk menentukan kesempatan kerja. Hubungan antara tenaga kerja dengan *output* melalui *fungsi produksi*, yaitu; suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara jumlah produksi yang akan dihasilkan dengan jumlah faktor produksi (tenaga kerja) yang digunakan dalam suatu proses produksi. Asumsi yang dibangun adalah bahwa dalam jangka pendek tenaga kerja (N) merupakan satu-satunya input yang dapat diubah-ubah penggunaannya, sedangkan faktor produksi lainnya seperti modal (K) ditentukan pada tingkat penggunaan tertentu (Mankiw, 2001).

Berdasarkan sudut pandang permintaan tenaga kerja, pengusaha akan terus menambah jumlah pekerja selama pekerja tambahan tersebut dapat menghasilkan penjualan tambahan yang melebihi upah yang dibayarkan kepadanya. Seorang pengusaha akan berhenti menambah pekerjanya apabila tambahan pekerja yang terakhir hanya dapat menghasilkan tambahan produksi yang sama nilainya. Sedangkan dari sudut pandang penawaran tenaga kerja, menunjukkan bahwa penawaran tenaga kerja (di pasar tenaga kerja) tergantung dari tingkat upah (*wages*) yang ditawarkan. Semakin tinggi tingkat upah maka semakin tinggi pula penawaran tenaga kerjanya dan sebaliknya.

Menurut Tulus Tambunan (2007), di pasar tenaga kerja bertemu dua kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja menentukan besar kecilnya volume kesempatan kerja dan tingkat upah riil. Volume kesempatan kerja melalui fungsi produksi menentukan jumlah output bertambah dari (Y_0 - Y_1). Kurva fungsi produksi yang tidak linear itu

menandakan bahwa persentase pertumbuhan output proposional dari persentase penambahan tenaga kerja. Hal ini berarti, tidak hanya volume kesempatan kerja saja, tetapi juga produktivitasnya meningkat. Sudut dari kurva fungsi produksi tersebut merupakan marginal produk dari tenaga kerja dipengaruhi oleh teknologi yang menentukan berapa banyak volume kesempatan kerja yang diperlukan untuk membuat sebuah atau sejumlah *output*. Penambahan kesempatan kerja dicerminkan kurva N_D ke kanan.



Sumber : Tulus Tambunan (2007)

Gambar 2.1.
Fungsi Produksi dan Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Sedangkan kesempatan kerja menurut Keynes berbeda dengan pendapat klasik. Menurut **Keynes**, kesempatan kerja penuh tidak akan selalu terjadi dalam perekonomian karena permintaan agregat tidak akan selalu sama dengan penawaran agregat pada saat kesempatan kerja penuh. Pada umumnya permintaan agregat akan lebih rendah dari penawaran agregat pada saat tenaga kerja penuh, sehingga pengangguran bukan lagi merupakan masalah yang bersifat sementara. Selanjutnya, kesempatan kerja ditentukan oleh permintaan efektif. Jika permintaan efektif kurang, maka terdapat kekurangan kesempatan kerja, sedangkan meningkatnya permintaan efektif akan menambah kesempatan kerja.

Pengertian permintaan efektif lebih lanjut dijelaskan oleh Alfred dan Douglas (dalam Blanchard, 2000), bahwa permintaan efektif sama dengan pendapatan nasional, yaitu hasil pendapatan semua penduduk dalam perekonomian dan merupakan nilai dari output perekonomian yang bersangkutan. Mengingat harga total output nasional merupakan hal yang sama dengan hasil para pengusaha-pengusaha, yang dicapai dengan jalan menjual barang konsumsi, atau alat produksi, maka permintaan efektif disatu pihak adalah sama dengan pengeluaran nasional untuk barang konsumsi ditambah dengan pengeluaran nasional untuk barang investasi.

Menurut Keynes, tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya kemampuan untuk membayar barang-barang dan jasa yang diminta tersebut dan diwujudkan dalam perekonomian. Bertambah besar permintaan efektif yang diwujudkan dalam perekonomian, bertambah besar pula tingkat produksi yang akan dicapai oleh sektor perusahaan. Keadaan ini dengan sendirinya akan menyebabkan pertambahan dalam tingkat kegiatan ekonomi dan penggunaan tenaga kerja (kesempatan kerja) dan faktor-faktor produksi (Blanchard, 2000).

Apabila kegiatan ekonomi bertambah tinggi dan lebih banyak faktor-faktor produksi digunakan maka kesempatan kerja akan bertambah dan faktor-faktor produksi lainnya akan berkurang. Dengan demikian, tingkat penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian akan tergantung kepada besarnya permintaan efektif. Makin besar permintaan, makin kecil jurang diantara tingkat kegiatan ekonomi yang tercapai dengan kegiatan ekonomi pada tingkat kesempatan kerja penuh maka pengangguran akan menjadi lebih bertambah kecil (Blanchard, 2000).

Saran model Keynesian dalam upaya meningkatkan kesempatan kerja adalah menaikkan total permintaan *agregat* melalui peningkatan pengeluaran pemerintah secara langsung atau melalui kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung meningkatkan investasi swasta, antara lain dengan tingkat bunga pinjaman yang rendah, subsidi investasi, penurunan tarif pajak dan sebagainya. Sepanjang dalam perekonomian terdapat pengangguran dan kelebihan kapasitas ekonomi maka penawaran barang dan jasa akan merespons meningkatnya permintaan secara otomatis. Keseimbangan baru tercapai dimana pendapatan nasional lebih tinggi dan kesempatan kerjapun meningkat (Todaro, 2003).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pasar tenaga kerja menurut teori Keynes pada dasarnya mengikuti pasar barang, dimana apabila output naik maka jumlah orang yang mendapat pekerjaan atau tingkat *employment* (N) juga naik. Hal tersebut karena pertumbuhan output menyebabkan produktivitas tenaga kerja bertambah dan merupakan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan tersebut jika diinvestasikan kembali maka akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, *employment* turun apabila output turun (Keiser, 1995).

Pertumbuhan output melalui pengembangan industri dan meningkatnya investasi diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan pada gilirannya memberikan pengaruh ganda terhadap perluasan kesempatan kerja. Dengan bertambahnya kesempatan kerja, diharapkan pendapatan masyarakat meningkat sekaligus peningkatan daya belinya.

Beberapa studi terdahulu tentang kesempatan kerja, diantaranya berasal dari hasil empiris berikut:

1. Blomstrom dan Kokko (1997), yang mengkaji bagaimana dampak investasi swasta dan upah terhadap kesempatan kerja di Swedia. Dengan menggunakan alat analisis regresi terhadap data *crosssection* tahun 1986-1994, didapatkan bukti empiris bahwa variabel investasi swasta berpengaruh positif dalam mempengaruhi kesempatan kerja, sedangkan variabel upah berpengaruh negatif dalam mempengaruhi kesempatan kerja.
2. Fitzroy dan Funke (1999), mengenai kesempatan kerja di Jerman Barat periode 1980 hingga 1997, telah digunakan variabel upah dan investasi swasta, untuk diketahui pengaruhnya terhadap kesempatan kerja. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa selama periode penelitian, variabel upah signifikan berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja, sedangkan investasi swasta signifikan berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Jerman Barat.
3. Walterskirchen (1999), dalam empirisnya yang mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Jerman Barat, Swedia dan Belanda periode 1988 hingga 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

terdapat hubungan signifikan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja.

4. Bambang Setiaji dan Sudarsono (2004), mengkaji bagaimana pengaruh perbedaan upah antar propinsi terhadap kesempatan kerja di Indonesia. Dengan menggunakan alat analisis 2SLS terhadap data *crosssection* tahun 2001, didapatkan bukti empiris bahwa (1) adanya perbedaan upah antar propinsi mempengaruhi tingkat kesempatan kerja, dan; (2) Diferensiasi upah ke atas (yang lebih tinggi dari UMR) di masing-masing propinsi cenderung mengurangi penggunaan tenaga kerja.
5. Suedekum dan Blien (2004), dalam penelitiannya tentang pengaruh tingkat upah terhadap kesempatan kerja di Jerman Barat periode 1993 hingga 2001, menemukan bukti empiris bahwa tingkat upah riil secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja.
6. Boyke T. H. Situmorang (2005), dalam penelitiannya tentang elastisitas kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan suku bunga di Indonesia tahun 1990-2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kebijakan upah minimum signifikan berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja, sedangkan tingkat suku bunga tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja.
7. Sri Roshidayati (2006), yang mengkaji bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah riil terhadap kesempatan kerja pada masing-masing Propinsi di Indonesia. Dengan menggunakan alat analisis regresi berganda terhadap data *crosssection* periode 2001-2004, didapatkan bukti empiris

bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja sedangkan tingkat upah riil berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja.

8. Choi (2007) mengenai kesempatan kerja di Korea Selatan periode 1971 hingga 2005, telah digunakan variabel upah dan pertumbuhan ekonomi untuk diketahui pengaruhnya terhadap kesempatan kerja. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa selama periode penelitian, variabel upah signifikan berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi signifikan berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Korea Selatan.
9. Jayaraman dan Singh (2007), dua orang ahli ekonomi dari Universitas Pasific Selatan Kepulauan Fiji, telah melakukan penelitian tentang keterkaitan antara investasi swasta dengan kesempatan kerja di Negara Kepulauan Fiji. Adapun variabel independen yang digunakan sebagai estimator variabel kesempatan kerja adalah pertumbuhan ekonomi, investasi swasta dan jumlah angkatan kerja. Dengan menggunakan data *cross section* tahun 1970-2003, dan alat analisis kointegrasi didapatkan bukti empiris bahwa kesempatan kerja di Kepulauan Fiji dipengaruhi secara positif oleh investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan jumlah angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja.

Apabila ditampilkan dalam matrik penelitian terdahulu tentang pengaruh investasi swasta dan variabel lain terhadap kesempatan kerja, dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3. berikut :

Tabel 2.3.
Matrik Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Kesempatan Kerja

No.	Nama Penulis	Judul	Periode	Lokasi	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Bromstrom dan Kokko (1997)	<i>Private Investment, Employment and Wages in Swedish</i>	1986-1994	Swedia	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi swasta ● Upah ● Kesempatan Kerja 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi swasta berpengaruh positif dalam mempengaruhi kesempatan kerja, sedangkan variabel upah berpengaruh negatif dalam mempengaruhi kesempatan kerja
2.	Fitzroy dan Funke (1999)	<i>Real Wages, Investment and Employment: New Evidence from West German Sectoral Data</i>	1980-1997	Jerman Barat	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi Swasta ● Upah ● Kesempatan Kerja 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Variabel upah signifikan berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja, sedangkan investasi swasta signifikan berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Jerman Barat.
3.	Walterskirchen (1999)	<i>The Relationship Between Growth and Employment</i>	1988-1998	Jerman Barat, Swedia dan Belanda	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan Ekonomi ● Kesempatan Kerja 	<i>Kointegrasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja.
4.	Bambang Setiaji dan Sudarsono (2004)	Pengaruh Diferensiasi Upah antar Propinsi Terhadap Kesempatan Kerja	2001	Propinsi di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● Upah Minimum ● Kesempatan Kerja 	<i>2SLS</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Adanya perbedaan upah antar propinsi mempengaruhi tingkat kesempatan kerja, dan; ● Diferensiasi upah ke atas (yang lebih tinggi dari UMR) di masing-masing propinsi cenderung mengurangi penggunaan tenaga kerja
5.	Suedekum dan Blien (2005)	<i>Wages and Employment Growth: Disaggregated Evidence for West Germany</i>	1993 – 2001	Jerman Barat	<ul style="list-style-type: none"> ● Upah riil ● Kesempatan Kerja 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penelitian menemukan bukti empiris bahwa tingkat upah riil secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja

Lanjutan Tabel 2.3.

No.	Nama Penulis	Judul	Periode	Lokasi	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6.	Boyke T.H. Sitomorang (2005)	Elastisitas Kesempatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Suku Bunga di Indonesia	1990 – 2003	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan Ekonomi ● Upah minimum ● Suku Bunga ● Kesempatan Kerja 	Regresi Berganda	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kebijakan upah minimum signifikan berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja ● Sedangkan tingkat suku bunga tidak signifikan berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja
7.	Sri Roshidayati (2006)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Riil terhadap Kesempatan Kerja	2001-2004	Kabupaten/ Kota Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan Ekonomi ● Upah Riil ● Kesempatan Kerja 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja ● Upah riil berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja
8.	Choi (2007)	<i>The Employment Effect of Economic Growth: Identifying Determinants of Employment Elasticity</i>	1971-2005	Korea Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ● Upah ● Pertumbuhan Ekonomi ● Kesempatan Kerja 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel upah signifikan berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja, sedangkan pertumbuhan ekonomi signifikan berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja di Korea Selatan.
9.	Jayaraman dan Singh (2007)	<i>Private Investment and Employment Creation in Pacific Island Countries: An empirical study of Fiji</i>	1970-2003	Fiji	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi swasta ● Pertumbuhan Ekonomi ● Jumlah angkatan kerja ● Kesempatan kerja 	<i>Johansen Cointegration</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penelitian menunjukkan kesempatan kerja di Kepulauan Fiji dipengaruhi secara positif oleh investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan jumlah angkatan kerja berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja

2.1.4. Distribusi Pendapatan

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang salah satunya disebabkan oleh investasi swasta, sudah barang tentu akan terjadi proses *multiplier*. Proses *multiplier* tersebut sebagai akibat dari meningkatnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi, seperti modal fisik, tenaga kerja, tanah, maupun *skill*, sehingga pendapatan bunga pemilik modal, upah dan gaji tenaga kerja, pendapatan sewa pemilik tanah dan profit bagi pemilik *skill* akan meningkat pula. Dalam konteks makro, maka secara agregat akan terjadi distribusi pendapatan yang lebih merata. (Branson, 1989).

Pemerataan pendapatan antar penduduk atau rumah tangga mengandung dua segi. Pertama adalah meningkatkan tingkat hidup masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh, dalam arti mempersempit perbedaan tingkat pendapatan antar rumah tangga.

Todaro (2003), mengelompokkan distribusi pendapatan dalam dua ukuran utama, yaitu: (i) distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan menurut bagian faktor distributif, dan (ii) distribusi pendapatan perseorangan atau besaran pendapatan. Distribusi fungsional atau distribusi bagian faktor, mencoba menjelaskan bagian dari total pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Pendapatan akan didistribusikan menurut fungsi (para tenaga kerja akan menerima upah, para pemilik tanah akan menerima sewa, dan para pemilik modal akan memperoleh laba).

Semua itu merupakan teori yang disusun dengan sangat logis dan rapi, karena setiap faktor dibayar sesuai dengan besarnya sumbangan yang diberikan oleh masing-masing faktor terhadap tingkat keluaran nasional. Sayangnya, relevansi teori fungsional tersebut dalam penerapannya kerap kali mengalami kendala, terutama disebabkan oleh kegagalan memperhitungkan peranan yang penting dan berpengaruh dari kekuatan-kekuatan non-pasar, seperti kekuatan untuk menentukan harga-harga faktor, misalnya peranan tawar-menawar secara kolektif antara pengusaha dan serikat pekerja dalam menentukan tingkat upah.

Distribusi pendapatan kedua yang lazim digunakan oleh para ahli ekonomi adalah distribusi pendapatan perseorangan atau besaran pendapatan. Distribusi pendapatan ini menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima. Bagaimana pendapatan itu mereka peroleh, berapa banyak yang diperoleh oleh masing-masing individu dan bagaimana cara memperolehnya, apakah merupakan hasil dari pekerjaan mereka atau dari sumber-sumber lain, seperti penarikan bunga, laba usaha, sewa, hadiah, warisan dan sebagainya tidak dipersoalkan dalam ukuran ini. Selain itu, juga diabaikan sumber-sumber pendapatan yang menyangkut lokasi (apakah di wilayah kota atau desa) dan jenis pekerjaan (misalnya pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa, dan sebagainya).

Untuk menghitung distribusi pendapatan, para ahli ekonomi biasanya menggabungkan semua individu dengan mengambil skala pendapatan per orang dan kemudian membagi total penduduk ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan ukuran atau besarnya pendapatan yang mereka terima. Suatu

metode yang lazim digunakan adalah membagi keseluruhan penduduk ke dalam lima kelompok (*quintile*) atau sepuluh kelompok (*decile*) menurut skala tingkat pendapatan mereka dan kemudian menentukan berapa proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan tersebut dari total pendapatan nasional. Oleh karena itu, distribusi pendapatan perseorangan seringkali pula disebut distribusi pendapatan antar kelompok.

Selain cara di atas, metode lain yang lazim digunakan untuk menganalisis statistik pendapatan per orang adalah dengan menyusun apa yang dikenal dengan Kurva Lorenz (*lorenz curve*). Pada sumbu (aksis) horizontal digambarkan jumlah penerima pendapatan tidak dalam arti absolut tetapi dalam bentuk persentase kumulatif. Sedangkan sumbu vertikal menggambarkan bagian dari total pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh masing-masing persentase penduduk. Sumbu ini juga merupakan kumulatif ke atas sampai dengan total 100 persen, sehingga kedua sumbu ini akan sama panjangnya dan seluruh angkanya dengan demikian masuk dalam gambar bujur sangkar. Garis diagonal ditarik dari sudut kiri paling bawah (titik awal) sampai dengan sudut kanan paling atas dari empat persegi itu. Pada setiap titik disepanjang garis diagonal digambarkan persentase pendapatan yang diterima dalam jumlah yang persis sama dengan persentase pendapatan dari sisi penerima. Dengan kata lain, garis diagonal mewakili "kesamaan yang sempurna" dalam distribusi pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan yang diterima oleh masing-masing ukuran kelompok penduduk.

Ukuran atau bobot relatif ketidakmerataan pendapatan dapat juga diperoleh dengan memperhitungkan nisbah (rasio) wilayah antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibandingkan dengan total wilayah paruh segi empat yang berisi kurva tersebut. Nisbah atau rasio ini dikenal dengan sebutan rasio koefisien Gini atau lebih sederhana disebut koefisien gini.

Koefisien gini merupakan salah satu pengukuran yang paling sering dan banyak digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan. Koefisien gini mengukur ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Gini tidak menentukan tingkat pendapatan tertentu, tetapi menghitung tingkat kesenjangan pendapatan perseorangan secara agregatif yang diterima di atas tingkat tertentu. Nilai koefisien Gini 0,50-0,70 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, dan nilai 0,20-0,35 menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata. (Bhatta, 2001)

Di Indonesia, perhitungan distribusi pendapatan (koefisien gini) menggunakan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan sekali dalam tiga tahun. Data pengeluaran rumah tangga yang dikumpulkan dalam Susenas digunakan sebagai pendekatan (*proxy*) untuk mengukur distribusi pendapatan penduduk Indonesia. Pendekatan ini digunakan karena dalam kenyataannya kadangkala pendapatan rumah tangga yang dilaporkan, selalu lebih rendah dari pendapatan yang sebenarnya. Mengingat, pengertian pengeluaran konsumsi tidak sama dengan pengertian pendapatan (yang diperoleh karena bekerja), demikian pula tidak sama dengan pengertian kekayaan, perbedaan konsep ini yang menjadi kendala serius dalam mengukur secara akurat tingkat dan distribusi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Studi empiris mengenai pengaruh investasi swasta dan variabel lainnya terhadap distribusi pendapatan (dimana gini rasio digunakan sebagai ukuran distribusi pendapatan), diantaranya dilakukan oleh:

1. Blejer dan Guerrero (1990), ekonomi dari Filipina dengan menggunakan data tahun 1980-1986. Studi mereka memfokuskan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, nilai tukar, investasi pemerintah dan inflasi terhadap distribusi pendapatan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengangguran, inflasi dan nilai tukar mempunyai efek positif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio). Sedangkan, investasi pemerintah dan pertumbuhan ekonomi mempunyai efek negatif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio).
2. Glomm dan Ravikumar (1992), yang meneliti tentang peran dari investasi swasta dan investasi pemerintah dalam pemerataan distribusi pendapatan di India periode 1986-1990, menggunakan variabel investasi swasta dan investasi pemerintah untuk dikaji pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan (gini rasio). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari investasi swasta dan investasi pemerintah terhadap distribusi pendapatan.
3. Hebbel, Serven dan Solimano (1996), sebagaimana hasil penelitiannya tentang hak kekayaan dan distribusi pendapatan yang dilakukan terhadap 5 negara Asia Timur periode 1980 – 1994, menemukan bukti empiris bahwa tingkat tabungan, investasi swasta dan konsumsi mempengaruhi distribusi pendapatan (gini rasio) selama periode penelitian.

4. Ahn (1997), dalam empirisnya tentang faktor penentu distribusi pendapatan di Korea periode tahun 1965-1994, menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan tingkat inflasi, untuk dikaji pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) di Korea. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang positif dari pengangguran dan inflasi terhadap distribusi pendapatan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan.
5. Sarel (1997), dalam studi empirisnya tentang pengaruh faktor makroekonomi terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) pada 52 negara, periode tahun 1990-1995. Beberapa variabel makroekonomi yang digunakannya untuk mengestimasi distribusi pendapatan diantaranya adalah; pertumbuhan ekonomi, pendapatan, investasi swasta, depresiasi nilai tukar dan imbal perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, investasi swasta, pendapatan dan hubungan perdagangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan, sedangkan depresiasi nilai tukar berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan.
6. Penelitian Jha (1998), dalam penelitian tentang distribusi pendapatan, menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, rasio penerimaan pajak terhadap PDB dan investasi publik untuk dilihat pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan di India dan Taiwan. Periode data yang digunakan dari 1964 hingga 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan investasi pemerintah berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio), sedangkan pertumbuhan penduduk dan rasio penerimaan pajak total terhadap PDB berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) di India dan Taiwan.

7. Ahmad Fahrezi Zali (1999) tentang distribusi pendapatan di Indonesia dan faktor yang mempengaruhinya, telah digunakan variabel pertumbuhan ekonomi, rasio penerimaan pajak total terhadap PDB dan pengeluaran pemerintah (investasi publik) yang diprediksi mempengaruhi distribusi pendapatan (gini rasio) di Indonesia periode 1987 hingga 1997. Hasil estimasi menunjukkan bukti empiris bahwa rasio penerimaan pajak total terhadap PDB dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio). Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) di Indonesia.
8. Bigsten dan Levin (2000), dalam studi empirisnya tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan (gini rasio) di 25 negara berkembang periode 1987 hingga 1998. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan (gini rasio).
9. Penelitian Siti Farhah (2001), yang mengeksplorasi hubungan antara Inflasi dan pengeluaran pembangunan terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) dengan menggunakan data runtun waktu periode 1984 hingga 2000 di negara Indonesia. Hasil estimasi yang didapat adalah bahwa variabel independen inflasi berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio), sedangkan pengeluaran pemerintah untuk investasi publik berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) di Indonesia.

10. Afonso, Schuknecht, Tanzi (2008), dalam empirisnya tentang faktor penentu distribusi pendapatan dan belanja publik di Australia untuk periode tahun 1960-2000. Mereka menggunakan variabel keterbukaan, belanja publik (infrastruktur), pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan, untuk dikaji pengaruhnya terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) di Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari pengangguran terhadap distribusi pendapatan (gini rasio), sedangkan keterbukaan, belanja publik, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio).
11. Karbasi dan Mojarad (2008), mengkaji dampak dari investasi publik terhadap ketidakrataan pendapatan desa di Iran. Penelitian mereka menggunakan data panel pada 25 provinsi selama periode 1995 hingga 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi publik yang dilakukan pada infrastruktur jalan, R & D, pertanian, irigasi, listrik, teknologi baru, dan lainnya, secara signifikan dapat mengurangi ketidakmerataan pendapatan. Pemerintah memegang peran kunci dalam upaya mengurangi ketidakmerataan pendapatan. Dengan meningkatnya kondisi infrastruktur diharapkan dapat mendorong investasi swasta, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata.

Apabila ditampilkan dalam matrik penelitian terdahulu tentang pengaruh investasi swasta dan variabel lain terhadap distribusi pendapatan (gini rasio), dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.4. berikut :

Tabel 2.4.
Matrik Hasil Penelitian Terdahulu Tentang Distribusi Pendapatan

No.	Nama Penulis	Judul	Periode	Lokasi	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Blejer dan Guerrero (1990)	<i>The Impact of Macroeconomic Policies on Income Distribution : An Empirical Study of the Philippines</i>	1980-1986	Filipina	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengangguran ● Nilai Tukar ● Inflasi ● Investasi pemerintah ● Pertumbuhan ekonomi ● Distribusi pendapatan 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Variabel pertumbuhan ekonomi dan investasi pemerintah berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) di Brazil ● Variabel pengangguran, nilai tukar dan inflasi berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) di Brazil
2.	Glomm dan Ravikumar (1992)	<i>Public and Private Investment; Implications for Income Distribution</i>	1986-1990	India	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi swasta ● Investasi pemerintah ● Distribusi pendapatan (gini rasio) 	<i>OLS</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari investasi swasta dan investasi pemerintah terhadap distribusi pendapatan (gini rasio)
3.	Hebbel, Serven dan Solimano (1996)	<i>Property Rights and Income Distribution</i>	1980-1994	5 Negara Asia Timur	<ul style="list-style-type: none"> ● Tabungan ● Investasi swasta ● Konsumsi ● Distribusi pendapatan 	<i>OLS</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Tingkat tabungan, investasi swasta dan konsumsi mempengaruhi distribusi pendapatan (gini rasio) selama periode penelitian
4.	Ahn (1997)	<i>Trends in and Determinants of Income Distribution in Korea</i>	1965 - 1994	Korea	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan ekonomi ● Pengangguran ● Tingkat inflasi ● Distribusi Pendapatan 		<ul style="list-style-type: none"> ● Terdapat pengaruh signifikan yang positif dari pengangguran dan inflasi terhadap distribusi pendapatan (gini rasio), sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio)
5.	Sarel (1997)	<i>How Macroeconomics Factors Affect Income Distribution: The Cross-Country Evidence</i>	52 Negara	1990-1995	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan ekonomi ● Pendapatan ● Investasi swasta ● Depresiasi nilai tukar ● Hubungan Perdagangan ● Distribusi pendapatan 	<i>Multiple Regression</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Variabel pertumbuhan ekonomi, investasi swasta, pendapatan dan hubungan perdagangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan, sedangkan depresiasi nilai tukar berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan

Lanjutan Tabel 2.4.

No.	Nama Penulis	Judul	Periode	Lokasi	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
6.	Jha (1998)	<i>Income Distribution in India and Taiwan</i>	1964-1996	India dan Taiwan	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan ekonomi ● Pertumbuhan penduduk ● Rasio penerimaan pajak total terhadap PDB ● Investasi publik ● Distribusi pendapatan 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan investasi pemerintah berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio), sedangkan pertumbuhan penduduk dan rasio penerimaan pajak total terhadap PDB berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) di India dan Taiwan
7.	Ahmad Fahrezi Zali (1999)	Distribusi Pendapatan Indonesia dan Faktor yang mempengaruhinya	1987-1997	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan ekonomi ● Rasio penerimaan pajak total terhadap PDB ● Pengeluaran pemerintah (investasi publik) ● Distribusi pendapatan 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil estimasi menunjukkan bukti empiris bahwa rasio penerimaan pajak total terhadap PDB dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) ● Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) di Indonesia
8.	Bigsten dan Levin (2000)	<i>Growth and Income Distribution</i>	1987-1998	25 negara	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan ekonomi ● Distribusi pendapatan 	<i>Korelasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan (gini rasio)
9.	Siti Farhah (2006)	Pengaruh Variabel Makroekonomi Indonesia terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia	1984-2002	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ● Pertumbuhan ekonomi ● Pengeluaran pembangunan ● Distribusi pendapatan 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Variabel independen inflasi berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio), sedangkan pengeluaran pemerintah untuk investasi publik berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) di Indonesia
10.	Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2008)	<i>Income Distribution Determinants and Public Spending Efficiency</i>	1960-2000	26 Negara OECD	<ul style="list-style-type: none"> ● Keterbukaan ● Belanja publik ● Pengangguran ● Pertumbuhan ekonomi ● Pendidikan ● Distribusi pendapatan 	<i>Regresi Berganda</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan dari pengangguran terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) ● Sedangkan keterbukaan, belanja publik, pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio)
11.	Karbasi dan Mojarad (2008)	<i>Impact of Public Investments on Iran Rural Income Inequality</i>	1995-2004	25 Propinsi di Iran	<ul style="list-style-type: none"> ● Investasi publik ● Investasi swasta ● Distribusi pendapatan 	OLS	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penelitian menunjukkan investasi publik yang dilakukan pada infrastruktur jalan, R & D, pertanian, irigasi, listrik, teknologi baru, dan lainnya, signifikan dalam mengurangi ketidakmerataan pendapatan. Dengan meningkatnya kondisi infrastruktur diharapkan dapat mendorong investasi swasta, sehingga distribusi pendapatan menjadi lebih merata

2.2. Kerangka Pemikiran

Menyusun kerangka pemikiran adalah menjawab secara rasional masalah yang telah dirumuskan dan identifikasi dengan mengalirkan jalan pikiran peneliti berdasarkan patokan pikir (asumsi) sampai pada pemikiran menurut kerangka logis (*logical construct*). Kerangka logis itu adalah kerangka logika sebagaimana digunakan dalam berfikir deduktif, yang menggunakan silogisme (*sylogisme*), yaitu suatu argumen (penalaran) deduktif yang valid (absah) berdasarkan berbagai rujukan yang digunakan. Adapun kerangka pemikiran yang disusun dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Model Penentu Perkembangan Investasi Swasta

Dalam menjelaskan model faktor penentu investasi yang akan dibentuk, akan digunakan pendekatan teori dan studi empiris sebelumnya. Dalam tataran teori, akan digunakan teori *keynes*, teori dana internal, teori neo klasik dan teori *tobin q*. Untuk melengkapi teori-teori tersebut, digunakan pula rujukan dari penelitian empiris yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan konsep marginal kapital (*marginal efficiency of capital* atau *MEC*), Keynes mencoba menjelaskan permintaan investasi. Menurutnya, permintaan suatu investasi ditentukan oleh besar kecilnya nilai *present value* dari perolehan bersih yang diharapkan atas pengeluaran tambahan kapital dengan biaya modal yang dikeluarkan saat ini. Dengan demikian, berdasarkan teori ini, suatu investasi tergantung dari tingkat *discount rate* (tingkat diskonto) yang menyatakan aliran perolehan yang diharapkan di masa depan dengan biaya sekarang dari kapital tambahan. Semakin besar *present value* dari perolehan

bersih yang diharapkan atas pengeluaran tambahan kapital dibandingkan dengan tingkat biaya yang dikeluarkan saat ini, maka akan semakin besar permintaan investasi. Mendasarkan pada teori ini, permintaan investasi (I_t) tergantung dari tingkat *return* (R), tingkat bunga riil (i), dan biaya modal yang dikeluarkan ($cost_k$, C_k), atau diformulasikan dalam bentuk fungsi menjadi :

$$I_t = f(R, i, C_k) \quad (2.10)$$

dimana; R adalah tingkat keuntungan yang diharapkan (*return*), i adalah *interest rate*, C_k adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh stok modal.

Berdasarkan pada teori dana internal (*internal funds theory of investment*), sebagaimana dikemukakan oleh Jan Tinbergen (dalam **Mankiw**, 2001), bahwa permintaan terhadap suatu investasi ditentukan dan tergantung pada tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan dimaksud adalah tingkat keuntungan yang diharapkan (*expected profit*) di masa depan. Sementara keuntungan yang diharapkan di masa depan umumnya dicerminkan oleh tingkat suku bunga riil dan tingkat risiko yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang. Dalam beberapa kasus penelitian, tingkat inflasi seringkali digunakan sebagai proksi dari tingkat risiko. Sementara itu, untuk investor luar negeri (PMA) disamping faktor bunga dan inflasi, perubahan kurs juga merupakan faktor yang diperhatikan dalam risiko. Perubahan nilai tukar (depresiasi dan apresiasi) akan mempengaruhi besarnya investasi yang akan ditanamkan di suatu wilayah investasi (regional atau nasional). Dengan demikian, menurut teori dana internal, permintaan akan investasi (I_t) merupakan fungsi dari tingkat bunga (i), inflasi (INF), dan nilai tukar (ER), sehingga :

$$I_t = f(i, INF, ER) \quad (2.11)$$

dimana; i adalah *interest rate*, INF adalah inflasi, dan ER adalah nilai tukar.

Sementara itu, menurut teori neo klasik, suatu stok kapital yang diinginkan oleh suatu perusahaan ditentukan oleh output dan harga jasa kapital relatif terhadap harga output. Harga jasa kapital pada gilirannya bergantung pada barang-barang modal, tingkat bunga, dan perlakuan pajak atas pendapatan perusahaan. Dengan demikian, menurut teori ini perubahan dalam output (Y atau PDRB) serta barang-barang modal (k), tingkat bunga (i) dan perlakuan pajak atas pendapatan perusahaan (Tax), akan mempengaruhi investasi atau stok kapital yang diinginkan (I_t). Dirumuskan dalam suatu fungsi matematis menjadi ;

$$I_t = f(growth, k, i, Tax) \quad (2.12)$$

dimana; *growth* adalah perubahan dalam output, k adalah barang modal, i adalah tingkat bunga riil dan *Tax* adalah pajak pendapatan.

Selanjutnya, dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dapat juga dijelaskan berdasarkan teori *Tobin q* (dalam Romer, 2006). Menurut teori ini, investasi sangat tergantung pada nilai pasar dari modal terpasang dibandingkan dengan biaya penggantian. Semakin besar nilai pasar dari modal terpasang dibandingkan dengan biaya penggantian ($q > 1$) maka perusahaan akan meningkatkan nilai pasar dari modal terpasang perusahaan mereka dengan membeli lebih banyak modal. Sebaliknya, jika $q < 1$ maka nilai pasar dari modal terpasang akan menjadi lebih kecil dari biaya pengantiannya. Dalam kondisi yang demikian, para manajer tidak akan mengganti modal.

Teori q Tobin ini pada dasarnya hampir sama dengan teori Keynes, yang mengatakan bahwa investasi perusahaan sangat tergantung dari tingkat keuntungan dan tingkat biaya. Hanya saja dalam teori *Tobin q*, tingkat keuntungan

yang diperhitungkan adalah nilai pasar saat ini. Sedangkan dalam teori Keynes, tingkat keuntungan yang dimaksud adalah *present value* dari keuntungan di masa depan. Demikian juga dalam hal biaya, jika dalam Teori *Tobin q*, biaya yang dimaksud adalah biaya penggantian, sedangkan dalam teori Keynes, biaya yang dimaksud adalah tambahan biaya atas barang modal.

Dengan demikian, menurut teori *Tobin q*, investasi atau stok kapital yang diinginkan (I_t) dipengaruhi oleh harga pasar (P_m) dan biaya penggantian barang modal (C_R).

$$I_t = f(P_m, C_R) \quad (2.13)$$

dimana; P_m adalah *market price of capital stock* dan C_R adalah *replacement cost of capital stock*.

Dengan memformulasikan kembali persamaan (2.10.) hingga (2.13), akan diperoleh:

$$I_t = f(R, i, C_k, INF, ER, growth, k, Tax, P_m, C_R) \quad (2.14)$$

dimana; R adalah tingkat keuntungan yang diharapkan (*return*), i adalah *interest rate*, C_k dan C_R adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh stok modal, INF adalah inflasi, ER adalah nilai tukar, *growth* adalah perubahan output, k adalah ketersediaan barang modal, *Tax* adalah pajak pendapatan dan P_m adalah *market price of capital stock*.

Mendasarkan pada ketersediaan dan keterbatasan data dari sumber publikasi resmi pemerintah daerah yang terdapat di masing-masing propinsi, maka dari persamaan (2.14) di atas, hanya variabel tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi yang akan digunakan sebagai estimator dalam menentukan perkembangan investasi swasta. Variabel-variabel tersebut, secara teoritis merupakan variabel yang diduga sebagai penentu perkembangan investasi swasta.

Tingkat suku bunga merupakan faktor utama yang menentukan tingkat investasi swasta. Penurunan tingkat bunga kredit investasi akan mendorong kenaikan investasi. Jumlah barang-barang modal yang diminta bergantung pada tingkat bunga yang mengukur biaya dari dana yang digunakan untuk membiayai investasi. Agar proyek investasi menguntungkan, hasilnya (penerimaan dari kenaikan produksi barang dan jasa masa depan) harus melebihi biayanya (pembayaran untuk dana pinjaman). Jika suku bunga meningkat, lebih sedikit proyek investasi yang menguntungkan dan jumlah barang-barang investasi yang diminta akan turun. Fungsi investasi mengkaitkan jumlah investasi pada tingkat bunga investasi tertentu karena tingkat bunga adalah biaya pinjaman (Mankiw, 2001).

Investor pada dasarnya bersedia membayar bunga untuk kegiatan investasi manakala dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan yang nantinya diharapkan bisa menghasilkan penerimaan yang lebih besar daripada jumlah yang diinvestasikan. Kelebihan penerimaan di atas pengeluaran (keuntungan) inilah yang merupakan daya tarik bagi investor untuk melakukan investasi dan sekaligus sebagai sumber untuk membayar bunga. Kondisi tersebut terjadi manakala biaya dana (bunga) yang berlaku dipasar relatif murah. Studi terdahulu tentang pengaruh bunga terhadap investasi dapat dilihat pada hasil studi terdahulu dari Chhibber dan Wijnbergen (1988), Carruth, Dickirson dan Henley (1998), Dehn (2000), Seruvatu dan Jayaraman (2001), Agrawal (2001), Susi Suwarsih (2004), Valila dan Mehrotra (2005), Lesotlho (2006), Khan dan Khan (2007), Wiwin Setyari dkk. (2008) dan Dwi Tantiasti (2008), yang menyatakan bahwa tingkat bunga pinjaman berpengaruh negatif terhadap investasi swasta.

Secara empiris, inflasi dan nilai tukar merupakan faktor penentu investasi swasta secara negatif. Pengaruh inflasi terhadap investasi swasta dapat dilihat pada hasil empiris Seruvatu dan Jayamaran (2001), Ribeiro dan Teixeira (2001), Roberts (2003), Acosta dan Roza (2005), Lesotlho (2006), Jongwanich dan Kohpaiboon (2006) serta Wiwin Setyari dkk. (2008), yang memperlihatkan bukti empiris akan adanya pengaruh negatif dan signifikan variabel inflasi terhadap investasi swasta. Sedangkan, Seruvatu dan Jayamaran (2001), Ribeiro dan Teixeira (2001), Susi Suwarsih (2004), Acosta dan Roza (2005), Khan dan Khan (2007), serta Wiwin Setyari dkk. (2008), memperlihatkan bukti empiris akan adanya pengaruh negatif dan signifikan nilai tukar terhadap investasi swasta. Temuan empiris tersebut menegaskan bahwa semakin meningkat inflasi dan nilai tukar (depresiasi), maka investasi swasta akan semakin menurun.

Sementara itu, hasil penelitian empiris dari Carruth, Dickerson dan Henley (1997), Dehn (2000), Ribeiro dan Teixeira (2001), Ouattara (2004), Lesotlho (2006) serta Jongwanich dan Kohpaiboon (2006), menemukan fakta empiris bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta.

Disamping variabel-variabel di atas, investasi swasta juga dipengaruhi oleh investasi pemerintah dan ketersediaan kredit investasi. Ada dua pandangan terkait dengan pengaruh investasi pemerintah terhadap investasi swasta, dan keduanya saling bertentangan. Pandangan pertama setuju adanya dampak *crowding-out* dari investasi pemerintah terhadap investasi swasta. Pandangan kedua menolak pendapat pertama dan menyatakan adanya dampak *crowding-in* dari investasi pemerintah terhadap investasi swasta.

Beberapa hasil studi empiris mengenai dampak *crowding-out* dari investasi pemerintah terhadap investasi swasta, misalnya dapat dilihat dari hasil

penelitian Acosta dan Roza (2005), Lesotlho (2006) serta Jongwanich dan Kohpaiboon (2006). Menurut mereka, adanya investasi pemerintah telah berdampak *crowding-out* terhadap investasi swasta. Hal tersebut terkait dengan adanya peningkatan beban pajak di masa depan yang harus ditanggung sektor swasta atas investasi pemerintah tersebut. Sementara itu, manfaat yang diterima sektor swasta dari investasi pemerintah relatif sedikit. Beberapa pengeluaran yang kurang bermanfaat adalah investasi atas komponen non infrastruktur seperti; pengeluaran untuk subsidi, belanja rutin, dan investasi disektor non produktif yang tidak memberikan dampak positif bagi produktivitas kerja.

Sementara itu, pendapat yang agak berbeda dapat dilihat dari hasil penelitian Chhibber dan Wijnbergen (1998), Seruvatu dan Jayamaran (2001), Ribeiro dan Teixeira (2001), Ouattara (2004), Khan dan Khan (2007) serta Dwi Tantiasti (2008) yang mengatakan adanya dampak *crowding-in* dari investasi pemerintah terhadap investasi swasta. Menurut mereka, adanya pengeluaran investasi sektor publik pemerintah untuk bidang irigasi, transportasi, komunikasi, kesehatan dan pendidikan telah memberikan dampak yang positif bagi investasi swasta.

Sebagaimana juga dikemukakan oleh **Todaro** (2003), bahwa investasi pemerintah yang besar dalam bidang MOS (*Modal Overhead Sosial*) dengan memasukkan pengeluaran investasi ke dalam bidang-bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, perhubungan, angkutan dan bidang lainnya yang menyangkut hajat orang banyak, seperti; pembangunan jalan raya, jalan kereta api, proyek pembangkit tenaga listrik, air bersih dan pengairan akan mendorong investasi swasta dikemudian hari dan terutama dampak ekonomi terhadap penyediaan kesempatan kerja, menaikkan pendapatan dan selanjutnya

meningkatkan kapasitas perekonomian. Penyediaan investasi pemerintah yang seperti itu, membantu meningkatkan tenaga kerja yang trampil dan memperlancar produksi, perdagangan dan usaha bisnis.

Dilihat dari ketersediaan dana, menurut Romer (2006), kebanyakan kapital umumnya tidak dimiliki melainkan disewa. Kredit investasi biasanya diberlakukan untuk memberikan insentif bagi perusahaan untuk berinvestasi. Ketersediaan kredit investasi akan membawa industri pada tingkat stok kapital yang lebih tinggi, sehingga mendorong pada peningkatan investasi. Adalah Chhibber dan Wijnbergen (1988), Dehn (2000), Seruvatu dan Jayaraman (2001), Ribeiro dan Teixeira (2001), Ouattara (2004), Acosta dan Roza (2005), Lesotlho (2006), Jongwanich dan Kohpaiboon (2006) serta Khan dan Khan (2007), yang membuktikan secara empiris mengenai dampak positif kredit investasi terhadap investasi swasta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, faktor penentu perkembangan investasi swasta (IS) diformulasikan sebagai fungsi dari :

$$IS_t = \beta_{10} + \beta_{11}GRT_t + \beta_{12}i_t + \beta_{13}IP_t + \beta_{14}INF_t + \beta_{15}CR_t + \beta_{16}ER_t + \varepsilon_t \quad (2.15)$$

dengan; $\beta_{11} > 0$, $\beta_{12} < 0$, $\beta_{13} > 0$, $\beta_{14} < 0$, $\beta_{15} > 0$, dan $\beta_{16} < 0$

Dimana, GRT adalah pertumbuhan ekonomi, i adalah tingkat bunga, IP adalah investasi pemerintah, INF adalah tingkat inflasi, CR adalah kredit investasi dan ER adalah nilai tukar.

2.2.2. Model Pertumbuhan Ekonomi

Dalam model pertumbuhan, terutama mengenai pengaruh dari investasi swasta terhadap pertumbuhan akan mendasarkan pada alur pikir model teori pertumbuhan baru (*new growth theory*), khususnya model modal manusia. Dalam teori pertumbuhan baru model modal manusia yang menekankan pentingnya kemajuan teknologi dan akumulasi modal manusia. Dikatakan pula bahwa

pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang hanya dapat tercipta apabila ada kemajuan teknologi yang endogen dan pengembangan sumber daya manusia [Todaro (2003), Romer 2006)]. Kemajuan teknologi tentunya harus disertai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Sedangkan modal manusia yang dimaksud disini yaitu; kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan per pekerja.

Salah satu asumsi dari *model modal manusia* adalah bahwa *output* diproduksi dengan menggunakan tiga input yaitu modal (K), modal manusia (HC) dan tenaga kerja efektif (A). Model ini juga menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki pekerja, semakin tinggi pula modal manusia yang dimilikinya. Dilihat dari kenyataan aspek ekonomi mikro bahwa setiap tambahan tahun pendidikan meningkatkan upah individu dengan persentase yang sama. Jika upah mencerminkan jasa tenaga kerja yang individu berikan maka *output* meningkat melalui penciptaan modal manusia.

Teori pertumbuhan endogen (*new growth theory*) menekankan bahwa sumber-sumber pertumbuhan output tidak hanya didorong investasi fisik seperti banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, tetapi yang jauh lebih penting adalah investasi sumber daya manusia (*human capital*). [(Todaro (2003), Romer (2006)].

Implikasi dari *new growth theory* dalam jangka panjang adalah investasi sangat penting dan merupakan faktor penentu utama untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan pertumbuhan itu sendiri didorong oleh adanya faktor eksternal yang bersifat positif dari investasi dan produksi. Berdasarkan *new growth theory*, pertumbuhan ekonomi merupakan fungsi dari modal manusia (HC), tenaga kerja (L) dan kapital (K), dimana K, terdiri dari dari investasi swasta (IS) dan investasi pemerintah (IP).

Modal manusia (*human capital*, HC) dalam *new growth theory* memiliki peranan penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Model modal manusia menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki pekerja, semakin tinggi pula modal manusia yang dimilikinya (Romer, 2006). Dapat dikatakan bahwa modal manusia merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong meningkatnya produktivitas kerja dan output yang dihasilkan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan PDB riil. Sebaliknya, ketika kualitas tenaga kerja rendah maka tenaga kerja yang bersangkutan menjadi tidak produktif dan tidak optimal dalam menghasilkan *output*. Fakta empiris mengenai pengaruh positif *human capital* terhadap pertumbuhan ekonomi, misalnya dapat dilihat dari hasil empiris Lachler dan Aschauer (1998), Gylfason dan Zoega (2000), serta Schularick dan Steger (2007).

Meningkatnya investasi akan mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru dan bermuara pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jhingan (2003) berpendapat bahwa investasi merupakan suatu alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di negara sedang berkembang. Dengan demikian jelaslah bahwa penting dan strategisnya peranan investasi untuk menciptakan kesempatan kerja dalam pertumbuhan ekonomi.

Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai peran ganda yang dimiliki investasi. Pertama, investasi menciptakan pendapatan, kedua investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal.

Setiap peningkatan investasi swasta akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output. Investasi swasta diarahkan kepada usaha untuk memperluas skala produksi dan usaha pemanfaatan secara penuh sumber-sumber yang ada dalam suatu wilayah, sehingga investasi dapat menaikkan output nasional dan pertumbuhan ekonomi. **Todaro** (2003) menganggap investasi swasta sebagai komponen perekonomian yang tidak stabil karena sifatnya yang fluktuatif. Karenanya, investasi swasta ditempatkan sebagai faktor penentu terpenting untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian empiris mengenai pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, misalnya dapat dilihat dari Khan dan Reinhart (1990), Sturm, Kuper, dan Haan (1996), Lachler dan Aschauer (1998), Krishna (1997) serta M'Amanja dan Morrisey (2006).

Dampak investasi pemerintah terhadap output dapat ditelusuri dari pendapat Barro dan Sala-i-Martin (1992), yang mengatakan pula bahwa pengeluaran produktif pemerintah akan berkorelasi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah produktif yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi meliputi investasi fisik, investasi sumberdaya manusia dan investasi R & D. Jenis pengeluaran pemerintah seperti inilah yang berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Cziraky (2004) bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan melalui dua mekanisme : *Pertama*, melalui peningkatan kuantitas faktor produksi dan kemudian menyebabkan peningkatan dalam pertumbuhan output. Contoh pengeluaran dalam kategori ini disebut investasi publik dalam infrastruktur dan investasi dalam perusahaan publik.

Kedua, yaitu secara tidak langsung melalui peningkatan tambahan produktivitas faktor-faktor produksi yang disediakan oleh sektor swasta. Contoh pengeluaran dalam kategori ini adalah investasi dalam pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor yang mempengaruhi akumulasi modal manusia.

Kaitannya dugaan adanya kausalitas antara investasi pemerintah dan investasi swasta dengan pertumbuhan ekonomi, dapat dikemukakan pula bahwa pengeluaran pemerintah atau investasi pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, perhubungan, angkutan dan bidang lainnya yang menyangkut hajat orang banyak, seperti; penerangan, air bersih, tenaga listrik, pengairan dan sistem *drainase* tentu akan mendorong investasi swasta sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan *output* (pertumbuhan ekonomi). Dengan demikian, pengaruh investasi pemerintah terhadap investasi swasta adalah pengaruh tidak langsung. Penggunaan variabel investasi pemerintah sebagai estimator dari pertumbuhan ekonomi sebagaimana dapat dilihat pada hasil penelitian Khan dan Reinhart (1990), Cullison (1993), Sturm, Kuper, dan Haan (1996), Lachler dan Aschauer (1998) serta M'Amanja dan Morrissey (2006).

Selanjutnya, variabel tenaga kerja (TK), diduga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin sedikit penduduk yang menganggur (*full employment*) maka pertumbuhan PDB riil akan meningkat sejalan dengan meningkatnya *output* yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Teori ekonomi klasik secara umum mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penduduk dan produktivitas kerja. Demikian juga dalam teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik Solow-Swan, dikemukakan bahwa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain tabungan dan kemajuan teknologi adalah kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Sedangkan dalam teori

pertumbuhan baru (*new growth*) dijelaskan tentang pentingnya peran pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan efektifitas tenaga kerja dalam mempengaruhi pertumbuhan. Tenaga kerja yang berkualitas dan efektif merupakan faktor yang dapat mendorong meningkatnya produktivitas kerja dan output yang dihasilkan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika kualitas tenaga kerja rendah dan tidak dapat dimanfaatkan – menganggur – maka tenaga kerja yang bersangkutan menjadi tidak produktif dan tidak optimal dalam menghasilkan *output*. Ketika tingkat pengangguran makin meningkat, maka jumlah *output* yang dihasilkan akan menurun, sehingga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara empiris, dibuktikan pula bahwa tenaga kerja berkualitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dapat dilihat pada hasil empiris Khan dan Reinhart (1990), Sturm, Kuper, dan Haan (1996), Sinha dan Sinha (1997), Lachler dan Aschauer (1998) dan Sinha (1999).

Berdasarkan hal di atas, model pertumbuhan ekonomi (GRT) diformulasikan sebagai fungsi dari :

$$GRT_t = \beta_{20} + \beta_{21}K_t + \beta_{22}HC_t + \beta_{23}TK_t + \mu_t \quad (2.16)$$

dimana; HC adalah modal manusia (*human capital*), K adalah *capital*, dan TK adalah tenaga kerja.

Dengan mengasumsikan bahwa kapital (K) dapat dibentuk oleh investasi sektor swasta (IS) dan investasi pemerintah (IP), sehingga persamaan (2.16.), menjadi :

$$GRT_t = \beta_{20} + \beta_{21}IS_t + \beta_{22}IP_t + \beta_{23}HC_t + \beta_{24}TK_t + \mu_t \quad (2.17)$$

dengan; $\beta_{21} > 0$, $\beta_{22} > 0$, $\beta_{23} > 0$, dan $\beta_{24} > 0$

Dimana; IS adalah investasi swasta dan IP adalah investasi pemerintah.

2.2.3. Model Kesempatan Kerja

Model kesempatan kerja dapat dijelaskan dari dua sudut pandang, yaitu dari teori klasik dan teori keynes. Teori Klasik mengemukakan pandangan mereka mengenai kesempatan kerja, yaitu bahwa tingkat output dan harga keseimbangan hanya bisa dicapai kalau perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*). Sementara, keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh (*equilibrium with full employment*) hanya bisa dicapai melalui bekerjanya mekanisme pasar bebas. Jadi adanya mekanisme pasar yang bekerja secara bebas tanpa campur tangan pemerintah itu merupakan *necessary condition* bagi tercapainya keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh. Keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh tersebut menurut kaum klasik merupakan kondisi yang ideal atau normal dari suatu perekonomian. Jika sampai terjadi pengangguran dalam perekonomian, maka hal tersebut hanyalah gejala atau fenomena yang bersifat sementara, dimana dalam jangka panjang akan hilang dengan sendirinya melalui bekerjanya secara bebas mekanisme pasar itu.

Dalam pandangan klasik, perekonomian tidak akan kekurangan permintaan *agregat*, yang berarti segala barang yang diproduksi akan dapat dijual, sedangkan tingkat produksi nasional dan kegiatan ekonomi ditentukan oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Atas dasar tersebut maka jumlah produksi (*output*) dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesempatan kerja. Fungsi produksi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara jumlah produksi yang akan dihasilkan dengan jumlah faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi.

Masih dalam pandangan klasik, tingkat harga dan upah dalam perekonomian dianggap cukup fleksibel, artinya harga-harga barang dan upah tenaga kerja sewaktu-waktu dengan cepat disesuaikan (kalau diperlukan). Adanya

fleksibilitas tingkat harga dan upah inilah menurut kaum klasik yang menjamin selalu tercapainya keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh dalam perekonomian. Oleh karenanya, menurut pandangan klasik, yang langsung menentukan *volume employment* dan output bukanlah tingkat harga tetapi struktur intern dari harga. Tegasnya keputusan produsen mengenai output dan *employment* adalah tergantung pada hubungan antara upah dan harga yang dibayar oleh pembeli outputnya. Setiap penjual menghasilkan output sampai pada tingkat upah marginalnya sama dengan harga yang sudah tertentu dan produsen akan mempekerjakan tenaga kerja (input) sampai pada titik dimana produk marginal sama dengan upah riil yaitu upah uang yang dinilai menurut tingkat harga output.

Sementara dari sisi penawaran, individu pekerja dipandang menganut prinsip maksimisasi kepuasan. Mereka akan mempertimbangkan penggunaan waktu mereka antara bekerja atau santai. Meningkatnya upah identik dengan meningkatnya harga santai, sebagaimana hukum permintaan bahwa kenaikan harga suatu barang atau faktor akan cenderung menurunkan jumlah barang atau faktor yang diminta, maka akan makin banyak jasa pekerja yang ditawarkan pada tingkat upah makin tinggi.

Sedangkan kesempatan kerja menurut pandangan **Keynes** berbeda dengan klasik. Menurut pandangan kelompok ini, kegiatan perekonomian tergantung kepada segi permintaan, yaitu tergantung kepada perbelanjaan atau pengeluaran agregat yang dilakukan perekonomian pada suatu waktu tertentu. Diartikan dengan pengeluaran agregat adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sesuatu perekonomian dalam suatu periode tertentu dan biasanya diukur untuk satu tahun tertentu.

Semakin besar perbelanjaan agregat (permintaan agregat) yang dilakukan dalam perekonomian, semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja yang dicapai. Perbelanjaan agregat (permintaan agregat) dalam kenyataannya tidak selalu mencapai tingkat perbelanjaan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Oleh sebab itu, pengangguran akan selalu berlaku. Untuk mengatasinya pemerintah perlu mempengaruhi perbelanjaan agregat, yang dilakukan dengan menjalankan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Dalam hal ini, diasumsikan bahwa terdapat hubungan antara output nasional dan kesempatan kerja nasional. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka kesempatan kerjapun mengalami kenaikan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka kesempatan kerjapun akan mengalami penurunan. Berdasarkan penjabaran tersebut diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif dengan kesempatan kerja. Adalah Walterskirchen (1999), Boyke T.H. Sitomorang (2005), Sri Roshidayati (2006), Choi (2007) dan Jayaraman dan Singh (2007), yang menemukan fakta empiris bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja.

Namun demikian, dalam kasus negara tertentu kadangkala terjadi kondisi dimana pertumbuhan ekonomi berjalan tidak searah dengan kesempatan kerja, yang berarti pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi tidak diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini kerap terjadi pada negara-negara berkembang yang mengalami pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan pergeseran struktur industri dari *labor incentive* menuju *capital incentive*.

Robinson (2004) mengemukakan bahwa kesempatan kerja merupakan fungsi dari investasi, artinya besar kecilnya pertambahan kesempatan kerja ditentukan dari besar kecilnya investasi, baik investasi swasta maupun investasi pemerintah. Lebih lanjut Robinson mengatakan bahwa investasi pada industri atau sektor-sektor perekonomian yang strategis akan menciptakan perluasan pasar dan menghasilkan kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kesempatan kerja dan pertumbuhan industri yang menjalar dari sektor utama ke sektor pendukungnya dari satu industri ke industri lainnya.

Dalam pandangan Keynes, peranan investasi dalam membentuk permintaan efektif sangat penting, hal tersebut disebabkan kesempatan kerja total tergantung pada permintaan total dan pengangguran timbul karena kekurangan permintaan total. Permintaan efektif memanifestasi diri sendiri dalam bentuk pengeluaran pendapatan. Sewaktu kesempatan kerja bertambah, pendapatan bertambah, yang diikuti oleh konsumsi yang bertambah, hanya saja jumlahnya kurang dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Maka agar dapat mencukupi, permintaan untuk mempertahankan kesempatan kerja harus diperoleh dari tambahan dalam investasi nyata (Winardi, 1995).

Studi terdahulu tentang pengaruh investasi swasta terhadap kesempatan kerja sebagaimana dapat dilihat dari hasil penelitian Bromstrom dan Kokko (1997), Fitzroy dan Funke (1999) serta Jayaraman dan Singh (2007), yang menyatakan bahwa investasi swasta memiliki pengaruh yang positif terhadap kesempatan kerja.

Dalam hal upah tenaga kerja (W), pandangan Keynes berbeda dengan klasik dan mengenai harga dan upah yang dianggap luwes atau fleksibel. Menurut Keynes beranggapan bahwa penurunan upah cenderung tidak luwes (*rigid*).

Ketidakluwesannya itu disebabkan oleh faktor-faktor institusional, seperti perjanjian serikat buruh, undang-undang upah minimum dan perjanjian implisit (antara majikan dan buruh). Dalam periode menurunnya permintaan total terhadap barang dan jasa, perusahaan-perusahaan bereaksi terhadap penurunan penjualan dengan mengurangi produksi dan memberhentikan buruh, bukan dengan memotong upah. Menurut Keynes, penurunan harga pun sama kakunya. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa penurunan permintaan efektif pada awalnya menyebabkan penurunan produksi dan kesempatan kerja bukan penurunan harga.

Kemudian besarnya upah mempunyai hubungan negatif terhadap kesempatan kerja. Jika upah mengalami kenaikan maka kesempatan kerja mengalami penurunan dan sebaliknya jika upah mengalami penurunan maka kesempatan kerja akan mengalami kenaikan. Adalah Bromstrom dan Kokko (1997), Fitzroy dan Funke (1999), Bambang Setiaji dan Sudarsono (2004), Suedekum dan Blien (2005), Boyke T.H. Sitomorang (2005), Sri Roshidayati (2006) dan Choi (2007), yang membuktikan secara empiris bahwa tingkat upah memiliki pengaruh negatif terhadap kesempatan kerja.

Berdasarkan tinjauan teoritis dan studi terdahulu di atas, dapat dikemukakan bahwa kesempatan kerja merupakan fungsi dari investasi swasta (IS_t), pertumbuhan ekonomi (GRT) dan tingkat upah riil tenaga kerja (W). Dalam penelitian ini, dampak investasi yang akan dikaji pengaruhnya secara langsung terhadap kesempatan kerja ($EMPL$) adalah investasi swasta (IS) sehingga fungsinya sebagai berikut :

$$EMPL_t = \beta_{30} + \beta_{31} IS_t + \beta_{32} GRT_t + \beta_{33} W_t + \varepsilon_3 \quad (2.18)$$

dengan; $\beta_{31} > 0$, $\beta_{32} > 0$, dan $\beta_{33} < 0$

dalam model di atas, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan upah secara bersama-sama mempengaruhi terhadap kesempatan kerja.

2.2.4. Model Distribusi Pendapatan

Dalam menjelaskan model distribusi pendapatan akan mengadopsi pada beberapa studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya, Misalnya; dari Blejer dan Guerrero (1990), Glomm dan Ravikumar (1992), Hebbel, Serven dan Solimanu (1996), Ahn (1997), Sarel (1997), Jha (1998), Ahmad Fahrezi Zali (1999), Bigsten dan Levin (2000), Siti Parhah (2006), Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2008) serta Karbasi dan Mojarad (2008). Beberapa variabel independen yang digunakan mereka sebagai estimator dari distribusi pendapatan misalnya adalah; variabel inflasi, pengangguran, investasi (swasta dan Pemerintah) dan pertumbuhan output.

Literatur mengenai pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap distribusi pendapatan dalam beberapa *textbook* tidak menjelaskan secara khusus mengenai permasalahan tersebut. Berkaitan dengan itu, studi Galli dan Hoeven (2001) mengenai pengaruh inflasi terhadap distribusi pendapatan dapat dijadikan sebagai referensi. Inflasi yang rendah dalam jangka panjang memperlambat menurunnya kekuatan daya beli. **Pertama**, biasanya orang miskin mempunyai kemampuan yang lebih kecil untuk melindungi standar hidup dari *inflationary shock* daripada orang kaya. Faktanya, orang miskin memegang proporsi kekayaan dalam bentuk *cash* yang lebih besar daripada orang kaya, sehingga daya beli orang miskin berkurang akibat inflasi. **Kedua**, inflasi yang rendah memperlambat menurunnya nilai riil dari *non-indexed public transfer*, seperti pendapatan yang diterima oleh penganggur dan pensiunan. Ketika transfer yang diterima dimiliki oleh bagian penduduk miskin, maka ketimpangan akan berkurang. **Ketiga**, ketika hutang privat dalam bentuk nominal, inflasi yang rendah memperlambat menurunnya nilai riil hutang *privat*. Jika orang miskin adalah peminjam, maka kondisi ini akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Negara yang sukses menurunkan inflasi, dari inflasi yang tinggi akan mendapatkan keuntungan bagi distribusi pendapatan, yaitu melalui lambatnya penurunan daya beli. Sebaliknya negara yang memiliki inflasi rendah, maka turunnya inflasi akan memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan. Studi terdahulu yang menguji pengaruh inflasi terhadap distribusi pendapatan (diukur menggunakan gini rasio) dapat dilihat pada penelitian Blejer dan Guerrero (1990) dan Ahn (1997), yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio).

Dampak lanjutan dari inflasi adalah meningkatnya pengangguran. Biasanya biaya yang diperlukan untuk memberhentikan pekerja yang mempunyai *skill* tinggi lebih besar daripada pekerja yang mempunyai *skill* rendah sehingga secara umum pengangguran cenderung mempengaruhi pekerja yang mempunyai *skill* yang rendah sehingga dalam jangka pendek ketimpangan distribusi pendapatan akan meningkat.

Pengaruh pengangguran terhadap distribusi pendapatan (gini rasio), sebagaimana juga ditemukan dalam hasil penelitian Blejer dan Guerrero (1990) Ahn (1997) dan Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2008) bahwa pengangguran mempunyai hubungan positif dengan ketimpangan distribusi pendapatan (diukur dengan gini rasio). Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin meningkat apabila tingkat pengangguran semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa dengan semakin banyak penganggur maka akan semakin banyak penduduk yang tidak menerima upah yang menyebabkan tingkat kesenjangan semakin lebar. Peningkatan tingkat pengangguran ini mempunyai biaya sosial yang tinggi karena efek terbesar menimpa pekerja yang mempunyai keterampilan rendah. Mereka adalah orang pertama yang menjadi penganggur ketika tingkat pengangguran secara agregat meningkat.

Dornbusch dan Fischer (1994) menyatakan bahwa akibat adanya pengangguran *siklis* akan mengakibatkan hilangnya output potensial karena perekonomian tidak beroperasi pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Secara individu, akibat dari pengangguran adalah hilangnya pendapatan bagi individu tersebut sehingga ketimpangan semakin besar. Menurut Dornbusch dan Fischer secara keseluruhan masyarakat akan mendapat kerugian akibat meningkatnya pengangguran, karena output total akan berada di bawah tingkat potensialnya. Kerugian dengan adanya pengangguran yaitu terjadinya distribusi beban pengangguran yang tidak merata antar penduduk. Pengangguran cenderung terpusat pada kaum miskin, dan hal ini membuat aspek distribusi pendapatan menjadi masalah yang serius.

Selanjutnya, mengenai pengaruh investasi swasta terhadap distribusi pendapatan dapat dijelaskan dari hasil studi empiris Glomm dan Ravikumar (1992), Hebbel, Serven dan Solimano (1996), Sarel (1997), serta Karbasi dan Mojarad (2008). Menurutnya, adanya investasi yang dilakukan oleh swasta maupun pemerintah akan berdampak pada penyediaan kesempatan kerja dan pada pendapatan masyarakat, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat. Demikian juga halnya dalam hasil empiris Blejer dan Guerrero (1990), Glomm dan Ravikumar (1992), Jha (1998), Ahmad Fahrezi Zali (1999), Siti Farhah (2006) dan Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2008), yang mengatakan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah pada investasi publik dalam jangka panjang berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) atau mengurangi ketimpangan (ketidakmerataan) distribusi pendapatan di Indonesia.

Dalam kajian empiris lainnya, ditemukan bukti bahwa distribusi pendapatan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh suatu perekonomian. Misalnya saja dapat dilihat dari studi terdahulu Blejer dan Guerrero (1990), Ahn (1997), Sarel (1997), Jha (1998), Ahmad Fahrezi Zali (1999), Bigsten dan Levin (2000), Siti Farhah serta Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2008). Dikatakan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan perekonomian bagaimanapun akan meningkatkan pendapatan per kapita dan daya beli masyarakatnya. Dengan demikian, adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (diukur oleh gini rasio) atau dapat mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat.

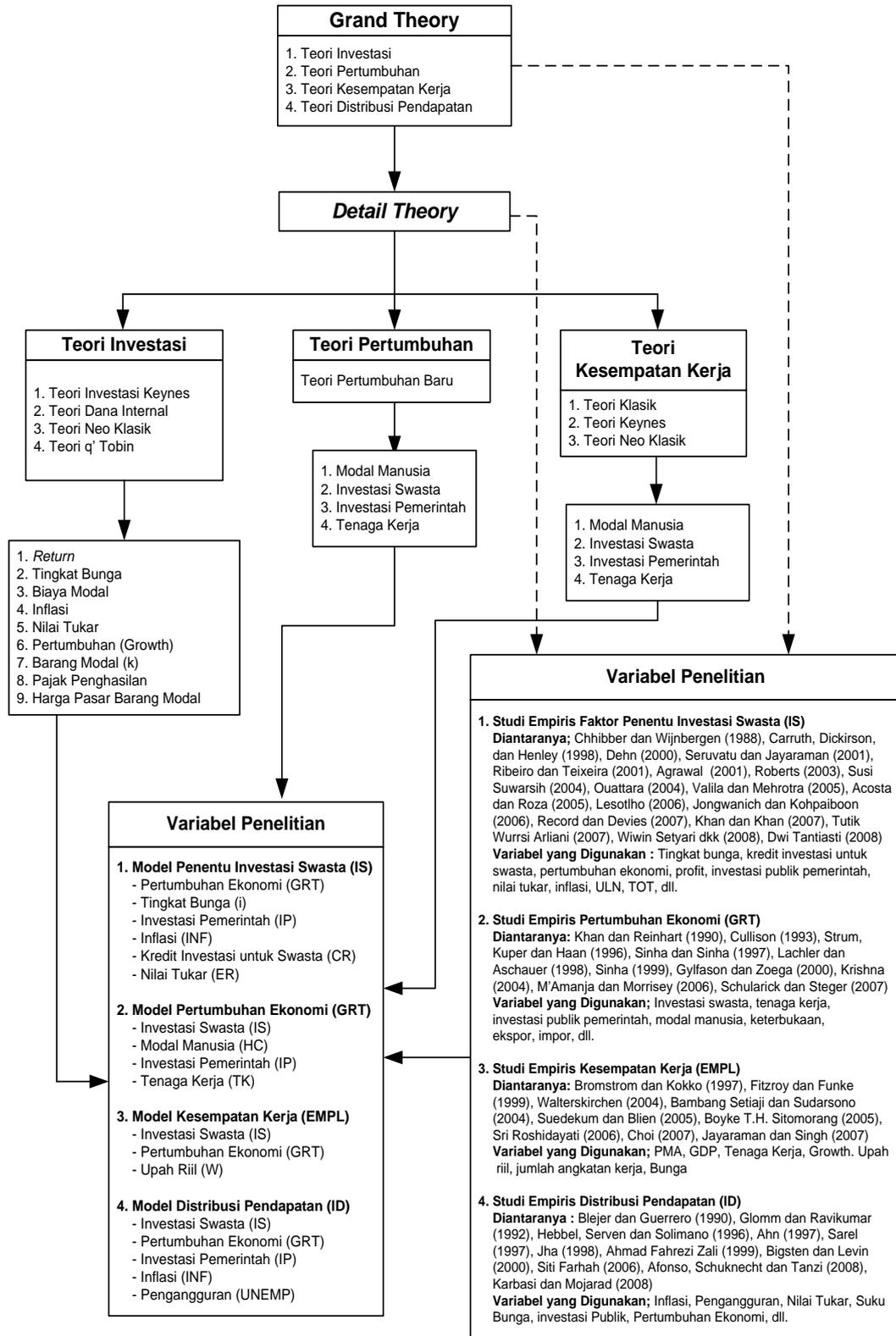
Dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, selanjutnya dapat dibuat formulasi dari model distribusi pendapatan (ID), yaitu:

$$ID_t = \beta_{40} + \beta_{41}IS_t + \beta_{42}GRT_t + \beta_{43}IP_t + \beta_{44}INF_t + \beta_{45}UNEMP_t + \varepsilon_t \quad (2.19)$$

dengan; $\beta_{41} < 0$, $\beta_{42} < 0$, $\beta_{43} < 0$, $\beta_{44} > 0$, dan $\beta_{45} > 0$

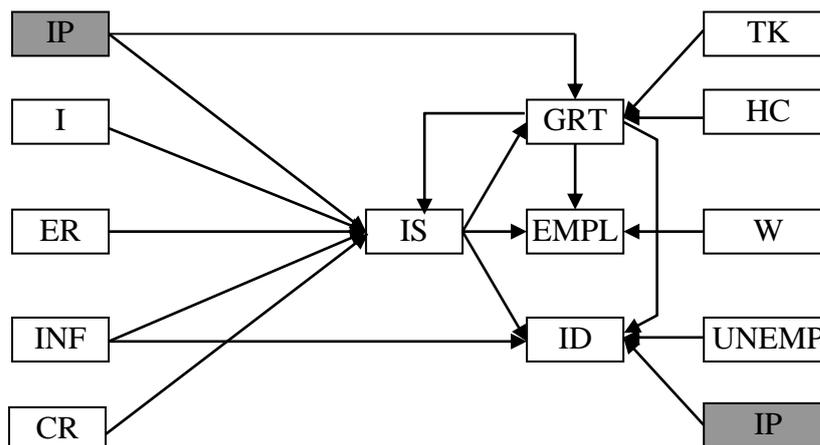
dimana, IS adalah investasi swasta, GRT adalah pertumbuhan output, IP adalah investasi pemerintah, INF adalah tingkat inflasi dan UNEMP adalah tingkat pengangguran.

Berdasarkan tinjauan pustaka, studi empiris dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya dapat dibuat *skema alur pikir* untuk penelitian ini sebagaimana diperlihatkan oleh Gambar 2.2. berikut :



Gambar 2.2.
Skema Alur Pikir

Adapun kerangka pemikiran untuk mengetahui faktor penentu investasi swasta dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan di Indonesia, dapat disarikan sebagai berikut :



Gambar 2.3.
Skema Kerangka Pemikiran

Dimana :

$$IS_t = \beta_{10} + \beta_{11}GRT_t + \beta_{12}i_t + \beta_{13}IP_t + \beta_{14}INF_t + \beta_{15}CR_t + \beta_{16}ER_t + \varepsilon_t \quad (2.20a)$$

$$GRT_t = \beta_{20} + \beta_{21}IS_t + \beta_{22}IP_t + \beta_{23}HC_t + \beta_{24}TK_t + \mu_t \quad (2.20b)$$

$$EMPL_t = \beta_{30} + \beta_{31}IS_t + \beta_{32}GRT_t + \beta_{33}W_t + \varepsilon_3 \quad (2.20c)$$

$$ID_t = \beta_{40} + \beta_{41}IS_t + \beta_{42}GRT_t + \beta_{43}IP_t + \beta_{44}INF_t + \beta_{45}UNEMP_t + \varepsilon_t \quad (2.20d)$$

2.3. Hipotesis Penelitian

Atas dasar latar belakang dan kerangka penelitian dapat dirumuskan hipotesis utama sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, investasi pemerintah, inflasi, ketersediaan kredit investasi dan nilai tukar berpengaruh terhadap investasi swasta, dimana pertumbuhan ekonomi, investasi pemerintah dan ketersediaan

kredit investasi berpengaruh positif terhadap investasi swasta sedangkan inflasi, nilai tukar dan tingkat bunga berpengaruh secara negatif terhadap investasi swasta pada masing-masing Propinsi di Indonesia selama periode penelitian.

dengan; $\beta_{11} > 0$, $\beta_{12} < 0$, $\beta_{13} > 0$, $\beta_{14} < 0$, $\beta_{15} > 0$, dan $\beta_{16} < 0$

2. Investasi swasta, investasi pemerintah, modal manusia dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing Propinsi di Indonesia selama periode penelitian.

dengan; $\beta_{21} > 0$, $\beta_{22} > 0$, $\beta_{23} > 0$, dan $\beta_{24} > 0$

3. Investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah berpengaruh terhadap investasi swasta, dimana investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja sedangkan tingkat upah berpengaruh secara negatif terhadap kesempatan kerja pada masing-masing Propinsi di Indonesia selama periode penelitian.

dengan; $\beta_{31} > 0$, $\beta_{32} > 0$, dan $\beta_{33} < 0$

4. Investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, investasi pemerintah, inflasi dan pengangguran berpengaruh terhadap distribusi pendapatan (rasio gini), dimana investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan investasi pemerintah berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (rasio gini), sedangkan inflasi dan pengangguran berpengaruh secara positif terhadap distribusi pendapatan (rasio gini), pada masing-masing Propinsi di Indonesia selama periode penelitian.

dengan; $\beta_{41} < 0$, $\beta_{42} < 0$, $\beta_{43} < 0$, $\beta_{44} > 0$, dan $\beta_{45} > 0$

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian yang Digunakan

Secara garis besar, objek penelitian ini mencakup 4 (empat) komponen penting, yaitu faktor penentu perkembangan investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan di Indonesia selama periode 1990 hingga 2007. Fokus utama dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap faktor penentu investasi swasta menurut Propinsi di Indonesia (mencakup; pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, investasi pemerintah, tingkat inflasi, ketersediaan kredit investasi untuk sektor swasta dan nilai tukar) serta pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan selama periode penelitian.

Sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris (*explanatory research*). Metode penelitian ini relevan digunakan untuk penelitian sosial yang mencoba melihat, mengukur dan menguji kausalitas antar variabel. Metode penelitian ini juga sesuai digunakan bagi penelitian-penelitian yang diarahkan untuk menguji hipotesis. Sekaran (2000) mengatakan bahwa metode eksplanatoris digunakan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan implikasi permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, aktual dan akurat.

Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dan verifikatif. Pendeskripsian digunakan terhadap data dari masing-masing variabel yang dilakukan secara terstruktur, faktual dan akurat. Sedangkan sifat verifikatif yaitu meneliti hubungan, keterkaitan dan pengaruh antara variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yang diteliti. Dalam kaitan verifikatif, dilakukan pengujian statistik dan ekonometrik untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

3.2. Operasionalisasi Variabel

Definisi operasional variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini adalah :

1. Investasi Swasta (IS)

Investasi swasta adalah besarnya total nilai realisasi investasi swasta berdasarkan propinsi di Indonesia yang terdiri dari PMA dan PMDN. Satuannya diukur dalam triliun rupiah.

2. Investasi pemerintah (IP).

Investasi pemerintah adalah besarnya total nilai realisasi investasi pemerintah atau pengeluaran pemerintah propinsi untuk infrastruktur barang modal pada setiap periode. Satuannya diukur dalam triliun rupiah.

3. Tingkat Bunga (I)

Tingkat bunga adalah besarnya nilai bunga kredit investasi bank umum berdasarkan propinsi. Satuannya dalam persentase.

4. Pertumbuhan Ekonomi (GRT)

Pertumbuhan ekonomi adalah besarnya nilai pertumbuhan PDRB Propinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan harga konstan 2000. Satuannya dalam persentase.

5. Kredit Investasi untuk Swasta (CR)

Kredit investasi untuk swasta adalah ketersediaan kredit investasi untuk sektor swasta dari lembaga keuangan dan perbankan berdasarkan Propinsi di Indonesia. Satuannya dalam milyar rupiah.

6. Nilai Tukar (ER).

Nilai tukar adalah besarnya nilai kurs riil rupiah terhadap dollar Amerika yang berlaku dimasing-masing ibu kota propinsi. Satuannya dalam rupiah.

7. Tenaga Kerja (TK).

Tenaga kerja adalah proporsi penduduk yang bekerja (tenaga kerja) di sektor formal terhadap jumlah penduduk berdasarkan propinsi di Indonesia. Satuannya dalam persentase.

8. Tingkat Kesempatan Kerja (EMPL).

Kesempatan kerja adalah proporsi dari jumlah tenaga kerja bekerja yang hanya bekerja di sektor formal terhadap angkatan kerja berdasarkan propinsi di Indonesia. Satuannya dalam persentase.

9. Inflasi (INF).

Inflasi adalah besarnya tingkat inflasi yang dihitung berdasarkan IHK yang terjadi berdasarkan propinsi di Indonesia. Satuannya dalam persentase.

10. Pengangguran (UNEMP).

Pengangguran adalah penduduk berdasarkan propinsi yang masuk dalam usia angkatan kerja, tetapi tidak bekerja karena sedang mencari pekerjaan (menganggur). Data yang digunakannya adalah proporsi penganggur terhadap angkatan kerja berdasarkan propinsi di Indonesia Satuannya dalam persentase.

11. Upah Riil (W).

Upah riil adalah besarnya rata-rata upah riil yang diterima oleh tenaga kerja sektor formal dalam masa satu bulan kerja pada masing-masing propinsi di Indonesia. Satuannya dalam juta rupiah.

12. Modal Manusia (HC).

Modal manusia akan diproksi menggunakan indeks tingkat pendidikan angkatan kerja dari SD hingga Perguruan Tinggi. Satuannya dalam bentuk indeks. Variabel modal manusia diukur berdasarkan proporsi tingkat pendidikan yang ditamatkan angkatan kerja dikalikan dengan lamanya angkatan kerja menempuh pendidikan, perhitungannya akan digunakan indeks pendidikan (IE) dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$IE = \sum(F_i \times LP)$$

Dimana :

IE = Indeks pendidikan (*Index of Education*)

F = Proporsi angkatan kerja berdasarkan kelompok pendidikan ke-i

LP = Lamanya angkatan kerja menempuh pendidikan, yaitu; tamatan
SD = 6, SLTP = 9, SLTA = 12, Diploma = 15, Universitas = 19

i = SD, SLTP, SLTA, DIPLOMA, UNIVERSITAS

13. Distribusi Pendapatan (ID).

Distribusi pendapatan memperlihatkan tingkat pemerataan pendapatan yang diterima oleh masyarakat pada masing-masing propinsi di Indonesia. Variabel distribusi pendapatan akan diukur menggunakan gini rasio. Satuannya dalam bentuk indeks. Kelemahan penggunaan koefisien gini sebagai indikator pemerataan di Indonesia, adalah basis gini yang dipublikasikan oleh BPS, datanya diambil dari data pengeluaran penduduk sehingga akan menghasilkan data yang relatif lebih stabil dibandingkan data pendapatan. Akibatnya variasi perubahan data tiap periode menjadi kecil dan

tidak mencolok. Kondisi tersebut akan berbeda manakala menggunakan data berbasis pendapatan. Namun demikian, mengingat data distribusi pendapatan berdasarkan propinsi hanya tersedia dalam bentuk koefisien gini, maka kondisi tersebut merupakan salah satu kelemahan dalam disertasi ini.

Apabila dibuat operasionalisasi variabel, secara lebih terperinci dapat dilihat sebagaimana Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1.
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Pengukuran	Simbol	Satuan	Skala
1.	Investasi swasta	Besarnya total nilai realisasi investasi swasta berdasarkan propinsi di Indonesia yang terdiri dari PMA dan PMDN	IS	Triliun Rp	Rasio
2.	Investasi pemerintah	Besarnya total nilai realisasi investasi pemerintah atau pengeluaran pemerintah propinsi untuk infrastruktur barang modal pada setiap periode.	IP	Triliun Rp	Rasio
3.	Tingkat Bunga	Besarnya tingkat bunga kredit investasi pada bank umum berdasarkan propinsi	I	Persen	Rasio
4.	Pertumbuhan Ekonomi	Besarnya nilai pertumbuhan PDRB propinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan harga konstan 2000	GRT	Persen	Rasio
5.	Kredit investasi untuk Swasta	Ketersediaan kredit investasi untuk sektor swasta dari lembaga perbankan berdasarkan propinsi di Indonesia	CR	Milyar Rp	Rasio
6.	Nilai tukar	Besarnya nilai kurs riil mata uang rupiah terhadap dollar Amerika yang berlaku di ibukota propinsi	ER	Rupiah	Rasio
7.	Tenaga Kerja	Proporsi jumlah penduduk yang bekerja (tenaga kerja) di sektor formal terhadap jumlah penduduk berdasarkan propinsi di Indonesia	TK	Persen	Rasio
8.	Tingkat Kesempatan Kerja	Proporsi jumlah tenaga kerja bekerja hanya di sektor formal terhadap angkatan kerja berdasarkan propinsi di Indonesia	EMPL	Persen	Rasio
9.	Inflasi	Besarnya tingkat inflasi yang dihitung berdasarkan IHK pada masing-masing propinsi di Indonesia	INF	Persen	Rasio
10.	Pengangguran	Proporsi penduduk yang menganggur terhadap angkatan kerja	UNEMP	Persen	Rasio
11.	Upah riil	Besarnya rata-rata upah riil yang diterima oleh tenaga kerja sektor formal dalam masa satu bulan kerja pada masing-masing propinsi di Indonesia	W	Juta Rupiah	Rasio
12.	Modal Manusia	Diproksi menggunakan indeks tingkat pendidikan angkatan kerja dari SD hingga Perguruan Tinggi	HC	Indeks	Rasio
13.	Distribusi Pendapatan	Tingkat pemerataan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di setiap propinsi diukur menggunakan gini rasio	ID	Indeks	Rasio

3.3. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data panel yaitu data runtun waktu (*time series*) tahunan dan data *cross section* untuk masing-masing propinsi yang dikumpulkan melalui kegiatan *survey* kepustakaan dari beberapa sumber publikasi.

Keseluruhan data sekunder tersebut diperoleh dari publikasi resmi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), Biro Pusat Statistik (BPS), Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (BKPM RI) dan berbagai lembaga terkait lainnya. Adapun periode datanya antara tahun 1990 hingga 2007, meliputi data tentang; investasi publik pemerintah, tingkat inflasi, ketersediaan kredit untuk investasi swasta, nilai tukar, investasi swasta, pertumbuhan ekonomi (atas harga konstan 2000), kesempatan kerja, distribusi pendapatan, *human capital*, tenaga kerja, tingkat upah riil, dan pengangguran berdasarkan data masing-masing propinsi di Indonesia.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan ke dalam tabel-tabel yang telah dipersiapkan sesuai dengan variabel-variabel yang teridentifikasi dalam kerangka analisis. Tabulasi dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yaitu; (1) tabel untuk data dasar, (2) tabel untuk pengolahan data, dan (3) tabel hasil olahan atau hasil analisis yang akan disajikan dalam laporan.

Untuk pengolahan data, akan dilakukan menggunakan dua *software*, yaitu *MS-Excell* untuk input dan olah data, serta *Eviews 5.1* untuk estimasi parameter, pengujian asumsi dasar dan pengujian validitas model.

3.4. Model Analisis dan Rancangan Uji Hipotesis

3.4.1. Model Analisis

Model analisis yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) adalah model persamaan struktural (*structural equation model*) dengan menggunakan data panel, yaitu penggabungan data *time series* dan *cross section*. Dimaksudkan dengan data panel disini adalah data dari hasil observasi entitas yang berbeda (propinsi di Indonesia) dimana variabel tersebut diukur sepanjang beberapa tahun tertentu. Sedangkan cara yang digunakan untuk menaksir model tersebut dengan pendekatan model efek random (*random effect model*). Hal ini terkait dengan jumlah data *cross section* yang lebih besar dibandingkan jumlah data *time series* (Nachrowi dan Usman, 2008).

Secara umum, dalam penelitian ini terdapat 1 (satu) model 2SLS dengan persamaan sebanyak 4 (empat) buah, sebagaimana berikut :

Model Pertama :

$$IS_{it} = \beta_{10} + \beta_{11}GRT_{it} + \beta_{12}I_{it} + \beta_{13}IP_{it} + \beta_{14}INF_{it} + \beta_{15}CR_{it} + \beta_{16}ER_{it} + \varepsilon_{1t} \quad (3.1)$$

Dimana :

- IS = investasi swasta periode t
- GRT = pertumbuhan ekonomi periode t
- I = tingkat bunga kredit investasi periode t
- IP = investasi pemerintah periode t
- INF = tingkat inflasi periode t
- CR = ketersediaan kredit investasi periode t
- ER = nilai tukar periode t
- i = nilai variabel di masing-masing propinsi
- β_{10} = nilai konstanta
- β_{1k} = nilai koefisien yang dicari, k = 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
- ε_1 = *error term*

Model pada persamaan (3.1) di atas, bersumber dari persamaan (2.15), digunakan untuk mengestimasi pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, investasi pemerintah, tingkat inflasi, ketersediaan kredit investasi serta nilai tukar dalam mempengaruhi investasi swasta di Indonesia. Dengan melakukan estimasi persamaan 3.1. akan didapatkan hasil mengenai variabel-variabel apa yang signifikan dalam mempengaruhi investasi swasta di Indonesia.

Model Kedua :

$$GRT_{it} = \beta_{20} + \beta_{21}IS_{it} + \beta_{22}IP_{it} + \beta_{23}HC_{it} + \beta_{24}TK_{it} + \varepsilon_{2t} \quad (3.2)$$

Dimana:

- GRT = pertumbuhan ekonomi periode t
 IS = realisasi investasi swasta periode t
 HC = modal manusia (*human capital*) periode t
 IP = realisasi investasi pemerintah periode t
 TK = proporsi penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk periode t
 i = nilai variabel di masing-masing propinsi
 β_{20} = nilai konstanta
 β_{2k} = nilai koefisien yang dicari, k = 1, 2, 3 dan 4
 ε_2 = *error term*

Model pada persamaan (3.2) di atas, bersumber dari persamaan (2.17), digunakan untuk mengestimasi pengaruh dari investasi swasta, investasi pemerintah, modal manusia, dan tenaga kerja dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan melakukan estimasi persamaan 3.2. akan didapatkan hasil mengenai pengaruh dari investasi swasta terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Model Ketiga :

$$EMPL_{it} = \beta_{30} + \beta_{31} IS_{it} + \beta_{32} GRT_{it} + \beta_{33} W_{it} + \varepsilon_3 \quad (3.3)$$

Dimana :

EMPL = proporsi dari jumlah tenaga kerja terhadap angkatan kerja periode t

IS = realisasi investasi swasta periode t

GRT = pertumbuhan ekonomi periode t

W = tingkat upah riil periode t

i = nilai variabel di masing-masing propinsi

β_{30} = nilai konstanta

β_{3k} = nilai koefisien yang dicari, k = 1, 2 dan 3

ε_3 = *error term*

Model pada persamaan (3.3) di atas, bersumber dari persamaan (2.18), digunakan untuk mengestimasi pengaruh realisasi investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah riil dalam mempengaruhi kesempatan kerja. Dengan melakukan estimasi persamaan 3.3. akan didapatkan hasil mengenai variabel-variabel apa yang signifikan dalam mempengaruhi kesempatan kerja di Indonesia.

Model Keempat :

$$ID_{it} = \beta_{40} + \beta_{41} IS_{it} + \beta_{42} GRT_{it} + \beta_{43} IP_{it} + \beta_{44} INF_{it} + \beta_{45} UNEMP_{it} + \varepsilon_4 \quad (3.4)$$

Dimana :

ID = distribusi pendapatan (rasio gini) periode t

IS = realisasi investasi swasta periode t

GRT = pertumbuhan ekonomi periode t

IP = realisasi investasi pemerintah periode t

INF = tingkat inflasi periode t

UNEMP = tingkat pengangguran periode t

- i = nilai variabel di masing-masing propinsi
 β_{40} = nilai konstanta
 β_{4k} = nilai koefisien yang dicari, $k = 1, 2, 3, 4$ dan 5
 ε_4 = *error term*

Model pada persamaan (3.4) di atas, bersumber dari persamaan (2.19), digunakan untuk mengestimasi pengaruh dari realisasi investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi pemerintah, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran dalam mempengaruhi distribusi pendapatan (gini rasio) di Indonesia. Dengan melakukan estimasi persamaan 3.4. akan didapatkan hasil mengenai variabel-variabel apa yang signifikan dalam mempengaruhi distribusi pendapatan (gini rasio) di Indonesia.

Berdasarkan persamaan (3.1.) hingga (3.4) di atas, tampak bahwa beberapa variabel mempunyai saling ketergantungan satu sama lain sehingga variabel-variabel terkategori sebagai variabel endogen dan variabel eksogen (*predetermined variable*). Kondisi ini yang menunjukkan bahwa model tersebut memenuhi persyaratan aplikasi persamaan simultan. Jika digunakan regresi *ordinary least square* (OLS) hasilnya akan bias, karena tingkat kesalahan akan terakumulasi dua kali. Oleh karenanya, untuk menghindari kekeliruan dan ketidakkonsistenan hasil regresi maka tahap-tahap pengujian sesuai dengan persyaratan penggunaan persamaan simultan harus dilakukan.

Mengingat dalam periode penelitian terdapat krisis ekonomi, maka terhadap modal (3.1.) hingga (3.4.), masing-masing akan ditambahkan variabel Dummy Krisis, dengan angka 0 = untuk periode 1990-1996, dan angka 1 = untuk periode 1997 – 2007).

3.4.2. Rancangan Pengujian Hipotesis

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka untuk menguji hipotesis tentang faktor penentu investasi swasta dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan tenaga kerja dan distribusi pendapatan pada masing-masing Propinsi di Indonesia maka akan dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Rancangan Hipotesis Pertama

Pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, investasi pemerintah, inflasi, ketersediaan kredit investasi dan nilai tukar berpengaruh terhadap investasi swasta, dimana pertumbuhan ekonomi, investasi pemerintah dan ketersediaan kredit berpengaruh positif terhadap investasi swasta, sedangkan inflasi, nilai tukar dan tingkat bunga berpengaruh secara negatif terhadap investasi swasta pada masing-masing Propinsi di Indonesia selama periode penelitian.

Rancangan hipotesisnya adalah:

$$H_0 : \beta_{11}, \dots, \beta_{16} = 0$$

$$H_a : \beta_{11}, \beta_{13}, \beta_{15} > 0 \text{ dan } \beta_{12}, \beta_{14}, \beta_{16} < 0$$

2. Rancangan Hipotesis Kedua

Investasi swasta, investasi pemerintah, modal manusia dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing Propinsi di Indonesia selama periode penelitian.

Rancangan hipotesisnya adalah:

$$H_0 : \beta_{21}, \dots, \beta_{24} = 0$$

$$H_a : \beta_{21}, \dots, \beta_{24} > 0$$

3. Rancangan Hipotesis Ketiga

Investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah berpengaruh terhadap investasi swasta, dimana investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesempatan kerja sedangkan tingkat upah berpengaruh secara negatif terhadap kesempatan kerja pada masing-masing Propinsi di Indonesia selama periode penelitian.

Rancangan hipotesisnya adalah:

$$H_0 : \beta_{31}, \beta_{32}, \beta_{33} = 0$$

$$H_a : \beta_{31}, \beta_{32} > 0 \text{ dan } \beta_{33} < 0$$

4. Rancangan Hipotesis Keempat

Investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, investasi pemerintah, inflasi dan pengangguran berpengaruh terhadap distribusi pendapatan (rasio gini), dimana investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan investasi pemerintah berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan (rasio gini), sedangkan inflasi dan pengangguran berpengaruh secara positif terhadap distribusi pendapatan (rasio gini), pada masing-masing Propinsi di Indonesia selama periode penelitian.

$$H_0 : \beta_{41}, \dots, \beta_{45} = 0$$

$$H_a : \beta_{44}, \beta_{45} > 0 \text{ dan } \beta_{41}, \beta_{42}, \beta_{43} < 0$$

3.5. Pengujian Persamaan Simultan

a. Uji Identifikasi (*Identified Test*)

Untuk mengetahui apakah suatu persamaan simultan dapat diidentifikasi atau tidak, dilakukan pengujian kondisi order (*order condition*). Hasil dari pengujian ini akan memastikan apakah model yang digunakan termasuk

over-identified (diidentifikasi lebih), *under-identified* (diidentifikasi kurang) atau *exactly/fully/just identified* (diidentifikasi tepat). Identifikasi terhadap persamaan estimasi dilakukan dengan cara:

$$[K - k] \geq [m - 1] \quad (3.5)$$

dimana K adalah jumlah variabel yang ditetapkan (*predetermined variable*) dalam model, k adalah jumlah variabel yang ditetapkan (*predetermined variable*) dalam persamaan tertentu, dan m adalah jumlah variabel *endogen* dalam suatu persamaan tertentu.

Jika (K-k) sama dengan (m-1) maka persamaan dalam kondisi *exactly identified*; jika nilai (K-k) lebih kecil dari (m-1) maka persamaan dalam kondisi *under-identified*; dan jika nilai (K-k) lebih besar dari (m-1) maka persamaan dalam kondisi *over-identified* (Gujarati, 2003).

Jika ternyata hasil perhitungan menunjukkan bahwa persamaan dalam kondisi *over-identified*, maka akan digunakan metode 2SLS (*Two Stage Least Square*) atau 3SLS (*Three Stage Least Square*), sebab metode tersebut jauh lebih baik bila dibandingkan dengan metode OLS (*ordinary Least Square*).

Ada dua kondisi yang harus dipenuhi suatu persamaan untuk bisa dianggap dapat diidentifikasi, yaitu; (a) kondisi order (*order condition*) dan (b) kondisi rank (*rank condition*) (Gujarati, 2003; dan Sritua Arief, 1993).

Selanjutnya, cara untuk mendeteksi apakah suatu sistem persamaan simultan bersifat dapat diidentifikasi (*just identified*) atau melebihi syarat untuk dapat diidentifikasi (*over identified*), yaitu; (1) cara identifikasi melalui bentuk model persamaan struktural yang sedang diteliti, dan (2) cara identifikasi melalui persamaan *reduced form* dari model yang sedang diteliti. Dalam prakteknya, cara pertama selalu digunakan dalam penelitian karena lebih praktis.

Untuk penelitian ini, model persamaan simultan yang digunakan adalah persamaan (3.1.) hingga (3.4.), yang apabila ditulis ulang sebagai berikut :

$$IS_{it} = \beta_{10} + \beta_{11}GRT_{it} + \beta_{12}i_{it} + \beta_{13}IP_{it} + \beta_{14}INF_{it} + \beta_{15}CR_{it} + \beta_{16}ER_{it} + \varepsilon_{1t} \quad (3.6)$$

$$GRT_{it} = \beta_{20} + \beta_{21}IS_{it} + \beta_{22}IP_{it} + \beta_{23}HC_{it} + \beta_{24}TK_{it} + \varepsilon_{2t} \quad (3.7)$$

$$EMPL_{it} = \beta_{30} + \beta_{31}IS_{it} + \beta_{32}GRT_{it} + \beta_{33}W_{it} + \varepsilon_{3t} \quad (3.8)$$

$$ID_{it} = \beta_{40} + \beta_{41}IS_{it} + \beta_{42}GRT_{it} + \beta_{43}IP_{it} + \beta_{44}INF_{it} + \beta_{45}UNEMP_{it} + \varepsilon_{4t} \quad (3.9)$$

Dimana :

- IP, i, INF, CR, ER, HC, TK, W, dan UNEMP merupakan *predeterminant variable* (variabel eksogen); dan:
- IS, GRT, EMPL dan ID merupakan variabel endogen
- $\beta_{1,0} - \beta_{i,0}$ nilai parameter konstanta
- $\beta_{1,i} - \beta_{4,i}$ merupakan nilai parameter yang dicari ($i > 0$)
- ε_i merupakan *error term*

Berdasarkan model (3.5.) hingga (3.8.), maka kondisi order untuk pengujian identifikasi adalah :

Tabel 3.2.
Uji Identifikasi Kondisi Order

Persamaan Struktural	(K - k)	(m - 1)	Identifikasi
(3.6)	9 - 5 = 4	2 - 1 = 1	<i>Over identified</i>
(3.7)	9 - 3 = 6	2 - 1 = 2	<i>Over identified</i>
(3.8)	9 - 1 = 8	3 - 1 = 2	<i>Over identified</i>
(3.9)	9 - 3 = 6	3 - 1 = 1	<i>Over identified</i>

Sumber : Hasil perhitungan, data diolah

Berdasarkan hasil perhitungan kondisi *order* dalam Tabel 3.2. di atas, menunjukkan bahwa seluruh model persamaan dalam kondisi *over-identified*. Setelah menghitung kondisi order, selanjutnya dilakukan pengujian kondisi rank, yaitu syarat lanjutan suatu sistem persamaan dapat diidentifikasi, manakala persamaan tersebut membentuk sekurang-kurangnya satu faktor penentu bukan nol dari ordo yang berlawanan $(M - 1) \times (M - 1)$, yang dapat dibentuk dari koefisien variabel baik variabel endogen maupun variabel *predeterminant* atau eksogen yang tidak dimasukkan dari persamaan tertentu tetapi dimasukkan ke dalam persamaan-persamaan lain dalam model struktural yang sedang diteliti (Sritua Arief, 1993, dan Gujarati, 2003).

Oleh karena itu, persamaan struktural (3.6.) hingga (3.9.) dituliskan kembali dalam bentuk:

$$IS_t - \beta_{10} - \beta_{11}GRT_t - \beta_{12}IP_t - \beta_{13}INF_t - \beta_{14}CR_t - \beta_{15}ER_t = \varepsilon_1 \quad (3.10)$$

$$GRT_t - \beta_{20} - \beta_{21}IS_t - \beta_{22}IP_t - \beta_{23}HC_t - \beta_{24}TK_t = \varepsilon_2 \quad (3.11)$$

$$EMPL_t - \beta_{30} - \beta_{31}IS_t - \beta_{32}GRT_t - \beta_{33}W_t = \varepsilon_3 \quad (3.12)$$

$$ID_t - \beta_{40} - \beta_{41}IS_t - \beta_{42}GRT_t - \beta_{43}IP_t - \beta_{44}INF_t - \beta_{45}UNEMP_{tt} = \varepsilon_4 \quad (3.13)$$

Untuk memudahkan perhitungan, sistem persamaan (3.10.) hingga (3.13.) dapat dibuat dalam suatu tabel (lihat Tabel 3.3.). Kemudian mengaplikasikan kondisi *rank* terhadap suatu persamaan dalam sistem persamaan simultan, yang mengharuskan terlebih dahulu membentuk matriks koefisien-koefisien variabel yang dikeluarkan dari persamaan ini tetapi dimasukkan ke dalam persamaan-persamaan lain. Matrik ini berdimensi $(M - 1) \times (M - 1)$, sebagai berikut;

Tabel 3.3.
Uji Identifikasi *Rank Condition*

Persamaan	I	IS	GRT	EMPL	DI	IP	INF	CR	ER	HC	TK	W	UNEMP
(3.1.)	$-\beta_{10}$	1	$-\beta_{11}$	0	0	$-\gamma_{12}$	$-\gamma_{13}$	$-\gamma_{14}$	$-\gamma_{15}$	0	0	0	0
(3.2.)	$-\beta_{20}$	$-\beta_{21}$	1	0	0	$-\gamma_{22}$	0	0	0	$-\gamma_{23}$	$-\gamma_{24}$	0	0
(3.3.)	$-\beta_{30}$	$-\beta_{31}$	$-\beta_{32}$	1	0	0	0	0	0	0	0	$-\gamma_{33}$	0
(3.4.)	$-\beta_{40}$	$-\beta_{41}$	$-\beta_{42}$	0	1	$-\gamma_{43}$	$-\gamma_{44}$	0	0	0	0	0	$-\gamma_{45}$

Sumber : Hasil perhitungan, data diolah

Berdasarkan Tabel 3.3. dari empat buah persamaan simultan, selanjutnya dapat dibuat matrik yang berdimensi $(4 - 1) \times (4 - 1) = 3 \times 3$, guna mendapatkan faktor penentu matriknya. Matrik tersebut masing-masing adalah matrik A (persamaan IS), B (persamaan GRT), C (persamaan EMPL), dan D (persamaan ID). Adapun faktor penentu masing-masing matrik adalah sebagai berikut :

$$|A| \begin{vmatrix} -\gamma_{23} & 0 & 0 \\ 0 & -\gamma_{33} & 0 \\ 0 & 0 & -\gamma_{45} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (3.14a)$$

$$|B| \begin{vmatrix} -\gamma_{14} & 0 & -\gamma_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -\gamma_{44} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (3.14b)$$

$$|C| \begin{vmatrix} -\gamma_{13} & -\gamma_{12} & 0 \\ 0 & -\gamma_{22} & 0 \\ -\gamma_{44} & -\gamma_{43} & 1 \end{vmatrix} \neq 0 \quad (3.14c)$$

$$|D| \begin{vmatrix} -\gamma_{15} & 0 & 0 \\ 0 & -\gamma_{24} & 1 \\ 0 & 0 & -\gamma_{33} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (3.14d)$$

Berdasarkan nilai faktor penentu matrik-matrik di atas, maka sesuai dengan kondisi *rank* dapat disimpulkan bahwa model IS, GRT, EMPL dan DI dapat diidentifikasi karena tidak satupun nilai faktor penentu dan matriks-matriks tersebut yang bernilai 0.

Mengingat model persamaan struktural (3.1.) hingga (3.4.) merupakan persamaan yang diidentifikasi lebih (*over identified*), maka untuk menghindari tidak efisiennya estimasi, maka akan dihitung menggunakan metode kuadrat terkecil dua tahap (2SLS) (Gujarati, 2003). Penaksiran terdiri dari dua tahap perhitungan, yaitu;

1. Mengaplikasikan metode *ordinary least square* (OLS) terhadap persamaan *reduced form*, artinya *me-regres* semua variabel *eksogen* terhadap masing-masing variabel *endogen* dalam setiap persamaan struktural. Berdasarkan nilai-nilai koefisien regresi variabel-variabel bebas dalam persamaan *reduced form* ini, maka diperoleh taksiran (*fitted*) mengenai nilai variabel-variabel endogen dalam persamaan-persamaan ini.
2. Substitusikan taksiran (*fitted*) nilai variabel-variabel *endogen* yang diperoleh dari perhitungan tahap pertama ke dalam sistem persamaan simultan sehingga setiap persamaan dalam sistem persamaan simultan mengalami transformasi. Penaksiran nilai parameter-parameter dalam model regresi persamaan simultan dilakukan dengan mengaplikasikan metode OLS terhadap persamaan yang telah mengalami transformasi tersebut. Berdasarkan model persamaan struktural (3.1.) hingga (3.4.) dapat dibentuk model persamaan *reduced form*, sebagai berikut :

$$IS_{it} = \beta_0 + \beta_1 i_{it} + \beta_2 IP_{it} + \beta_3 INF_{it} + \beta_4 CR_{it} + \beta_5 ER_{it} + \beta_6 HC_{it} + \beta_7 TK_{it} + \varepsilon_1 \quad (3.15)$$

$$GRT_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 i_{it} + \alpha_2 INF_{it} + \alpha_3 CR_{it} + \alpha_4 ER_{it} + \alpha_5 HC_{it} + \alpha_6 TK_{it} + \varepsilon_2 \quad (3.16)$$

$$EMPL_{it} = \delta_0 + \delta_1 i_{it} + \delta_2 IP_{it} + \delta_3 INF_{it} + \delta_4 CR_{it} + \delta_5 ER_{it} + \delta_6 HC_{it} + \delta_7 TK_{it} + \delta_8 W_{it} + \varepsilon_3 \quad (3.17)$$

$$ID_{it} = \lambda_0 + \lambda_1 CR_{it} + \lambda_2 ER_{it} + \lambda_3 i_{it} + \lambda_4 IP_{it} + \lambda_5 INF_{it} + \lambda_6 UNEMP_{it} + \lambda_7 HC_{it} + \lambda_8 TK_{it} + \varepsilon_4 \quad (3.18)$$

Dengan menggunakan nilai koefisien-koefisien regresi yang diperoleh melalui perhitungan OLS untuk persamaan-persamaan *reduced form* di atas (yaitu nilai-nilai π), maka diperoleh nilai-nilai taksiran untuk variabel-variabel *endogen*

yaitu $\widehat{Y}_1, \widehat{Y}_2, \dots, \widehat{Y}_4$. Pada tahap kedua, substitusikan $\widehat{Y}_1, \widehat{Y}_2, \dots, \widehat{Y}_4$ ke dalam sistem persamaan simultan (3.1) hingga (3.4). Setelah proses substitusi selesai, maka aplikasikan metode OLS terhadap persamaan yang telah disubstitusikan tersebut untuk memperoleh hasil-hasil regresi model persamaan simultan (Sritua Arief, 1993).

b. Uji Bias Simultan (*Simultaneity Test*)

Uji bias simultan dilakukan untuk memastikan apakah model persamaan simultan yang digunakan dapat diperlakukan sebagai persamaan simultan atau tidak. Alat analisis yang paling sering digunakan untuk melakukan pengujian bias simultan adalah *Hausman-Test*.

Prosedur pengujian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut; (1) menyusun bentuk persamaan *reduce form*, (2) melakukan estimasi dengan menggunakan metode OLS, (3) residual hasil estimasi *reduce form* variabel yang dianggap *endogen* disubstitusikan ke dalam persamaan struktural dan diestimasi dengan menggunakan OLS. Jika koefisien residual sama dengan nol maka *null hypothesis* tidak ditolak yang berarti tidak simultan, dan jika koefisien residual tidak sama dengan nol maka *null hypothesis* ditolak yang berarti bias simultan.

c. Uji Endogenitas (*Endogeneity Test*)

Uji eksogenitas dilakukan untuk memastikan apakah variabel *endogen* yang digunakan dalam persamaan simultan dapat (atau tidak) diperlakukan sebagai variabel *endogen* atau variabel *eksogen*. Prosedur pengujian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut; (1) menyusun bentuk persamaan *reduced form*; (2) melakukan estimasi dengan menggunakan metode OLS; dan (3) nilai prediksi

(*fitted*) hasil estimasi *reduced form* variabel yang dianggap endogen disubstitusikan ke dalam persamaan struktural dan diestimasi dengan menggunakan metode OLS. Kaidah pengujian dirumuskan sebagai berikut :

Ho ; variabel *endogen* dapat diperlakukan sebagai variabel *eksogen*

Ha ; variabel *endogen* tidak dapat diperlakukan sebagai variabel *eksogen*.

Jika nilai probabilitas F-hitung lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, maka model yang digunakan dibenarkan memiliki hubungan simultan. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F-hitung lebih besar dari $\alpha = 0,05$, maka model yang digunakan tidak dibenarkan memiliki hubungan simultan.

3.6. Pengujian Ekonometrik

Uji validitas model diperlukan untuk melihat apakah rangkaian data yang digunakan dalam penelitian ini sudah valid atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut, akan dilakukan beberapa pengujian ekonometrik, antara lain; uji otokorelasi, uji multikolinearitas dan uji normalitas (Gujarati, 2003).

a. Uji Otokorelasi (*Autocorrelation Test*)

Otokorelasi adalah korelasi antara *residual data time series* pada titik-titik waktu yang berbeda. Dalam kasus khusus dimana residual berdekatan pada periode waktu terpisah (misalnya t dan $t+1$) mempunyai hubungan, disebut *first-order autocorrelation* (Mendenhall dan Sincich, 2003).

Pengujian otokorelasi dilakukan dengan menggunakan rumus Durbin-Watson (DW) sebagai berikut:

$$DW = \frac{\sum(e_t - e_{t-1})^2}{\sum e_t^2}; 0 \leq DW \leq 4 \quad (3.19)$$

dimana, e_t adalah *residual*.

Keputusan mengenai ada-tidaknya otokorelasi dilakukan dengan cara sebagai berikut; jika DW semakin mendekati angka 2, semakin tidak ada

otokorelasi, dan sebaliknya, jika DW semakin menjauhi angka 2, semakin ada otokorelasi. Jika DW mendekati angka 0, maka terjadi otokorelasi positif dan sebaliknya jika DW mendekati angka 4 maka terjadi otokorelasi negatif.

b. Uji Multikolinearitas (*Multicollinearity Test*)

Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel independen yang digunakan dalam model mempunyai hubungan (*correlated*), baik yang sifatnya moderat maupun tinggi. Oleh karena itu, uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa antara variabel independen yang satu dengan lainnya dalam model tidak mempunyai hubungan (*uncorrelated*). Untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas dalam model, digunakan beberapa indikator sebagai berikut (Mendenhall dan Sincich, 2003):

- ❖ Terjadi korelasi yang signifikan antara variabel independen secara berpasangan dalam model;
- ❖ Uji-t tidak signifikan untuk semua (atau hampir semua) parameter β secara individual, padahal uji-F untuk model secara keseluruhan adalah signifikan;
- ❖ Terjadi tanda yang berkebalikan (dari apa yang diharapkan) pada parameter estimasi;
- ❖ *Variance inflation factor* (VIF) untuk parameter β lebih besar dari 10.

Keputusan mengenai ada-tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan matriks korelasi (*colleration matrix*), dimana jika nilai koefisien korelasi +1 mengindikasikan adanya hubungan positif yang sempurna, dan sebaliknya, jika nilai koefisien korelasi -1 mengindikasikan adanya hubungan negatif yang sempurna.

Deteksi mengenai ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan cara: (i) jika nilai koefisien korelasi lebih kecil dari 0,40 maka terdapat multikolinearitas yang rendah; (ii) jika nilai koefisien korelasi berada diantara

0,40 dan 0.80 maka terdapat multikolinearitas yang moderat; dan (iii) Jika nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,80 maka terdapat multikolinearitas yang parah (*severe multicollinearity*).

Untuk mengatasi masalah multikolinearitas, dapat dilakukan beberapa cara (Gujarati, 2003), yaitu:

- ❖ Menghilangkan informasi yang bersifat dugaan atau prasangka (*a priori information*);
- ❖ Mengkombinasikan data *time-series* dan data *cross-sectional* (panel data);
- ❖ Menghilangkan salah satu atau beberapa variabel yang mempunyai korelasi tinggi dari model regresi;
- ❖ Melakukan transformasi variabel;
- ❖ Menambah data baru;
- ❖ Dengan mentransformasikan variabel. Nilai variabel yang digunakan mundur satu tahun

c. Uji Normalitas (*Normality Test*)

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah suatu model estimasi bebas dari penyimpangan normalitas. Suatu model estimasi dapat dikatakan bebas dari penyimpangan normalitas apabila residualnya terdistribusi secara normal. *Jarque-Bera* merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk melakukan pengujian normalitas.

Langkah-langkah dalam melakukan uji normalitas, dengan metode uji *Jarque-Bera* adalah sebagai berikut :

- ❑ Meregres setiap model persamaan untuk mendapatkan nilai residunya (U_t)
- ❑ Hitung nilai *Jarque-Bera* statistik dengan rumus (Gujarati, 2003), sebagai berikut :

$$JB = N - \frac{k}{6} \left[S^2 + \frac{1}{4}(K - 3)^2 \right] \quad (3.20)$$

Dimana :

$S = Skewness$

$K = Kurtosis$

$k =$ Jumlah parameter dalam model

□ **Kriteria Hipotesis:**

$H_0 =$ distribusi u_t normal

$H_a \neq$ distribusi u_t tidak normal

□ **Kriteria keputusan**

- Jika JB_{hitung} lebih besar dari χ^2_{tabel} ($JB_{hitung} > \chi^2_{tabel}$), maka tolak H_0 , artinya distribusi u_t tidak normal.
- Jika JB_{hitung} lebih kecil dari χ^2_{tabel} ($JB_{hitung} < \chi^2_{tabel}$), maka terima H_0 , artinya distribusi u_t normal.

3.7. Pengujian Spesifikasi Model

3.7.1. Uji Kesesuaian Model (*Goodness of Fit Test*)

Pada umumnya, untuk mengetahui apakah model yang digunakan sudah baik atau tidak, biasanya tergantung pada (Gujarati, 2003);

Pertama, nilai koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 terletak antara nol dan satu. Jika nilai R^2 semakin mendekati satu (atau di atas 0,50), maka model yang digunakan cukup baik karena variasi perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variabel independen. Sebaliknya, jika nilai R^2 semakin mendekati nol (atau kurang dari 0,50), maka model yang digunakan kurang baik karena variasi perubahan variabel dependen tidak dapat (lemah) dijelaskan oleh variasi perubahan variabel independen.

Kedua, kesesuaian arah koefisien, antara *pre*-hipotesis dengan *post*-hipotesis. Jika sebagian besar variabel dalam model memiliki kesesuaian arah koefisien *pre*-hipotesis dengan *post*-hipotesis, maka model yang digunakan telah cukup baik karena hasil penelitian sesuai dengan konsep teori yang membentuk *pre*-hipotesis. Sebaliknya, jika terdapat banyak ketidaksesuaian arah koefisien *pre*-hipotesis dengan *post*-hipotesis, maka model yang digunakan kurang baik karena realita dilapangan bertentangan konsep teori yang umum berlaku.

Ketiga, nilai *F-test*. *F-test* selain digunakan untuk melihat signifikansi parameter variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, juga digunakan untuk melihat *goodness of fit* suatu model. Dengan membandingkan antara nilai *F-test* dengan nilai *F-table*, akan dapat ditentukan apakah model tersebut sudah baik atau tidak. Jika *F-test* lebih besar dari nilai *F-table* misalnya pada tingkat signifikansi (*level of significancy*) 5%, maka dapat dikatakan bahwa model yang digunakan sudah cukup baik, karena seluruh variabel independen secara bersama-sarna dapat menjelaskan variabel dependen. Sebaliknya, jika *F-test* lebih kecil dari nilai *F-table*, misalnya pada tingkat signifikansi 5%, maka dapat dikatakan bahwa model yang digunakan kurang baik, karena seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

Dewasa ini, selain kedua pengujian di atas, pendekatan *Heuristic* (*Heuristic approach*) juga seringkali digunakan untuk memilih model terbaik dari berbagai kemungkinan model yang ada. *Akaike Info Criterion* (AIQ) dan *Schwarz Criterion* (SQ) merupakan dua pengujian yang lazim digunakan dalam pendekatan

Heuristic. Semakin rendah nilai AIC dan SC, maka model tersebut semakin baik, dan sebaliknya, semakin tinggi nilai AIC dan SC, model tersebut semakin kurang baik.

3.7.2. Uji Signifikansi Parameter

Secara statistik, ada dua alat uji yang sering digunakan untuk melihat signifikansi parameter estimasi, yaitu:

Pertama, *t-test* (untuk uji parsial). *T-test* digunakan untuk melihat apakah variabel independen secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan antara nilai *t-test* dengan nilai *t-table*, hal tersebut akan dapat diketahui.

Kaidah pengujian dirumuskan sebagai berikut (Mendenhall dan Sincich, 2003) :

1. Untuk pengujian satu arah dengan arah **pengaruh positif**, yaitu:

$$H_0 : \beta_{ij} = 0$$

$$H_a : \beta_{ij} > 0$$

Dimana : $i = 1, 2, 3$ dan 4 dan $j > 0$

Adapun kriteria pengujian pengujian hipotesisnya sebagai berikut :

- ❑ H_0 diterima apabila nilai p-value di atas $\alpha = 5\%$ atau jika $t_{\alpha (N-k-1)} < t_{stat}$, berarti suatu variabel independen **secara individu tidak signifikan** dalam mempengaruhi variabel dependennya secara positif.

- H_0 ditolak apabila nilai p-value di atas $\alpha = 5\%$ atau jika $t_{\alpha (N-k-1)} > t_{stat}$, berarti bahwa suatu variabel independen **secara individu signifikan** dalam mempengaruhi variabel dependennya secara positif.

2. Untuk pengujian satu arah dengan arah pengaruh negatif, yaitu:

$$H_0 : \beta_{ij} = 0$$

$$H_a : \beta_{ij} < 0$$

Dimana : $i = 1, 2, 3$ dan 4 dan $j > 0$

Adapun kriteria pengujian pengujian hipotesisnya sebagai berikut :

- H_0 diterima apabila nilai p-value di atas $\alpha = 5\%$ atau jika $-t_{\alpha (N-k-1)} > -t_{stat}$, berarti bahwa variabel independen **secara individu tidak signifikan** dalam mempengaruhi variabel dependennya secara negatif.
- H_0 ditolak apabila nilai p-value di atas $\alpha = 5\%$ atau jika $t_{\alpha (N-k-1)} < -t_{stat}$, berarti bahwa variabel independen **secara individu signifikan** dalam mempengaruhi variabel dependennya secara negatif.

Kedua, *F-test* (untuk uji keseluruhan). *F-test*. digunakan untuk melihat signifikansi parameter variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dengan membandingkan antara nilai *F-test* dengan nilai *F-table*, dapat ditemukan apakah variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

Kaidah pengujian dirumuskan sebagai berikut (**Mendenhall** dan **Sincich**, 2003):

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$$

H_a : Paling sedikit ada satu $\beta_i \neq 0$, $i = 1, 2, \dots, n$

Sedangkan untuk memperoleh *F-test* digunakan rumus sebagaimana berikut ini:

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R) / [n - (k + 1)]} \quad (3.21)$$

dimana R^2 adalah koefisien determinasi, n adalah jumlah observasi, dan k adalah jumlah variabel independen.

Adapun kriteria pengujian pengujian hipotesisnya sebagai berikut :

- ❑ Jika $F_{\text{stat}} \leq F_{\alpha (k-1; N-k)}$, maka H_0 diterima, berarti bahwa variabel independen **secara bersama-sama tidak signifikan** dalam mempengaruhi variabel dependennya.
- ❑ Jika $F_{\text{stat}} \geq F_{\alpha (k-1; N-k)}$, maka H_0 ditolak, berarti bahwa variabel independen **secara bersama-sama signifikan** dalam mempengaruhi variabel dependennya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Perkembangan Investasi Swasta di Indonesia

Investasi (*investment*) dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap stok kapital yang ada (*net addition to existing capital stock*). Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal (*capital accumulation*) atau pembentukan modal (*capital formation*) (Mankiw, 2001). Investasi juga dapat diartikan sebagai penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan akan mendapatkan keuntungan dari hasil penanaman modal (Agrawal, 2001).

Investasi-investasi tersebut dapat berasal dari sektor pemerintah (dalam hal ini pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi) maupun dari sektor swasta. Investasi oleh pemerintah, dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun APBD. Sedangkan investasi yang dilaksanakan oleh sektor swasta dilakukan melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berasal dari luar negeri. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, kebutuhan investasi nasional akan lebih banyak dilakukan oleh sektor swasta dalam bentuk PMA dan PMDN, dengan sektor pemerintah bertindak sebagai penyedia sarana dan prasarana bagi timbulnya investasi swasta tersebut.

Manfaat terpenting yang diperoleh dari investasi swasta yaitu antara lain; *Pertama*, terciptanya lapangan kerja baru yang dapat menyerap tenaga kerja.

Kedua, investasi swasta berperan penting dalam pembangunan ekonomi negara, karena mengurangi kesenjangan antara tabungan domestik dengan kebutuhan investasi domestik terutama jika investasi asing yang masuk dalam bentuk penanaman modal langsung (Ahmadi Rilam, 1997).

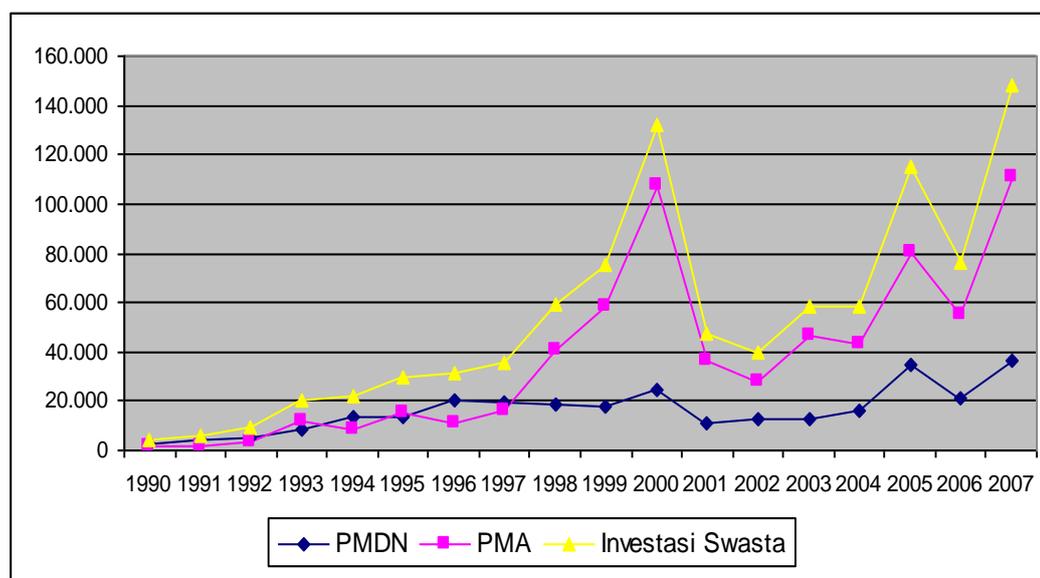
Tabel 4.1.
Perkembangan Realisasi Investasi Swasta Periode 1990-2007
Tahun 1990 – 2007 (dalam Milyar Rp dan Persen)

Tahun	PMDN		PMA		Investasi Swasta		
	Proyek	Nilai (RpMiliar)	Proyek	Nilai (RpMilyar)	Proyek	Nilai (RpMilyar)	Growth (%)
1990	253	2.617	100	1.342	353	3.959	-
1991	265	4.201	149	1.969	414	6.170	55,85
1992	225	5.420	155	3.787	380	9.207	49,22
1993	304	8.712	183	11.893	487	20.605	123,80
1994	582	13.916	392	8.294	974	22.210	7,79
1995	375	13.968	287	15.460	662	29.428	32,50
1996	450	20.265	357	11.033	807	31.298	6,35
1997	345	19.174	331	16.151	676	35.325	12,87
1998	296	18.584	412	40.252	708	58.836	66,56
1999	248	17.495	504	58.267	752	75.762	28,77
2000	300	24.622	638	107.529	938	132.151	74,43
2001	160	10.998	454	36.425	614	47.423	(64,11)
2002	108	12.582	442	27.595	550	40.177	(15,28)
2003	120	12.421	569	46.139	689	58.560	45,76
2004	130	15.678	548	43.045	678	58.723	0,28
2005	215	34.694	907	80.187	1122	114.881	95,63
2006	162	21.286	869	54.790	1031	76.076	(33,78)
2007	159	36.570	982	111.196	1141	147.766	94,23

Sumber : Laporan Realisasi Investasi, BKPM Jakarta, 2008

Berdasarkan Tabel 4.1. dan Gambar 4.1. terlihat bahwa investasi swasta selama periode 1990 sebagai awal penelitian hingga tahun 2000 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Sedangkan sejak tahun 2001 hingga tahun 2007 sebagai akhir dari periode penelitian, perkembangan investasi swasta

menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif (kadang meningkat dan bahkan menurun) mengikuti kondisi dan gejala perekonomian yang terjadi pada saat itu.

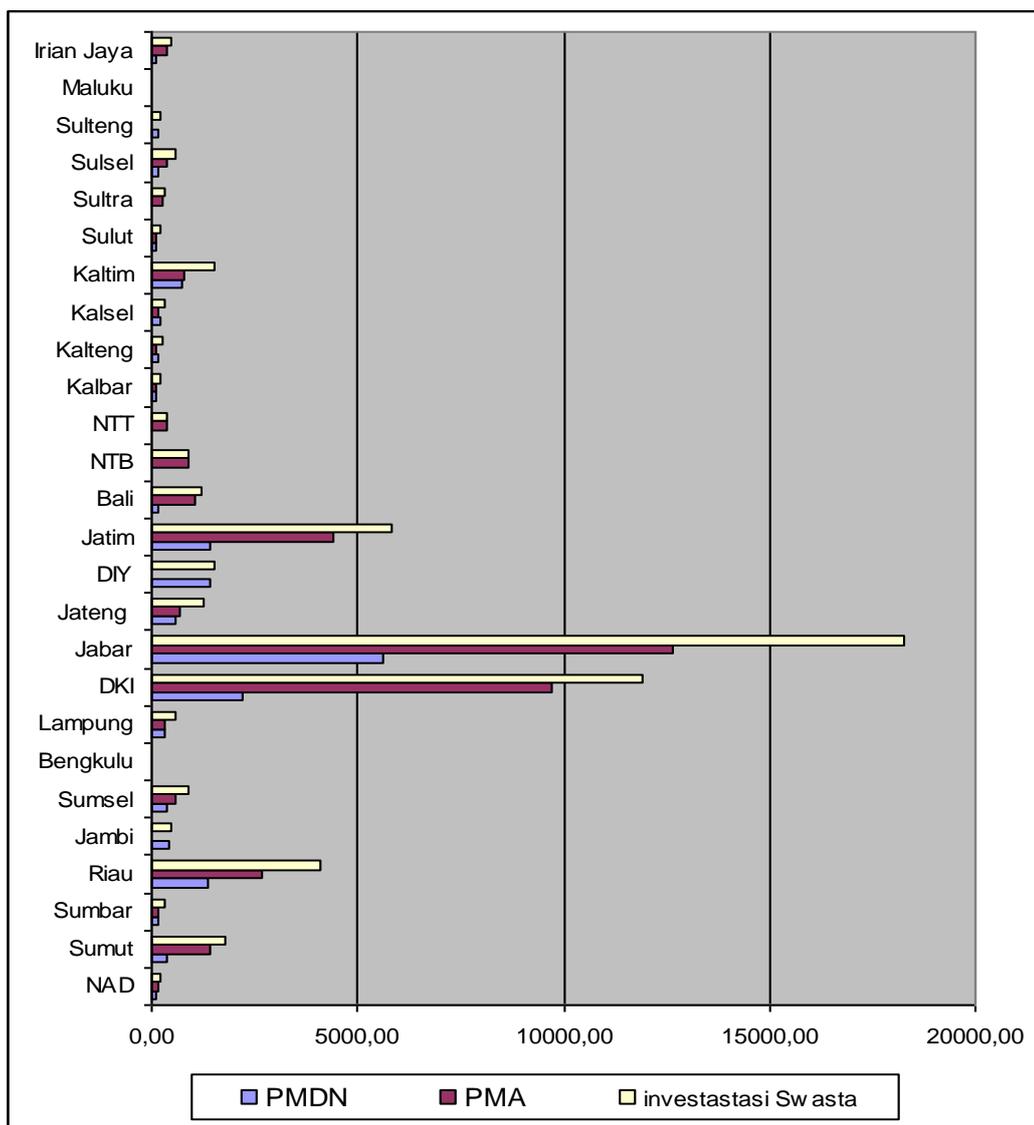


Sumber: Laporan Realisasi Investasi PMA & PMDN, BKPM Jakarta

Gambar 4.1.
Perkembangan Realisasi Investasi Swasta Periode 1990-2007
(dalam Miliar Rupiah)

Dilihat dari investasi swasta berdasarkan regional sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1., diketahui bahwa rata-rata investasi swasta per tahun baik PMDN maupun PMA lebih banyak dilaksanakan di Pulau Jawa. Selama periode penelitian, Propinsi Jawa Barat merupakan propinsi dengan realisasi investasi swasta paling besar. Rata-rata investasi swasta per tahun di Jawa Barat sebesar Rp18.268,74 miliar, yang terdiri dari rata-rata realisasi PMDN sebesar Rp5.600,09 miliar dan rata-rata realisasi PMA sebesar 12.668,65 miliar. Diikuti diurutan kedua terbesar realisasi investasi swasta adalah DKI Jakarta dengan rata-rata realisasi investasi per tahun sebesar Rp11.928,00 miliar, terdiri dari

rata-rata realisasi PMDN sebesar Rp2.210,92 miliar dan rata-rata realisasi PMA sebesar 9.717,08 miliar. Selanjutnya Propinsi Jawa Timur di urutan ketiga, dengan rata-rata realisasi investasi per tahun sebesar Rp5.852,50 miliar, terdiri dari rata-rata realisasi PMDN sebesar Rp1.441,77 miliar dan rata-rata realisasi PMA sebesar 4.410,72 miliar.



Sumber: Laporan Realisasi Investasi PMA & PMDN, BKPM Jakarta

Gambar 4.2.
Perkembangan Rata-rata Realisasi Investasi Periode 1990-2007
(dalam Miliar Rupiah)

Sementara itu, propinsi Riau merupakan propinsi di luar pulau Jawa yang memiliki rata-rata realisasi investasi swasta per tahun terbesar, yaitu sebesar Rp4.074,26 miliar, yang terdiri dari PMDN sebesar Rp1.381,22 miliar dan PMA sebesar Rp2.693,04 miliar. Diikuti propinsi Sumatera Utara dengan rata-rata realisasi investasi per tahun sebesar Rp1.783,08 miliar, terdiri dari rata-rata realisasi PMDN sebesar Rp364,58 miliar dan rata-rata realisasi PMA sebesar 1.418,50 miliar.

Sebagaimana perkembangan realisasi investasi swasta pada Tabel 4.1. dapat dilihat bahwa tahun 2007 merupakan tahun tertinggi pencapaian realisasi investasi swasta, yaitu sebesar Rp 147.766 Milyar, diikuti tahun 2000 dan tahun 2005, yang masing-masing mencapai Rp 132.151 Milyar dan Rp 114.881 Milyar. Realisasi investasi pada tahun 2000, merupakan pencapaian pertama realisasi investasi swasta menembus angka Rp100 triliun atau tepatnya sebesar Rp132.151 miliar, serta merupakan pencapaian realisasi investasi swasta tertinggi kedua setelah tahun 2007, suatu catatan prestasi yang menggembirakan. Hal ini terkait dengan dapat direalisasikannya 72,77 persen dari total persetujuan PMA pada tahun itu, atau sebesar Rp107.529 miliar dan sisanya berasal dari realisasi PMDN sebesar Rp24.22 miliar. Propinsi yang paling menarik minat bagi PMA pada tahun 2000 adalah Propinsi DKI Jakarta, sedangkan untuk PMDN adalah Propinsi Jawa Barat. Pemilihan DKI Jakarta sebagai lokasi proyek PMA sedangkan PMDN di Jawa Barat/Banten lebih disebabkan karena DKI Jakarta dan Jawa Barat/Banten telah memiliki infrastruktur yang memadai dan relatif paling aman untuk berinvestasi.

Sedangkan realisasi investasi, baik PMA maupun PMDN, pada tahun 2007 sebagai capaian tertinggi investasi swasta selama periode penelitian, terkait dengan adanya serangkaian paket kebijakan perbaikan iklim investasi yang dikeluarkan untuk mendukung investasi swasta, dimana diantaranya adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inpres Nomor: 6 Tahun 2007 ini terdiri atas empat kelompok kebijakan, yaitu investasi, lembaga keuangan, UMKM dan infrastruktur.

Disamping itu, beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain adalah (1) menyelenggarakan *Indonesia Infrastructure Conference & Exhibition* (IICE) pada bulan November 2006 sebagai tindak-lanjut paket kebijakan infrastruktur, melakukan promosi secara langsung ke negara-negara Timur Tengah, serta menyusun skema kemitraan antara pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership/PPP*); (2) diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor: 24 Tahun 2006 bulan Juni 2006 mengenai pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) untuk berbagai jenis perizinan, termasuk di dalamnya investasi, serta telah disusunnya panduan nasional tentang PPTSP pada bulan Mei 2007; (3) diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 1 Tahun 2007 pada bulan Januari 2007 mengenai pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanam modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu; (4) telah disahkannya UU Nomor: 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada bulan April 2007; (5)

telah dilakukannya evaluasi terhadap sejumlah perda bermasalah dengan pembatalan 963 perda dan 107 raperda sampai bulan Mei 2007; (6) telah diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Perpres Nomor: 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan; serta (7) pengembangan fasilitas, peningkatan pengawasan, dan pelayanan kepabeanan dan perpajakan.

Adanya serangkaian kebijakan tersebut telah menyebabkan PMDN pada tahun 2007 meningkat 71,80 persen menjadi Rp36.570,00 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, dan PMA juga mencatat peningkatan yang relatif tinggi, yaitu sekitar 102,95 persen menjadi Rp111.196,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar PMDN dan PMA tertuju pada sektor sekunder atau industri pengolahan, antara lain industri logam, industri mesin dan elektronik, industri makanan, industri kertas, dan industri kimia. Nilai realisasi investasi PMDN yang menonjol berdasarkan sektor adalah Industri Kertas dan Percetakan sebesar Rp14.548,2 miliar (8 proyek), Industri Makanan sebesar Rp5.371,7 miliar (27 proyek), Industri Logam, Mesin dan Elektronika sebesar Rp3.541,6 miliar (17 proyek), Tanaman Pangan dan Perkebunan sebesar Rp3.528,8 miliar (18 proyek) dan Konstruksi sebesar Rp2.110,7 miliar (4 proyek). Sedangkan nilai realisasi investasi PMA yang menonjol berdasarkan sektor adalah Transportasi, Gudang dan Komunikasi sebesar Rp30.209,53 miliar (43 proyek), Industri Kimia dan Farmasi sebesar Rp14.730,94 miliar (32 proyek), Industri Logam, Mesin dan

Elektronika sebesar Rp6.526,87 miliar (99 proyek), Industri Makanan sebesar Rp6.435,47 miliar (53 proyek) dan Industri Kertas dan Percetakan sebesar Rp6.146,65 miliar (11 proyek). Dilihat dari lokasinya, PMDN lebih banyak dilakukan di Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Riau dan Sulawesi Tenggara, sedangkan PMA lebih banyak dilakukan DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Riau.

Kondisi yang agak berbeda dari perkembangan investasi swasta terjadi pada tahun 2001 dan tiga tahun setelahnya. Dimana nilai investasi swasta mengalami penurunan, baik persetujuan maupun realisasi investasi swasta. Persetujuan investasi swasta pada tahun 2001 mengalami 53,30 persen, menjadi Rp117.953 miliar, yang terdiri dari PMDN senilai Rp58.673 miliar dan PMA senilai US\$ 5,7 miliar atau Rp59.280 miliar. Sedangkan dilihat dari realisasi investasi, telah terjadi penurunan 64,11 persen menjadi Rp47.423 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp132.151 miliar. Realisasi investasi swasta tersebut baru mencapai 40,20 persen dari total nilai persetujuannya. Kondisi investasi swasta yang kurang menggembirakan berlanjut pada tiga tahun berikutnya, dimana realisasi investasi pada tahun 2002-2004, berturut-turut sebesar Rp40.177 miliar, Rp58.560 miliar dan Rp58.560 miliar, atau mengalami penurunan masing-masing sebesar 69,60 persen, 55,68 persen dan 55,56 persen jika dibandingkan dengan tahun 2000.

Perkembangan realisasi investasi yang kurang menggembirakan selama periode 2001-2004, hal tersebut terkait dengan berbagai macam isu keamanan nasional yang tidak kondusif dan ketidakpastian politik yang mewarnai

perekonomian Indonesia pada periode tersebut. Kondisi keamanan yang kurang kondusif terkait dengan berbagai peristiwa Bom yang terjadi di Indonesia sepanjang periode itu, dan pelaku utama penebar ancaman bom belum seluruhnya tertangkapnya. Peristiwa bom yang terjadi sepanjang periode 2000-2004 diantaranya adalah;

- ✘ Peristiwa bom tahun 2000, berlangsung di Kedubes Filipina, bom di Kedubes Malaysia, bom di Bursa Efek Jakarta, bom malam Natal di 5 Gereja yang berlokasi di Jakarta.
- ✘ Peristiwa bom tahun 2001, berlangsung di Plaza Atrium Senen Jakarta, bom di restoran KFC Makasar dan bom sekolah Australia di Jakarta bom.
- ✘ Peristiwa bom tahun 2002, berlangsung pada malam tahun baru di Jakarta (5 lokasi) dan di Palu (4 lokasi), bom Bali I di Bali, bom di beberapa Gereja di Manado, bom di kantor Konjen Filipina Jakarta dan bom di restoran McDonald's Makasar.
- ✘ Peristiwa bom tahun 2003, berlangsung di kompleks Mabes Polri Jakarta, bom di Bandara Cengkareng Jakarta dan bom di Hotel JW Marriot.
- ✘ Peristiwa bom tahun 2004, berlangsung di Cafe BBC Palopo Sulawesi, bom di Kedubes Australia dan bom di Gereja Immanuel Palu Sulawesi Utara.

Disamping faktor keamanan yang kurang kondusif, masalah ketidakpastian politik yang mewarnai proses *impeachment* dan Sidang Istimewa terhadap kepemimpinan nasional (*melengserkan* Gus Dur) yang sudah mulai diwacanakan sejak bulan Februari 2001. Ketidakpastian kondisi politik dan suhu politik yang makin meningkat oleh beberapa investor ditafsirkan sebagai kondisi

yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian karena apabila Sidang Istimewa gagal dilaksanakan dikhawatirkan terjadi *chaos* dan terjadi konflik internal yang dapat mempengaruhi disintegrasi bangsa sehingga dikhawatirkan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan tidak bisa dijalankan oleh pemerintah. Sementara itu, Sidang Istimewa itu sendiri dilaksanakan selama lima hari pada tanggal 21-25 Juli 2001, yang secara permanen memberhentikan Gus dur dan mengangkat Megawati sebagai Presiden RI yang kelima.

Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sentimen yang negatif bagi investor, terutama investor asing, karena dipandang akan memberikan risiko dan efek negatif yang serius bagi investasi mereka manakala mereka melakukan investasi di Indonesia pada saat itu. Tidak semua investor domestik maupun asing yang bersedia menanggung risiko akibat ketidakpastian yang diakibatkan oleh suhu politik yang memanas dan risiko akibat faktor keamanan yang tidak kondusif.

4.1.2. Perkembangan Faktor Penentu Investasi Swasta di Indonesia

4.1.2.1. Perkembangan Tingkat Bunga dan Kredit Investasi Perbankan

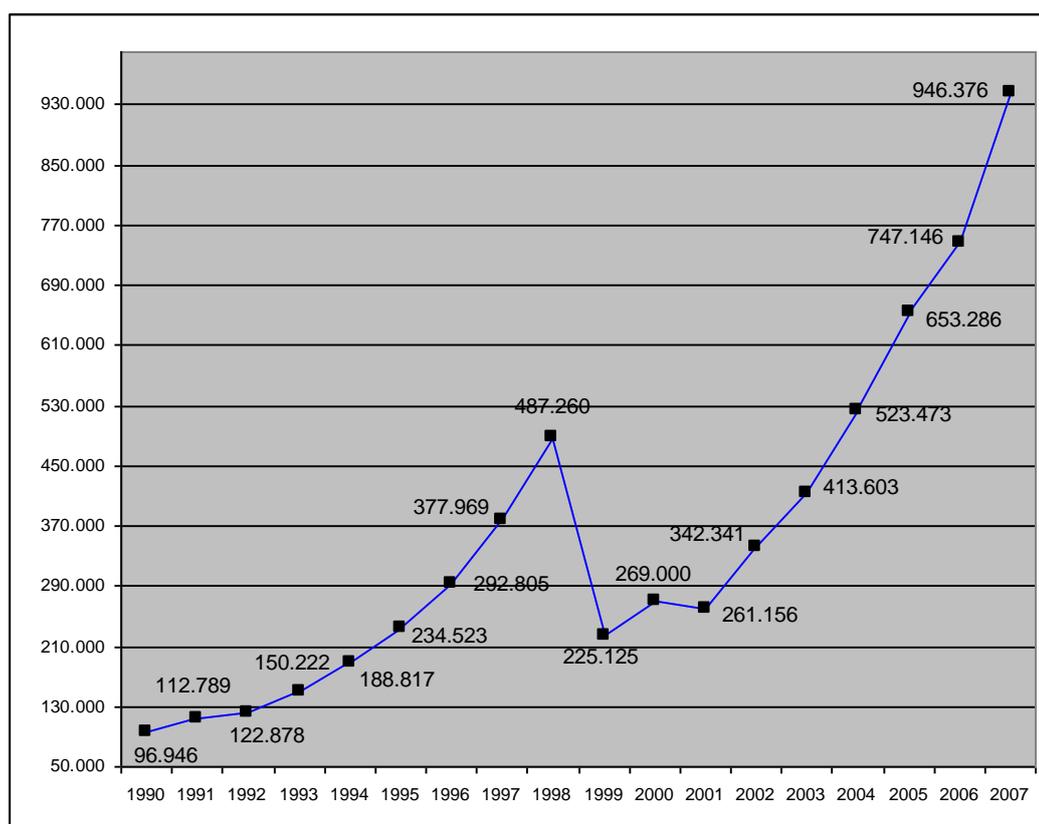
Dalam suatu pembangunan sudah pasti diharapkan terjadinya pertumbuhan. Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan sarana dan prasara, terutama dukungan dana yang memadai. Disinilah perbankan mempunyai peran yang cukup penting karena sesuai dengan fungsinya perbankan Indonesia adalah penghimpun dan penyalur dana masyarakat sedangkan tujuannya adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam sistem perekonomian sekarang ini, perbankan memang bukan merupakan satu-satunya sumber permodalan utama bagi investasi nasional. Tetapi bagi Indonesia, perbankan merupakan sumber permodalan utama dan peranan itu masih relatif besar dan diandalkan dibandingkan dengan pasar modal dan sumber-sumber permodalan lainnya. Bagi bank umum, kredit merupakan sumber utama penghasilan, sekaligus sumber resiko operasi bisnis terbesar. Sebagian dana operasional bank diputar dalam kredit, maka kredit akan mempunyai suatu kedudukan yang istimewa. Kredit dapat dianggap sebagai salah satu sumber dana yang penting dari setiap jenis kegiatan usaha (Sutoyo, 2005).

Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber utama pembiayaan investasi di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan. Pemberian kredit investasi dari sektor perbankan mempunyai peranan yang penting. Penyediaan perkreditan perbankan untuk tujuan investasi dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja, baik melalui perluasan produksi dan maupun dalam mendorong munculnya unit-unit usaha baru.

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit terbagi dalam beberapa macam, yaitu; kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Kredit investasi diberikan oleh bank dengan tujuan membantu para investor untuk mendanai pembangunan proyek baru atau perluasan proyek yang sudah ada. Sedangkan kredit modal kerja diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Sementara itu, kredit konsumsi dipergunakan untuk membiayai operasi bisnis, debitur perorangan menarik kredit untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa konsumtif. Bagi bank umum bila sukses dalam kegiatan bisnis kredit, maka akan berhasil pula operasi bisnis mereka. Sebaliknya, bila mereka terjat dalam banyak kredit bermasalah dan atau macet (baik jumlah

debitur maupun nilai pinjaman), mereka akan menghadapi kesulitan besar. Seperti yang telah terjadi pada saat krisis moneter yang menyebabkan makin banyaknya kredit bermasalah. Hal tersebut pada akhirnya mengakibatkan kehancuran pada Perbankan, dan kepercayaan masyarakat pada perbankan drastis mengalami penurunan.



Sumber : Berbagai edisi SEKI, Bank Indonesia

Gambar 4.3.
Perkembangan Kredit Investasi Bank Umum
(dalam Milyar Rupiah)

Sebagaimana pada Gambar 4.3., terlihat bahwa penyediaan kredit investasi bank umum untuk mendukung investasi menunjukkan peningkatan yang fantastis selama periode 1990–1998. Pada tahun 1998, jumlah kredit investasi yang dapat disalurkan perbankan sebesar Rp407.260 Milyar, atau mengalami peningkatan 4 kali lipat (402,61 persen) dibandingkan tahun 1990, yang hanya sebesar

Rp96.946 Miliar. Kondisi tersebut tidak terlepas dari serangkaian kebijakan deregulasi di bidang moneter, keuangan dan perbankan yang dimulai sejak 1 Juni 1983 dan dilanjutkan paket kebijakan Oktober 1988, paket Desember 1988 dan paket 25 Maret 1989, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut tercermin antara lain dari meningkatnya pengerahan dana masyarakat melalui bank-bank dan pasar modal serta meningkatnya efisiensi dan pelayanan perbankan kepada masyarakat dengan jaringan yang semakin luas sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat suku bunga kredit investasi.

Tabel 4.2.
Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit Investasi Bank Umum
Tahun 1990 – 2007 (dalam Persen)

Tahun	Suku Bunga Kredit Investasi (%)	Tahun	Suku Bunga Kredit Investasi (%)
1990	20,45	1999	27,12
1991	24,99	2000	18,24
1992	23,81	2001	17,82
1993	19,86	2002	18,57
1994	17,38	2003	16,4
1995	18,31	2004	13,9
1996	18,99	2005	13,32
1997	21,09	2006	15,6
1998	31,77	2007	13,32

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, berbagai edisi

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan disektor keuangan dan perbankan yang semakin efisien, pada tanggal 20 Januari 1990 pemerintah mengeluarkan kebijakan penyempurnaan sistem perkreditan nasional (Pakjan 1990). Kebijakan ini bertujuan untuk memantapkan fungsi perbankan dan lembaga keuangan sebagai pengelola dan pelaksana sistem perkreditan nasional. Melalui Pakjan tersebut, bank dan lembaga keuangan didorong untuk dapat lebih mandiri dan mampu melaksanakan pengerahan dana masyarakat serta menyalurkannya secara lebih mantap.

Dampak krisis ekonomi yang melanda pada periode 1997 dan 1998, baru terasa pada tahun 1999, dimana penyaluran kredit investasi mulai melambat dan mengalami penurunan sebesar 53,80 persen, yaitu dari Rp487.260,- milyar menjadi Rp225.125,- milyar. Laporan Bank Indonesia menunjukkan bahwa belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan, antara lain disebabkan oleh masih berlangsungnya konsolidasi internal perbankan dan belum mampunya sektor riil menyerap kredit. Dalam kondisi resesi ekonomi setelah krisis, kadangkala penurunan kredit juga disebabkan oleh adanya “*credit crunch*”, yaitu suatu kondisi dimana terdapat dana yang berlimpah di sektor perbankan tetapi pihak perbankan tidak mau menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit ke sektor riil meskipun permintaan kredit oleh sektor riil meningkat, karena melihat pengalaman buruk di masa lalu dimana banyak ‘korporat kelas kakap’ yang belum melunasi utangnya dan sampai saat ini hanya mampu membayar bunganya saja sehingga utang makin menumpuk.

Konsep *credit crunch* dapat dilihat dari pendapat **Bambang** (2001), yang mengartikan *credit crunch* sebagai *quantity rationing*, dimana suku bunga pinjaman tidak lagi berfungsi dalam menyeimbangkan permintaan dan penawaran kredit. Konsep ini terkait dengan konsep *credit rationing* yang dikemukakan oleh Stiglitz (2000) yang mendefinisikan *credit rationing* sebagai suatu kondisi dimana nasabah tertentu tidak mendapatkan kredit walaupun mereka mau membayar suku bunga pinjaman yang lebih tinggi.

Dengan melihat fakta di lapangan, pada tahun 1999 telah terjadi *credit crunch*, yaitu suatu situasi dimana terjadi penurunan suplai kredit investasi perbankan secara tajam sebagai akibat dari menurunnya kemauan bank dalam menyalurkan kredit investasi pada dunia usaha. Keengganan bank dalam

menyalurkan kredit tersebut tercermin dari meningkatnya *spread* yaitu selisih antara suku bunga pinjaman dan suku bunga dana dan semakin ketatnya kriteria untuk memperoleh kredit. Dalam kondisi yang ekstrim, *credit crunch* terjadi dalam bentuk *credit rationing*, yaitu bank menolak memberikan kredit terhadap nasabah tertentu atau sebagian besar nasabah pada tingkat suku bunga berapapun.

Sementara itu, konsolidasi internal perbankan seperti penerapan *good corporate governance* dan pengelolaan risiko yang baik masih merupakan proses yang dilaksanakan oleh perbankan. Semua hal tersebut sangat dicermati oleh perbankan karena pengaruhnya pada kecukupan modal perbankan atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Di sisi lain, dalam kondisi resesi ekonomi setelah krisis, penurunan kredit perbankan dapat juga terjadi karena melemahnya permintaan kredit dari sektor swasta akibat rendahnya prospek investasi dan belum pulihnya kondisi keuangan perusahaan.

Kondisi setelah krisis ini berbeda dengan periode sebelum krisis (tahun 1997 dan sebelumnya), dimana bank pemerintah maupun bank swasta berlomba-lomba memberikan kredit investasi kepada perusahaan-perusahaan besar. Kondisi perkembangan kredit investasi perbankan setelah periode krisis memang belum sepenuhnya pulih seperti sedia kala, banyak perusahaan terutama yang berskala besar terlibat utang sehingga belum mampu beroperasi secara normal.

Walaupun sempat terjadi penurunan tajam terhadap penyaluran kredit investasi pada tahun 1999 dan 2001, secara perlahan sejak tahun 2002, kredit investasi bank umum mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini seiring dengan meningkatnya portofolio kredit dimana sejak tahun 2002

komposisi aktiva produktif perbankan mulai mengalami pergeseran. Bila pada tahun-tahun sebelumnya aktiva produktif didominasi oleh obligasi pemerintah, maka sejak tahun 2002 mulai beralih ke kredit. Kondisi tersebut berlangsung hingga tahun 2007 dimana porsi kredit terus meningkat sementara porsi SBI dan obligasi pemerintah terus menurun seiring dengan semakin membaiknya fungsi intermediasi perbankan (Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2008).

Dilihat dari bank pemberi kredit investasi, semenjak terjadi krisis ekonomi, kelompok bank BUMN masih mendominasi sebagai penyalur terbesar pemberi kredit investasi termasuk untuk sektor korporat dan infrastruktur, sedangkan kelompok bank swasta (asing dan campuran) cenderung memfokuskan diri pada kredit konsumsi. Kelompok bank swasta merupakan kelompok bank yang paling agresif membidik pasar konsumsi, padahal pada umumnya kredit konsumsi bukan merupakan kredit yang tergolong produktif dan pemberian kredit kepada sektor-sektor non produktif oleh bank jelas tidak sejalan dengan tujuan pemberian kesempatan kepada bank untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena tidak adanya keuntungan yang dipetik pemerintah dalam bentuk tambahan kemampuan penyediaan kredit dari industri perbankan untuk pembangunan perekonomian Indonesia.

Partisipasi pihak asing dalam industri perbankan kurang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan perekonomian nasional, hal tersebut tampak dari kecenderungan bank-bank yang dimiliki pihak asing untuk menyalurkan kreditnya dalam bentuk kredit konsumsi, terutama kredit kendaraan bermotor, kredit multiguna dan kartu kredit. Tendensi kredit konsumsi meningkat

dari tahun ke tahun dan diprediksi terus membesar sejalan dengan bank nasional yang mulai tampak mengerem kredit ke sektor korporat dan infrastruktur (investasi) karena adanya trauma kredit macet dan penyeragaman aktiva produktif bank-bank (Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2007).

Gejolak suku bunga dan inflasi menjadi dua faktor penting yang mempengaruhi aktivitas penyaluran kredit. Keduanya tidak hanya mendorong suku bunga kredit, tapi juga membuat risiko kredit macet menjadi besar. Tetapi dalam kondisi seperti ini, kegiatan kredit perbankan harus tetap berlangsung.

Tabel 4.3.
Perkembangan Rata-rata Pertumbuhan Kredit Investasi
Periode 1990-2007 (dalam persen)

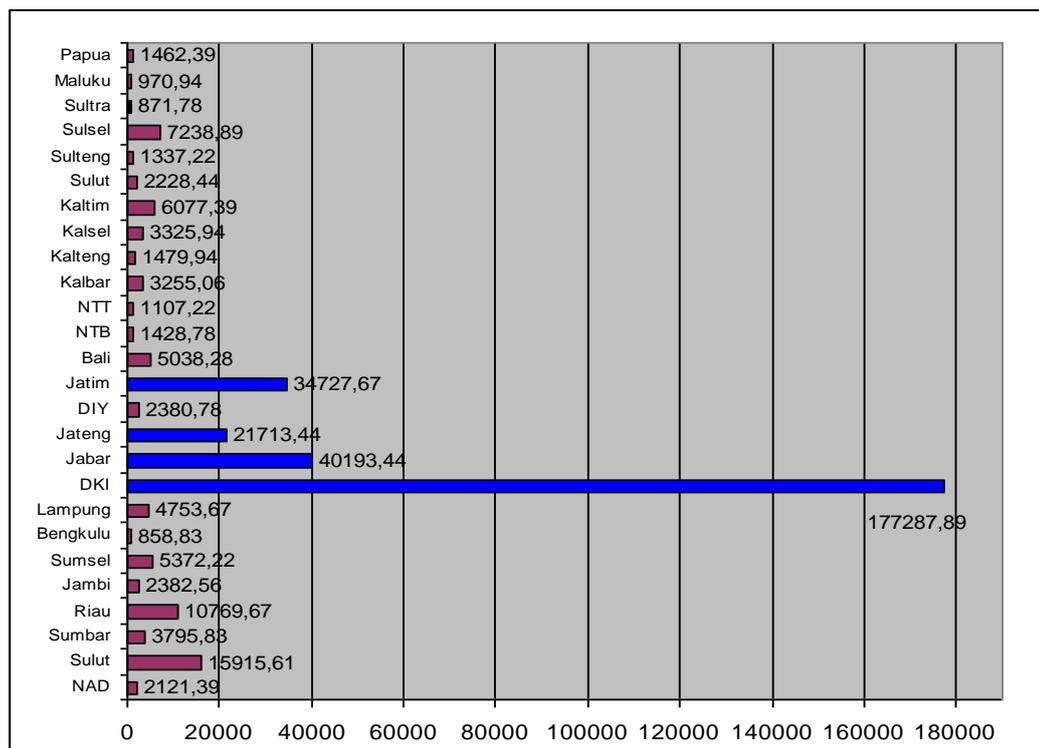
No.	PROPINSI	Pertumbuhan	Rata-rata
1	NAD	18,76	22,24
2	Sumatera Utara	15,96	
3	Sumatera Barat	17,86	
4	Riau	23,48	
5	Jambi	20,73	
6	Sumatera Selatan	16,87	
7	Bengkulu	18,83	
8	Lampung	22,03	
9	DKI Jakarta	16,23	
10	Jawa Barat	19,89	
11	Jawa Tengah	17,29	
12	D.I. Yogyakarta	17,63	
13	Jawa Timur	68,55	
14	Bali	17,24	38,02
15	NTB	19,99	
16	NTT	22,20	
17	Kalimantan Barat	15,07	
18	Kalimantan Tengah	25,01	
19	Kalimantan Selatan	228,88	
20	Kalimantan Timur	22,99	
21	Sulawesi Utara	16,32	
22	Sulawesi Tengah	20,78	
23	Sulawesi Selatan	20,68	
24	Sulawesi Tenggara	26,10	
25	Maluku	16,57	
26	Irian Jaya	21,64	
Nasional		16,52	29,52

Sumber : Berbagai Edisi Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, BI Jakarta

Dilihat dari perkembangan kredit investasi secara regional selama periode penelitian, rata-rata mencapai 29,52 persen. Pertumbuhan kredit investasi di wilayah kawasan timur Indonesia (selanjutnya disingkat dengan KTI) secara umum lebih tinggi dibandingkan wilayah kawasan barat Indonesia (selanjutnya disingkat dengan KBI). Rata-rata pertumbuhan kredit wilayah KTI selama periode penelitian mencapai 38,02 persen, sedangkan wilayah KBI hanya mencapai 22,24 persen.

Apabila dilihat dari perbandingan rata-rata pertumbuhan kredit investasi regional terhadap rata-rata pertumbuhan kredit investasi nasional, diketahui bahwa terdapat 22 propinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan kredit investasi di atas rata-rata pertumbuhan kredit investasi nasional. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi di propinsi Kalimantan Selatan sebesar 228,88 persen, sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah terdapat di propinsi Kalimantan Barat sebesar 15,07 persen. Sedangkan 4 (empat) propinsi lainnya, yaitu Sumatera Utara (15,96 persen), Kalimantan Barat (15,07 persen), Sulawesi Utara (16,32 persen) dan Maluku (16,57 persen) merupakan propinsi dengan rata-rata pertumbuhan kredit investasi di bawah rata-rata pertumbuhan kredit investasi nasional.

Namun dilihat dari rata-rata nilai kredit investasi berdasarkan regional, Propinsi DKI Jakarta merupakan propinsi terbesar dalam penyaluran kredit investasinya, yaitu sebesar Rp177.287,89 milyar dan Propinsi Bengkulu merupakan propinsi terendah dalam penyaluran kredit investasi perbankan, yang hanya sebesar Rp858,83 milyar.



Sumber : Berbagai Edisi Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, BI Jakarta

Gambar 4.4.
Perkembangan Rata-rata Nilai Kredit Investasi Periode 1990-2007
(dalam Milyar Rupiah)

4.1.2.2. Perkembangan Investasi Pemerintah

Investasi pemerintah merupakan salah satu komponen dari pengeluaran pemerintah. Investasi pemerintah menggunakan konsep kepemilikan, yaitu setiap pengeluaran pemerintah pusat untuk kepentingan pemerintah pusat sendiri seperti pembangunan gedung kantor, pembelian mesin, komputer untuk penyelenggaraan tugas pemerintah pusat sebagai penyelenggara administrasi umum (*general administration*) maupun untuk kepentingan masyarakat yang bersifat penyediaan infrastruktur, seperti; pembangunan jalan, irigasi, pelabuhan, jaringan komunikasi, rel kereta api dan sebagainya merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Investasi pemerintah tergambar dalam neraca modal pemerintah yang memperlihatkan bagaimana proses kegiatan pemerintah dalam melaksanakan pembentukan modal (investasi). Investasi pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah ditujukan untuk pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal. Sedangkan barang modal merupakan barang atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi dan mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih. Secara terperinci, barang modal pemerintah, diklasifikasikan menjadi berikut ini (Matrik Investasi Pemerintah, 2006).

- a. Barang modal dalam bentuk konstruksi, baik berupa bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal serta konstruksi lainnya, seperti; jalan, jembatan, instalasi listrik, jaringan komunikasi, bendungan, irigasi dan konstruksi lainnya.
- b. Barang modal dalam bentuk mesin-mesin dan peralatan untuk keperluan kantor dan sebagainya.
- c. Barang modal berupa alat transportasi (kendaraan).
- d. Biaya yang dikeluarkan untuk perubahan, perbaikan dan perluasan dari barang-barang modal, yang dapat meningkatkan produktivitas atau memperpanjang umur pemakaian barang modal tersebut.
- e. Pengeluaran dalam rangka pengembangan dan pembukaan lahan baru seperti areal pemukiman dan areal perkebunan, pematangan tanah (lahan), perluasan areal hutan, penghutan kembali serta penanaman dan peremajaan pohon.
- f. Pembelian ternak produktif untuk keperluan pembiakan, pemerahan susu, pengangkutan dan sebagainya, tetapi tidak termasuk pembelian ternak potong untuk dikonsumsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, investasi pemerintah selanjutnya dapat dirinci menurut wujud barang modalnya, sebagai berikut.

- Tanah, meliputi antara lain; biaya pengadaan atau pembelian tanah, pengurangan tanah, pematangan tanah dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah.
- Peralatan dan mesin, meliputi antara lain; biaya pengadaan atau pembelian alat-alat dan mesin-mesin seperti alat besar, alat pengangkutan, mesin pertanian, alat perkantoran, mesin-mesin industri dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah.
- Gedung dan bangunan, meliputi antara lain biaya pembuatan gedung perkantoran, rumah dinas, monumen dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah.
- Jaringan, meliputi antara lain; pembuatan jalan, jembatan, pengairan atau irigasi, instalasi listrik atau telekomunikasi, pelabuhan dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah.
- Fisik lainnya, meliputi antara lain; pengadaan atau pembelian buku perpustakaan, barang-barang museum, hewan ternak dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Perkembangan investasi pemerintah berdasarkan wujudnya selama periode penelitian, yaitu dari tahun 1990 hingga 2007, terefleksikan sebagaimana Tabel 4.4. dan Gambar 4.5. berikut.

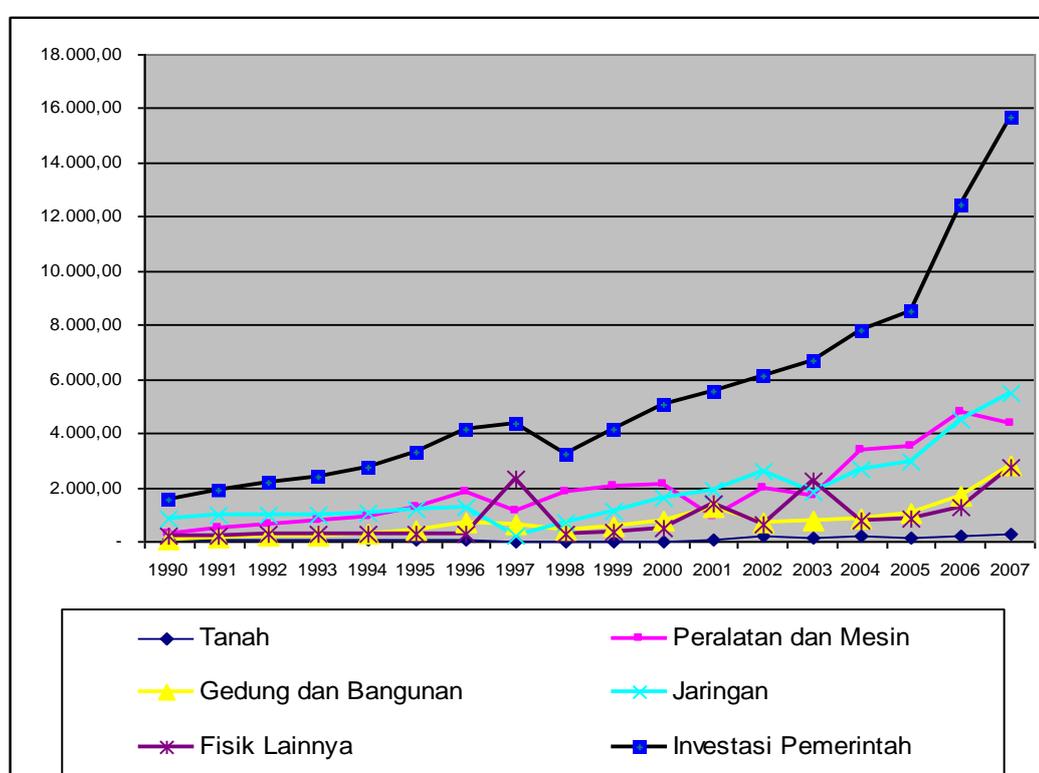
Tabel 4.4.
Perkembangan Investasi Pemerintah Menurut Wujud Barang Modal
Periode 1990-2007 (dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jaringan	Fisik Lainnya	Total Investasi Pemerintah
1990	78,81	307,49	105,20	836,38	207,75	1.535,63
1991	82,63	483,53	157,56	966,16	241,99	1.931,87
1992	80,18	634,84	202,11	984,03	254,77	2.155,93
1993	79,80	772,21	245,84	994,17	268,19	2.360,21
1994	87,51	935,98	304,38	1.087,08	302,75	2.717,70
1995	87,38	1.296,94	455,14	1.168,11	308,57	3.316,14
1996	84,38	1.802,00	668,85	1.253,33	307,47	4.116,02
1997	30,52	1.139,17	624,35	178,58	2.353,31	4.325,93
1998	25,37	1.812,18	397,82	705,42	270,03	3.210,81
1999	28,95	2.034,97	582,37	1.115,10	374,73	4.136,12
2000	30,93	2.127,67	799,65	1.620,09	492,37	5.070,71
2001	67,88	927,48	1.239,05	1.920,05	1.409,30	5.563,74
2002	219,16	1.946,92	704,91	2.591,12	640,75	6.102,86
2003	166,91	1.720,64	756,71	1.813,67	2.242,02	6.699,94
2004	175,88	3.350,01	848,93	2.637,26	788,97	7.801,05
2005	174,16	3.495,93	1.045,39	2.948,15	871,56	8.535,19
2006	238,64	4.760,29	1.680,43	4.483,03	1.299,11	12.461,50
2007	302,12	4.371,59	2.821,00	5.465,27	2.714,41	15.674,40
Rata-rata	113,40	1.884,44	757,76	1.820,39	852,67	5.428,65

Sumber : Berbagai edisi Matrik Investasi Pemerintah, BPS Jakarta

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4. dan Gambar 4.5., investasi pemerintah selama periode penelitian – kecuali tahun 1998 – memperlihatkan kondisi yang terus meningkat setiap tahunnya dengan proporsi investasi pemerintah untuk peralatan dan mesin serta investasi pemerintah untuk jaringan lebih besar dibandingkan investasi pemerintah untuk infrastruktur lainnya, seperti tanah, gedung dan bangunan dan investasi fisik lainnya. Proporsi investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jaringan seperti jaringan jalan, irigasi, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi), rata-rata mencapai sebesar 34,79 persen atau Rp1,888,42 miliar per tahun dari rata-rata keseluruhan pengeluaran untuk barang modal pemerintah. Kemudian diikuti secara

berturut-turut oleh investasi pemerintah untuk peralatan dan mesin sebesar 34,60 persen atau Rp1.878,09 miliar per tahun, investasi pemerintah untuk infrastruktur fisik lainnya sebesar 15,34 persen atau Rp832,66 miliar per tahun, investasi pemerintah untuk gedung dan bangunan sebesar 12,91 persen atau Rp700,82 miliar per tahun dan investasi pemerintah untuk infrastrktur tanah sebesar 2,37 persen atau Rp128,66 miliar per tahun.

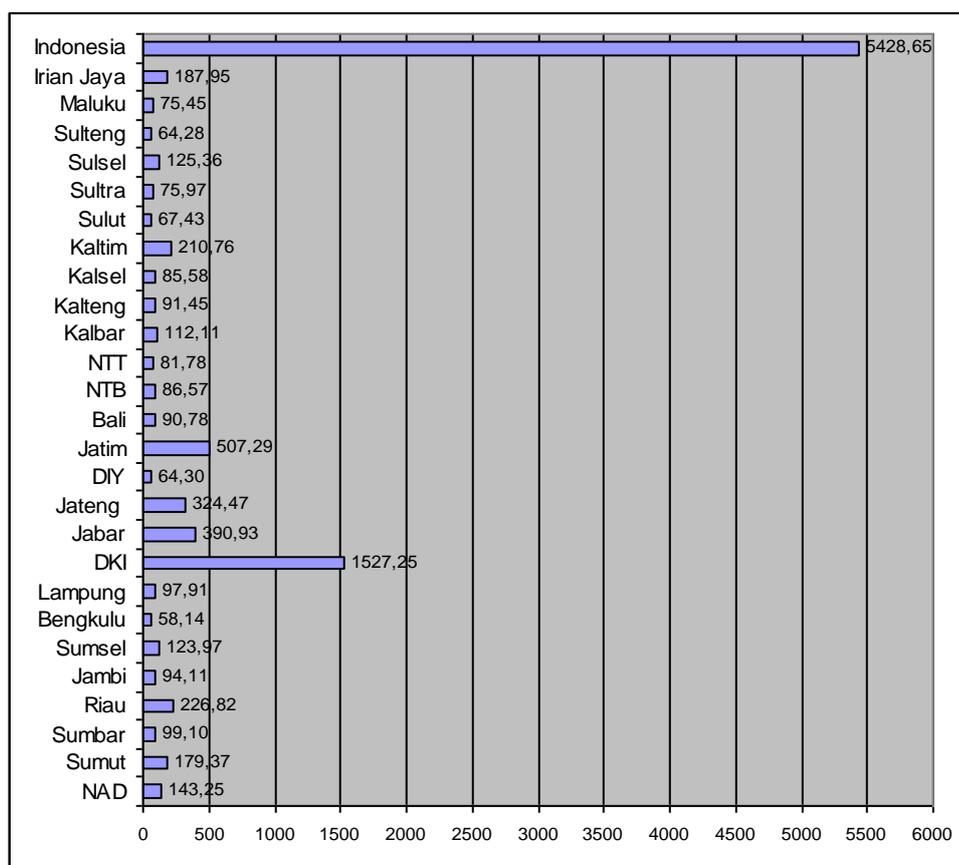


Sumber : Berbagai edisi Matrik Investasi Pemerintah, BPS Jakarta

Gambar 4.5.
Perkembangan Investasi Pemerintah Periode 1990-2007
Menurut Wujudnya (dalam Miliar Rupiah)

Dilihat dari investasi pemerintah berdasarkan regional sebagaimana terlihat pada Gambar 4.6., diketahui bahwa rata-rata investasi pemerintah per tahun lebih banyak dilaksanakan di Pulau Jawa. Selama periode penelitian, DKI Jakarta merupakan propinsi yang mendapatkan alokasi investasi pemerintah

terbesar dibandingkan propinsi yang lainnya, dengan rata-rata nilai investasi sebesar Rp1.527,25 miliar per tahun, diikuti tiga propinsi lainnya yaitu Jawa Timur dengan rata-rata investasi sebesar Rp507,29 miliar per tahun, Jawa Barat rata-rata sebesar Rp390,93 miliar per tahun dan Jawa Tengah rata-rata sebesar Rp324,47 miliar per tahun.



Sumber : Berbagai edisi Matrik Investasi Pemerintah, BPS Jakarta

Gambar 4.6.
Perkembangan Rata-rata Investasi Pemerintah Periode 1990-2007
Menurut Propinsi (dalam Miliar Rupiah)

Pada tahun 1990 sebagai tahun permulaan penelitian, nilai investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebesar Rp1.535,63 miliar, dengan alokasi wujud barang modal untuk tanah sebesar Rp78,81 miliar (5,13 persen), peralatan dan mesin sebesar Rp307,49 miliar (20,02 persen), gedung dan bangunan sebesar

Rp105,20 miliar (6,85 persen), jaringan sebesar Rp836,38 miliar (54,46 persen) dan untuk fisik lainnya sebesar Rp207,75 miliar (13,53 persen). Melihat alokasi investasi pemerintah tersebut di atas, menunjukkan bahwa alokasi investasi pemerintah lebih besar diarahkan untuk peningkatan jaringan terutama untuk perluasan jaringan listrik, jaringan jalan raya, jaringan kereta api dan pembangunan dermaga.

Pada tahun 1990, telah dilakukan perluasan sarana tenaga listrik untuk mendorong pertumbuhan sektor industri dan kegiatan ekonomi lainnya serta memenuhi kebutuhan untuk rumah tangga yang semakin meningkat, diantaranya pembangunan jaringan transmisi dengan 879,78 kms (kilometer sirkit), kapasitas gardu induk 1.340,42 MVA, jaringan tegangan menengah 9.058,21 kms, jaringan tegangan rendah 9.733,01 kms dan gardu distribusi 568,90 MVA, yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali. Disamping jaringan listrik, pada tahun yang sama juga telah dilakukan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan baru, yang dilakukan antara lain di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Banda Aceh, Medan, Palembang, Banjarmasin, Ujung Pandang, Ambon dan Jayapura (Matrik Investasi Pemerintah Tahun 1990 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Tanggal 16 Agustus tahun 1991).

Sementara itu, di bidang perkeretaapian telah dilakukan rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana kereta api mencakup kegiatan rehabilitasi lok, kereta penumpang, gerbong barang dan pengadaan lok diesel. Dalam usaha meningkatkan keselamatan operasi kereta api dilakukan pemasangan perangkat sinyal semi elektronik, sinyal elektronik dan pemasangan pintu perlintasan listrik. Di bidang angkutan laut, hasil yang dicapai pada tahun 1990 antara lain adalah rehabilitasi lapangan penumpukan dan pembangunan dermaga.

Pada tahun 1990, investasi pemerintah juga diarahkan untuk belanja gedung dan bangunan, diantaranya pembangunan gedung sekolah dasar, ruang kelas serta rehabilitasi berat dan ringan gedung Sekolah Dasar Negeri. Di tingkat SLTP dan SLTA telah dibangun gedung dan ruang kelas baru, ruang perpustakaan, ruang laboratorium dan rehabilitasi gedung yang mengalami kerusakan. Pada jenjang pendidikan tinggi, fasilitas pendidikan juga dikembangkan, dimana telah dibangun ruang kuliah/ kantor, ruang laboratorium, ruang perpustakaan dan rehabilitasi gedung. Daerah-daerah investasi pemerintah tersebut tersebut antara lain; Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Irian Jaya (Matrik Investasi Pemerintah Tahun 1990 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI Tanggal 16 Agustus tahun 1991).

Pada periode 1991-1992, investasi pemerintah secara berturut-turut dapat ditingkatkan menjadi Rp1.931,87 miliar dan 2.155,93 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 25,80 persen pada tahun 1991 dan 40,39 persen pada tahun 1992 dibandingkan tahun 1990, dengan alokasi investasi terbesar digunakan untuk infrastruktur jaringan listrik, jalan, irigasi dan di bidang infrastuktur gedung dan bangunan.

Pada tahun 1993, jumlah investasi pemerintah juga mengalami peningkatan dari Rp2.155,93 miliar menjadi Rp2.360,21 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 9,48 persen. Hal tersebut tidak terlepas dari meningkatnya investasi pemerintah dalam wujud peralatan dan mesin (21,64 persen), gedung dan bangunan (21,64 persen), jaringan (1,03 persen) dan fisik lainnya (5,26

persen). Sementara pada tahun yang sama, investasi pemerintah dalam wujud tanah mengalami penurunan sebesar 0,48 persen. Namun demikian, dari total investasi pemerintah pada tahun 1993, alokasi investasi pemerintah untuk infrastruktur jaringan, masih dominan dibandingkan yang lain, yang mencapai 42,12 persen dari total anggaran untuk investasi pemerintah. Meningkatnya investasi pemerintah dalam wujud gedung dan bangunan, salah satunya terkait dengan pembangunan terminal peti kemas di 5 lokasi di Jawa dan Sumatera, yaitu di Gedebage Bandung, Rambipuji di Jember, Jebres di Solo, Kertapati di Palembang, dan Tebingtinggi dalam rangka melayani pesatnya kenaikan angkutan barang dengan kereta api.

Untuk jaringan jalan, diantaranya telah dibangun jalan layang kereta api sepanjang 9 kilometer di DKI Jakarta. Disamping itu, telah dibangun pula jaringan jalan nasional sepanjang 2.120 ribu kilometer di Sumatera, Jawa dan Irian Jaya sehingga panjang jalan yang ada sampai tahun 1993, telah mencapai 244,2 ribu kilometer, yang terdiri dari jalan nasional 17,8 ribu kilometer, jalan provinsi 32,3 kilometer, jalan kabupaten 168,6 kilometer, dan jalan perkotaan 25.518 kilometer dimana dari seluruh jaringan jalan tersebut, 10,4 ribu kilometer berfungsi sebagai jalan arteri, 39,6 ribu kilometer sebagai jalan kolektor, dan 194,1 ribu kilometer berfungsi sebagai jalan lokal.

Periode tahun 1994-1997, investasi pemerintah diarahkan untuk bidang pembangunan transportasi udara, dimana telah dilakukan pembangunan prasarana bandar udara berupa landasan, terminal, bangunan operasional serta penataan kelas bandar udara. Untuk meningkatkan pelayanan tenaga listrik, dalam periode 1994-1997 telah ditingkatkan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 1.535

MW, jaringan transmisi sepanjang 427,6 kms, gardu induk sebesar 3.635 MVA, jaringan distribusi tegangan rendah sepanjang 2.734,2 kms dan gardu distribusi sebesar 112,7 MVA. Di samping itu juga, pada periode yang sama telah dilanjutkan pembangunan stasiun pemantauan komposisi atmosfer global di Bukit Koto Tabang, dan peningkatan kemampuan Pusat Gempa Regional IV dan V, masing-masing di Ujung Pandang dan Jayapura. Dibidang jaringan jalan, dalam tahun 1995-1997 telah dilakukan peningkatan jalan arteri dan kolektor sepanjang 5.984 kilometer dan penggantian jembatan sepanjang 15.301 meter. Di bidang gedung dan bangunan, dengan tujuan memperluas kesempatan belajar di tingkat SLTP terutama dalam rangka program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, pada tahun 1994-1997 telah dibangun sebanyak 236 unit gedung baru (UGB), 5.220 ruang kelas baru (RKB) serta pembangunan ruang laboratorium IPA dan ruang perpustakaan masing-masing 81 dan 309 ruangan. Di bidang fisik lainnya, pada periode yang sama telah dilakukan pengadaan buku pelajaran sebanyak 32,3 juta eksemplar, yang penyebarluasannya lebih diprioritaskan bagi murid-murid SD dan MI di daerah tertinggal.

Pada tahun 1998, investasi pemerintah mengalami penurunan sebesar 25,78 persen menjadi Rp3.210,81 miliar dibandingkan tahun 1997 yang sebesar Rp4.325,93 miliar. Kondisi ini terkait dengan krisis ekonomi dan keuangan yang melanda pada tahun 1997. Pengalaman internasional mengatakan, bila suatu negara mengalami krisis ekonomi, maka pertama kali yang dikorbankan dalam pembangunannya adalah pembangunan disektor infrastruktur (Bappenas, 1998). Pada tahun 1998 sebagai akibat terbatasnya sumber pembiayaan pemerintah, terdapat 91 proyek besar dari investasi pemerintah yang ditunda, seperti pembangunan jalan tol, kelistrikan, gas, air minum dan kimia.

Menyadari pentingnya investasi pemerintah terhadap perbaikan iklim investasi dan pembangunan infrastruktur dapat mendorong akselerasi kegiatan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan alokasi jumlah investasi yang nilainya setara dengan investasi sebelum terjadinya krisis ekonomi. Hal tersebut, mulai dapat diwujudkan sejak tahun 2000 hingga 2007 dimana nilai investasi pemerintah pada tahun 2000 yang sebesar Rp5.070,71 miliar, lebih besar 17,22 persennya jika dibandingkan nilai investasi pemerintah pada tahun 1997 yang sebesar Rp4.325,93 miliar. Nilai investasi pemerintah tersebut selanjutnya dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya, masing-masing menjadi Rp5.563,74 miliar pada tahun 2001 (meningkat 9,72 persen), Rp6.102,86 miliar pada tahun 2002 (9,69 persen), Rp6.699,94 miliar pada tahun 2003 (meningkat 9,78 persen), Rp7.801,05 miliar pada tahun 2004 (16,43 persen), Rp8.535,19 miliar pada tahun 2005 (9,41 persen), Rp12.461,50 miliar pada tahun 2006 (meningkat 46,00 persen) dan Rp15.674,40 miliar pada tahun 2007 (25,78 persen). Selama periode 2000-2007, alokasi penggunaan belanja modal relatif tidak berubah. Komposisi penggunaan belanja modal sekitar 34 persen untuk masing-masing peralatan/mesin dan jaringan infrastruktur, sekitar 15 persen untuk gedung dan bangunan, dan sisanya untuk tanah dan fisik lainnya.

Investasi pemerintah selama periode 2000-2007, dalam jaringan, diantaranya dialokasikan untuk pembangunan jaringan jalan, jaringan kereta api, jaringan listrik dan pelabuhan. Beberapa investasi pemerintah untuk pembangunan jaringan jalan dilaksanakan pada tahun 2001 antara lain, dimulainya pembangunan ruas jalan tol Cikampek–Padalarang dan Surabaya–Mojokerto.

Disamping itu, saat ini sedang dipersiapkan untuk pembangunan jalan lingkaran luar Jakarta atau disebut Jakarta *Outer Ring Road* (JORR), Demikian juga sedang dilakukan persiapan untuk ruas-ruas jalan tol lainnya yang tercantum dalam Keppres Nomor 39 Tahun 1997 dan Keppres Nomor 15 Tahun 2002. Pada tahun yang sama pula, telah dimulai peningkatan jalan lintas Timur di provinsi Lampung antara Bakauheni–Mengala–Bujungtenuk dan pembangunan tahap awal pengkajian Jembatan Surabaya–Madura antara Jawa–Madura sebagai upaya untuk melancarkan arus barang dan jasa antar wilayah melalui kerjasama dengan pemerintah Cina, yang juga melaksanakan kajian jembatan-jembatan bentang panjang seperti jembatan Selat Sunda dan Jembatan Selat Bali.

Sementara, pada tahun 2005, telah dilakukan pembangunan infrastruktur jalan di Kepulauan Riau dan kelanjutan proyek Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh, perbaikan jalan trans Kalimantan, pembangunan jalan Palangkaraya-Buntok dan ruas jalan di Kalimantan Tengah, serta perpanjangan landasan pacu Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya. Sementara pada tahun 2006, telah dibangun proyek jalan tol Bandara Juanda-Jend. A Yani-Surabaya, tol Gempol-Pandaan, tol Surabaya-Mojokerto, tol Bekasi Timur-Cawang-Kampung Melayu dan tol Semarang-Batang.

Sedangkan di tahun 2007, telah dilakukan penyiapan tanah untuk pembangunan jalan tol (ruas Solo–Ngawi–Kertosono); dan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk beberapa ruas jalan tol (ruas Pasuruan–Probolinggo), Penyelesaian Jembatan Suramadu, dan peningkatan jalan/jembatan pada lintas utama dan lintas strategis yang meliputi Pantura Jawa, Lintas Timur Sumatera, Lintas Selatan Kalimantan, dan Lintas Barat Sulawesi, seluruhnya sepanjang 1.170 km dan penggantian jembatan sepanjang 8.902 m.

Untuk jaringan kereta api, telah dibangun jalur ganda lintas perkeretaapian yang sudah jenuh, diantaranya melanjutkan pembangunan jalur ganda Cikampek–Cirebon; jalur ganda parsial Cikampek–Padalarang serta persiapan pembangunan jalur ganda kedua Manggarai–Bekasi (Cikarang) dan lintas selatan Jawa (Yogyakarta-Solo), yang dapat diselesai pada 2004. Pada tahun 2005, telah dibangun ruas jalan jalur ganda kereta api Yogyakarta-Kroya.

4.1.2.3. Perkembangan Tingkat Inflasi

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan dijumpai di hampir semua negara di dunia adalah fenomena inflasi. Definisi inflasi secara singkat adalah kecenderungan dari harga-harga yang meningkat secara umum dan terus menerus (Budiono, 1999). Sementara Aulia Pohan (2008), mengemukakan bahwa laju inflasi merupakan gambaran harga-harga. Harga yang membumbung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi. Sementara harga yang relatif stabil tergambar dalam inflasi yang rendah.

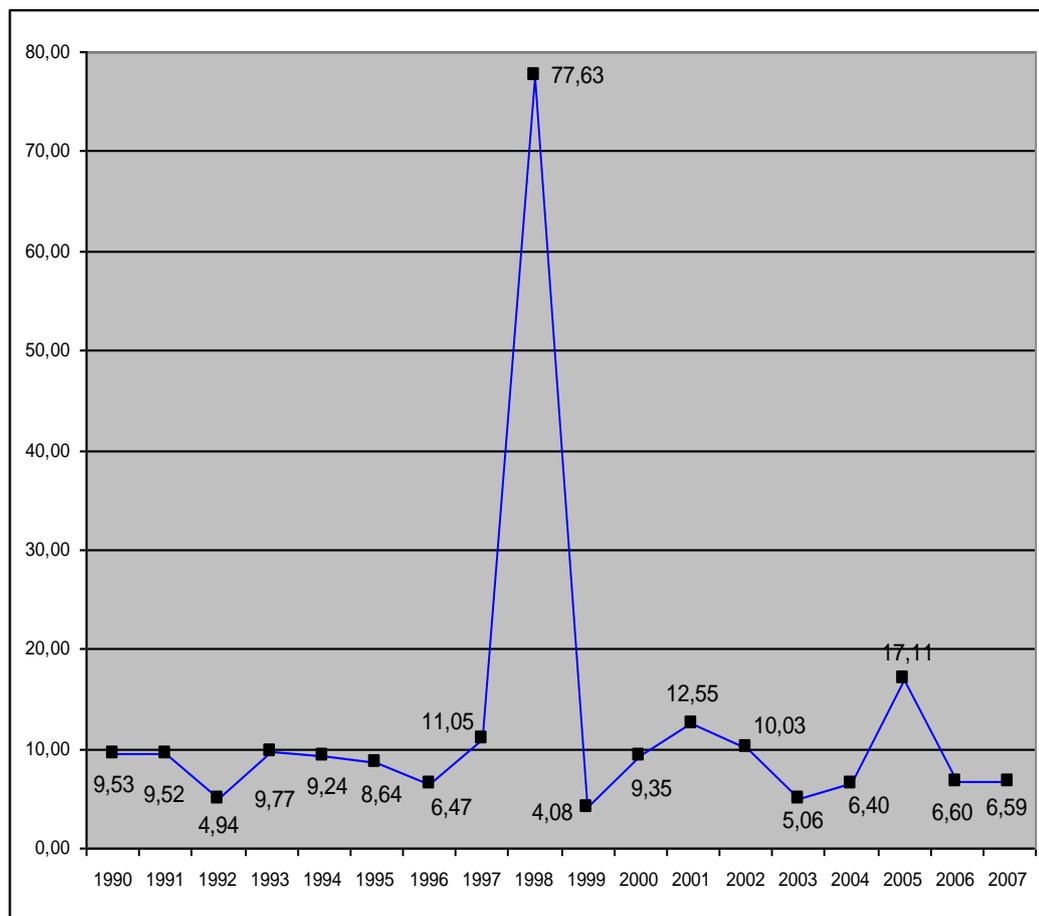
Tingkat inflasi yang terjadi dalam suatu negara merupakan salah satu indikator untuk mengukur baik buruknya masalah ekonomi yang dihadapi suatu negara. Bagi negara yang perekonomiannya baik, tingkat inflasi yang terjadi relatif rendah, berkisar antara 2 sampai 4 persen per tahun. Namun demikian, ada juga negara yang menghadapi tingkat inflasi yang tinggi dan lebih serius (sangat tinggi). Tingkat inflasi yang tinggi, berkisar antara 7 sampai 10 persen, sedangkan inflasi yang sangat tinggi disebut hiper inflasi (*hyper inflation*), manakala nilainya di atas 30 persen. Negara Indonesia adalah salah satu contoh yang pernah mengalami hiper inflasi, yaitu pada tahun 1966 dengan tingkat inflasi sebesar 650 persen.

Keberadaan inflasi sering diartikan sebagai salah satu masalah utama dalam perekonomian negara, selain pengangguran dan ketidakseimbangan neraca pembayaran. Namun demikian, meskipun menjadi salah satu masalah besar dalam perekonomian, dampak positif inflasi akan maksimal dengan tingkat inflasi yang moderat, berkisar antara 5 – 6 persen per tahun (**Aulia Pohan**, 2008).

Dilihat dari proses penghitungannya, laju inflasi dapat dihitung berdasarkan perubahan indeks harga konsumen (IHK) dari satu periode ke periode berikutnya. Berdasarkan indeks tersebut, selama periode analisis, secara umum tingkat inflasi Indonesia menunjukkan trend yang fluktuatif.

Berdasarkan Gambar 4.7., terlihat bahwa meskipun tingkat harga cukup berfluktuatif, namun selama periode 1990 – 1996, tingkat inflasi masih terjaga di bawah kisaran 2 digit. Sementara periode setelah itu, terutama periode 1997-1998, perkembangan indeks harga relatif tidak stabil, dengan nilai inflasi yang cukup besar (melebihi dua digit), yaitu sebesar 11,05 persen dan 77,63 persen. Kondisi yang sama terjadi pula pada periode tahun 2001, 2002 dan 2005 dengan nilai inflasi masing-masing sebesar 12,55 persen, 10,03 persen dan 17,11 persen.

Perkembangan inflasi yang cukup besar pada periode 1997-1998, disebabkan oleh adanya krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan Juli 1997, yang disebabkan oleh meningkatnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan menguatnya mata uang dollar Amerika terhadap hampir semua mata uang utama dunia dan besarnya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri telah menyebabkan inflasi mengalami peningkatan yang signifikan pada akhir tahun 1997 menjadi 11,05 persen. Padahal sampai dengan Juni 1997, inflasi Indonesia hanya 4,96 persen.



Sumber : Berbagai edisi, Indikator Ekonomi Indonesia, BPS Jakarta

Gambar 4.7.
Perkembangan Inflasi Indonesia Periode 1990-2007

Disamping itu, tinggi inflasi pada tahun 1997 juga disebabkan oleh musim kering yang menyebabkan harga kelompok bahan makanan meningkat. Tekanan inflasi pada tahun 1997 juga diakibatkan oleh meningkatnya harga barang yang memiliki kandungan impor. Disisi lain, permintaan barang dan jasa meningkat akibat isu ketidakpastian pengadaan barang dan jasa. Pembelian barang yang melampaui batas disebabkan pada waktu yang sama masyarakat memegang uang berlebihan, seperti tercermin dari meningkatnya uang beredar pada tahun itu.

Makin kuatnya tekanan inflasi berlanjut pada tahun 1998, inflasi semakin tidak terkendali akibat krisis moneter, dimana laju inflasi membumbung tinggi dan mencapai 77,63 persen dan merupakan inflasi terparah dalam perekonomian Indonesia. Disamping itu, dampak depresiasi rupiah hingga mencapai level Rp14.200,- per dollar Amerika, telah membuat kurs rupiah menjadi terlalu rendah (*undervalue*) dan tidak sesuai dengan perkembangan fundamental perekonomian. Tekanan-tekanan terhadap rupiah yang terus berlanjut ini, telah mendorong inflasi menjadi sangat tinggi pada akhir tahun 1998. Nilai tukar yang terus melemah telah menjadi penyebab keterpurukan sektor riil karena *import content* yang tinggi sehingga sisi penawaran tidak mampu memenuhi sisi permintaannya yang mendorong tingkat inflasi sedemikian beratnya pada tahun 1998.

Agar keterpurukan ekonomi tidak terus berlanjut, akibat penurunan nilai kurs rupiah terhadap dollar maka pemerintah selanjutnya menerapkan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) pada akhir tahun 1999, yang dalam perkembangannya, telah mendorong penguatan nilai tukar rupiah selama tahun 1999. Hasil tersebut tentu saja memberikan kontribusi terhadap nilai inflasi sehingga inflasi dapat ditekan hingga di bawah dua digit (4,08 persen) pada tahun 1999.

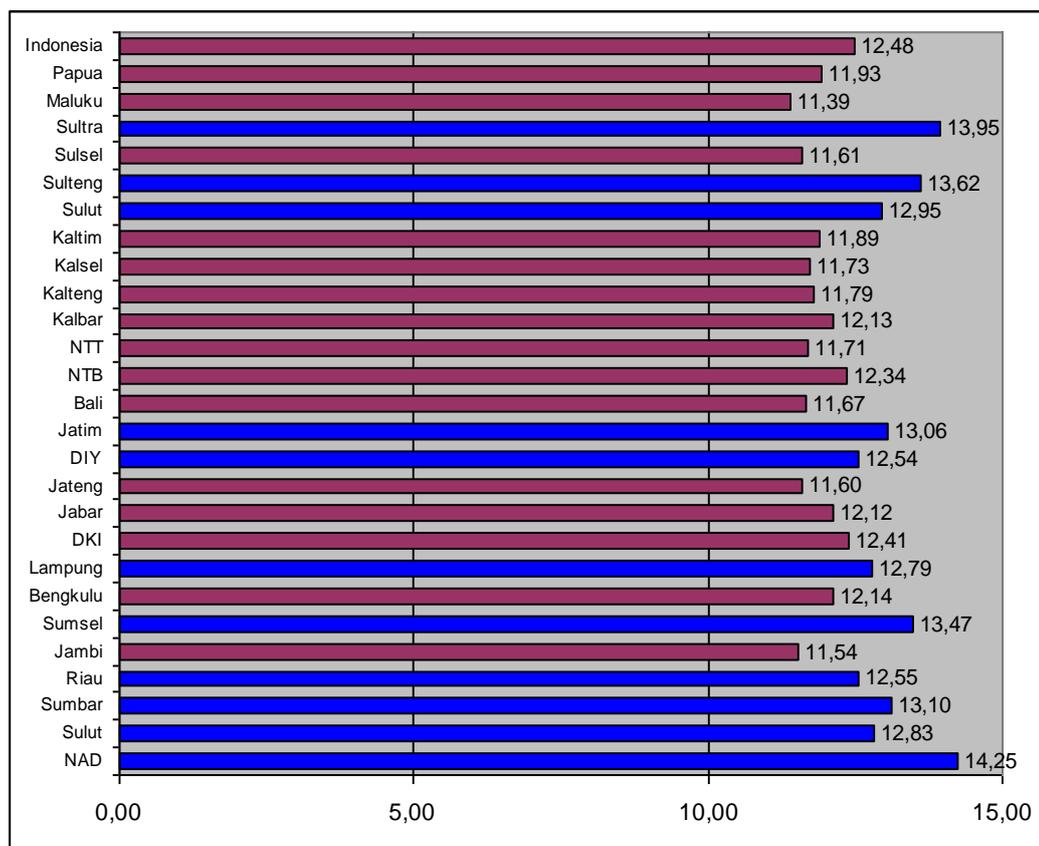
Sementara itu, kondisi inflasi di Indonesia pada tahun 2001, lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik yang makin memanas pada tahun 2001, terutama digelarnya Sidang Istimewa MPR pada 21 Juli 2001, untuk memilih kepemimpinan nasional baru pasca di-*impeachment* Gus Dur sebagai presiden Indonesia. Inflasi pada tahun 2001 terkait dengan kekhawatiran tidak berhasilnya Sidang Istimewa MPR dalam memilih kepemimpinan nasional yang baru dan

kondisi keamanan yang tidak kondusif sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi barang/jasa dan kebutuhan pokok yang berlebih. Tentu saja hal ini mendorong harga menjadi meningkat, sehingga tingkat inflasi akhir tahun 2001 menjadi 12,55 persen.

Membaiknya situasi politik seiring dengan berhasilnya Sidang Istimewa MPR dalam memilih kepemimpinan nasional yang baru. Kondisi ini diharapkan menjadi landasan baru bagi Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga lambat-laun mendorong ekonomi pada kondisi yang normal, dimana sektor riil dapat tumbuh secara perlahan. Akibatnya, nilai inflasi pada akhir tahun 2002 meskipun di atas dua digit, tetapi nilainya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 10,03%.

Dalam periode tahun 2003-2007 (kecuali tahun 2005), tingkat inflasi menunjukkan perkembangan yang cukup stabil. Tingginya inflasi pada tahun 2005 lebih disebabkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM dua kali dalam satu tahun (Maret dan Oktober 2005), yang merupakan respon atas melambungnya harga minyak dunia dan berlanjutnya kondisi moneter ketat di tingkat global. Respon atas kenaikan harga BBM ditunjukkan dengan naiknya tarif angkutan dalam kota setelah kenaikan harga BBM, dalam rangka menyelamatkan *public transportation* dan hal tersebut menyebabkan harga barang dan jasa mengalami kenaikan sebagai dampak meningkat biaya distribusi.

Sementara itu, rendahnya inflasi tahun 2006 dan 2007, dibandingkan inflasi tahun 2005, terjadi karena tetap terjaganya harga komoditas strategis, penundaan tarif dasar listrik (TDL) dan karena keberhasilan menjaga stabilitas makro ekonomi, apresiasi nilai tukar, dan ekspektasi inflasi yang terjaga.



Sumber : Berbagai edisi, Indikator Ekonomi Indonesia, BPS Jakarta

Gambar 4.8.
Perkembangan Rata-rata Inflasi Menurut Propinsi Periode 1990-2007

Dilihat dari rata-rata perkembangan inflasi menurut wilayah, terlihat bahwa beberapa daerah propinsi masih tercatat memiliki rata-rata inflasi yang relatif tinggi dan berada di atas inflasi nasional. Bahkan untuk propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), rata-rata inflasi mencapai 14,25% atau tertinggi dibandingkan dengan propinsi lainnya di seluruh Indonesia selama periode penelitian, diikuti oleh Propinsi Sulawesi Utara (13,95 persen) dan Propinsi Sulawesi Tenggara (13,62 persen). Tingginya tingkat ketergantungan wilayah NAD terhadap pasokan barang dari luar NAD maupun antarprovinsi di Sumatera, yang disertai oleh belum membaiknya kondisi infrastruktur turut menyebabkan

rentannya harga barang-barang di NAD terhadap *shocks*. Faktor yang menyebabkan tingginya inflasi di daerah-daerah tersebut adalah pengaruh gangguan pasokan barang, yang disebabkan oleh kelangkaan pasokan, buruknya infrastruktur untuk distribusi, *span of distribution* yang panjang, perilaku penimbunan dan pungli serta pengaruh musiman. Sementara itu, rata-rata inflasi di 16 kota lainnya relatif stabil dan berada di bawah rata-rata inflasi nasional. Hal ini ditunjang oleh lebih stabilnya kondisi sarana dan prasarana perekonomian.

Khusus untuk daerah NAD, perkembangan rata-rata inflasi di Provinsi NAD yang tinggi tersebut diakibatkan karena kondisi perekonomian serta kerusakan infrastruktur pendukungnya yang sepenuhnya belum pulih, pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tahun 2004 lalu. Perkembangan infrastruktur yang belum kondusif dan kondisi berbagai daerah di Indonesia yang rawan bencana alam merupakan faktor yang berpotensi menyebabkan gangguan dalam distribusi barang, terutama barang kebutuhan pokok. Terganggunya kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok akan mendorong kenaikan harga barang tersebut, yang juga berpotensi meningkatkan ekspektasi kenaikan harga yang dapat memicu peningkatan inflasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya kenaikan harga BBM, yang makin meningkatkan biaya distribusi menuju propinsi tersebut.

Upaya melakukan pengendalian inflasi daerah dilakukan dengan mengajak *stakeholders* di daerah melalui beberapa strategi pendekatan sebagai berikut (Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2007) :

- a. Memperkuat aspek kelembagaan antara Bank Indonesia di daerah dan Pemda, terutama dalam rangka menanamkan komitmen pihak terkait untuk bersama-sama mengendalikan inflasi di daerah mengingat terciptanya inflasi yang rendah dan stabil merupakan kebutuhan bersama.
- b. Mengidentifikasi sumber-sumber kelangkaan pasokan barang kebutuhan pokok di daerah. Adapun tujuan dari strategi itu adalah untuk menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, memperpendek jalur distribusi, memperbaiki infrastruktur di daerah, dan menghapus perilaku penimbunan dan pungutan liar.
- c. Melakukan diseminasi untuk memberikan pemahaman masyarakat di daerah terkait kondisi dan prospek ekonomi serta risiko tekanan inflasi.

Terkait dengan penguatan aspek kelembagaan, Bank Indonesia melalui KBI di masing-masing provinsi telah meningkatkan efektivitas kerja sama dengan Pemda. Terdapat dua format kerja sama yang akan dikembangkan dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2005, yaitu mengoptimalkan kerja sama pembentukan Tim Pengendalian Inflasi di Daerah (TPID).

Adapun tujuan dari langkah memperkuat kelembagaan tersebut adalah menyampaikan kepedulian mengenai tekanan inflasi di masing-masing daerah dan upaya untuk menanganinya. Terdapat tiga fokus dari pengendalian inflasi daerah, yaitu:

- (i) mengamankan kecukupan pasokan;
- (ii) meminimalkan gangguan harga yang bersumber dari peraturan daerah (retribusi dan pajak); dan
- (iii) memberikan pemahaman kondisi dan prospek ekonomi serta risiko tekanan inflasi di daerah.

4.1.2.4. Perkembangan Nilai Tukar

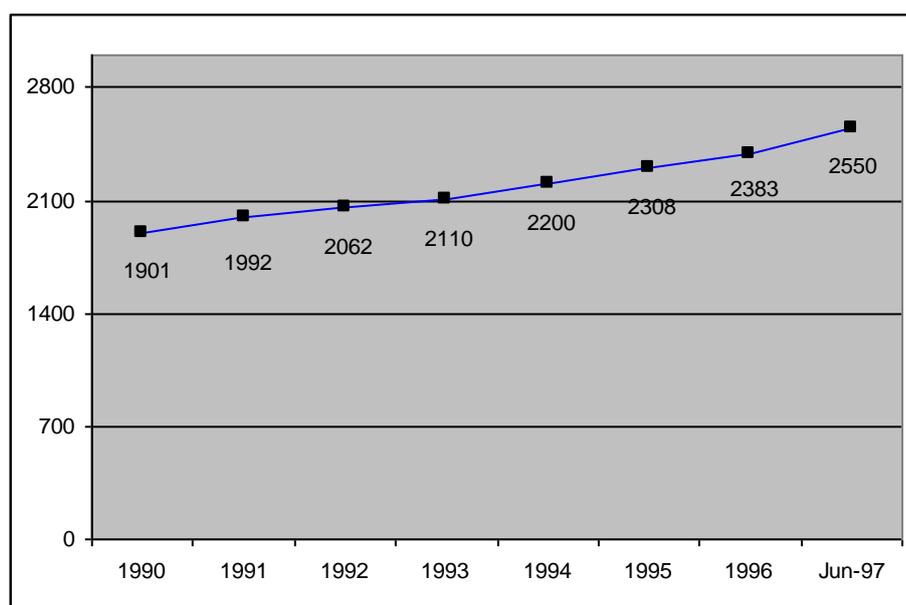
Nilai tukar didefinisikan sebagai harga mata uang luar negeri dalam satuan harga mata uang domestik (Krugman dan Obsfeld, 2001). Variabel nilai tukar dapat memberikan kepastian dunia usaha dan merupakan suatu hal yang penting dalam peningkatan investasi maupun kegiatan yang berorientasi ekspor.

Nilai tukar yang fluktuatif secara drastis akan menyebabkan kesulitan pada dunia usaha dalam merencanakan usahanya terutama bagi mereka yang mendatangkan bahan bakunya dari luar negeri (*import content*) atau menjual barangnya ke pasar ekspor. Oleh karenanya, pengelolaan nilai tukar yang relatif stabil menjadi salah satu faktor yang mendukung perekonomian secara makro.

Selama periode penelitian, perkembangan nilai tukar dibedakan menjadi periode nilai tukar tetap mengambang terkendali (1990 – Juli 1997) dan periode sistem nilai tukar mengambang bebas (Agustus 1997 – 2007). Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, nilai tukar rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang (*basket currencies*) negara-negara mitra dagang utama dan menempuh kebijakan depresiasi rupiah melalui penerapan sistem pita merayap (*crawling band*), yaitu sedikit melakukan perubahan dalam nilai mata uang secara periodik untuk bergerak menuju nilai *band* tertentu dimana kebijakan ini mulai efektif diterapkan sejak tahun 1992 sampai bulan Agustus 1997 oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral.

Melalui sistem nilai tukar merayap, Bank Sentral menetapkan indeks nilai tukar dan membiarkan rupiah bergerak dalam indeks tersebut. Ketika nilai tukar rupiah melebihi atau turun jauh dari indeks yang telah ada, maka Bank Sentral

akan mengintervensi pasar untuk menjaga agar rupiah tidak jauh bergerak dari indeks yang telah ditetapkan sehingga ketergantungan Bank Sentral dalam menjalankan transaksi devisa semakin berkurang.

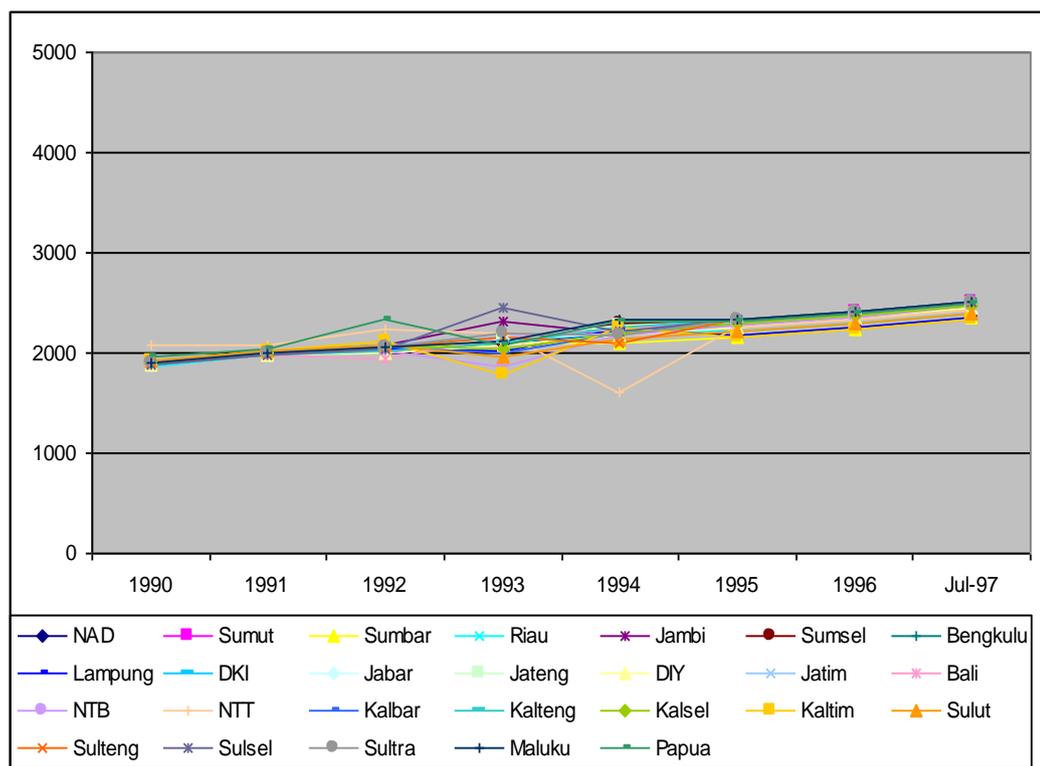


Sumber : Berbagai Edisi, Laporan Tahunan Bank Indonesia

Gambar 4.9.
Perkembangan Nilai Tukar Periode 1990-Juli 1997

Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dollar selama periode 1990- Juni 1996, meskipun terus mengalami penurunan nilai namun nilai kurs umumnya relatif stabil dan depresiasi nilai tukar relatif tidak terlalu besar, sehingga kebutuhan devisa untuk mempertahankan keseimbangan kurs tidak begitu besar. Hal tersebut seiring dengan perekonomian Indonesia yang menghadapi pasang surut, terutama akibat tekanan menurunnya harga minyak di pasar dunia dan berlanjutnya resesi ekonomi dunia. Disamping itu, perekonomian diwarnai juga dengan pertumbuhan ekonomi menurun, adanya defisit neraca pembayaran yang makin membesar serta tingginya laju inflasi Indonesia -- selama

periode 1990-Juni 1997 rata-rata inflasi Indonesia sebesar 8,3 persen -- dibandingkan inflasi beberapa negara pesaing dan mitra dagang ekonomi Indonesia mengakibatkan nilai tukar rupiah *over-value* dan menurunkan daya saing barang ekspor Indonesia di luar negeri.



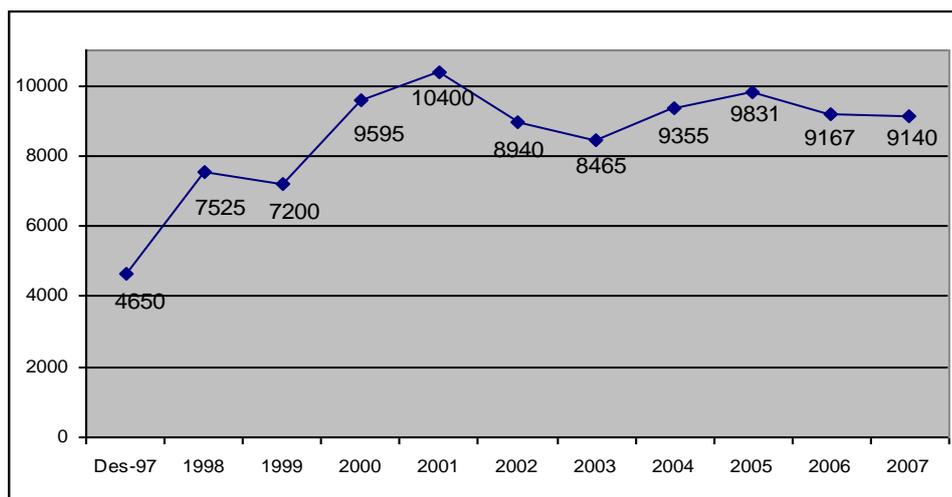
Sumber : Berbagai edisi, Nilai Tukar Valas di Indonesia, BPS Jakarta

Gambar 4.10. Perkembangan Nilai Tukar Menurut Propinsi Periode 1990-Juli 1997

Berdasarkan wilayah propinsi, sebagaimana diperlihatkan oleh Gambar 4.10. fluktuasi nilai tukar secara umum mengikuti pola pergerakan nilai tukar nasional dimana pergerakan nilai tukar relatif stabil dan masih berada diambang batas pita intervensi yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Besar kecilnya pergerakan nilai tukar di daerah secara umum ditentukan oleh besarnya aktivitas ekonomi daerah dan pasokan nilai tukar yang dimiliki oleh perbankan daerah.

Ketika keleluasaan kekuatan pasar semakin besarnya dalam penentuan nilai tukar maka perilaku pasar menjadi lebih sulit untuk diprediksi secara langsung. Kondisi tersebut terjadi juga di Indonesia manakala perekonomian mengalami peralihan sistem nilai tukar, yaitu dari sistem mengambang terkendali (*managed floating system*) menjadi sistem yang mengambang penuh atau bebas (*freely floating system*) pada tanggal 14 Agustus 1997 lalu yang telah menyebabkan posisi nilai tukar rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar.

Pada sistem nilai tukar mengambang bebas, sebagaimana dikemukakan McGregor (2000) bahwa perkembangan kurs akan tergantung pada permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) mata uang dollar di pasar valuta asing. Gerakan kurs akan berfluktuasi baik naik maupun turun secara murni sesuai dengan besarnya kekuatan pasar (mekanisme pasar). Dalam sistem ini, bank sentral akan membiarkan nilai tukar menyesuaikan diri untuk menyamakan nilainya di pasar.

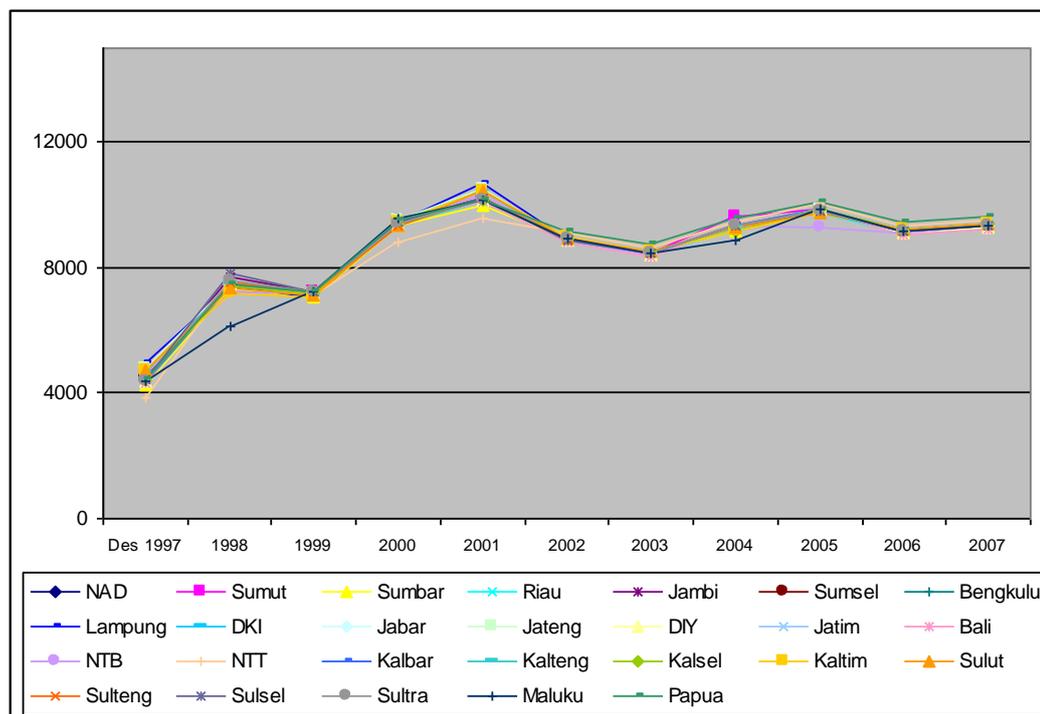


Sumber : Berbagai Edisi, Laporan Tahunan Bank Indonesia

Gambar 4.11.
Perkembangan Nilai Tukar Periode Des 1997- 2007

Setelah diterapkannya kebijakan sistem nilai tukar mengambang bebas, telah menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap US\$ mengalami fluktuasi. Pada tahun 1998 nilai tukar rupiah mengalami tekanan depresiasi yang sangat besar, yaitu menjadi Rp7.525,- per satu US\$ dibandingkan Desember 1997 yang sebesar Rp4.650,-. Dengan demikian, nilai tukar rupiah terdepresiasi sekitar 61,83%. Hal tersebut disebabkan oleh tekanan dari spekulasi (terutama spekulasi asing) pada nilai tukar rupiah terhadap US\$. Tekanan tersebut selain terkait dengan makin lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah, juga disebabkan oleh kurang-tepatan otoritas moneter mengambil langkah dalam mengantisipasi keterpurukan mata uang di awal krisis. Pada saat yang bersamaan terjadi pula ketidakstabilan politik, yang salah satunya disebabkan oleh peristiwa kerusuhan besar-besaran yang ditujukan terhadap *etnik* China di pertengahan Mei 1998 dan demonstrasi besar-besaran untuk menurunkan rezim Soeharto disepanjang tahun 1997 – 1998 yang merupakan tahun awal penerapan sistem tersebut.

Pada tahun 1999, nilai tukar rupiah mengalami apresiasi sebesar 4,32% menjadi Rp7.200,- per US\$ dimana hal tersebut disebabkan oleh sinyal positif dari kondisi politik, yaitu berhasilnya penyelenggaraan pemilihan umum pada tanggal 7 Juni 1999 yang dilakukan secara demokratis sesuai harapan dan aspirasi masyarakat umum. Kehadiran seorang pemimpin baru yang sesuai dengan kehendak rakyat, telah memberikan harapan bagi perbaikan ekonomi Indonesia secara keseluruhan dan berkurangnya ketidakpastian faktor-faktor non ekonomi di dalam negeri.



Sumber : Berbagai Edisi, Laporan Tahunan Bank Indonesia

Gambar 4.12.
Perkembangan Nilai Tukar Menurut Propinsi Periode Des 1997-2007

Pada tahun 2000, tukar rupiah mengalami depresiasi sebesar 33,26 persen menjadi Rp9.595,-. Kondisi ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakpercayaan pasar terutama dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap beberapa program restrukturisasi ekonomi yang secara umum dinilai pelaku pasar masih berjalan lamban, terutama menyangkut masalah restrukturisasi utang dan korporasi, privatisasi dan divestasi serta upaya revitalisasi sektor perbankan dan korporasi. Lambannya perbaikan fundamental ekonomi tersebut, selain sebagai akibat dari kompleksitas permasalahan ekonomi yang semakin berat juga karena lemahnya dukungan sistem kelembagaan, jaminan kepastian hukum dan keamanan berusaha.

Memasuki periode tahun 2001, nilai tukar rupiah makin terus melemah dari tahun sebelumnya dimana pada 2001 nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 8,39 persen menjadi sebesar Rp10.400,- per dollar. Kondisi politik lebih berperan dalam mewarnai penurunan nilai tukar sepanjang tahun 2001. Ketidakpastian kondisi politik dan keamanan dalam negeri terkait dengan proses *impeachment* — melalui memorandum I dan II — terhadap kepemimpinan nasional yang berakibat pada pergantian kepemimpinan nasional dari Gus Dur ke Megawati. Situasi ketidakpastian tersebut menimbulkan ekspektasi terhadap melemahnya nilai tukar rupiah ke depan yang pada gilirannya mendorong terjadinya aksi beli (*panic buying*) sehingga rupiah melemah cukup tajam.

Pada tahun 2002, nilai tukar rupiah menguat terhadap US\$ menjadi Rp8.940,- dan mengalami apresiasi kembali pada tahun 2003 menjadi Rp8.465,-. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan masyarakat karena faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal tersebut, antara lain:

1. Bertambahnya pasokan valuta asing akibat meningkatnya arus modal masuk dari hasil divestasi saham BCA, Bank Niaga, Telkom dan Indosat.
2. Tekanan permintaan valuta asing dari sektor swasta khususnya dalam rangka pelunasan utang luar negeri yang jatuh tempo relatif berkurang akibat keberhasilan proses restrukturisasi utang swasta.
3. Keberhasilan pelaksanaan *Paris Club* III yang menyetujui penundaan pembayaran cicilan pokok utang LN pemerintah yang jatuh tempo dan bunganya.

Selain itu, faktor eksternal juga mempengaruhi penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yaitu menurunnya suku bunga *fed fund*, gejala melemahnya dolar AS dalam skala global; dan menguatnya nilai tukar regional dalam tahun 2002. Penguatan nilai tukar rupiah selama tahun 2002 berlanjut sampai pada akhir tahun 2003.

Nilai tukar rupiah merupakan satu indikator ekonomi makro yang terkait dengan besaran APBN. Asumsi nilai tukar rupiah berhubungan dengan banyaknya transaksi dalam APBN yang terkait dengan mata uang asing, seperti penerimaan pinjaman dan pembayaran utang luar negeri, penerimaan minyak dan pemberian subsidi BBM. Dengan demikian, variabel asumsi dasar ekonomi makro tersebut sangat menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran negara, termasuk dana perimbangan serta besarnya pembiayaan anggaran.

Pada tahun 2004, asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN ditetapkan sebesar Rp8.600 per US\$. Dalam realisasinya, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap US\$ selama tahun 2004 adalah sebesar Rp9.355,- atau mengalami penyimpangan sebesar 8,78 persen (*under-estimated*). Penetapan asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN yang ternyata lebih rendah sekitar 8,78 persen dari realisasi, adalah merupakan sesuatu yang di luar prediksi. Hal ini terkait dengan kekhawatiran pelaku pasar uang atas penyelenggaraan Pemilu 2004. Namun demikian, mengingat fungsi asumsi nilai tukar yang ditetapkan dalam APBN sebagai “*anchor*” nilai tukar sehingga dapat meredam ekspektasi masyarakat yang berlebihan. Tetapi disisi lain, apabila asumsi tersebut jauh dari realita yang diekspektasikan pasar, maka pasar akan menolak sehingga asumsi tersebut tidak dipercaya lagi. Berdasarkan kondisi ini, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan asumsi nilai tukar sehingga dari kedua sisi, baik pemerintah maupun pelaku pasar dapat sama-sama terwakili.

Selanjutnya, pada tahun 2005, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menunjukkan kecenderungan melemah secara tajam. Nilai terendah nilai tukar rupiah terjadi dalam bulan Juli 2005 (Rp9.900/dolar AS) dan nilai tukar rupiah tertinggi terjadi pada bulan Januari 2005 (Rp9.384/dolar AS). *Trend* pergerakan Kurs Rupiah cenderung melemah terhadap USD tahun 2005 disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Faktor dalam negeri diantaranya disebabkan oleh; dampak inflasi yang cenderung meningkat, dampak negatif dari tingginya harga minyak terhadap neraca perdagangan migas, sentimen negatif dari kelangkaan BBM dan kekhawatiran dari dampak tingginya harga minyak terhadap kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*). Sedangkan faktor luar negeri yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar tahun 2005, diantaranya adalah; penguatan dollar Amerika Serikat terhadap hampir semua mata uang dan pengaruh tingkat suku bunga Amerika Serikat yang merambat naik.

Kenaikan nilai tukar rupiah (apresiasi) terhadap dollar pada tahun 2006 menjadi Rp9.167,- disertai pergerakan yang lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya, dipengaruhi oleh kondisi fundamental makroekonomi yang membaik, daya tarik investasi keuangan di dalam negeri yang terjaga, serta perkembangan ekonomi global yang relatif lebih kondusif. Fundamental makroekonomi yang semakin baik menjadi pilar utama penopang terpeliharanya kestabilan nilai tukar rupiah. Membaiknya fundamental makroekonomi terutama tercermin dari kinerja neraca pembayaran yang semakin kuat, tingkat inflasi yang berangsur menurun serta defisit fiskal yang terjaga rendah.

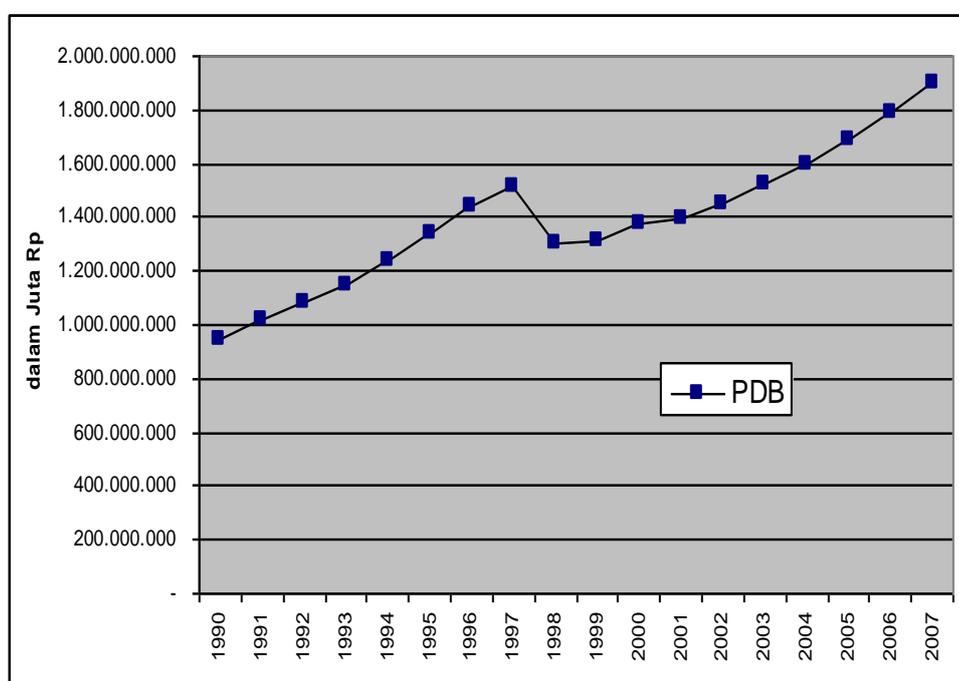
Sepanjang tahun 2007, nilai tukar rupiah bergerak stabil dan secara rata-rata menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi Rp9.140,- per dollar. Perkembangan nilai tukar rupiah yang stabil, di tengah perkembangan ekonomi dan pasar keuangan global yang kurang menguntungkan, ditopang oleh semakin membaiknya kepercayaan masyarakat, baik domestik maupun internasional terhadap perekonomian Indonesia serta tingginya imbal hasil di pasar keuangan domestik. Nilai tukar rupiah sempat tertekan pada paruh kedua tahun 2007 terutama akibat dampak krisis di Amerika Serikat (AS) yang meluas dalam skala global dan meningkatnya harga minyak dunia secara signifikan. Meskipun demikian, kebijakan moneter dan fiskal yang tetap ditempuh secara hati-hati dan konsisten serta langkah Bank Indonesia dalam stabilisasi nilai tukar mampu menahan pelemahan nilai tukar rupiah lebih lanjut.

4.1.2.5. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Nilai Produk Domestik Bruto dan laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara.

Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka hal itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

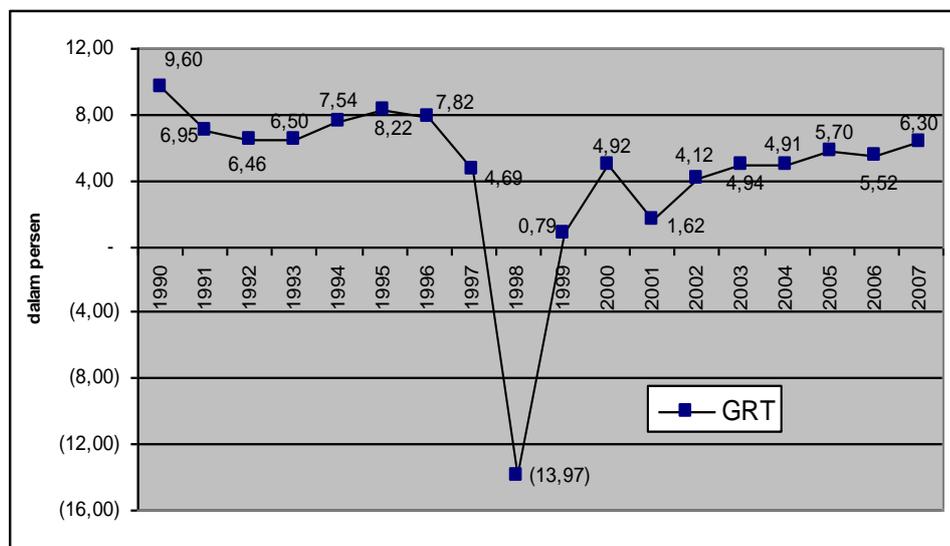
Selama periode analisis, secara umum Produk Domestik Bruto menurut harga konstan, menunjukkan *trend* yang meningkat. Pada tahun 1990 sebagai awal periode analisis, Produk Domestik Bruto yang dihitung atas harga konstan tahun 2000 (selanjutnya disingkat dengan PDB) tercatat sebesar Rp947.921.031 juta dan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2007 nilai PDB telah mencapai 1.897.191.030 miliar rupiah yang berarti meningkat 2 kali lipat dibandingkan nilai PDB tahun 1990.



Sumber : Indonesia Dalam Angka, BPS, data diolah

Gambar 4.13.
Perkembangan PDB AHK 2000

Sebagaimana pada Gambar 4.13. tersebut, walaupun terjadi berbagai fluktuasi dalam jangka pendek, selama periode 1990-2007 nilai PDB atas harga konstan 2000, memperlihatkan *trend* yang terus meningkat (kecuali pada tahun 1998), dengan nilai rata-rata per tahun sebesar Rp1.391.495.078 juta. Pada periode 1997-1998, PDB mengalami penurunan disebabkan oleh terjadinya krisis moneter.



Sumber : Indonesia Dalam Angka, BPS, data diolah

Gambar 4.14.
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi AHK 2000

Dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi periode 1990-1996, PDB Indonesia telah tumbuh dengan cukup cepat, dalam periode ini, PDB meningkat rata-rata di 7,58 persen per tahun. Pertumbuhan yang tinggi selama periode ini, disebabkan oleh pertumbuhan ekspor. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tulus Tambunan (2007), yang menyatakan bahwa sebahagian besar pertumbuhan tinggi yang dicapai pada periode tahun 1990 hingga sebelum krisis ekonomi berasal dari sektor ekspor, bahkan untuk tahun 1994-1996, rata-rata PDB tumbuh sebesar 7,86 persen per tahun.

Pertumbuhan PDB dalam tahun 1991 dan 1992 yang mencapai rata-rata 6,71 persen, menurun dibandingkan tahun 1990 yang sebesar 9,6 persen, disebabkan oleh efek dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam rangka mengendalikan jumlah uang beredar agar tetap dalam batas-batas aman. Dalam bidang moneter, kebijaksanaan pengendalian moneter mulai diterapkan pada pertengahan tahun 1990 dan dipertegas pada tahun 1991. Dalam bidang fiskal pemerintah menyisihkan cadangan anggaran pembangunan secara

berturut-turut selama 2 (dua) tahun anggaran. Pembentukan cadangan anggaran pembangunan dilakukan untuk mengamankan kesinambungan pembiayaan pembangunan di waktu mendatang dan sekaligus untuk membantu upaya pengendalian uang beredar.

Adanya langkah kebijakan tersebut, telah berhasil mempertahankan kestabilan ekonomi. Namun demikian, tidak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Pengendalian moneter menyebabkan dana yang semula mudah diperoleh menjadi langka dan tingkat bunga meningkat. Beberapa proyek juga harus diperkecil, ditunda dan bahkan dibatalkan. Bagi sektor usaha tertentu, dampak kebijaksanaan pengendalian moneter cukup terasa karena dana untuk pembiayaan usaha menjadi lebih mahal dan lebih sulit diperoleh.

Pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dapat dipertahankan, terutama setelah tingkat bunga diturunkan dan pelonggaran moneter dilaksanakan. Pertumbuhan PDB mencapai 7,54% dalam tahun 1994 dan 8,22% dalam tahun 1995, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB Riil dalam tahun 1992 dan 1993 yang mencapai 6,5%. Tingkat pertumbuhan ekonomi ini, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk di tahun tersebut, telah meningkatkan pendapatan nasional nominal per kapita dari sekitar US\$ 920 dalam tahun 1994 menjadi sekitar US\$ 1.023 dalam tahun 1995.

Pada tahun 1996, PDB tumbuh sebesar 7,82 persen. Pertumbuhan PDB yang sebesar itu, didorong oleh tingginya gairah investasi. Pada tahun anggaran 1996, persetujuan penanaman modal dalam negeri mencapai 105 triliun rupiah lebih yang berarti meningkat sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Persetujuan penanaman modal asing juga tetap tinggi, meskipun tidak setinggi tahun

sebelumnya. Nilai persetujuan penanaman modal asing tercatat 26,6 miliar dolar Amerika. Persetujuan penanaman modal memang tidak seluruhnya terealisasi. Akan tetapi, angka-angka tersebut mencerminkan kepercayaan yang tinggi dari pemilik modal dalam negeri maupun luar negeri terhadap pembangunan dan perekonomian negara Indonesia.

Krisis moneter yang terjadi pada pertengahan tahun 1997, berdampak pada melemahnya pertumbuhan PDB, yang mulai terasa pada pertengahan tahun 1997, dimana laju pertumbuhan PDB pada tahun 1997 hanya dapat dipertahankan pada tingkat 4,69 persen. Memasuki tahun 1998, dampak krisis mulai meluas dan berkembang menjadi krisis ekonomi yang parah dan mendalam sehingga menyebabkan PDB berkontraksi secara mencolok. Pada tahun 1998, PDB mengalami pertumbuhan negatif sebesar 13,97 persen dan merupakan laju pertumbuhan negatif yang pertama kalinya dalam sejarah perekonomian Indonesia sejak tahun 1970. Kejadian tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami ayunan pertumbuhan positif ke pertumbuhan negatif. Keadaan tersebut sangat jelas dapat diamati pada Gambar 4.14. yang memperlihatkan *trend* PDB yang mengalami ayunan ketika memasuki tahun 1998.

Pertumbuhan yang negatif pada tahun 1998, sebagai akibat dari makin tingginya harga produk impor sehingga para pengusaha kesulitan memproduksi barang yang sebagian besar bahan bakunya diimpor. Ketika produk makin langka akibat produksi yang terbatas, telah menyebabkan harga produksi menjadi mahal, sementara disisi lain tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi semakin rendah akibat daya beli dari uang yang makin menurun. Kondisi-kondisi di atas, telah menjadi penyebab rendahnya PDB Indonesia hingga tahun 1998.

Setelah tahun 1998, PDB memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan meskipun dilihat dari nilai total dan per kapita masih di bawah level sebelum krisis. Namun demikian, pertumbuhan PDB sekitar 0,79 persen hingga 4,92 persen sampai dengan akhir tahun 2001, dinilai oleh beberapa pengamat ekonomi bukanlah hal yang mengejutkan dan relatif mudah dicapai. PDB tumbuh hingga 4,92 persen dari keadaan ekonomi yang terdalam, akan lebih mudah dicapai daripada mencapai pertumbuhan PDB yang sama pada saat ekonomi sedang berada di puncak *performance*.

Peningkatan PDB hingga sebesar 4,92 persen, disebabkan oleh tiga hal (A.Tony Prasetyantono, 2001), yaitu ; ***Pertama***, adanya dorongan konsumsi yang meningkat dari masyarakat, terutama konsumen yang berpendapatan menengah ke atas. ***Kedua***, adanya peningkatan sektor luar negeri. Ekspor yang terus menguat dikombinasikan dengan melemahnya impor, telah mendorong surplus perdagangan sangat besar. Ekspor yang terus menguat terutama berkaitan dengan pasar non-migas Indonesia mulai membaik sehingga mereka meningkatkan permintaan terhadap barang-barang ekspor. ***Ketiga***, harga minyak yang terus tinggi secara tak terduga pada awal tahun 1999 hingga sekarang (rata-rata US\$ 29 per barrel) seolah mengingatkan pada era *oil-booming* pada tahun 1980-an. Pertumbuhan PDB hingga sebesar 4,92 persen yang dicapai tersebut meskipun belum melegakan namun diharapkan sebagai awal bagi kebangkitan perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi dan pertumbuhan PDB ini terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Walaupun sektor riil ekonomi masih belum sepenuhnya pulih dan tingkat pengangguran tenaga kerja masih tetap tinggi, pencapaian pertumbuhan PDB sebesar 4,12 persen pada tahun 2002 merupakan indikator ekonomi makro yang sangat baik. Seiring dengan itu, pendapatan per kapita Indonesia juga mulai

meningkat. Dalam tahun 2002, pendapatan per kapita sebesar tercatat Rp7,6 juta, lebih tinggi dari pendapatan per kapita dalam tahun 2001 sebesar Rp6,9 juta. Apabila dinyatakan dalam dollar Amerika, angka ini berturut-turut adalah sebesar US\$ 673 dalam tahun 2001 dan meningkat menjadi US\$ 811 dalam tahun 2002. Pencapaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2002 tersebut merupakan indikasi dari membaiknya keadaan ekonomi nasional, peningkatan pendapatan per kapita dalam dollar ini juga dibantu oleh menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.

Pada periode tahun 2003 dan 2004, pertumbuhan PDB Indonesia berturut-turut sebesar 4,94 persen dan 4,91 persen per tahun. Penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut, berasal dari konsumsi, sementara peranan investasi dan ekspor masih terbatas. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi terutama terjadi pada sektor pengangkutan/ komunikasi, bangunan dan perdagangan/hotel/ restoran, walaupun penyumbang terbesar masih dari sektor industri dan pertanian.

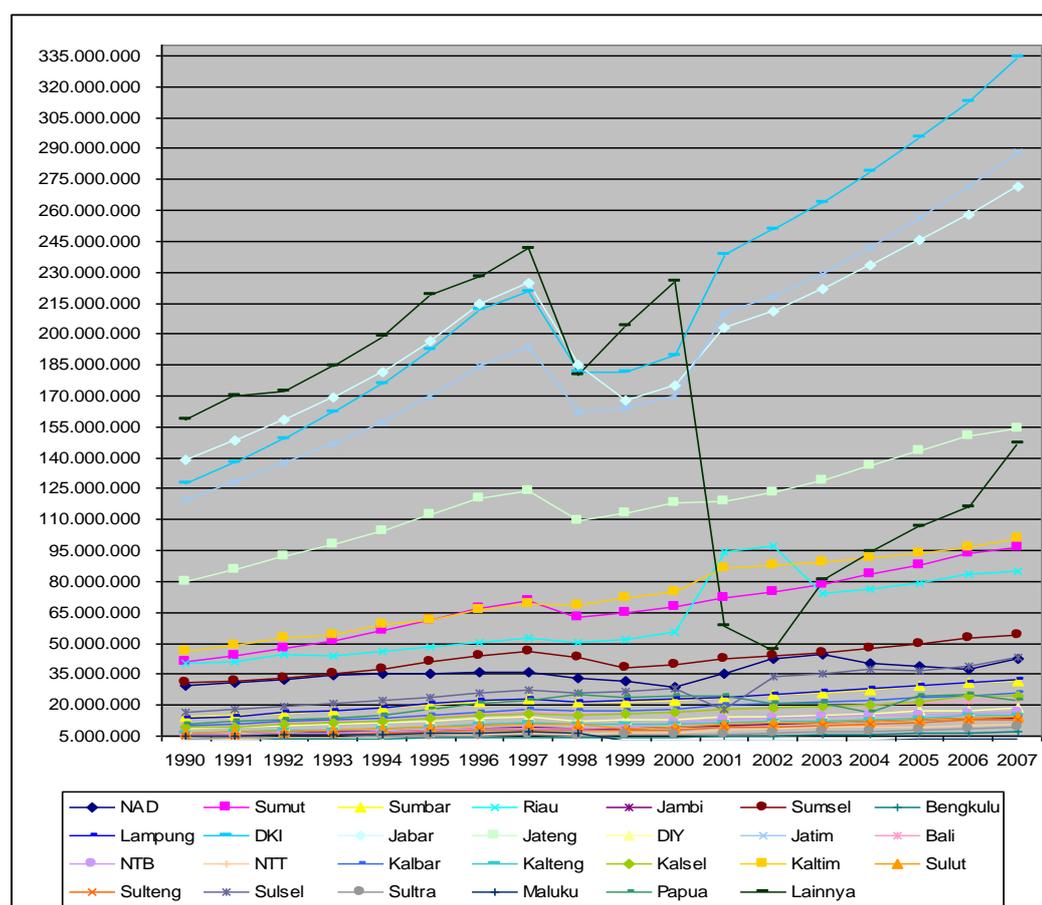
Pada tahun 2005, laju pertumbuhan PDB dapat menguat kembali menjadi 5,70 persen melebihi pertumbuhan PDB yang dicapai pada tahun 2004, terutama ditopang oleh pertumbuhan permintaan domestik yang lebih tinggi. Kenaikan harga BBM yang terjadi sebanyak 2 (dua) kali pada tahun tersebut (Maret dan Oktober), ternyata tidak mereduksi pertumbuhan yang terjadi. Pemerintah telah melakukan berbagai program kebijakan yang ditujukan untuk stabilisasi jangka pendek dan meningkatkan akselerasi pertumbuhan jangka panjang. Program stabilisasi jangka pendek antara lain dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif kenaikan harga BBM serta kenaikan *administered prices* lainnya. Dalam kaitan ini, Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan 1 Oktober 2005, dengan tujuan mengurangi dan meringankan dampak kenaikan harga BBM pada

bulan Oktober melalui pemberian insentif kepada kaum miskin, petani, pekerja, konsumen, kelompok industri, perdagangan, dan UMKM. Untuk kelompok miskin diberikan tambahan program kompensasi berupa subsidi langsung tunai (SLT). Terhadap petani diberikan insentif peningkatan harga pembelian pemerintah sebesar 30 persen. Di samping itu, insentif kebijakan juga diberikan dalam bentuk pemangkasan ekonomi biaya tinggi, deregulasi, pengurangan pajak dan bea masuk. Berbagai kebijakan tersebut juga didukung dengan berbagai kebijakan lain untuk memperlancar arus distribusi dan mengurangi biaya tinggi dalam perekonomian.

Imbas kenaikan kenaikan harga yang terjadi di 2005 pada akhirnya menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2006, dimana laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar 5,52 persen. Kinerja perekonomian yang dicapai pada angka tersebut banyak dipengaruhi peran kuat stimulus fiskal dan dampak positif peningkatan harga komoditas primer dunia. Stimulus fiskal memberikan dampak pengganda dalam menahan pelambatan pertumbuhan konsumsi swasta.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2007 mencatat beberapa pencapaian pokok yang menggembirakan. Untuk pertama kali sejak krisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas angka 6%, tepatnya berkisar di angka 6,30%. Akselerasi pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didukung oleh tingginya pertumbuhan permintaan domestik, baik konsumsi masyarakat maupun investasi. Konsumsi masyarakat meningkat seiring dengan membaiknya daya beli. Sementara itu, pertumbuhan investasi didukung oleh membaiknya persepsi investor, meningkatnya imbal hasil investasi (*return on investment*) dan ketersediaan pembiayaan yang memadai termasuk dari perbankan dan pasar keuangan pada umumnya. Ekspor tetap mampu tumbuh tinggi di tengah

pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Hal itu tidak terlepas dari upaya diversifikasi negara tujuan ekspor sehingga dampak perlambatan ekonomi di negara maju terhadap ekspor Indonesia dapat direduksi dengan peningkatan ekspor ke negara yang pertumbuhannya tinggi seperti China dan India. Meningkatnya pertumbuhan di sisi permintaan diimbangi dengan peningkatan pertumbuhan produksi di hampir seluruh sektor perekonomian. Tiga sektor utama yang mempunyai kontribusi dominan terhadap pertumbuhan PDB, yakni sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor perdagangan, mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Sumber : Indonesia Dalam Angka, BPS, data diolah

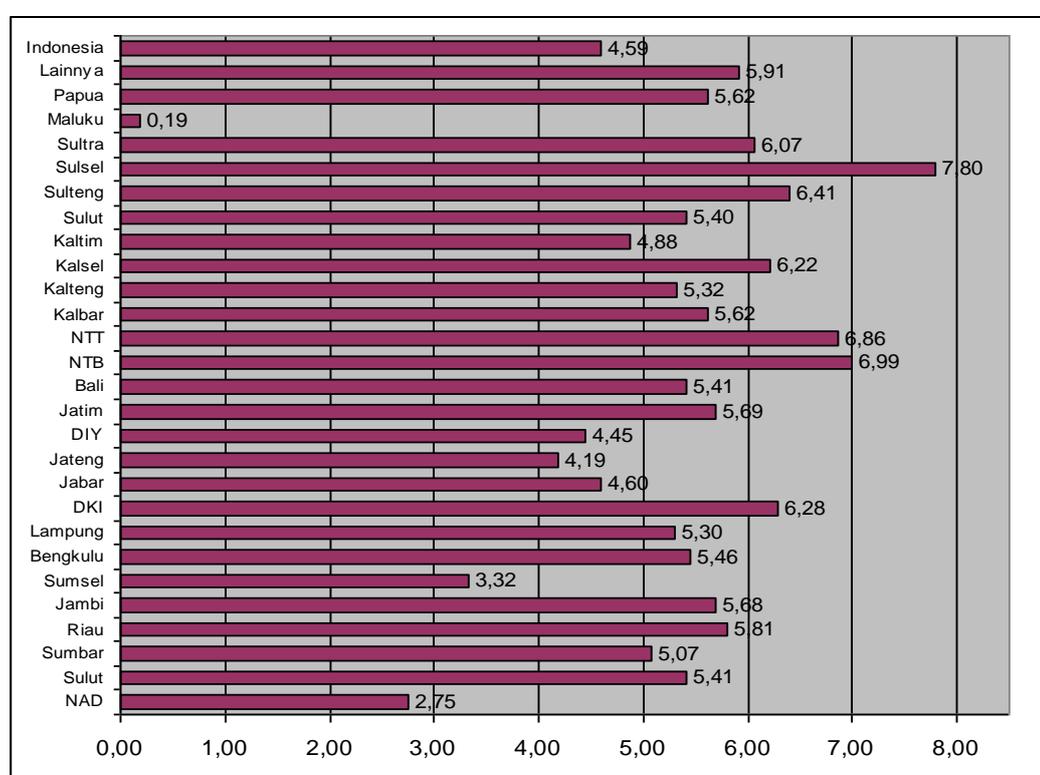
Gambar 4.15.
Perkembangan Rata-rata PDRB Riil Menurut Propinsi
Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000

Dilihat dari perkembangan ekonomi daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.15., dapat dijelaskan bahwa selama periode penelitian (1990-2007) menunjukkan kecenderungan kinerja ekonomi yang terus membaik (kecuali tahun 1997, tercermin pada peningkatan nilai PDRB yang diukur atas harga konstan 2000, di hampir setiap pemerintah daerah propinsi. Dilihat dari kontribusinya, pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa, seperti Jawa Barat, DKI, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, masih menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi di wilayah yang memiliki pangsa sekitar 60 persen dari PDB nasional ini tetap tinggi sehingga dapat menahan pelambatan ekonomi secara nasional.

Sementara di wilayah lain, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, nilai PDRB-nya berada di bawah nilai PDRB yang ada di Pulau Jawa, meskipun pada beberapa sektor ekonomi khususnya sektor primer meningkat cukup tinggi. Dilihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagaimana pada Gambar 4.16., terlihat perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah masih cukup tinggi.

Sebagaimana pada Gambar 4.16., dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian cukup beragam, dimana terdapat 21 propinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih besar dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) propinsi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi di bawah 4,59 persen, yang merupakan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah terdapat di propinsi Maluku dan Nangroe Aceh Darussalam, yaitu sebesar 0,19 persen dan 2,75 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi

tertinggi terdapat di propinsi Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar 7,86 persen, 6,99 persen dan 6,86 persen. Adanya konflik senjata yang berkepanjangan di kedua daerah dan musibah bencana alam yang melanda Aceh, telah menjadi penyebab tidak optimalnya pembangunan yang dilaksanakan di kedua propinsi tersebut sehingga menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah itu.



Sumber : Indonesia Dalam Angka, BPS, data diolah

Gambar 4.16.
Perkembangan Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Periode 1990-2007

Kinerja perekonomian daerah masih diwarnai oleh perbedaan pertumbuhan antardaerah. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di pulau Jawa dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Pertumbuhan

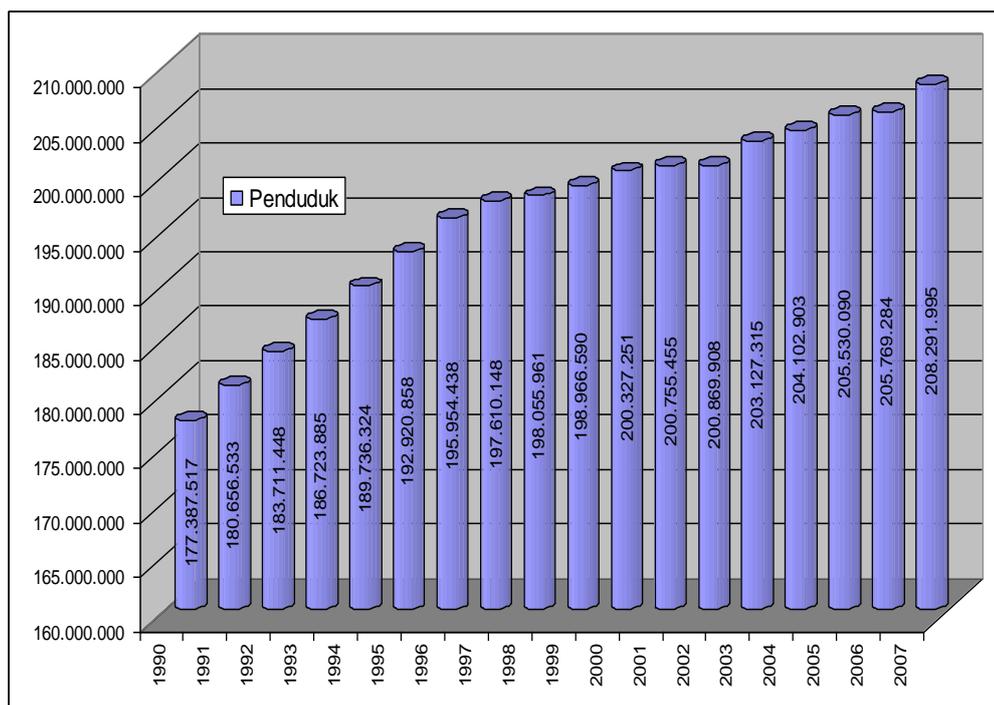
ekonomi di beberapa provinsi lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang rata-rata berada di atas 5,95 persen. Provinsi-provinsi tersebut, antara lain adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, dan Riau dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing sebesar 0,04 persen; 2,5 persen; 3,1 persen; 3,5 persen; dan 4,3 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, deviasi pertumbuhan ekonomi antarprovinsi meningkat dari 1,7 persen menjadi 1,8 persen. Salah satu faktor penyebab rendahnya pertumbuhan di provinsi-provinsi tersebut adalah keterbatasan infrastruktur dan perbedaan luas daerah, aturan daerah yang kurang menarik minat investasi dan bertumpunya ekonomi daerah pada sektor primer tertentu (pertambangan).

4.1.3. Perkembangan Ketenagakerjaan

Perkembangan ketenagakerjaan dalam penelitian ini mencakup penduduk, angkatan kerja, kesempatan kerja, modal manusia dan upah tenaga kerja. Dilihat dari penduduk, Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar, namun dipandang berhasil dalam pengendalian jumlah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap (Indikator Ekonomi Indonesia, BPS, 2000).

Penduduk Indonesia berdasarkan data hasil Sensus Penduduk yang disajikan pada Gambar 4.17., menunjukkan jumlah yang terus bertambah. Pada tahun 1990 tercatat sebanyak 177.387.517 jiwa, jumlah penduduk tersebut

berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 (SP2000), telah bertambah sebanyak 22.939.734 jiwa menjadi 200.327.251 jiwa pada tahun 2000 dan tahun 2007 meningkat kembali menjadi 208.291.996 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun selama periode penelitian sebesar 0,95 persen.

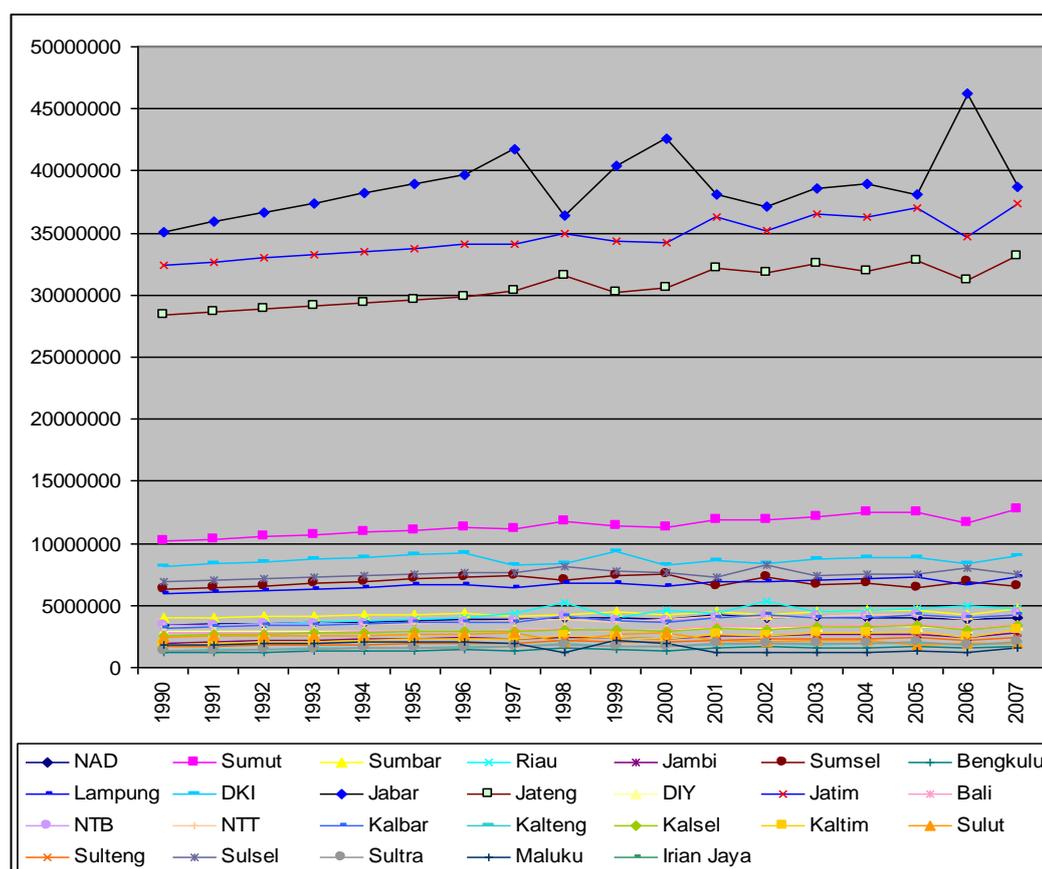


Sumber : Berbagai edisi, Indikator Ekonomi Indonesia, BPS Jakarta

Gambar 4.17.
Perkembangan Penduduk Indonesia Periode 1990-2007

Kecenderungan penduduk yang terus bertambah dari periode sensus yang satu ke sensus atau survei berikutnya tentunya bukan hanya disebabkan penambahan penduduk secara alamiah, tetapi tidak terlepas dari kecenderungan migrasi baru yang masuk ke Indonesia disebabkan daya tarik Indonesia, baik dilihat dari potensi ekonomi maupun panorama keindahan alamnya. Dilihat berdasarkan wilayah propinsi, sebaran penduduk sebagian besar terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan DKI Jakarta.

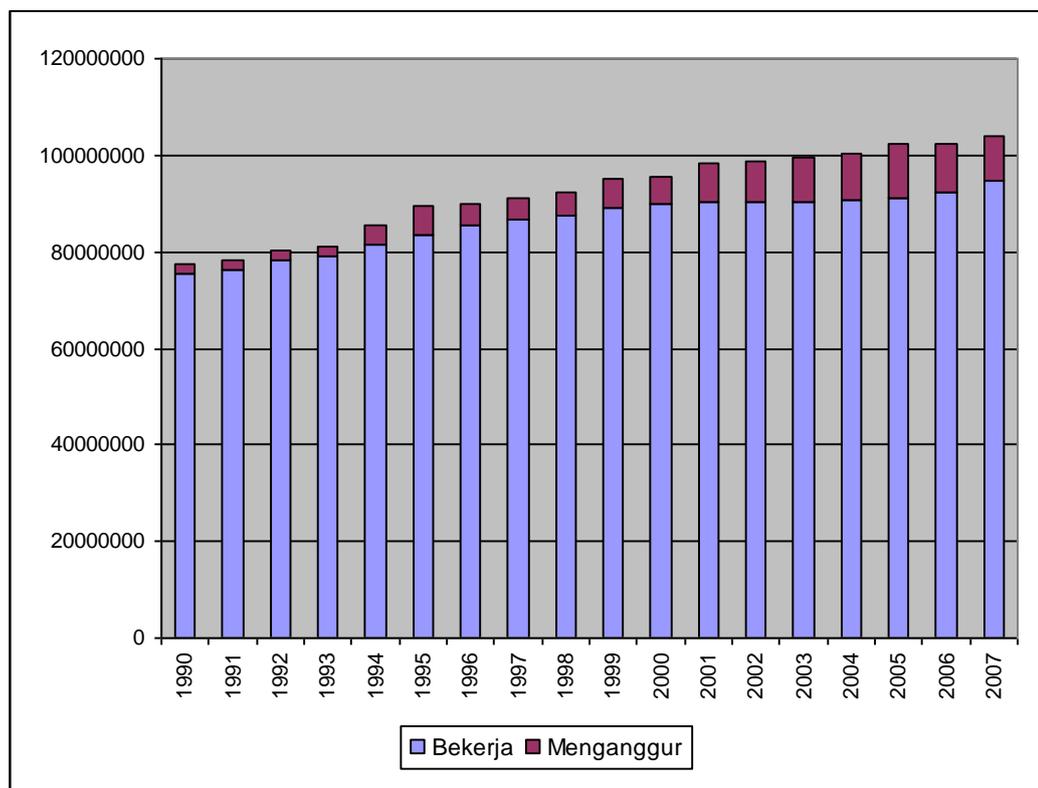
Tingginya pertumbuhan penduduk di daerah tersebut, tidak terlepas dari potensi daerah bersangkutan yang telah tumbuh menjadi pusat kawasan pertumbuhan ekonomi dan industri sehingga menjadi daerah tujuan para pendatang (migran).



Sumber : Berbagai edisi, Indikator Ekonomi Indonesia, BPS Jakarta

Gambar 4.18.
Perkembangan Penduduk Indonesia Periode 1990-2007

Dalam kenyataannya, tidak semuanya penduduk menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja. Pertimbangan utamanya adalah kelayakan bekerja menurut umur. Penduduk yang layak bekerja ditinjau dari umurnya disebut penduduk usia kerja atau *man-power* (Sudarsono, 2004). Sementara itu, Biro Pusat Statistik memberikan definisi penduduk usia kerja sebagai penduduk yang berusia minimal 15 tahun sebagai batas bawah usia kerja. Batas atas usia kerja secara umum ditentukan oleh ketentuan pensiun yang berlaku.



Sumber : Berbagai edisi, Indikator Ekonomi Indonesia, BPS Jakarta

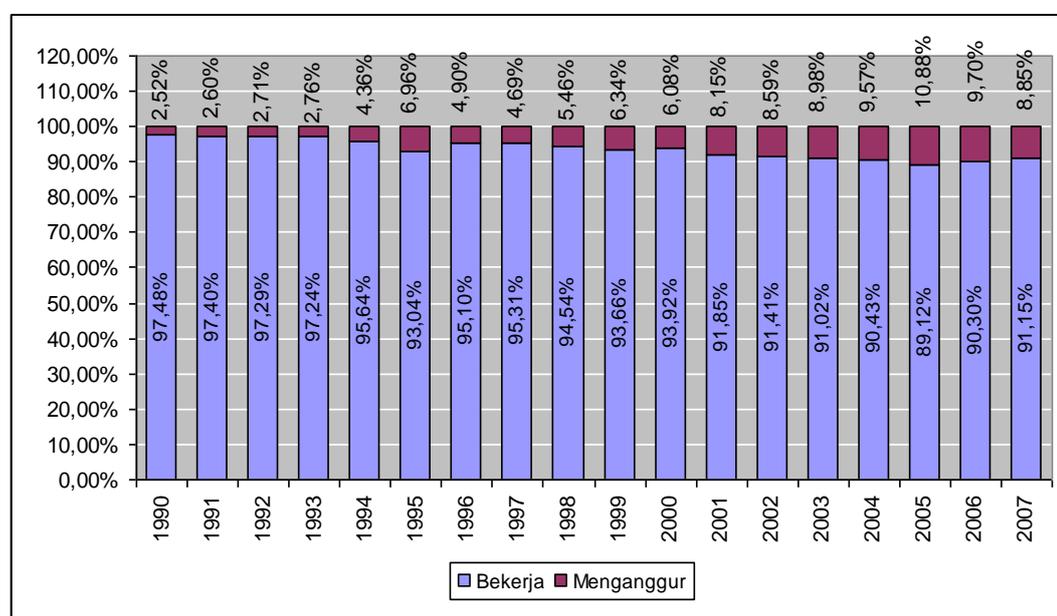
Gambar 4.19.
Perkembangan Angkatan Kerja Bekerja dan Menganggur
Periode 1990-2007

Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.19., perkembangan angkatan kerja tidak dapat dilepaskan dari perkembangan penduduk di masa lalu. Meskipun laju pertumbuhan penduduk mulai menurun, pertumbuhan angkatan kerja masih relatif tinggi karena adanya angkatan kerja baru, yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas yang mulai memasuki lapangan kerja. Angkatan kerja sendiri dibedakan menjadi dua kelompok, angkatan kerja yang bekerja (tenaga kerja) dan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran).

Angkatan kerja yang bekerja (tenaga kerja) merupakan faktor produksi yang bersama-sama dengan faktor produksi modal fisik dan faktor produksi modal manusia akan menentukan tingkat output dalam perekonomian suatu negara.

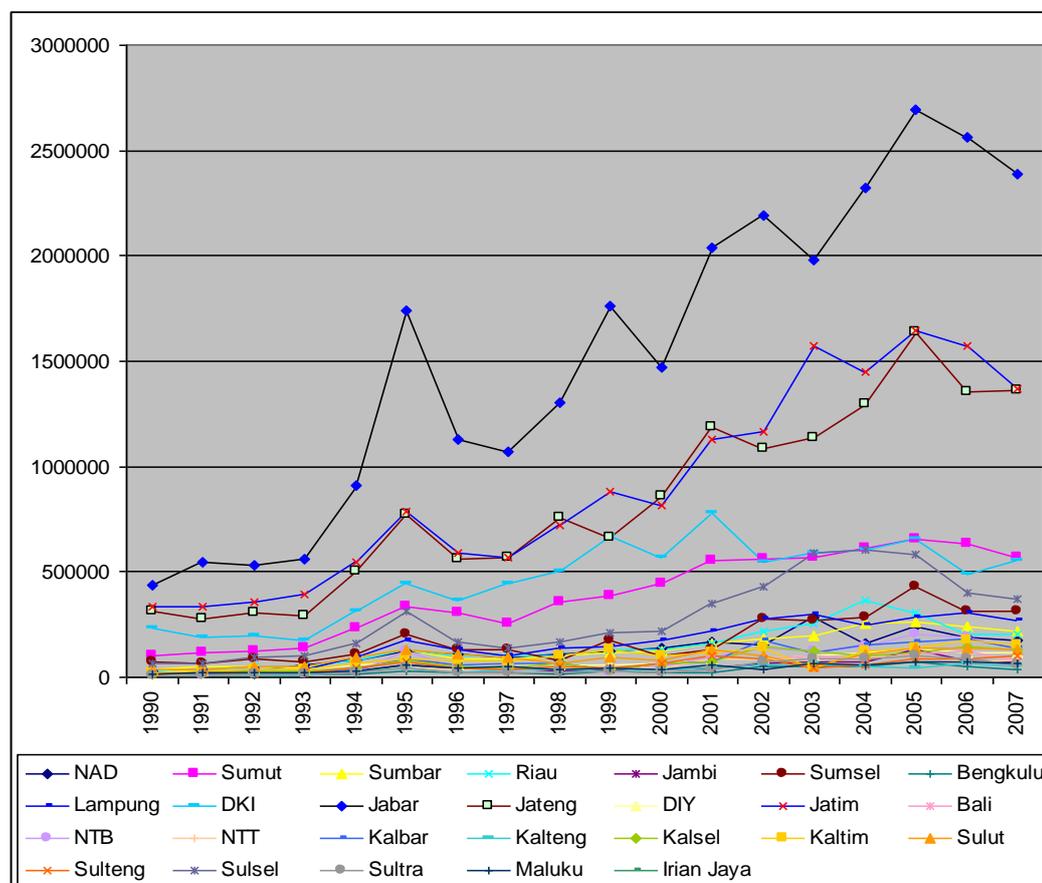
Konsep tenaga kerja sebagai faktor produksi adalah bagian dari angkatan kerja yang berstatus bekerja (*worker*) dan aktif dalam kegiatan produksi. Dalam konsep ini, bagian dari angkatan kerja yang berstatus bukan sebagai tenaga kerja disebut sebagai pengangguran.

Bagaimanapun pertambahan jumlah angkatan kerja yang selalu meningkat tiap tahun, yang tidak sejalan dengan kemampuan dalam penyerapannya akan selalu menambah jumlah pengangguran di dalam negeri. Sebagaimana terlihat pada Gambar 4.20., terlihat bahwa surplus angkatan kerja yang tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan lowongan pekerjaan akan menyebabkan makin meningkatnya pengangguran, dimana telah terjadi peningkatan persentase jumlah penganggur, dari 2,52 persen pada tahun 1990 sebagai awal periode menjadi 8,85 persen pada akhir periode penelitian.



Sumber : Berbagai edisi, Indikator Ekonomi Indonesia, BPS Jakarta

Gambar 4.20.
Perkembangan Persentase Angkatan Kerja Bekerja dan Menganggur
Periode 1990-2007



Sumber : Berbagai edisi, Indikator Ekonomi Indonesia, BPS Jakarta

Gambar 4.21.
Perkembangan Angkatan Kerja yang Menganggur
Menurut Propinsi Periode 1990-2007

Ditinjau dari lokasinya, jumlah pengangguran terbesar terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Tingginya jumlah pengangguran di Jawa dan Sumatera menggambarkan bahwa kedua pulau tersebut memiliki daya tarik bagi angkatan kerja sehingga terjadi migrasi secara besar-besaran dari pulau-pulau lainnya, padahal peluang kerja di Jawa dan Sumatera juga terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tinggi antara angkatan kerja daerah setempat dan angkatan kerja pendatang di kedua pulau tersebut, yang akhirnya meningkatkan jumlah pengangguran (Indikator Ekonomi Indonesia, BPS, 2006).

Kondisi sebaran angkatan kerja ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih merupakan tujuan utama migrasi karena tingginya kegiatan ekonomi dan pembangunan di pulau tersebut, padahal pada era otonomi daerah diharapkan terjadi pergeseran kegiatan dan pembangunan ekonomi ke luar Jawa. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah 7 (tujuh) tahun otonomi daerah diberlakukan, kegiatan dan pembangunan ekonomi di daerah belum sepenuhnya mempengaruhi sebaran angkatan kerja di Indonesia.

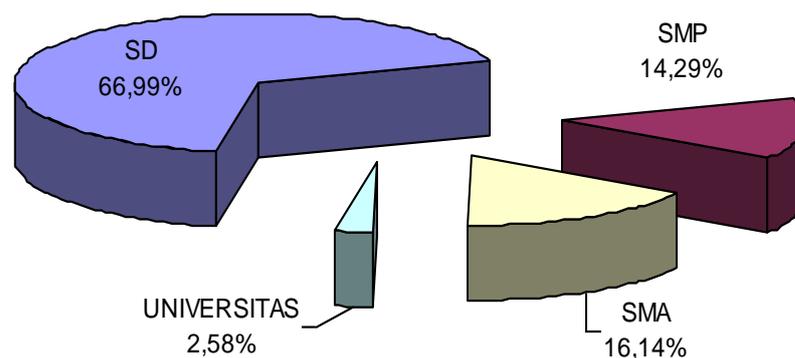
Bertambahnya pengangguran, menunjukkan terbatasnya peluang kerja dan kesempatan kerja yang dapat diciptakan yang tidak dapat mengimbangi pertambahan angkatan kerja. Tabel 4.5. di bawah ini menegaskan pernyataan tersebut, dimana dalam kurun waktu 1991-2007, angkatan lapangan kerja baru selalu melebihi jumlah lapangan kerja yang dapat diciptakan.

Tabel 4.5.
Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terbuka
Periode Tahun 1991-2007

Tahun	Angkatan Kerja (Juta)	Angkatan Kerja Baru (juta)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Jumlah Angkatan Kerja Bekerja (juta)	Lapangan Kerja Baru (juta)	Lap. Kerja Setiap 1% Pertumbuhan Ekonomi	Pengangguran Terbuka	% Pengangguran Terbuka
1991	78,12	0,67	6,95	76,09	0,59	84.395	2,03	2,60
1992	80,36	2,24	6,46	78,18	2,10	324.473	2,18	2,71
1993	81,10	0,74	6,50	78,86	0,68	104.817	2,24	2,76
1994	85,38	4,28	7,54	81,66	2,80	371.186	3,72	4,35
1995	89,53	4,15	8,22	83,30	1,64	199.185	6,23	6,96
1996	89,74	0,21	7,82	85,34	2,04	260.787	4,40	4,90
1997	90,94	1,20	4,69	86,68	1,34	285.573	4,26	4,69
1998	92,34	1,40	-13,97	87,29	0,61	(43.941)	5,05	5,47
1999	95,09	2,75	0,79	89,06	1,76	2.232.201	6,03	6,35
2000	95,65	0,56	4,92	89,84	0,78	158.892	5,81	6,08
2001	98,27	2,62	1,62	90,27	0,43	266.833	8,00	8,14
2002	98,86	0,59	4,12	90,37	0,10	24.272	8,49	8,59
2003	99,34	0,48	4,94	90,43	0,06	12.146	8,91	8,97
2004	100,24	0,90	4,91	90,65	0,22	44.807	9,59	9,57
2005	102,15	1,91	5,70	91,03	0,38	66.667	11,12	10,89
2006	102,25	0,10	5,52	92,34	1,31	237.095	9,91	9,69
2007	103,77	1,52	6,30	94,59	2,25	356.983	9,18	8,85
Rata-rata	-	1,55	4,30	-	1,12	293.316	-	1,26

Sumber : Indikator Ekonomi Indonesia, BPS, berbagai edisi

Pada Tabel 4.5. di atas, selama periode 1991-2007, secara umum terlihat bahwa lapangan kerja baru yang dapat diciptakan perekonomian, tidak mampu menyerap sepenuhnya angkatan kerja baru yang tumbuh pada tahun itu. Berdasarkan tabel di atas, dapat juga ungkapkan bahwa rata-rata pertambahan angkatan kerja baru per tahun adalah sebesar 1,55 juta orang, sedangkan rata-rata kesempatan kerja baru yang dapat diciptakan hanya sebesar 1,12 juta orang, dengan demikian tiap tahun terdapat peningkatan jumlah penganggur sebanyak 0,43 juta per orang. Dilihat dari kualitas pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja, terlihat bahwa selama periode penelitian, rata-rata 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap lapangan kerja sebanyak 293.316 orang. Dengan demikian, apabila rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3 persen per tahun, maka jumlah kesempatan kerja yang dapat diciptakan adalah sebesar 1,26 juta orang.



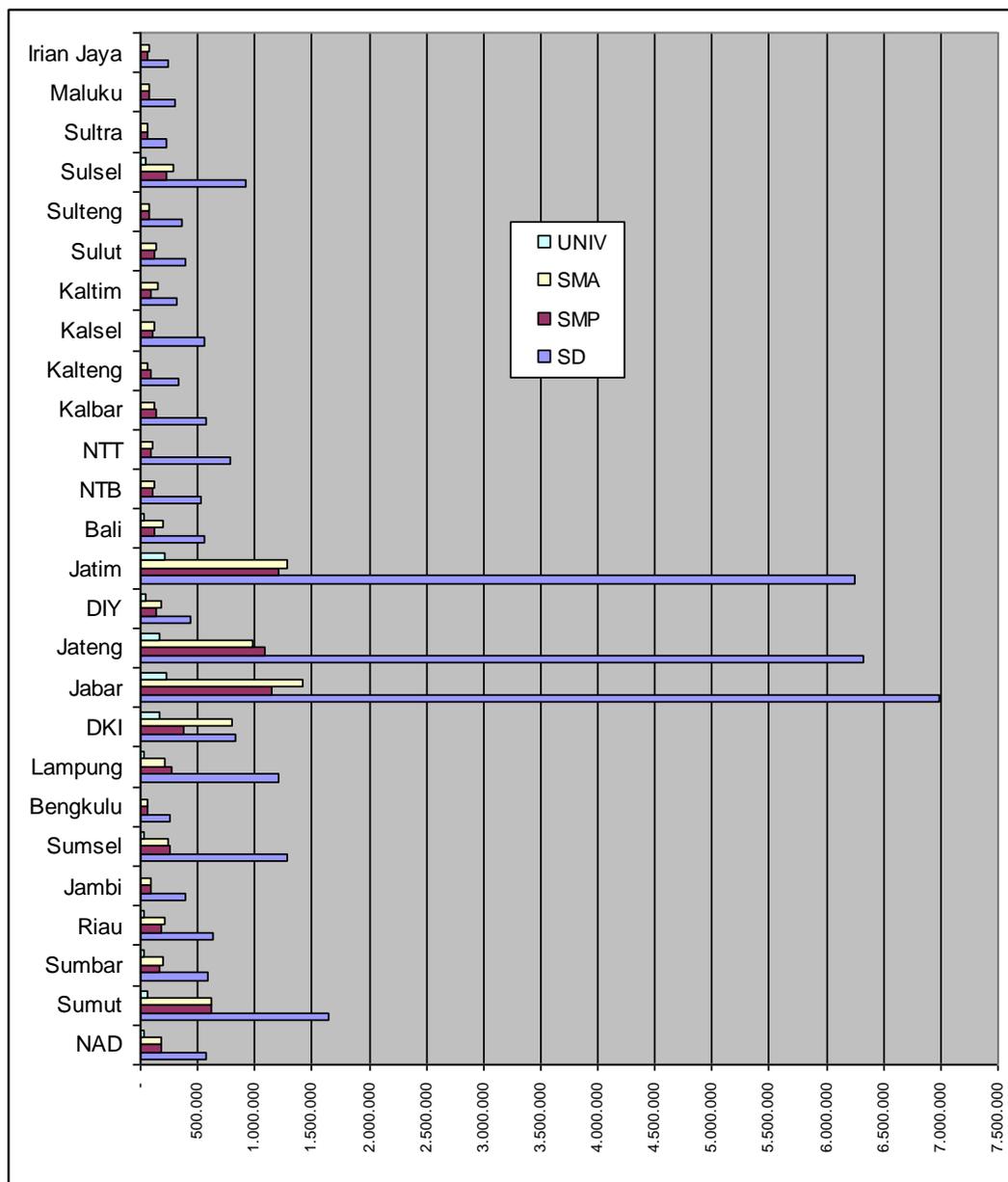
Sumber : Berbagai edisi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS Jakarta

Gambar 4.22.
Rata-rata Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja di Indonesia
Periode 1990-2007

Dilihat keadaan pendidikan angkatan kerja yang merupakan proksi untuk *human capital*, terlihat bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja di Indonesia selama periode penelitian pada umumnya masih sangat rendah. Pada periode 1990-2007, sekitar 66,99 persen dari angkatan kerja hanya berpendidikan di SD, 14,29 persen berpendidikan SLTP dan 16,14 persen berpendidikan SLTA. Sedangkan angkatan kerja yang memiliki pendidikan sampai perguruan tinggi (universitas), hanya sebesar 2,58 persen. Dengan demikian, *human capital* yang dimiliki oleh angkatan kerja di Indonesia secara umum belum begitu menggembirakan. Pada kenyataannya diketahui bahwa pada jenjang pendidikan rendah, angkatan kerja hanya baru diberikan bekal kemampuan dasar dan hanya memiliki kemampuan serta ketrampilan pekerjaan yang masih rendah. Dengan bekal pendidikan yang masih rendah, kecenderungan besar angkatan kerja hanya mampu melakukan pekerjaan yang banyak melibatkan kekuatan fisik. Sedangkan ditinjau dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan penerapan keahlian tertentu, angkatan kerja berpendidikan rendah dianggap belum memiliki cukup ketrampilan memadai untuk bekerja. Hal ini berarti bahwa di pasar tenaga kerja, sebagai besar angkatan kerja hanya memiliki tingkat pendidikan rendah dan hanya sebagian kecil saja yang berpendidikan perguruan tinggi.

Meskipun demikian, dilihat dari persentase per tahun, terdapat suatu tendensi semakin bertambahnya persentase angkatan kerja berpendidikan SLTA ke atas serta menurunnya persentase pekerja berpendidikan rendah. Kondisi ini diduga erat kaitannya dengan jumlah lowongan kerja dan kondisi pasar kerja yang tersedia mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu dengan jenjang yang lebih

tinggi. Ditambah lagi adanya tuntutan dan persyaratan tenaga kerja yang berkeahlian tertentu, khususnya penguasaan pekerja terhadap penerapan kemajuan teknologi.



Sumber : Berbagai edisi Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, BPS Jakarta

Gambar 4.23.
Rata-rata Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja di Indonesia
Menurut Propinsi Periode 1990-2007

Dilihat dari sebaran pendidikan angkatan kerja menurut propinsi, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.23., diketahui bahwa rata-rata pendidikan yang ditamatkan angkatan kerja hingga pendidikan SD, sebagian besar berada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan NTT. Sedangkan angkatan kerja pendidikan tinggi (Universitas) berada di Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Sumatera Utara.

Semakin besar pendidikan yang ditamatkan angkatan kerja semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan atau berpindah kerja dari pekerjaan lama menuju pekerjaan baru yang lebih baik. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan akan bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan bersaing tenaga kerja di pasar kerja sehingga posisi tenaga kerja dalam mendapatkan pekerjaan yang memadai semakin baik dengan upah yang semakin tinggi.

Pendidikan yang dimiliki oleh angkatan kerja akan mempengaruhi besar kecilnya tingkat upah dan produktivitas, dimana tingkat upah dan produktivitas tenaga kerja biasanya berjalan searah dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh angkatan kerja. Peningkatan kualitas pekerjaan yang ditekuni tenaga kerja dan upah yang diperoleh tenaga kerja akan meningkatkan pendapatan keluarga, pendapatan daerah serta pendapatan negara. Meningkatnya pendapatan keluarga berarti meningkatnya kualitas konsumsi keluarga dalam pemenuhan kebutuhan keluarga seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Merujuk pada rata-rata upah menurut propinsi sebagaimana Tabel 4.6., secara umum terlihat adanya peningkatan upah tenaga kerja di masing-masing propinsi setiap periodenya. Namun dilihat besarnya di

masing-masing propinsi terlihat bahwa rata-rata upah antar propinsi relatif berbeda. Rata-rata upah tertinggi terdapat di Propinsi Irian Jaya, Kalimantan Timur dan DKI Jakarta, sedangkan rata-rata upah terendah terdapat di Propinsi Lampung, NTB dan Jawa Tengah.

Tabel 4.6.
Rata-rata Perkembangan Tingkat Upah Menurut Propinsi
(dalam rupiah)

No	Propinsi	Tingkat Rata-rata Upah Tenaga Kerja			
		1990-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2007
1.	NAD	163.136,17	384.517,00	826.758,40	1.221.305,00
2.	Sumut	135.061,33	330.018,00	705.707,80	1.011.184,00
3.	Sumbar	141.517,83	361.039,00	774.384,40	1.056.763,50
4.	Riau	203.958,67	453.715,60	924.213,80	1.208.744,00
5.	Jambi	146.823,83	324.637,80	717.577,00	934.234,50
6.	Sumsel	154.568,33	304.765,00	672.983,60	961.020,50
7.	Bengkulu	137.094,83	313.438,00	690.771,00	1.088.194,00
8.	Lampung	113.914,67	269.578,60	536.518,20	816.109,50
9.	DKI Jakarta	216.718,17	459.959,00	1.003.770,40	1.492.958,00
10.	Jabar	130.269,50	306.406,60	642.231,60	1.085.145,00
11.	Jateng	99.448,17	229.126,80	490.225,80	748.725,50
12.	D.I. Y.	121.696,17	305.939,00	618.724,60	985.545,00
13.	Jatim	103.119,67	249.950,00	536.250,80	864.154,00
14.	Bali	130.005,17	326.036,40	718.291,20	1.114.399,00
15.	NTB	100.186,00	231.416,60	463.830,00	925.875,50
16.	NTT	142.356,33	349.268,00	774.574,20	1.060.578,00
17.	Kalbar	150.188,00	352.830,40	765.308,00	1.058.557,00
18.	Kalteng	177.532,67	398.586,00	923.113,20	996.817,00
19.	Kalsel	153.363,33	360.097,00	799.911,20	1.037.027,00
20.	Kaltim	208.990,33	488.654,20	1.080.010,00	1.625.029,50
21.	Sulut	135.456,83	328.882,80	821.244,80	1.114.611,00
22.	Sulteng	131.229,17	309.534,40	695.309,20	1.020.080,50
23.	Sulsel	153.384,00	359.256,80	803.374,20	1.022.076,50
24.	Sultra	161.964,50	395.759,40	822.302,00	975.731,00
25.	Maluku	157.628,00	400.825,20	857.951,00	1.215.909,50
26.	Irian Jaya	239.195,00	556.297,80	1.263.650,60	1.598.675,50
	Rata-rata	150.338,72	351.943,67	766.499,50	1.086.132,67

Sumber : Statistik Upah, BPS Jakarta, berbagai edisi

Kemungkinan alasan yang mendasari terciptanya perbedaan rata-rata upah antara propinsi, antara lain:

1. Perkiraan produktivitas pekerja dimasing-masing propinsi ditinjau melalui rata-rata jumlah jam kerja per minggu.
2. Adanya perbedaan kualitas pekerja di masing-masing propinsi, dimana kualitas pekerja di DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi daripada pekerja di NTB atau Lampung. Kualitas pekerja berdasarkan Pendidikan akan mempengaruhi besarnya upah yang diperolehnya.
3. Adanya perputaran uang dan dinamika kegiatan perekonomian yang berbeda antar propinsi, dianggap mempengaruhi kemudahan dan tingkat pendapatan atau laba yang lebih besar. Hal tersebut akan mempengaruhi perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui kenaikan upahnya bagi yang berpotensi.

Dalam praktek dilapangan tingkat upah di masing-masing daerah tergantung pada penetapan upah minimal oleh masing-masing pemerintah daerah. Upah minimum yang ditetapkan umumnya menjadi patokan dalam penetapan upah dan kenaikan upah bagi suatu perusahaan dalam regional tertentu karena upah minimum dijadikan standar bagi setiap perusahaan sebagai upah terendah. Apabila upah terendah naik maka akan mendorong upah pada struktur di atasnya akan naik. Di perusahaan sendiri, *review* upah biasanya dilaksanakan sesuai dengan kinerja pekerja dan juga kemampuan perusahaan untuk membayar. Untuk skema dan struktur upah umumnya disesuaikan dengan bentuk organisasi dari perusahaan itu sendiri karena memang setiap perusahaan mempunyai karakteristik masing-masing. Dengan demikian, kenaikan upah yang diberikan pada masing-masing pekerja akan berbeda-beda sesuai dengan kompetensi, kontribusi, jabatan, masa kerja dan lain sebagainya.

4.2. Pengujian Persamaan Simultan, Pengujian Hipotesis Penelitian, dan Pengujian Ekonometrik terhadap Model Penelitian

Estimasi terhadap model penelitian dihitung menggunakan 2SLS untuk data panel sebanyak 468 observasi, yang terdiri dari data *cross section* sebanyak 26 propinsi dan data *time series* dari tahun 1990 hingga 2007. Dengan pertimbangan bahwa jumlah data waktu (*time series*) lebih kecil dibandingkan jumlah data individu (*cross section*), sebagaimana pendapat Nachrowi dan Usman (2008), disarankan untuk menggunakan metode *Random Effect Model*.

Evaluasi pengujian persamaan simultan terhadap model penelitian, diperlukan untuk memperoleh pembenaran atas model yang digunakan. Evaluasi dimaksud mencakup uji bias simultan dan uji *endogenitas*. Disamping itu, terhadap data yang digunakan dilakukan juga pengujian ekonometrik untuk melihat tingkat validitas data. Pengujian dimaksud mencakup; uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji normalitas. Sementara itu, pengujian identifikasi dilakukan untuk memastikan penggunaan metode 2SLS, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab III Metode Penelitian, dimana berdasarkan pengujian identifikasi semua persamaan yang digunakan telah memenuhi kondisi order dan kondisi rank (*order and rank condition*).

4.2.1. Pengujian Persamaan Simultan

a. Uji Bias Simultan (*Hausman Test*).

Hausman test digunakan untuk memastikan apakah model persamaan yang digunakan dapat diperlakukan sebagai persamaan simultan atau tidak. Oleh karena itu, *hausman test* hanya dilakukan pada persamaan simultan untuk menentukan apakah persamaan tersebut bias simultan atau tidak. Hasil *hausman test* terhadap seluruh model persamaan simultan, ditampilkan pada Tabel 4.7. di bawah ini:

Tabel 4.7.
Hasil *Hausman Test* untuk Pengujian Persamaan Simultan

Persamaan	F-test	Probabilitas	Keterangan
IS	12,2627	0,0000	Simultan***
GRT	5,0541	0,0002	Simultan***
EMPL	26,1074	0,0000	Simultan***
ID	25,1628	0,0000	Simultan***

Sumber : Data hasil olahan

*) **) (***) signifikan pada *critical values* 10%, 5% dan 1%

Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas, tampak bahwa semua persamaan (persamaan IS, GRT, EMPL dan ID) menunjukkan bias simultan. Oleh karena itu, semua persamaan tersebut diestimasi menggunakan metode 2SLS. Hasil lengkap dari *hausman test* dapat dilihat pada Lampiran 4.

b. *Endogenitas Test*

Pada dasarnya, *endogenitas test* digunakan untuk mempertegas *hausman test* bahwa penempatan variabel *endogen* dan *eksogen* dalam sebuah model persamaan simultan sudah tepat. Seperti halnya *hausman test*, *endogenitas test* hanya diterapkan pada persamaan simultan.

Hasil pengujian *endogenitas* terhadap seluruh model persamaan simultan, ditampilkan pada Tabel 4.8. di bawah ini:

Tabel 4.8.
Hasil *Endogenitas Test* untuk Pengujian Persamaan Simultan

Persamaan	F-test	Probabilitas	Keterangan
IS	14.3078	0,0000	<i>Endogen</i>
GRT	5,4563	0,0001	<i>Endogen</i>
EMPL	65,1942	0,0000	<i>Endogen</i>
ID	22,7010	0,0000	<i>Endogen</i>

Sumber : Data hasil olahan

Berdasarkan hasil pengujian tersebut di atas, tampak bahwa semua variabel *endogen* dalam sistem persamaan simultan sudah tepat diperlakukan sebagai variabel *endogen* karena probabilitas nilai *F-test* lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan kembali bahwa semua persamaan (persamaan IS, GRT, EMPL dan dan ID) yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat simultan. Oleh karena itu, semua persamaan tersebut dapat diestimasi menggunakan metode 2SLS. Hasil lengkap dari *endogenitas test* dapat dilihat pada Lampiran 5.

4.2.2. Pengujian Hipotesis Pertama Untuk Persamaan Faktor Penentu Investasi Swasta

4.2.2.1. Hasil Estimasi

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Program Eviews 5.0. terhadap model penelitian faktor penentu perkembangan investasi swasta, didapatkan hasil bahwa GRT, IP, CR dan ER memiliki tanda positif dan signifikan terhadap IS. Sedangkan I, INF dan D_K memiliki tanda negatif dan signifikan terhadap IS. Nilai D_K yang negatif dan signifikan, menunjukkan bahwa krisis ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap perkembangan investasi swasta pada masing-masing propinsi di Indonesia.

Hasil uji *REM* untuk model faktor penentu perkembangan investasi swasta di Indonesia memperlihatkan nilai intersef yang negatif sebesar -543,5611 dan signifikan secara statistik sehingga memberikan kesimpulan bahwa memang ada perbedaan intersep antar provinsi di Indonesia, sedangkan sloponya tidak. Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata komponen *random error cross section*

untuk masing-masing propinsi terlihat bahwa Jawa Barat memiliki nilai rata-rata komponen *random error cross section* tertinggi sebesar 1005,018 dan terendah adalah Jawa Tengah sebesar -406,410.

Tabel 4.9.
Random Effect Model Faktor Penentu Investasi Swasta

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-543.5611	205.4450	-2.645774	0.0092
GRT?	4.235180	1.263318	3.352426	0.0005
I?	-1.454267	0.341921	-4.253221	0.0000
IP?	4.722652	1.115303	4.234410	0.0000
INF?	-4.593288	2.009901	-2.285331	0.0171
CR?	2.723118	0.953566	2.855720	0.0059
ER?	0.842336	0.337700	2.494332	0.0145
DK?	-1.561189	-0.378652	-4.123019	0.0000
Random Effects (Cross)				
_NAD—C	-114.7212			
_SUMUT—C	-94.42900			
_SUMBAR—C	-33.96075			
_RIAU—C	141.9728			
_JAMBI—C	36.79471			
_SUMSEL—C	-56.66636			
_BENGKULU—C	26.99166			
_LAMPUNG—C	-5.209288			
_DKI—C	-379.3789			
_JABAR—C	1005.018			
_JATENG—C	-406.4100			
_DIY—C	144.0886			
_JATIM—C	-309.6914			
_BALI—C	85.56391			
_NTB—C	80.25354			
_NTT—C	43.35643			
_KALBAR—C	-30.96143			
_KALTENG—C	10.84793			
_KALSEL—C	1.538313			
_KALTIM—C	-1.553658			
_SULUT—C	17.38933			
_SULTENG—C	30.94783			
_SULSEL—C	-39.08313			
_SULTRA—C	33.69606			
_MALUKU—C	20.68224			
_IRJA—C	-53.26390			

Sumber : Hasil Olah Data menggunakan Eviews 5.0. (Lampiran 5)

Adapun nilai koefisien intersep *fixed effect* untuk setiap propinsi dalam model faktor penentu investasi swasta di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.10. berikut ini :

Tabel 4.10.
Nilai Koefisien Estimasi Intersep Masing-masing Provinsi
dalam Model Faktor Penentu Investasi Swasta di Indonesia

Intersep	Koefisien	Keterangan
_NAD—C	-658,282	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_SUMUT—C	-637,990	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_SUMBAR—C	-577,522	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_RIAU—C	-401,588	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_JAMBI—C	-506,766	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_SUMSEL—C	-600,227	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_BENGKULU—C	-516,569	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_LAMPUNG—C	-548,770	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_DKI—C	-922,940	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_JABAR—C	461,457	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_JATENG—C	-949,971	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_DIY—C	-399,472	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_JATIM—C	-853,252	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_BALI—C	-457,997	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_NTB—C	-463,308	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_NTT—C	-500,205	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_KALBAR—C	-574,523	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_KALTENG—C	-532,713	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_KALSEL—C	-542,023	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_KALTIM—C	-545,115	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_SULUT—C	-526,172	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_SULTENG—C	-512,613	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_SULSEL—C	-582,644	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_SULTRA—C	-509,865	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_MALUKU—C	-522,879	C signifikan pada tingkat alpa 5%
_IRJA—C	-596,825	C signifikan pada tingkat alpa 5%

Sumber : Tabel 4.9. (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.10. tersebut di atas, dapat diinterpretasikan bahwa apabila tidak terjadi perubahan variabel independen didalam model (variabel independen yaitu *GRT*, *I*, *IP*, *INF*, *CR* dan *ER* tidak berkembang/sama dengan

nol), maka nilai intersep (*ceteris paribus*), di NAD adalah sebesar Rp -658,282 Triliun, Sumut sebesar Rp -637,990 Triliun, Sumbar sebesar Rp -577,522 Triliun, Riau sebesar Rp -401,588 Triliun, Jambi sebesar Rp -506,766 Triliun, Sumsel sebesar Rp -600,227 Triliun, Bengkulu sebesar Rp -516,569 Triliun, Lampung sebesar Rp -548,770 Triliun, DKI sebesar Rp -922,940 Triliun, Jabar sebesar Rp 461,457 Triliun, Jateng sebesar Rp -949,971 Triliun, DIY sebesar Rp -399,472 Triliun, Jatim sebesar Rp -853,252 Triliun, Bali sebesar Rp -457,997 Triliun, NTB sebesar Rp -463,308 Triliun, NTT sebesar Rp -500,205 Triliun, Kalbar sebesar Rp -574,523 Triliun, Kalteng sebesar Rp -532,713 Triliun, Kalsel sebesar Rp -542,023 Triliun, Kaltim sebesar Rp -545,115 Triliun, Sulut sebesar Rp -526,172 Triliun, Sulteng sebesar Rp -512,613 Triliun, Sulsel sebesar Rp -582,644 Triliun, Sultra sebesar Rp -509,865 Triliun, Maluku sebesar Rp -522,879 Triliun dan Irja sebesar Rp -596,825 Triliun.

Dengan demikian, hal tersebut berarti bahwa rata-rata variabel independen di Jawa Barat lebih memberikan pengaruh terhadap rata-rata variabel dependen (perkembangan investasi swasta) dibandingkan dengan propinsi lain. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa rata-rata variabel pertumbuhan ekonomi, suku bunga, investasi pemerintah, tingkat inflasi, ketersediaan kredit investasi dan nilai tukar yang terdapat di Propinsi Jawa Barat lebih efektif untuk mendorong perkembangan investasi swasta di Jawa Barat dibandingkan dengan di Propinsi lainnya.

Dilihat dari nilai sloponya masing-masing variabel independen, dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 1 persen akan meningkatkan nilai investasi swasta dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar Rp4,2 triliun, setiap peningkatan suku bunga rata-rata

sebesar 1 persen akan menurunkan perkembangan investasi swasta dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar Rp1,4 triliun, setiap peningkatan investasi pemerintah (IP) rata-rata sebesar 1 triliun rupiah akan meningkatkan nilai investasi swasta dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar Rp4,7 triliun, setiap penurunan inflasi rata-rata sebesar 1 persen akan meningkatkan nilai investasi swasta dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar Rp 4,5 triliun, setiap peningkatan penyaluran kredit investasi oleh perbankan rata-rata sebesar 1 miliar rupiah akan meningkatkan nilai investasi swasta dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar Rp2,7 triliun dan setiap terjadi depresiasi nilai tukar rata-rata sebesar 1 rupiah terhadap dollar akan meningkatkan nilai investasi swasta dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar Rp0,8 triliun.

Selanjutnya, melalui pengujian konsistensi arah koefisien, dapat diketahui apakah arah koefisien hasil penelitian sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan atau tidak. Pengujian arah koefisien ini dilakukan dengan cara membandingkan arah koefisien hasil penelitian dengan hipotesis ekonomi yang telah dikemukakan sebelumnya. Hasilnya pengujian arah koefisien untuk persamaan faktor penentu investasi swasta, tampak sebagaimana Tabel 4.11.

Tabel 4.11.
Pengujian Arah Koefisien Persamaan Faktor Penentu Investasi (IS)

Variabel	Arah Koefisien (Hipotesis)	Arah Koefisien (Model)	Kesimpulan
GRT	+	+	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis
I	+	+	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis
IP	+	+	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis
INF	-	-	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis
CR	+	+	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis
ER	-	+	Arah koefisien tidak konsisten dengan hipotesis

Sumber : Hasil perhitungan dan Hipotesis

Berdasarkan Tabel 4.11. diketahui bahwa sebagian besar variabel penelitian memiliki arah koefisien yang benar (konsisten) sesuai dengan hipotesis yang diajukan, kecuali untuk arah pengaruh dari variabel nilai tukar (ER) terhadap investasi swasta (IS) yang berlawanan arah dengan hipotesis. Untuk penjelasan lebih lanjut dari Tabel 4.10. di atas akan diuraikan pada bahasan sub bab 4.3.1.

Dilihat dari pengujian signifikansi diketahui bahwa variabel GRT, I, IP, INF, CR dan ER baik secara individu maupun simultan berpengaruh secara signifikan terhadap investasi swasta (IS) pada $\alpha = 5$ persen, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai p-valuenya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, IS. Sementara itu, hasil uji R^2 memperlihatkan nilai sebesar 0,7823 (lihat lampiran 3). Angka tersebut mengindikasikan bahwa variasi perubahan variabel dependen hanya mampu dijelaskan sekitar 78,23 persen oleh variasi perubahan variabel independen. Dengan kata lain, masih terdapat sekitar 21,77 persen variasi perubahan variabel dependen yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain di luar persamaan faktor penentu investasi swasta.

4.2.2.2. Pengujian Asumsi Validitas OLS Faktor Penentu Investasi Swasta

a. Uji Normalitas

Uji *Jarque-Bera* digunakan untuk memastikan persamaan estimasi bebas dari masalah penyimpangan asumsi normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam persamaan faktor penentu investasi swasta memperlihatkan nilai yang jauh lebih rendah dari nilai χ^2 -tabel ($\alpha = 0,05$;

df = 462) sebesar 124,342. Nilai *Jarque-Bera* berturut-turut adalah (GRT= 65,742; I = 44,5301; IP = 34,985; INF = 39,347; CR = 44,430; dan ER = 12,085). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan estimasi yang digunakan bebas dari penyimpangan asumsi normalitas. Hasil lengkap uji *Jarque-Bera* dapat dilihat pada Lampiran 1.

b. Uji Multikolinieritas

Uji *correlation matrix* digunakan untuk mengetahui ada tidaknya saling korelasi diantara variabel-variabel independen. Hasil uji multikolinieritas memperhatikan angka yang jauh di bawah 0,80. Ini mengindikasikan bahwa diantara variabel-variabel independen tidak terdapat saling korelasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan estimasi yang digunakan bebas dari gejala multikolinieritas. Hasil lengkap uji *correlation matrix* dapat dilihat pada Lampiran 2.

c. Uji Autokorelasi

Uji Durbin-Watson (DW) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi atau serial korelasi. Hasil uji DW menunjukkan nilai sebesar 2,0511 ($n = 468$; $k = 6$; $d_L = 1,707$; dan $d_U = 1,831$), yang mana nilai tersebut berada di wilayah H_0 tidak ditolak atau terdapat pada daerah ($d_U < d < 4-d_U$). Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi atau serial korelasi dalam residual. Hasil lengkap uji *autokorelasi* dapat dilihat pada Lampiran 3.

Berdasarkan berbagai hasil pengujian validitas asumsi klasik untuk persamaan faktor penentu investasi swasta di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan faktor penentu investasi swasta (IS) sudah dapat diterima sebagai suatu persamaan yang valid.

4.2.3. Pengujian Hipotesis Kedua untuk Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

4.2.3.1. Hasil Estimasi

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Program Eviews 5.0. terhadap model penelitian pertumbuhan ekonomi, didapatkan hasil bahwa IS, IP, HC dan TK memiliki tanda positif dan signifikan terhadap GRT. Sedangkan Dummy krisis (D_K) memiliki nilai yang negatif, tapi tidak signifikan, menunjukkan bahwa krisis ekonomi memiliki pengaruh yang negatif, namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada masing-masing propinsi di Indonesia.

Hasil uji *REM* untuk model faktor penentu perkembangan investasi swasta di Indonesia memperlihatkan nilai intersef yang negatif sebesar 4,3277 dan signifikan secara statistik sehingga memberikan kesimpulan bahwa memang ada perbedaan intersep antar provinsi di Indonesia, sedangkan sloponya tidak. Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata komponen *random error cross section* untuk masing-masing propinsi terlihat bahwa Jawa Barat memiliki nilai rata-rata komponen *random error cross section* tertinggi sebesar 11,3936 dan terendah adalah Maluku sebesar -19,7533.

Tabel 4.12.
Random Effect Model Pertumbuhan Ekonomi

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	4.327721	1.930602	2.241643	0.0232
IS?	0.001218	0.000499	2.438896	0.0154
IP?	0.031252	0.005031	6.211288	0.0000
HC?	2.218751	0.356208	6.228801	0.0000
TK?	2.166327	0.803497	2.696122	0.0082
D _k ?	-1.153821	0.911602	-1.265707	0.2063
<i>Random Effects (Cross)</i>				
_NAD--C	-6.870675			
_SUMUT--C	7.286895			
_SUMBAR--C	-11.10609			
_RIAU--C	3.724074			
_JAMBI--C	-16.40151			
_SUMSEL--C	-0.244708			
_BENGKULU--C	-16.92829			
_LAMPUNG--C	-8.172145			
_DKI--C	8.060056			
_JABAR--C	11.39358			
_JATENG--C	7.716484			
_DIY--C	-14.50158			
_JATIM--C	10.33708			
_BALI--C	-12.05971			
_NTB--C	-11.21099			
_NTT--C	-12.92505			
_KALBAR--C	-8.939480			
_KALTENG--C	-16.27318			
_KALSEL--C	-11.18901			
_KALTIM--C	9.955045			
_SULUT--C	-18.83006			
_SULTENG--C	-16.86623			
_SULSEL--C	-7.644750			
_SULTRA--C	-17.33525			
_MALUKU--C	-19.75331			
_IRJA--C	-8.321015			

Sumber : Hasil Olah Data menggunakan Eviews 5.0. (Lampiran 5)

Adapun nilai koefisien intersep *fixed effect* untuk setiap propinsi dalam model pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.13. berikut:

Tabel 4.13.
Nilai Koefisien Estimasi Intersep Masing-masing Provinsi
dalam Model Pertumbuhan Ekonomi

Intersep	Koefisien	Keterangan
_NAD—C	-2,543	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SUMUT—C	11,615	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SUMBAR—C	-6,778	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_RIAU—C	8,052	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_JAMBI—C	-12,074	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SUMSEL—C	4,083	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_BENGKULU—C	-12,601	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_LAMPUNG—C	-3,844	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_DKI—C	12,388	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_JABAR—C	15,721	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_JATENG—C	12,044	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_DIY—C	-10,174	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_JATIM—C	14,665	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_BALI—C	-7,732	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_NTB—C	-6,883	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_NTT—C	-8,597	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_KALBAR—C	-4,612	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_KALTENG—C	-11,946	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_KALSEL—C	-6,862	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_KALTIM—C	14,283	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SULUT—C	-14,502	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SULTENG—C	-12,536	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SULSEL—C	-3,317	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SULTRA—C	-13,008	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_MALUKU—C	-15,426	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_IRJA—C	-3,993	C signifikan pada tingkat alfa 5%

Sumber : Tabel 4.11. (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.13. tersebut di atas, dapat diinterpretasikan bahwa apabila tidak terjadi perubahan variabel independen didalam model (variabel independen yaitu *IS*, *IP*, *HC* dan *TK* tidak berkembang/sama dengan nol), maka sumbangan intersep (*ceteris paribus*) di NAD adalah sebesar -2,54 persen, Sumut sebesar 11,62 persen, Sumbar sebesar -6,78 persen, Riau sebesar 8,05 persen, Jambi sebesar -12,07 persen, Sumsel sebesar 4,08 persen, Bengkulu sebesar

-12,60 persen, Lampung sebesar -3,84 persen, DKI sebesar 12,39 persen, Jabar sebesar 15,72 persen, Jateng sebesar 12,04 persen, DIY sebesar -10,17 persen, Jatim sebesar 14,67 persen, Bali sebesar -7,73 persen, NTB sebesar -6,88 persen, NTT sebesar -8,60 persen, Kalbar sebesar -4,61 persen, Kalteng sebesar -11,95 persen, Kalsel sebesar -6,86 persen, Kaltim sebesar 14,28 persen, Sulut sebesar -14,50 persen, sulteng sebesar -12,54 persen, Sulsel sebesar -3,32 persen, Sultra sebesar -13,01 persen, Maluku sebesar -13,43 persen dan Irja sebesar -3,99 persen.

Dengan demikian, hal tersebut berarti bahwa rata-rata variabel independen di Jawa Barat lebih memberikan pengaruh terhadap rata-rata variabel dependen (pertumbuhan ekonomi) dibandingkan dengan propinsi lain. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa rata-rata variabel investasi swasta, investasi pemerintah, modal manusia dan tenaga kerja yang terdapat di Propinsi Jawa Barat lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dibandingkan dengan di Propinsi lainnya.

Dilihat dari nilai sloponya masing-masing variabel independen, dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan investasi swasta rata-rata sebesar 1 triliun akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar 0,0012 persen, setiap peningkatan investasi pemerintah rata-rata sebesar 1 triliun akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar 0,0313 persen, setiap peningkatan modal manusia rata-rata sebesar 1 satuan indeks akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar 2,2 persen dan setiap peningkatan tenaga kerja yang berkualitas rata-rata sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar 2,1663 persen.

Selanjutnya, melalui pengujian konsistensi arah koefisien, dapat diketahui apakah arah koefisien hasil penelitian sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan atau tidak. Pengujian arah koefisien ini dilakukan dengan cara membandingkan arah koefisien hasil penelitian dengan hipotesis ekonomi yang telah dikemukakan sebelumnya. Hasilnya pengujian arah koefisien untuk persamaan pertumbuhan, tampak sebagaimana Tabel 4.14. berikut :

Tabel 4.14.
Pengujian Arah Koefisien Persamaan Pertumbuhan (GRT)

Variabel	Arah Koefisien (Hipotesis)	Arah Koefisien (Model)	Kesimpulan
IS	+	+	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis
IP	+	+	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis
HC	+	+	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis
TK	+	+	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis

Sumber : Hasil perhitungan dan Hipotesis

Berdasarkan Tabel 4.14. dapat diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki arah koefisien yang benar (konsisten) sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari Tabel 4.14. di atas akan diuraikan pada bahasan sub bab 4.3.2.

Dilihat dari pengujian signifikansi, diketahui bahwa variabel IS, IP, HC dan TK baik secara individu maupun simultan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan (GRT) pada alfa 5 persen sebagaimana ditunjukkan oleh nilai p-valuenya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, GRT. Sementara itu, hasil uji R^2 memperlihatkan nilai sebesar 94,13 persen (lihat lampiran 3). Angka tersebut mengindikasikan bahwa variasi perubahan variabel dependen telah mampu dijelaskan sekitar 94,13 persen oleh

variasi perubahan variabel independen. Dengan kata lain, masih terdapat sekitar 5897 persen variasi perubahan variabel dependen yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain di luar persamaan pertumbuhan.

4.2.3.2. Pengujian Asumsi Validitas OLS Pertumbuhan Ekonomi

a. Uji Normalitas

Uji *Jarque-Bera* digunakan untuk memastikan persamaan estimasi bebas dari masalah penyimpangan asumsi normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam persamaan pertumbuhan memperlihatkan nilai yang jauh lebih rendah dari nilai χ^2 -tabel ($\alpha = 0,05$; $df = 463$) sebesar 124,342. Nilai *Jarque-Bera* berturut-turut untuk persamaan pertumbuhan adalah (IS = 23,889; IP = 34,985; HC = 10,249; dan TK = 31,469). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang digunakan bebas dari penyimpangan asumsi normalitas. Hasil lengkap uji *Jarque-Bera* dapat dilihat pada Lampiran 1.

b. Uji Multikolinieritas

Uji *correlation matrix* digunakan untuk mengetahui ada tidaknya saling korelasi diantara variabel-variabel independen. Hasil uji multikolinieritas memperhatikan angka yang jauh di bawah 0,80. Ini mengindikasikan bahwa diantara variabel-variabel independen tidak terdapat saling korelasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan estimasi yang digunakan bebas dari gejala multikolinieritas. Hasil lengkap uji *correlation matrix* dapat dilihat pada Lampiran 2.

c. Uji Autokorelasi

Uji Durbin-Watson (DW) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi atau serial korelasi. Hasil uji DW menunjukkan nilai sebesar 1,9810 ($n = 468$; $k = 5$; $d_L = 1,718$; dan $d_U = 1,820$), yang mana nilai tersebut berada di wilayah H_0 tidak ditolak atau terdapat pada daerah ($d_U < d < 4-d_U$). Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi atau serial korelasi dalam residual. Hasil lengkap uji *autokorelasi* dapat dilihat pada Lampiran 3.

Berdasarkan berbagai hasil pengujian validitas asumsi klasik untuk persamaan pertumbuhan ekonomi di atas, dapat disimpulkan bahwa model pertumbuhan (GRT) sudah dapat diterima sebagai suatu persamaan yang valid.

4.2.4. Pengujian Hipotesis Ketiga untuk Persamaan Kesempatan Kerja

4.2.4.1. Hasil Estimasi

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Program Eviews 5.0. terhadap model kesempatan kerja, didapatkan hasil bahwa IS dan GRT memiliki tanda positif dan signifikan terhadap IS. Sedangkan W memiliki tanda negatif dan signifikan terhadap IS. Sedangkan Dummy krisis (D_K) memiliki nilai yang negatif dan tapi tidak signifikan, menunjukkan bahwa krisis ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan namun tidak signifikan terhadap kesempatan kerja pada masing-masing propinsi di Indonesia.

Hasil uji *REM* untuk model faktor penentu perkembangan investasi swasta di Indonesia memperlihatkan nilai intersef yang negatif sebesar 85,8336 dan signifikan secara statistik sehingga memberikan kesimpulan bahwa memang ada perbedaan intersep antar provinsi di Indonesia, sedangkan sloponya tidak.

Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata komponen *random error cross section* untuk masing-masing propinsi terlihat bahwa Propinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai rata-rata komponen *random error cross section* tertinggi sebesar 6,6864 dan terendah adalah DKI Jakarta sebesar -10,4413.

Tabel 4.15.
Random Effect Model Kesempatan Kerja

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.83357	8.211083	10.45338	0.0000
IS?	0.063552	0.028225	2.251632	0.0185
GRT?	-0.105524	0.041020	-2.572514	0.0142
W?	-0.043442	0.007334	-5.923011	0.0000
DK?	-0.015324	0.020315	-0.754328	0.4672
Random Effects (Cross)				
_NAD--C	-1.742252			
_SUMUT--C	-3.285488			
_SUMBAR--C	-1.690482			
_RIAU--C	-1.901528			
_JAMBI--C	2.335724			
_SUMSEL--C	0.424426			
_BENGKULU--C	3.233702			
_LAMPUNG--C	-0.039006			
_DKI--C	-10.44133			
_JABAR--C	-9.422116			
_JATENG--C	-0.741174			
_DIY--C	1.846136			
_JATIM--C	-0.869472			
_BALI--C	4.176326			
_NTB--C	0.880556			
_NTT--C	6.686446			
_KALBAR--C	2.917956			
_KALTENG--C	4.006778			
_KALSEL--C	2.347652			
_KALTIM--C	-1.234568			
_SULUT--C	-4.142306			
_SULTENG--C	0.184198			
_SULSEL--C	-4.393530			
_SULTRA--C	1.779824			
_MALUKU--C	3.503986			
_IRJA--C	5.579538			

Sumber : Hasil Olah Data menggunakan Eviews 5.0. (Lampiran 5)

Adapun nilai koefisien intersep *fixed effect* untuk setiap propinsi dalam model kesempatan kerja di Indonesia dapat dilihat pada tabel 4.16. berikut ini :

Tabel 4.16.
Nilai Koefisien Estimasi Intersep Masing-masing Provinsi
dalam Model Faktor Penentu Kesempatan Kerja di Indonesia

Intersep	Koefisien	Keterangan
_NAD—C	85,0932	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SUMUT—C	83,5481	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SUMBAR—C	85,1431	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_RIAU—C	84,9320	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_JAMBI—C	89,1693	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SUMSEL—C	87,2580	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_BENGKULU—C	90,0673	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_LAMPUNG—C	86,7946	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_DKI—C	76,3922	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_JABAR—C	77,4115	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_JATENG—C	86,0924	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_DIY—C	88,6797	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_JATIM—C	85,9641	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_BALI—C	91,0099	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_NTB—C	87,7141	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_NTT—C	93,5200	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_KALBAR—C	89,7515	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_KALTENG—C	90,8403	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_KALSEL—C	89,1812	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_KALTIM—C	85,5990	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SULUT—C	82,6913	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SULTENG—C	87,0178	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SULSEL—C	82,4400	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SULTRA—C	88,6134	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_MALUKU—C	90,3376	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_IRJA—C	92,4131	C signifikan pada tingkat alfa 5%

Sumber : Tabel 4.14. (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.16. tersebut di atas, dapat diinterpretasikan bahwa apabila tidak terjadi perubahan variabel independen didalam model (variabel independen yaitu *IS*, *GRT* dan *W* tidak berkembang/konstan), maka sumbangan intersep (ceteris paribus) di NAD adalah sebesar 85,09 persen, Sumut sebesar 83,55 persen, Sumbar sebesar 85,14 persen, Riau sebesar 84,93 persen, Jambi sebesar 89,17 persen, Sumsel sebesar 87,26 persen, Bengkulu sebesar 90,07

persen, Lampung sebesar 86,79 persen, DKI sebesar 76,39 persen, Jabar sebesar 77,41 persen, Jateng sebesar 86,79 persen, DIY sebesar 88,68 persen, Jatim sebesar 85,96 persen, Bali sebesar 91,01 persen, NTB sebesar 87,71 persen, NTT sebesar 93,52 persen, Kalbar sebesar 89,75 persen, Kalteng sebesar 90,84 persen, Kalsel sebesar 89,18 persen, Kaltim sebesar 85,60 persen, Sulut sebesar 82,69 persen, Sulteng sebesar 87,02 persen, Sulsel 82,44 persen, Sultra sebesar 88,61 persen, Maluku sebesar 90,33 persen dan Irija sebesar 92,41 persen.

Dengan demikian, hal tersebut berarti bahwa rata-rata variabel independen di Propinsi NTT lebih memberikan pengaruh terhadap rata-rata variabel dependen (kesempatan kerja) dibandingkan dengan propinsi lain. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa rata-rata variabel investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan upah yang terdapat di Propinsi NTT lebih efektif untuk meningkatkan kesempatan kerja di Propinsi NTT dibandingkan dengan di Propinsi lainnya.

Dilihat dari nilai sloponya masing-masing variabel independen, dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan investasi swasta rata-rata sebesar 1 triliun akan meningkatkan kesempatan kerja dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar 0,0636 persen, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 1 persen akan menurunkan kesempatan kerja dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar 0,1055 persen dan setiap peningkatan upah rata-rata sebesar 1 juta rupiah akan menurunkan kesempatan kerja dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar 0,0434 persen.

Selanjutnya, melalui pengujian konsistensi arah koefisien, dapat diketahui apakah arah koefisien hasil penelitian sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan atau tidak. Pengujian arah koefisien ini dilakukan dengan cara

membandingkan arah koefisien hasil penelitian dengan hipotesis ekonomi yang telah dikemukakan sebelumnya. Hasilnya pengujian arah koefisien untuk persamaan kesempatan kerja, tampak sebagaimana Tabel 4.17. berikut :

Tabel 4.17.
Pengujian Arah Koefisien Persamaan Kesempatan Kerja (EMPL)

Variabel	Arah Koefisien (Hipotesis)	Arah Koefisien (Model)	Kesimpulan
IS	+	+	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis
GRT	+	-	Arah koefisien tidak konsisten dengan hipotesis
W	-	-	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis

Sumber : Hasil perhitungan dan Hipotesis

Berdasarkan Tabel 4.17. dapat diketahui bahwa sebagian besar variabel penelitian memiliki arah koefisien yang benar (konsisten) sesuai dengan hipotesis yang diajukan, kecuali untuk arah pengaruh dari variabel pertumbuhan (GRT) terhadap kesempatan kerja (EMPL) yang berlawanan dengan hipotesis. Untuk penjelasan lebih lanjut dari Tabel 4.17. di atas akan diuraikan pada bahasan sub bab 4.3.3.

Dilihat dari pengujian signifikansi, diketahui bahwa variabel IS, GRT dan W baik secara individu maupun simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kesempatan kerja (EMPL) pada alpa 5 persen sebagaimana ditunjukkan oleh nilai p-valuenya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, EMPL. Sementara itu, hasil uji R^2 memperlihatkan nilai sebesar 0,8155. Angka tersebut mengindikasikan bahwa variasi perubahan variabel dependen hanya mampu dijelaskan sekitar 81,55 persen oleh variasi perubahan variabel independen. Dengan kata lain, masih terdapat sekitar 18,45 persen variasi perubahan variabel dependen yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain di luar persamaan kesempatan kerja.

4.2.4.2. Pengujian Asumsi Validitas OLS Kesempatan Kerja

a. Uji Normalitas

Uji *Jarque-Bera* digunakan untuk memastikan persamaan estimasi bebas dari masalah penyimpangan asumsi normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam model kesempatan kerja memperlihatkan nilai yang jauh lebih rendah dari nilai χ^2 -tabel ($\alpha = 0,05$; $df = 464$) sebesar 124,342. Nilai *Jarque-Bera* berturut-turut adalah (IS = 23,899; GRT = 65,742; dan W = 53,998). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang digunakan bebas dari penyimpangan asumsi normalitas. Hasil lengkap uji *Jarque-Bera* dapat dilihat pada Lampiran 1.

b. Uji Multikolinieritas

Uji *correlation matrix* digunakan untuk mengetahui ada tidaknya saling korelasi diantara variabel-variabel independen. Hasil uji multikolinieritas memperhatikan angka yang jauh di bawah 0,80. Ini mengindikasikan bahwa diantara variabel-variabel independen tidak terdapat saling korelasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan estimasi yang digunakan bebas dari gejala multikolinieritas. Hasil lengkap uji *correlation matrix* dapat dilihat pada Lampiran 2.

c. Uji Autokorelasi

Uji Durbin-Watson (DW) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi atau serial korelasi. Hasil uji DW menunjukkan nilai sebesar 2,0218 ($n = 468$; $k = 4$; $d_L = 1,728$; dan $d_U = 1,810$), yang mana nilai tersebut berada di

wilayah H_0 tidak ditolak atau terdapat pada daerah ($d_U < d < 4-d_U$). Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi atau serial korelasi dalam residual. Hasil lengkap uji *autokorelasi* dapat dilihat pada Lampiran 3.

Berdasarkan berbagai hasil pengujian validitas asumsi klasik untuk persamaan kesempatan kerja di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan kesempatan kerja (EMPL) sudah dapat diterima sebagai suatu model yang valid.

4.2.5. Pengujian Hipotesis Keempat untuk Persamaan Distribusi Pendapatan

4.2.5.1. Hasil Estimasi

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan Program Eviews 5.0. terhadap model penelitian pertumbuhan ekonomi, didapatkan hasil bahwa INF, UNEMPL dan D_K memiliki tanda positif dan signifikan terhadap ID. Sedangkan IS, GRT dan IP memiliki nilai yang negatif dan signifikan terhadap ID. *Dummy krisis* (D_K), nilai yang positif menunjukkan bahwa krisis ekonomi meningkatkan nilai indeks gini rasio, yang berarti memiliki dampak makin memperburuk ketidakmerataan distribusi pendapatan pada masing-masing propinsi di Indonesia.

Hasil uji *REM* untuk model faktor penentu perkembangan investasi swasta di Indonesia memperlihatkan nilai intersef yang negatif sebesar 0,3962 dan signifikan secara statistik sehingga memberikan kesimpulan bahwa memang ada perbedaan intersep antar provinsi di Indonesia, sedangkan sloponya tidak. Sedangkan berdasarkan nilai rata-rata komponen *random error cross section* untuk masing-masing propinsi, terlihat bahwa Propinsi Irian Jaya memiliki nilai rata-rata komponen *random error cross section* untuk ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi sebesar 0,4717 dan ketimpangan distribusi pendapatan terendah adalah Propinsi Sulawesi Tenggara sebesar -0,2219.

Tabel 4.18.
Random Effect Model Distribusi Pendapatan

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.382736	0.052441	7.298432	0.0000
IS?	-0.003422	0.001307	-2.617323	0.0074
GRT?	-0.017622	0.007490	-2.352881	0.0172
IP?	-0.163270	0.047442	-3.441433	0.0001
INF?	0.026299	0.013380	1.965511	0.0235
UNEMP?	0.003881	0.001299	2.988225	0.0031
DK?	0.043524	0.013246	3.285822	0.0012
Random Effects (Cross)				
_NAD--C	-0.101767			
_SUMUT--C	-0.098833			
_SUMBAR--C	0.007232			
_RIAU--C	-0.136245			
_JAMBI--C	-0.086381			
_SUMSEL--C	0.148766			
_BENGKULU--C	-0.196578			
_LAMPUNG--C	0.000741			
_DKI--C	0.042831			
_JABAR--C	0.228281			
_JATENG--C	0.397097			
_DIY--C	0.034888			
_JATIM--C	0.400106			
_BALI--C	-0.061095			
_NTB--C	-0.140172			
_NTT--C	-0.046298			
_KALBAR--C	0.070911			
_KALTENG--C	-0.176984			
_KALSEL--C	-0.193658			
_KALTIM--C	0.148497			
_SULUT--C	-0.113194			
_SULTENG--C	-0.221918			
_SULSEL--C	-0.178897			
_SULTRA--C	-0.200288			
_MALUKU--C	0.086920			
_IRJA--C	0.471693			

Sumber : Hasil Olah Data menggunakan Eviews 5.0. (Lampiran 5)

Adapun nilai koefisien intersep *fixed effect* untuk setiap propinsi dalam model distribusi pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.19. berikut:

Tabel 4.19.
Nilai Koefisien Estimasi Intersep Masing-masing Provinsi
dalam Model Distribusi Pendapatan di Indonesia

Intersep	Koefisien	Keterangan
_NAD—C	0,2809	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SUMUT—C	0,2839	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SUMBAR—C	0,3899	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_RIAU—C	0,2465	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_JAMBI—C	0,2963	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SUMSEL—C	0,5315	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_BENGKULU—C	0,1861	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_LAMPUNG—C	0,3834	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_DKI—C	0,4255	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_JABAR—C	0,6109	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_JATENG—C	0,7798	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_DIY—C	0,4176	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_JATIM—C	0,7828	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_BALI—C	0,3216	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_NTB—C	0,2425	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_NTT—C	0,3364	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_KALBAR—C	0,4536	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_KALTENG—C	0,2057	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_KALSEL—C	0,1890	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_KALTIM—C	0,5312	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SULUT—C	0,2695	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SULTENG—C	0,1608	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SULSEL—C	0,2038	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_SULTRA—C	0,1824	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_MALUKU—C	0,4696	C signifikan pada tingkat alfa 5%
_IRJA—C	0,8544	C signifikan pada tingkat alfa 5%

Sumber : Tabel 4.16. (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.19. tersebut di atas, dapat diinterpretasikan bahwa apabila tidak terjadi perubahan variabel independen didalam model (variabel independen yaitu *IS*, *GRT*, *IP*, *INF* dan *UNEMPL* tidak berkembang/sama dengan nol), maka intersep distribusi pendapatan/gini rasio (*ceteris paribus*) di NAD adalah sebesar 0,2809, Sumut sebesar 0,2839, Sumbar sebesar 0,3899, Riau sebesar 0,2465, Jambi sebesar 0,2963, Sumsel sebesar 0,5315, Bengkulu sebesar 0,1861, Lampung sebesar 0,3834, DKI sebesar 0,4255, Jabar sebesar 0,6109,

Jateng sebesar 0,7798, DIY sebesar 0,4176, Jatim sebesar 0,7828, Bali sebesar 0,3216, NTB sebesar 0,2425, NTT sebesar 0,3364, Kalbar sebesar 0,4536, Kalteng sebesar 0,2057, Kalsel sebesar 0,1890, Kaltim sebesar 0,5312, Sulut sebesar 0,2695, Sulteng sebesar 0,1608, Sulsel 0,2038, Sultra sebesar 0,1824, Maluku sebesar 0,4696 dan Irja sebesar 0,8544.

Dengan demikian, hal tersebut berarti bahwa rata-rata variabel independen di Propinsi Irian Jaya lebih memberikan pengaruh terhadap rata-rata variabel dependen (ketimpangan distribusi pendapatan) dibandingkan dengan propinsi lain. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa rata-rata variabel investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, investasi pemerintah, inflasi dan pengangguran yang terdapat di Propinsi Irian Jaya lebih progresif dalam mendorong ketidakmerataan distribusi pendapatan dibandingkan dengan di Propinsi lainnya.

Dilihat dari nilai sloponya masing-masing variabel independen, dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan investasi swasta rata-rata sebesar 1 triliun akan mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar 0,0034 indeks poin, setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 1 persen akan menurunkan ketidakmerataan distribusi pendapatan dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar 0,0176 indeks poin, setiap peningkatan investasi pemerintah rata-rata sebesar 1 triliun akan mengurangi ketidakmerataan distribusi pendapatan dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar 0,1632 indeks poin, setiap peningkatan inflasi rata-rata sebesar 1 persen akan meningkatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar 0,0263 indeks poin dan setiap peningkatan pengangguran rata-rata sebesar 1 persen akan meningkatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan dimasing-masing propinsi rata-rata sebesar 0,0039 indeks poin.

Selanjutnya, melalui pengujian konsistensi arah koefisien, dapat diketahui apakah arah koefisien hasil penelitian sesuai dengan hipotesis penelitian yang diajukan atau tidak. Pengujian arah koefisien ini dilakukan dengan cara membandingkan arah koefisien hasil penelitian dengan hipotesis ekonomi yang telah dikemukakan sebelumnya. Hasilnya pengujian arah koefisien untuk model persamaan distribusi pendapatan, tampak sebagaimana Tabel 4.20. berikut :

Tabel 4.20.
Pengujian Arah Koefisien Persamaan Distribusi Pendapatan (ID)

Variabel	Arah Koefisien (Hipotesis)	Arah Koefisien (Model)	Kesimpulan
IS	-	-	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis
GRT	-	-	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis
IP	-	-	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis
INF	+	+	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis
UNEMPL	+	+	Arah koefisien konsisten dengan hipotesis

Sumber : Hasil perhitungan dan Hipotesis

Berdasarkan Tabel 4.20. dapat diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki arah koefisien yang benar (konsisten) sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari Tabel 4.20. di atas akan diuraikan pada bahasan sub bab 4.3.4.

Dilihat dari pengujian signifikansi, diketahui bahwa variabel IS, GRT, IP, INF dan UNEMP baik secara individu maupun simultan berpengaruh secara signifikan terhadap distribusi pendapatan (ID) pada alpa 5 persen sebagaimana ditunjukkan oleh nilai p-valuenya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial maupun bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen, ID. Sementara itu, hasil uji R^2 memperlihatkan nilai sebesar 0,9632. Angka tersebut mengindikasikan bahwa variasi perubahan

variabel dependen hanya mampu dijelaskan sekitar 96,32 persen oleh variasi perubahan variabel independen. Dengan kata lain, masih terdapat sekitar 3,68 persen variasi perubahan variabel dependen yang diakibatkan oleh faktor-faktor lain di luar persamaan distribusi pendapatan.

4.2.5.2. Pengujian Asumsi Validitas OLS Distribusi Pendapatan

a. Uji Normalitas

Uji *Jarque-Bera* digunakan untuk memastikan persamaan estimasi bebas dari masalah penyimpangan asumsi normalitas. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam model distribusi pendapatan memperlihatkan nilai yang jauh lebih rendah dari nilai χ^2 -tabel ($\alpha = 0,05$; $df = 461$) sebesar 124,342. Nilai *Jarque-Bera* berturut-turut adalah (IS = 23,899; GRT = 65,742; IP = 34,985; INF = 39,347; dan UNEMP = 60,247). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang digunakan bebas dari penyimpangan asumsi normalitas. Hasil lengkap uji *Jarque-Bera* dapat dilihat pada Lampiran 1.

b. Uji Multikolinieritas

Uji *correlation matrix* digunakan untuk mengetahui ada tidaknya saling korelasi diantara variabel-variabel independen. Hasil uji multikolinieritas memperhatikan angka yang jauh di bawah 0,80. Ini mengindikasikan bahwa diantara variabel-variabel independen tidak terdapat saling korelasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persamaan estimasi yang digunakan bebas dari gejala multikolinieritas. Hasil lengkap uji *correlation matrix* dapat dilihat pada Lampiran 2.

c. Uji Autokorelasi

Uji Durbin-Watson (DW) digunakan untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi atau serial korelasi. Hasil uji DW menunjukkan nilai sebesar 2,0145 ($n = 468$; $k = 7$; $d_L = 1,697$; dan $d_U = 1,1841$), yang mana nilai tersebut berada di wilayah H_0 tidak ditolak atau terdapat pada daerah ($d_U < d < 4-d_U$). Hasil ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi atau serial korelasi dalam residual. Hasil lengkap uji *autokorelasi* dapat dilihat pada Lampiran 3.

Berdasarkan berbagai hasil pengujian validitas asumsi klasik untuk persamaan distribusi pendapatan di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan distribusi pendapatan (ID) sudah dapat diterima sebagai suatu model yang valid.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Persamaan Faktor Penentu Investasi Swasta: Pengaruh Investasi Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Suku Bunga, Tingkat Inflasi, Jumlah Kredit Investasi Untuk Swasta dan Nilai Tukar Terhadap Investasi Swasta di Indonesia

Secara umum, hasil estimasi pengaruh investasi pemerintah (IP), pertumbuhan ekonomi (GRT), tingkat suku bunga (I), tingkat inflasi (INF), kredit investasi untuk swasta (CR) dan nilai tukar (ER) terhadap investasi swasta sangat baik. Hampir semua variabel independen (kecuali ER), tampak memperlihatkan tanda pengaruh yang konsisten dengan teori, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tabel 4.9. Adapun besarnya nilai R^2 sebesar 0,7823. Angka tersebut mengindikasikan bahwa variasi perubahan variabel dependen mampu dijelaskan sekitar 78,23 persen oleh variasi perubahan variabel independen. Dengan demikian kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel

dependen sebesar 78,23 persen. Sedangkan sisanya sebesar 21,77 persen dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dikaji dalam persamaan dimaksud (hasil perhitungan model OLS, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3).

Salah satu hasil penelitian ini adalah mengenai pengaruh positif investasi pemerintah terhadap kegiatan investasi swasta. Hal ini berarti semakin besar investasi pemerintah maka semakin banyak tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh swasta untuk melakukan kegiatan produktif termasuk investasi. Hasil penelitian ini lebih mendukung studi empiris dari Chhibber dan Wijnbergen (1998), Seruvatu dan Jayaraman (2001), Ribeiro dan Teixeira (2001), Ouattara (2004), Khan dan Khan (2007) serta Dwi Tantiasti (2008) yang menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur merupakan faktor pendukung kegiatan PMA dan PMDN dan perekonomian nasional. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa investasi pemerintah berpengaruh negatif "*crowding out*", terhadap investasi swasta yaitu berkurangnya dana dan sumber daya yang tersedia bagi dunia usaha karena sebagian dana dan sumberdaya dipakai oleh pemerintah untuk melakukan investasi, serta kekhawatiran penetapan tingkat pajak yang lebih besar dimasa yang akan datang akibat kegiatan investasi swasta tersebut, sebagaimana hasil empiris Acosta dan Roza (2005), Lesotlho (2006) serta Jongwanich dan Kohpaiboon (2006) tidak dapat dibuktikan.

Hal ini berarti bahwa selama periode penelitian untuk kasus Indonesia, terdapat dampak *crowding-in* dari investasi publik pemerintah terhadap investasi swasta. Adanya pengeluaran investasi sektor publik pemerintah untuk bidang irigasi, transportasi, komunikasi, kesehatan dan pendidikan telah memberikan dampak yang positif bagi investasi swasta.

Menurut hasil empiris Dwi Tantiasti (2008) dikatakan bahwa jika pengeluaran infrastruktur meningkat dan kondisi infrastruktur suatu daerah menjadi lebih baik maka akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Selanjutnya peningkatan investasi ini akan membuka kesempatan kerja dan dapat mengatasi masalah pengangguran. Tingginya investasi juga berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian suatu daerah kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kondisi infrastruktur dengan meningkatkan porsi anggaran belanja daerahnya untuk pengeluaran infrastruktur.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Todaro (2003), yang menyatakan bahwa investasi publik yang dilakukan oleh pemerintah terutama yang menyangkut kepentingan orang banyak, seperti dalam bidang; pembangunan jalan raya, jalan kereta api, proyek pembangkit tenaga listrik, air bersih dan pengairan/irigasi akan mendorong peningkatan investasi swasta di masa yang akan datang. Penyediaan investasi publik tersebut, dapat mendorong iklim investasi serta membantu memperlancar produksi, perdagangan dan dunia usaha.

Salah satu temuan lainnya dari hasil penelitian ini adalah pengaruh positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi (GRT) terhadap investasi swasta. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi telah mendorong peningkatan investasi swasta dan sebaliknya semakin menurun pertumbuhan ekonomi akan menurunkan investasi swasta. Kesimpulan atas temuan ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang dipertimbangkan investor swasta dalam melakukan investasi swasta di Indonesia. Hasil penelitian ini juga telah mendukung studi empiris dari Carruth, Dickerson dan Henley (1997), Dehn

(2000), Rebeiro dan Teixeira (2001), Ouattara (2004), Lesotlho (2006) serta Jongwanich dan Kohpaiboon (2006), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dalam meningkatkan investasi swasta.

Hal yang dapat dijelaskan dari pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap investasi swasta adalah bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka hal tersebut mencerminkan makin tumbuh dan meningkatnya sektor-sektor produksi. Semakin sektor-sektor produksi dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan kondusif, maka *output* yang dihasilkannya dalam bentuk barang dan jasa akan melimpah di pasar domestik. Apabila pasar domestik tidak mampu menyerap produk yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat jumlah penawarannya melebihi permintaan domestik, maka hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk dipasarkan di pasar luar negeri sehingga tingkat ekspor bersih makin meningkat dan valuta asing yang dapat diterima makin meningkat. Kondisi inilah yang akan mendorong peningkatan perusahaan-perusahaan untuk melakukan investasi swasta.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, kebijakan sektoral yang telah ditempuh adalah perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, serta penguatan dan reformasi sektor keuangan. Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi meliputi tiga aspek pokok yaitu (i) kelembagaan yaitu memperkuat kelembagaan pelayanan investasi serta menyinkronkan peraturan pusat dan peraturan daerah (Perda), (ii) kelancaran arus barang ekspor dan impor antara lain meningkatkan pelayanan kargo dan mempercepat pelayanan kepabeanan, dan (iii) perpajakan antara lain

meningkatkan pelayanan perpajakan dan melindungi hak wajib pajak. Sasaran utama dari paket ini adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan menjadikan investasi sebagai salah-satu motor utamanya.

Selanjutnya, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa tingkat suku bunga pinjaman berpengaruh negatif terhadap investasi swasta. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil studi terdahulu dari Chhibber dan Wijnbergen (1988), Carruth, Dickirson dan Henley (1998), Dehn (2000), Seruvatu dan Jayaraman (2001), Agrawal (2001), Susi Suwarsih (2004), Valila dan Mehrotra (2005), Lesotlho (2006), Khan dan Khan (2007), Wiwin Setyari dkk. (2008) dan Dwi Tantiasti (2008), yang menyatakan bahwa tingkat bunga pinjaman berpengaruh negatif terhadap investasi swasta.

Menurut Aulia Pohan (2008), pada satu sisi, tingkat bunga yang tinggi menguntungkan para deposan karena dapat meningkatkan keinginan masyarakat deposan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari tabungannya. Hal tersebut makin mendorong hasrat masyarakat untuk terus menabung. Sementara disisi lain, suku bunga yang tinggi akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha, terutama bagi mereka yang pembiayaan usahanya bersumber dari kredit perbankan sehingga dapat mengakibatkan penurunan kegiatan produksi dan investasi. Menurunnya produksi pada gilirannya akan menurunkan pula kebutuhan dana oleh dunia usaha sehingga permintaan kredit perbankan untuk kegiatan investasi menjadi makin menurun.

Sebagaimana juga dikatakan oleh Jhingan (2000) dan Mankiw (2001) bahwa tingkat bunga menentukan kegiatan investasi di sektor riil dimana apabila tingkat bunga naik maka investasi akan mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila tingkat bunga turun maka akan menyebabkan permintaan investasi menjadi meningkat.

Disamping investasi pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga, variabel yang diduga memiliki pengaruh terhadap investasi swasta adalah tingkat inflasi, dimana berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat inflasi memiliki pengaruh yang negatif terhadap kegiatan investasi swasta. Hasil empiris ini sejalan dan konsisten dengan hasil empiris Seruvatu dan Jayamaran (2001), Ribeiro dan Teixeira (2001), Roberts (2003), Acosta dan Roza (2005), Lesotlho (2006), Jongwanich dan Kohpaiboon (2006) serta Wiwin Setyari dkk. (2008) dimana tingkat inflasi memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan investasi swasta.

Apabila kenaikan harga-harga mengakibatkan peningkatan pendapatan lebih besar daripada peningkatan biaya maka pengaruh inflasi terhadap investasi swasta adalah positif. Dalam hal ini peningkatan *margin* keuntungan akan merangsang pengusaha memperluas produksinya dengan melakukan investasi. Sebaliknya apabila inflasi mengakibatkan kenaikan biaya lebih besar daripada kenaikan pendapatan maka perusahaan akan mengurangi investasi.

Banyak ekonom yang berpendapat bahwa inflasi yang cukup tinggi cenderung berpengaruh negatif terhadap investasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Lesotlho (2006), bahwa adanya inflasi menyebabkan pendapatan riil penduduk yang berpendapatan tetap akan berkurang, konsumsi akan menurun dan stok barang-barang yang tidak terjual meningkat yang pada akhirnya mendorong produsen mengurangi produksi dengan memperkecil kapasitas produksi. Oleh karena itu, inflasi perlu dikendalikan pada tingkat yang cukup rendah agar disisi tidak merugikan penduduk yang berpendapatan tetap dan disisi lain tetap memberikan insentif bagi kegiatan perdagangan dan produksi.

Beberapa argumen yang mendukung inflasi berpengaruh negatif terhadap investasi swasta sebagaimana dikemukakan oleh Jongwanich dan Kohpaiboon (2006), antara lain adalah; **Pertama**, inflasi akan menyebabkan tingkat bunga perbankan menjadi tinggi, baik bunga simpanan maupun bunga kredit. Adanya tingkat suku bunga yang tinggi akan mendorong biaya penggunaan dana menjadi lebih mahal. Sehingga akan berpengaruh pada sektor riil. Dengan tingginya tingkat bunga akan menurunkan minat investor atau produsen untuk memanfaatkan pendanaan dari sektor perbankan karena adanya *cost of capital* yang tinggi akibat beban bunga yang tinggi dan investor akan cenderung menahan minat mereka dalam melakukan investasi di sektor riil. Terutama bagi mereka yang sektor pendanaannya tergantung pada perbankan. Kondisi ini mendorong investasi swasta menjadi menurun dan berkurang. Dengan demikian, tingkat inflasi telah mendorong investasi swasta menjadi menurun.

Kedua, inflasi dapat menurunkan nilai tabungan masyarakat sehingga masyarakat akan cenderung memilih menginvestasikan dananya dalam aktiva yang lebih baik. Dengan kecenderungan ini, dunia perbankan akan mengalami kesulitan likuiditas dan sebagai salah satu sumber perolehan dana bagi sektor riil, hal ini tentu tidak menguntungkan.

Ketiga, inflasi dapat menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas, dengan kata lain nilai tukar kas tersebut menjadi lebih kecil karena secara nominal harus menghadapi harga komoditi per satuan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sebaliknya, mereka yang banyak memiliki kekayaan dalam bentuk aktiva tetap/aset *non-likuid* (golongan menengah ke atas), justru diuntungkan dengan kenaikan harga tersebut. Dengan demikian inflasi akan membuat jurang kesenjangan pendapatan yang semakin lebar.

Keempat, inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat. Sebagai contoh, di sektor perdagangan luar negeri, komoditi ekspor Indonesia menjadi kurang dapat bersaing dengan komoditi sejenis di pasar dunia. Dengan kata lain, kemerosotan produksi akan terjadi, baik untuk produk yang berorientasi ekspor maupun produk untuk pasar domestik. Hal ini sangat berbahaya karena dapat memicu meningkatnya pengangguran di suatu negara.

Kelima, di sisi kurs valuta asing, rupiah akan semakin terdepresiasi terhadap mata uang asing yang pada gilirannya akan menimbulkan masalah lain yang tidak kalah seriusnya, seperti membengkaknya kewajiban Pemerintah terhadap kreditur luar negeri. Menurut Harvey Kusumah (1988) inflasi akan mempengaruhi kinerja perdagangan suatu negara yang tercermin dalam neraca perdagangannya. Terakhir, inflasi yang tidak terkendali dapat mendorong terjadinya *capital outflow* ke luar negeri. Pemilik modal akan lebih memilih menginvestasikan dananya di negara yang lebih menguntungkan. Begitu pula akan terjadi relokasi sektor manufaktur (riil) ke negara yang memiliki *cost production* yang lebih rendah.

Variabel selanjutnya adalah pengaruh kredit investasi terhadap investasi swasta. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan pembiayaan investasi dalam bentuk kredit investasi berpengaruh positif dan signifikan dalam mendorong investasi swasta. Hasil penelitian ini mendukung hasil empiris sebelumnya, seperti; Chhibber dan Wijnbergen (1988), Dehn (2000), Seruvatu dan Jayaraman (2001), Ribeiro dan Teixeira (2001), Ouattara (2004), Acosta dan Roza (2005), Lesotlho (2006), Jongwanich dan Kohpaiboon (2006) dan Khan dan Khan (2007).

Menurut Chhibber dan Wijnbergen (1988) mengatakan bahwa peningkatan peran perbankan dalam pembiayaan investasi melalui kredit investasi perbankan terhadap bisnis atau sektor riil akan meningkatkan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga Dehn (2000), mengatakan bahwa terdapat hubungan antara ketersediaan pembiayaan kredit untuk tujuan investasi dengan pertumbuhan investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Hasil empiris Seruvatu dan Jayaraman (2001) juga menjelaskan bahwa peningkatan pembiayaan kredit investasi telah mendorong investor untuk melakukan investasi swasta.

Sementara itu, Ribeiro dan Teixeira (2001) menyatakan bahwa semakin besar porsi dana bank yang disediakan untuk mendukung kredit investasi akan mendorong pertumbuhan investasi swasta. Pendapat ini didukung pula oleh Ouattara (2004) yang menyatakan bahwa investasi swasta (*private investor*) di dalam negeri akan semakin meningkat apabila terdapat ketersediaan pendanaan yang mencukupi dan peran tersebut dilakukan oleh sektor perbankan dengan menyediakan fasilitas kredit investasi bagi para investor. Acosta dan Roza (2005) menjelaskan bahwa pemberian kredit investasi perbankan sangat berperan dalam penentuan tingkat investasi swasta dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil studinya telah membuktikan dampak positif dari pembiayaan kredit sistem perbankan terhadap investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa hasil studi juga telah membuktikan bahwa peningkatan intensitas pasar modal diikuti oleh peningkatan intensitas pasar kredit yang lebih tinggi sebagai sumber pembiayaan eksternal bagi industri (Lesotlho, 2006). Ouattara (2004) dan Acosta dan Roza (2005) menyatakan bahwa pengembangan sistem

keuangan dan efisiensi sistem keuangan secara keseluruhan telah mempengaruhi tingkat investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi. Hasil studi ini didukung oleh studi Jongwanich dan Kohpaiboon (2006) yang menjelaskan pengaruh positif antara struktur kelembagaan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi di negara-negara industri.

Fungsi utama dari bank adalah intermediasi dan transformasi kewajiban menjadi aktiva produktif. Fungsi intermediasi dan transformasi kewajiban menjadi aktiva produktif dijelaskan oleh hubungan empat neraca, yaitu neraca pemerintah, neraca rumahtangga, neraca perusahaan, dan neraca bank. Defisit neraca pemerintah pada umumnya dibiayai dengan penerbitan sekuritas dan cadangan kas atau *monetary base*. Sekuritas yang diterbitkan pemerintah menjadi aktiva pada neraca rumahtangga, perusahaan atau bank. Instrumen deposit yang diterbitkan oleh bank merupakan kewajiban yang ditransformasikan menjadi aktiva, yaitu cadangan dan kredit perbankan. Cadangan merupakan giro wajib minimum yang dapat digunakan untuk membiayai defisit pemerintah. Pinjaman atau kredit perbankan yang bersumber dari deposit rumahtangga, perusahaan dan pemerintah digunakan untuk membiayai investasi perusahaan.

Fungsi intermediasi atau transformasi kewajiban perbankan menjadi aktiva produktif merupakan indikator pengembangan sistem keuangan dalam mendorong tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pengembangan sistem perbankan dengan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk pembiayaan eksternal bisnis atau sektor riil (Ouattara, 2004, dan Acosta dan Roza, 2005). Studi dari Khan dan Khan (2007) menjelaskan bahwa pinjaman atau

kredit dari bank-bank besar untuk sektor swasta dilakukan dalam rangka mendorong investasi swasta agar dapat tumbuh dan memberikan stimulus bagi perekonomian.

Variabel independen lainnya adalah nilai tukar, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki arah pengaruh yang positif terhadap investasi swasta. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan. Arah pengaruh yang positif, mengandung arti bahwa suatu peningkatan nilai tukar (depresiasi) dapat menyebabkan peningkatan investasi swasta. Sebaliknya suatu penurunan nilai tukar (apresiasi) dapat menyebabkan penurunan investasi swasta. Beberapa hasil studi empiris sebelumnya yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap investasi swasta diantaranya adalah; Agrawal (2001), Lesotlho (2006) dan Jongwanich dan Kohpaiboon (2006). Mereka menyatakan bahwa suatu peningkatan nilai tukar (depresiasi) berpengaruh positif terhadap investasi swasta dan sebaliknya suatu apresiasi nilai tukar telah berpengaruh negatif terhadap investasi swasta. Sedangkan studi empiris yang tidak konsisten dengan hasil penelitian ini diantaranya dengan hasil penelitian Seruvatu dan Jayamaran (2001), Ribeiro dan Teixeira (2001), Acosta dan Roza (2005), Khan dan Khan (2007), dan Wiwin Setyari dkk. (2008), yang menyatakan bahwa suatu depresiasi nilai tukar berpengaruh negatif terhadap investasi swasta.

Pengaruh positif hasil penelitian dari nilai tukar terhadap investasi swasta mengandung dua pengertian, **Pertama**, bagi investor asing (PMA) adanya depresiasi menyebabkan nilai tukar rupiah menjadi lebih rendah harganya dan nilai dollar menjadi tambah banyak jika diukur dengan nilai tukar rupiah. Bagi

investor asing yang inputnya berasal dari pasar domestik, adanya depresiasi nilai tukar akan mendorong peningkatan investasi swasta karena investor asing akan mendapatkan input produksi dengan harga yang murah dan biaya produksi untuk menghasilkan produk menjadi lebih murah sehingga akan banyak masuk investasi asing ke dalam negeri. Apalagi jika orientasi output mereka untuk tujuan ekspor selain dijual di domestik. Dalam perspektif perdagangan, dengan biaya produksi yang rendah, harga produk komoditas ekspor menjadi lebih mampu bersaing di pasar luar negeri sehingga kinerja ekspor bersih dapat ditingkatkan.

Kedua, bagi investor dalam negeri adanya depresiasi akan memberikan insentif kepada mereka yang inputnya menggunakan bahan baku domestik dan pasarnya untuk produk ekspor. Dalam perspektif perdagangan, nilai tukar yang makin melemah dapat mendorong terjadinya peningkatan produk ekspor sehingga penerimaan investor dari pasar luar negeri menjadi meningkat. Namun bagi investor yang banyak menggunakan bahan baku dan barang modal adalah impor, hasil studi ini relatif tidak mendukung karena hal ini akan memberatkan.

Menurut Krugman dan Obstfeld (2001), terjadinya depresiasi atau devaluasi cenderung mempengaruhi nilai tukar perdagangan (*terms of trade*). Suatu depresiasi nilai tukar akan merangsang produksi ekspor maupun substitusi impor. Depresiasi akan cenderung mendorong harga impor menjadi naik dan harga ekspor menjadi turun dalam mata uang asing. Di sisi lain, hal tersebut meningkatkan harga produk-produk ekspor dan aneka produk substitusi (pengganti) impor dari produk luar negeri.

4.3.2. Persamaan Pertumbuhan Ekonomi: Pengaruh Investasi Swasta, Investasi Pemerintah, Modal Manusia dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Secara keseluruhan, variabel investasi swasta (IS), investasi pemerintah (IP), modal manusia (HC) dan tenaga kerja (TK), tampak memperlihatkan hasil yang sepenuhnya konsisten, terutama jika dikaitkan dengan berbagai temuan empiris sebelumnya. Misalnya, salah satu kesimpulan penting hasil studi empiris selama ini bahwa investasi swasta dan pemerintah merupakan faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi. Adalah Khan dan Reinhart (1990), Sturm, Kuper, dan Haan (1996), Lachler dan Aschauer (1998), Krishna (1997) serta M'Amanja dan Morrissey (2006) yang menemukan fakta empiris bahwa investasi swasta mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan. Berikutnya, Khan dan Reinhart (1990), Cullison (1993), Sturm, Kuper, dan Haan (1996), Lachler dan Aschauer (1998) serta M'Amanja dan Morrissey (2006) yang memperlihatkan bukti empiris akan adanya pengaruh positif dan signifikan investasi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua temuan empiris tersebut menegaskan bahwa semakin meningkat investasi swasta dan investasi pemerintah maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.

Investasi pemerintah merupakan faktor pentingnya lainnya yang dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Para ahli sepakat bahwa investasi pemerintah dibidang infrastruktur dan investasi publik mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, peningkatan investasi pemerintah akan mendorong pertumbuhan. Pandangan ini didasarkan atas anggapan bahwa investasi pemerintah diperlukan untuk menstimulasi aktifitas perekonomian.

Oleh karenanya, diperlukan pembangunan infrastruktur terus-menerus dan merata tersebar di wilayah Indonesia. Pada beberapa wilayah tertentu, seperti di Pulau Jawa, infrastruktur sudah tersedia dengan memadai, namun di bagian wilayah lainnya (luar Pulau Jawa), ketersediaan infrastruktur sangat tidak memadai dengan kualitas yang sangat buruk. Akibat keterbatasan infrastruktur tersebut, akses penduduk terhadap sumberdaya dan pasar menjadi relatif terbatas dan aktifitas produksi menjadi kurang berkembang.

Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Melalui Peraturan Presiden Nomor: 67 tahun 2005, Pemerintah mempersiapkan langkah-langkah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangkit listrik, jalan tol, bandara, perkeretaapian, pelabuhan dan telekomunikasi. Kurangnya pasokan energi listrik, terbatasnya jaringan telekomunikasi, memburuknya kualitas jalan raya dan kepadatan lalu lintas, akan menghambat kemajuan usaha dan menurunkan daya saing perekonomian. Mengingat terbatasnya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, maka telah ditingkatkan pula partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur publik melalui kemitraan, khususnya dalam pembiayaan penyediaan infrastruktur.

Sementara itu, selain dipengaruhi investasi (swasta dan pemerintah), pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh modal manusia. Hasil penelitian ini membuktikan hal tersebut, bahwa modal manusia secara positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan studi empiris dari Lachler dan Aschauer (1998) dan Gylfason dan Zoega (2000) yang mengatakan bahwa modal manusia berperan positif dalam pertumbuhan ekonomi. Hal yang sama juga

dikemukakan oleh Schularick dan Steger (2007) bahwa salah satu bentuk investasi manusia dalam ilmu pengetahuan, keterampilan/keahlian, nilai, norma, sikap, dan perilaku yang berguna bagi manusia dalam meningkatkan kapasitas belajar dan produktifnya. Dengan meningkatnya kapasitas belajar dan kapasitas produktif, produktivitas seseorang meningkat sehingga akan meningkatkan pendapatan orang tersebut dan meningkatkan *output* berupa barang dan jasa bagi masyarakat, yang secara keseluruhan berarti akan meningkatkan pertumbuhan.

Dalam literatur ekonomi sebagaimana dalam *new growth theory* dikemukakan juga bahwa modal manusia memiliki peranan penting dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Model modal manusia menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki pekerja, semakin tinggi pula modal manusia yang dimilikinya (Romer, 2006). Dapat dikatakan bahwa modal manusia merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong meningkatnya produktivitas kerja dan output yang dihasilkan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, ketika kualitas tenaga kerja rendah maka tenaga kerja yang bersangkutan menjadi tidak produktif dan tidak optimal dalam menghasilkan *output*.

Menurut Lachler dan Aschauer (1998), modal manusia terkait erat dengan kualitas SDM yang dihasilkan melalui proses pendidikan. Dengan pendidikan dapat ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Dilihat dari aspek percepatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang mengalami perubahan yang lebih lambat dalam kehidupan masyarakat global. Perlambatan

perubahan terutama disebabkan karena sistem pendidikan yang kurang mampu mengikuti percepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat cepat dan kompleks, di samping faktor kultur dan ekonomi. Apabila Indonesia tidak bisa mengikuti perubahan yang terjadi melalui penyiapan SDM yang berkualitas, dipastikan modal manusia yang dimiliki bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dan tersisih dari persaingan masyarakat global.

Oleh karena itu, tenaga kerja Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pengetahuan, kreatifitas dan daya saing sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja asing yang berdatangan ke Indonesia atau berkompetisi untuk merebut peluang usaha dan bekerja di luar negeri. Pendidikan dan peluang lapangan kerja pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi SDM yang tidak kalah pentingnya dengan investasi modal fisik. Pengalaman beberapa negara menunjukkan bahwa pendidikan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan negara-negara maju dalam pembangunan berbagai bidang ditentukan oleh ketersediaan SDM yang berkualitas dan bukan oleh melimpahnya sumberdaya alam. Apabila ditinjau lebih jauh, keberhasilan yang diraih oleh negara-negara maju tidak terlepas dari kebijakan pembangunan yang dikembangkan pada bidang pendidikan. Dalam hal ini, negara-negara maju umumnya menempatkan pembangunan pendidikan pada bagian terdepan.

Selain investasi dan modal manusia, tenaga kerja (TK) merupakan faktor penting lainnya yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Hampir tidak ada ekonom yang meragukan pentingnya tenaga kerja (yang bekerja) bagi pertumbuhan. Bahkan sejak dari Klasik, tenaga kerja dianggap sebagai faktor

penentu utama pertumbuhan. Model Arthur Lewis yang lebih dikenal sebagai model pertumbuhan dengan *supply* tenaga kerja tidak terbatas mendefinisikan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah tenaga kerja dikaitkan dengan pemanfaatan kapital. Menurutnya, besar kecilnya *output* dipengaruhi oleh penggunaan tenaga kerja. Demikian halnya dengan Todaro (2003) yang menyatakan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah tenaga kerja. Berdasarkan model pertumbuhan neoklasik, tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingkat pertumbuhan stok modal, tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan kemajuan teknikal.

Hasil temuan pengaruh tenaga kerja (yang bekerja) berkualitas terhadap pertumbuhan mendukung temuan empiris sebelumnya. Seperti Khan dan Reinhart (1990), Sturm, Kuper, dan Haan (1996), Sinha dan Sinha (1997), Lachler dan Aschauer (1998) dan Sinha (1999), yang memperlihatkan bukti empiris akan adanya pengaruh positif dan signifikan tenaga kerja berkualitas terhadap pertumbuhan ekonomi.

Khan dan Reinhart (1990) mengatakan bahwa peranan tenaga kerja berkualitas (yang bekerja) merupakan suatu syarat mutlak bagi pertumbuhan ekonomi. Sturm, Kuper dan Haan (1999) juga mengatakan bahwa hampir semua ahli ekonomi menekankan arti penting tenaga kerja (yang bekerja) sebagai penentu utama pertumbuhan ekonomi. Adanya keterlibatan faktor tenaga kerja dalam proses produksi dapat meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi tenaga kerja dalam pembangunan tersebut dapat menaikkan *output* yang pada gilirannya menaikkan laju dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan faktor kunci bagi pertumbuhan

ekonomi. Sebagaimana **Sinha** (1999) juga menyatakan bahwa peningkatan tenaga kerja berkualitas dalam suatu institusi merupakan komponen esensial dalam pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh tenaga kerja berkualitas (diukur oleh rasio angkatan kerja bekerja terhadap jumlah penduduk) terhadap pertumbuhan ekonomi juga dapat ditelusuri dari pendapat Lachler dan Aschauer (1998), yang telah melakukan eksplanasi teoritis terhadap keterkaitan antara tenaga kerja berkualitas dan modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan matematika telah menunjukkan bahwa secara teoritis tenaga kerja dan modal manusia terkait erat dengan pertumbuhan.

4.3.3. Persamaan Kesempatan Kerja: Pengaruh Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah Terhadap Kesempatan Kerja di Indonesia

Persoalan yang dihadapi sebagian besar negara dibidang ketenagakerjaan adalah menyangkut kesempatan kerja. Hal ini terkait dengan bagaimana meningkatkan kesempatan kerja yang dapat menyerap keseluruhan angkatan kerja yang diciptakan oleh perekonomian. Untuk model estimasi pengaruh investasi swasta, pertumbuhan dan tingkat upah terhadap kesempatan kerja, diperoleh tanda koefisien pengaruh yang berbeda. Pengaruh investasi swasta terhadap kesempatan kerja adalah positif sedangkan nilai koefisien pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah terhadap kesempatan kerja adalah negatif.

Pengaruh investasi swasta terhadap kesempatan kerja yang menunjukkan tanda pengaruh positif dapat diartikan bahwa semakin meningkat investasi swasta maka hal tersebut akan mendorong terciptanya kesempatan kerja. Dalam

pengertian ini, besarnya penyediaan kesempatan kerja untuk menyerap jumlah pencari kerja secara positif ditentukan oleh besarnya investasi swasta yang terjadi di dalam negeri baik oleh swasta domestik (PMDN) atau swasta asing (PMA). Hasil penelitian ini, konsisten dengan studi terdahulu dari Bromstrom dan Kokko (1997), Fitzroy dan Funke (1999) serta Jayaraman dan Singh (2007), yang menyatakan pengaruh positif dari investasi swasta terhadap kesempatan kerja.

Sebagaimana dikemukakan oleh Robinson (2004) bahwa kesempatan kerja merupakan fungsi dari investasi, artinya besar kecilnya penambahan kesempatan kerja ditentukan dari besar kecilnya investasi, terutama dalam hal ini investasi swasta. Pendapat yang sama disampaikan juga oleh Robinson (2004) bahwa investasi pada industri atau sektor-sektor perekonomian yang strategis akan menciptakan perluasan pasar dan menghasilkan kesempatan investasi baru dan membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lebih lanjut. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada kesempatan kerja dan pertumbuhan industri yang menjalar dari sektor utama ke sektor pendukungnya dari satu industri ke industri lainnya.

Hasil empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja yang menunjukkan tanda pengaruh negatif. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hipotesis yang diajukan. Hasil pengaruh yang negatif mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, akan menyebabkan rasio tenaga kerja bekerja terhadap angkatan kerja menjadi berkurang (kecil) sehingga kesempatan kerja menjadi rendah, dan sebaliknya semakin rendah pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan rasio tenaga kerja bekerja terhadap angkatan kerja menjadi bertambah besar sehingga kesempatan kerja meningkat. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan studi empiris Walterskirchen (1999), Boyke T.H. Sitomorang (2005), Sri Roshidayati (2006), Choi (2007) serta Jayaraman dan

Singh (2007). Disamping itu, hasil penelitian yang menemukan pengaruh negatif pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja bertentangan dengan teori klasik dan teori keynes, yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mendorong kearah kesempatan kerja yang makin meningkat pula.

Hasil yang negatif dari pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan kesempatan kerja mengandung makna adanya ketidakmampuan pertumbuhan ekonomi tinggi dalam menyediakan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, sehingga ada sebagian angkatan kerja yang tidak dapat diterima di pasar kerja akibat kesempatan kerja yang terbatas. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang diciptakan tidak dapat menyerap pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat.

Ada beberapa alasan mengapa pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dalam penelitian ini menunjukkan hubungan yang negatif dan bertentangan dengan hipotesis dan teori yang diajukan. **Pertama**, kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja baru dalam perekonomian, tidak mampu menyerap sepenuhnya angkatan kerja baru yang tumbuh pada tahun itu. Berdasarkan Tabel 4.4., dapat dilihat bahwa rata-rata penambahan angkatan kerja baru per tahun adalah sebesar 1,55 juta orang, sedangkan rata-rata kesempatan kerja baru yang dapat diciptakan hanya sebesar 1,12 juta orang, dengan demikian setiap tahun terjadi *carry over* tenaga kerja yang tidak terserap semakin besar, dimana terdapat peningkatan jumlah penganggur sebanyak 0,43 juta per orang. Dilihat dari kualitas pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan kesempatan kerja, terlihat bahwa selama periode penelitian, rata-rata 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap lapangan kerja sebanyak 293.316 orang. Dengan demikian, apabila rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3 persen per tahun, maka jumlah kesempatan kerja yang dapat diciptakan adalah sebesar 1,26 juta

orang, yang lebih kecil dari rata-rata pertambahan angkatan kerja baru per tahun sebesar 1,55 juta orang.

Kedua, adanya perpindahan struktur (corak) ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri yang telah berlangsung sejak tahun 1990-an dimana peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia mulai tergeser oleh peranan sektor industri yang mengalami perkembangan pesat. Adanya pergeseran peranan sektor pertanian oleh sektor industri menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi dari perekonomian yang berbasis agraris menjadi perekonomian yang berbasis industri. Pergeseran tersebut telah mendorong percepatan pertumbuhan tinggi. Namun demikian, perubahan struktur ekonomi tersebut, belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan pendidikan sehingga tenaga kerja di sektor pertanian yang identik *unskill* dan *untechnology* tidak langsung secara otomatis dapat diserap sepenuhnya oleh sektor industri yang metode produksinya membutuhkan *skill* dan kental teknologi tinggi. Dalam perkembangannya, sektor industri hanya memberikan kesempatan kerja lebih luas kepada tenaga kerja berpendidikan tinggi yang cenderung memiliki pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan kemampuan dalam penguasaan teknologi modern (Sudarsono, 2004).

Ketiga, terdapat kecenderungan mulai berkurangnya investasi di sektor primer yang *labor incentive* (padat karya) dan mengarah pada investasi di sektor industri yang *capital incentive* (padat modal). Sebagaimana diketahui investasi merupakan penunjang percepatan pertumbuhan ekonomi, bagi negara berkembang dengan kelebihan penawaran tenaga kerja, yang perlu dilakukan adalah upaya mendorong investasi kearah *labor incentive*. Namun dalam perkembangannya struktur investasi yang dilakukan di Indonesia kebanyakan mengarah kepada *labor incentive* (padat modal). Sebagaimana dapat dilihat pada struktur investasi swasta di Tabel 4.21. bahwa investasi swasta cenderung lebih banyak diarahkan

pada sektor industri (sekunder) yang kebanyakan mengarah kepada padat modal dan tersier dibandingkan pada sektor pertanian (primer) yang lebih banyak menggunakan padat tenaga kerja. Kondisi ini telah mendorong peningkatan pertumbuhan tinggi yang tidak dapat diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja.

Tabel 4.21.
Struktur Investasi Swasta (PMA dan PMDN) di Indonesia
Periode 2003-2007 (dalam Juta US\$ dan Milyar Rupiah)

No.	Sektor	2003		2004		2005		2006		2007	
		PMA*	PMDN**	PMA*	PMDN**	PMA*	PMDN**	PMA*	PMDN**	PMA*	PMDN**
I.	PRIMER	253,3	610,0	308,5	975,5	402,3	5.577,2	533,0	3.599,8	219,1	4.377,4
	1. Tanaman Pangan	219,2	77,5	161,0	507,4	171,5	3.070,6	351,9	3.443,0	45,7	3.528,8
	2. Peternakan	1,1	29,9	20,2	19,6	52,8	108,3	18,8	115,6	9,1	145,2
	3. Kehutanan	-	452,8	-	-	118,8	993,4	31,0	20,0	-	8,9
	4. Perikanan	1,0	33,6	5,3	-	5,8	4,9	32,8	0,2	24,7	3,1
	5. Pertambangan	32,1	16,2	122,0	448,5	53,4	1.400,0	98,5	21,0	309,8	691,4
II.	SEKUNDER	1.880,6	6.229,4	2.803,5	10.517,9	3.500,6	20.999,2	3.619,2	13.012,7	4.697,0	26.289,8
	6. Ind. Makanan	319,2	3.323,0	574,3	3.507,9	603,2	4.490,8	354,4	3.175,3	704,1	5.371,7
	7. Ind. Tekstil	152,4	249,1	165,5	70,0	71,1	1.640,7	424,0	81,7	131,7	228,2
	8. Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki	5,8	1,0	13,2	24,5	47,8	14,6	51,8	4,0	95,9	58,5
	9. Ind. Kayu	157,8	356,2	4,1	888,9	75,5	198,8	58,9	709,0	127,9	38,8
	10. Ind. Kertas dan Percetakan	8,6	99,4	414,5	205,7	9,9	9.732,6	747,0	1.871,2	672,5	14.548,2
	11. Ind. Kimia dan Farmasi	282,2	1.362,6	614,1	4.284,8	1.152,9	1.945,2	264,6	3.248,9	1.611,7	564,5
	12. Ind. Karet dan Plastik	99,9	53,4	81,0	445,4	392,6	678,4	112,7	253,6	157,9	161,4
	13. Ind. Mineral Non Logam	42,9	-	107,1	524,5	66,2	774,6	94,8	218,2	27,8	124,2
	14. Ind. Logam, Mesin dan Elektronik	434,5	548,7	312,8	546,6	521,8	1.151,5	955,2	3.334,2	714,1	3.541,6
	15. Ind. instrumen Kedokteran, Presisi & Optik, dan Jam	6,5	140,9	13,0	-	3,1	-	0,2	-	10,9	-
	16. Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	313,5	57,7	402,6	19,6	360,6	284,6	438,5	116,6	412,3	609,4
	17. Industri Lainnya	57,3	37,4	101,3	-	195,9	79,4	117,1	-	30,2	36,5
III.	TERSIER	3.316,6	5.050,6	1.489,3	3.771,3	5.008,1	4.155,8	1.839,5	4.036,5	5.045,1	4.211,5
	18. Listrik, Gas dan Air	76,7	-	6,1	-	68,7	-	105,3	88,0	119,3	746,4
	19. Kontruksi	106,7	505,6	385,6	1.882,6	921,9	2.386,4	144,2	538,6	448,2	2.110,7
	20. Perdagangan & Reparasi	307,4	486,6	672,7	373,6	383,6	91,9	434,3	345,8	482,9	143,0
	21. Hotel dan Restoran	80,3	68,1	89,5	79,1	180,3	269,0	111,2	180,2	108,2	127,7
	22. Transportasi, Gudang dan Komunikasi	2.667,5	3.511,2	103,8	1.220,6	2.946,8	637,5	646,9	1.227,7	136,4	286,2
	23. Perumahan, Kawasan Ind. dan Perkantoran	0,7	95,0	35,2	0,9	208,3	46,9	254,0	45,6	64,5	-
	24. Jasa Lainnya	77,3	384,1	196,4	214,5	298,5	724,1	143,6	1.610,6	488,6	795,5
	TOTAL	5.450,6	11.890,0	4.601,3	15.264,7	8.911,0	30.724,2	5.991,7	20.649,0	10.341,4	34.878,7

Sumber : BKPM Jakarta, 2008

Keterangan : * Juta US\$

** Milyar Rupiah

Disektor industri sendiri, juga terjadi tendensi makin meningkatnya investasi pada industri yang *capital incentive*, dimana berdasarkan data pada Tabel 4.21. di atas, realisasi investasi pada industri kimia dan farmasi nilainya lebih besar dibandingkan investasi pada industri makanan; industri tekstil; dan industri kayu; yang *labor incentive*. Demikian halnya dengan dua industri yang

identik *capital incentive*, yaitu industri logam, mesin dan elektronik; serta industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain; nilai realisasi investasinya menunjukkan kecenderungan yang meningkat di atas industri kayu dan industri tekstil. Secara umum, industri-industri dimaksud di atas, cenderung menggunakan metode teknik produksi yang bersifat padat modal atau cenderung menggunakan teknologi hemat tenaga kerja (*labor saving technology*). Hal yang sama juga terjadi pada PMDN, dimana realisasi investasi pada industri kimia dan farmasi; industri logam, mesin dan elektronik; serta industri kertas dan percetakan; yang identik dengan *capital incentive* lebih besar dari realisasi investasi pada industri *labor incentive*, seperti; industri tekstil; industri kayu, serta industri barang dari kulit dan alas kaki.

Penggunaan teknik produksi yang bersifat padat modal, secara pukol rata dengan menghemat pemanfaatan tenaga kerja dapat membawa hasil produksi yang lebih besar sehingga pertumbuhan ekonomi dapat lebih pesat, namun konsekuensinya ialah pertumbuhan ekonomi akan melampaui perluasan kesempatan kerja. Dengan kata lain, akan terjadi kesenjangan yang semakin besar antara pertumbuhan produksi dan pertumbuhan lapangan pekerjaan produktif. Akibatnya menyebabkan penumpukan tenaga kerja sebagai akibat dari perluasan kesempatan kerja yang makin terbatas (Sri Roshidayati, 2006).

Hal yang sama juga terjadi di Propinsi Jawa Barat, dimana selama 5 tahun terakhir, terlihat bahwa realisasi investasi swasta banyak dilakukan pada sektor industri (sekunder) yang padat modal, dan hanya sedikit realisasi investasi swasta yang dilakukan di sektor primer, padahal investasi di sektor primer ini banyak melibatkan tenaga kerja (padat karya). Apabila dilihat lagi lebih detail pada struktur investasi swasta di sektor sekunder, terlihat bahwa di Propinsi Jawa Barat pun telah terjadi pula pergeseran investasi swasta di sektor industri dimana peran

industri makanan; industri tekstil; industri barang dari kulit dan alas kaki; dan industri kayu di Jawa Barat sebagai industri yang banyak menyerap tenaga kerja (padat karya), sampai tahun 2000-an, selalu menduduki peringkat tertinggi dalam urutan investasi swasta di Jawa Barat, namun dalam beberapa tahun terakhir peringkatnya menurun dan tergantikan oleh industri logam, mesin dan elektronik; serta industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain yang kental dengan padat modal.

Tabel 4.22.
Struktur Investasi Swasta (PMA dan PMDN) di Jawa Barat
Periode 2003-2007 (dalam Milyar Rupiah)

No.	Sektor	Nilai investasi PMA dan PMDN					Peringkat Investasi				
		2003	2004	2005	2006	2007	2003	2004	2005	2006	2007
I.	PRIMER	99,1	46,7	178,1	79,8	126,6					
	1. Tanaman Pangan	23,0	0,0	136,1	1,7	49,8	16	20	12	19	19
	2. Peternakan	53,2	46,7	42,0	78,1	76,8	13	16	15	11	15
	3. Kehutanan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21	21	19	20	21
	4. Perikanan	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	19	22	20	21	22
	5. Pertambangan	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	18	23	21	22	23
II.	SEKUNDER	10.193,9	11.373,6	16.650,6	21.470,5	22.008,2					
	6. Ind. Makanan	2.172,8	2.402,0	2.024,1	367,7	1.807,7	2	2	4	9	4
	7. Ind. Tekstil	759,3	1.018,4	3.389,8	950,3	972,6	7	7	2	6	6
	8. Ind. Barang dari Kulit & Alas Kaki	93,2	12,6	289,9	69,9	69,7	11	18	10	14	16
	9. Ind. Kayu	83,0	53,1	33,5	27,8	60,1	12	15	16	16	18
	10. Ind. Kertas dan Percetakan	105,7	429,1	64,8	2.406,6	10.423,6	10	12	14	4	1
	11. Ind. Kimia dan Farmasi	2.119,6	1.168,6	929,5	4.311,8	1.189,0	3	5	7	3	5
	12. Ind. Karet dan Plastik	818,0	606,8	857,1	730,7	507,8	6	15	8	7	7
	13. Ind. Mineral Non Logam	319,4	957,3	95,6	73,0	60,3	9	8	13	12	17
	14. Ind. Logam, Mesin dan Elektronik	3.166,7	1.460,5	4.998,5	6.967,3	4.223,1	1	3	1	1	2
	15. Ind. instrumen Kedokteran, Presisi & Optik, dan Jam	37,9	99,2	19,5	13,0	0,0	15	13	17	17	24
	16. Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	472,0	2.413,9	1.465,8	5.552,4	2.558,9	8	1	4	2	3
	17. Industri Lainnya	46,4	752,1	2.482,5	0,0	135,4	14	9	3	23	11
III.	TERSIER	2.703,4	2.726,0	1.542,1	2.179,2	10.521,0					
	18. Listrik, Gas dan Air	-	-	0,0	71,9	9.120,0	22	24	22	13	20
	19. Kontruksi	21,0	23,4	0,0	7,6	426,8	17	17	23	18	8
	20. Perdagangan & Reparasi	1.028,7	1.135,2	237,5	571,1	353,9	5	6	11	8	9
	21. Hotel dan Restoran	0,0	3,7	0,0	0,0	128,5	23	19	24	24	12
	22. Transportasi, Gudang dan Komunikasi	1.647,8	60,2	9,7	275,5	77,1	4	14	18	10	14
	23. Perumahan, Kawasan Ind. dan Perkantoran	0,0	135,2	312,7	1.200,2	293,5	24	12	9	5	10
	24. Jasa Lainnya	5,9	1.368,3	982,2	52,9	121,2	20	4	5	15	13
	TOTAL	12.996,4	14.146,3	18.370,8	23.729,5	32.655,8	-	-	-	-	-

Sumber : BKPM Jakarta, 2008

Keterangan : * Juta US\$

** Milyar Rupiah

Perubahan struktur investasi swasta seperti di atas telah menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Barat tinggi (berslope positif), namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja sebagaimana yang terjadi pada kasus nasional.

Keempat, merosotnya sektor formal dalam menyerap pertumbuhan angkatan kerja. Banyak pekerja yang awalnya berada di dalam sektor formal yang *under-utilized* beralih ke sektor informal. Penciptaan kesempatan kerja di sektor informal, memiliki karakteristik yang mengandalkan tenaga kerja *low skill, low paid*, dan tanpa proteksi sosial (Makmun, 2004) .

Variabel independen berikutnya adalah upah, yang berdasarkan hasil estimasi diketahui berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja. Koefisien upah yang negatif menunjukkan jika terjadi peningkatan upah tenaga kerja, maka akan menurunkan kesempatan kerja. Sebaliknya, jika terjadi penurunan upah maka akan meningkatkan kesempatan kerja. Hasil penelitian ini konsisten mendukung hasil empiris Bromstrom dan Kokko (1997), Fitzroy dan Funke (1999), Bambang Setiaji dan Sudarsono (2004), Suedekum dan Blien (2005), Boyke T.H. Sitomorang (2005), Sri Roshidayati (2006) dan Choi (2007), yang mengatakan bahwa upah berpengaruh negatif terhadap kesempatan kerja.

Tingkat upah yang mempunyai hubungan negatif terhadap kesempatan kerja, hal ini disebabkan bahwa jumlah lapangan pekerjaan (formal) yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja sehingga kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*) pengusaha cenderung lebih besar

dibandingkan dengan kekuatan tenaga kerja, sehingga ketika tuntutan upah tenaga kerja meningkat mendorong pengusaha untuk tidak merealisasikannya dengan cara mengganti tenaga kerja lama dengan tenaga kerja yang baru yang mau menerima upah yang ditawarkan oleh pengusaha. Hal ini terkait juga dengan kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia yang didominasi oleh angkatan kerja dengan pendidikan rendah, sehingga tenaga kerja tersebut yang tidak mempunyai kekuatan yang cukup dibandingkan dengan para pengusaha yang mempekerjakannya. Dalam kasus ini, pekerja tidak mempunyai pilihan selain menerima upah yang diberikan oleh pengusaha, karena hal terpenting bagi pekerja di Indonesia adalah tidak menganggur atau mempunyai pekerjaan. Jikalau ada atau dapat yang memiliki daya tawar upah kepada pengusaha, umumnya dilakukan oleh tenaga kerja dengan pendidikan dan kualitas produktivitas yang tinggi, sementara tenaga kerja tersebut jumlahnya terbatas.

Kondisi inilah yang selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan upah minimum. Penetapan upah minimum regional yang berkisar pada kebutuhan hidup minimum tenaga kerja telah ditetapkan pemerintah sejak tahun 1989. Sebagai jaring pengaman, upah minimum regional setiap tahun ditinjau besarannya. Sejak tahun 1989 upah minimum regional selalu didasarkan pada pemenuhan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) dan mulai tahun 1995 diarahkan pada pemenuhan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dengan alasan sudah mengacu pada indeks harga konsumen, perluasan kesempatan kerja, dan kelangsungan perusahaan.

Kebijakan peningkatan upah minimum merupakan kebijakan yang dilematis, di satu sisi peningkatan upah minimum bertujuan untuk memenuhi tuntutan pekerja yang masih menerima upah di bawah kebutuhan hidupnya. Tetapi pada sisi lain peningkatan upah minimum juga akan menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga mengakibatkan penurunan kondisi perekonomian Indonesia.

Tanpa kebijakan pendukung, peningkatan upah minimum memang berdampak buruk pada penurunan kesempatan kerja. Dalam industri padat karya dengan penggunaan teknologi, elastisitas substitusi antara tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain lebih tinggi. Dalam industri kelas ini buruh mudah digantikan dengan mesin. Sedikit saja ada kejutan yang membuat biaya buruh naik, perusahaan akan mudah berpikir untuk mengeluarkan pegawainya. Untuk mengurangi akibat yang tidak diinginkan, kebijakan peningkatan upah minimum perlu dibarengi dengan kebijakan lain yang dapat membuka kesempatan kerja bagi tenaga kerja, seperti peningkatan kualitas tenaga kerja agar tenaga kerja dapat lebih mandiri atau menciptakan kesempatan kerja sendiri melalui usaha-usaha kecil.

4.3.4. Persamaan Distribusi Pendapatan: Pengaruh Investasi Swasta, Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Pemerintah, Tingkat Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia

Seperti halnya hasil estimasi pengaruh investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap kesempatan kerja, hasil estimasi pengaruh investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, investasi pemerintah, tingkat inflasi dan

pengangguran terhadap distribusi pendapatan, juga relatif cukup baik. Sebagian besar variabel independen tampak memperlihatkan tanda pengaruh seperti yang diharapkan. Hasil perhitungan pengaruh selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5.

Temuan awal penelitian ini adalah bahwa investasi swasta (IS) mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap distribusi pendapatan (ID). Hal ini mengisyaratkan bahwa apabila terjadi peningkatan dalam investasi swasta akan menurunkan rasio gini atau distribusi pendapatan menjadi lebih merata, sebaliknya penurunan dalam investasi swasta akan berdampak pada meningkatnya rasio gini atau distribusi pendapatan menjadi tidak merata. Temuan ini tampaknya konsisten dengan hasil empiris Glomm dan Ravikumar (1992), Hebbel, Serven dan Solimano (1996), Sarel (1997), serta Karbasi dan Mojarad (2008) bahwa adanya kecenderungan peningkatan investasi yang dilakukan oleh swasta mampu membuat distribusi pendapatan menjadi lebih baik. Lebih lanjut dikatakan bahwa adanya investasi akan mendorong terciptanya kesempatan kerja baru sehingga akan mendorong makin banyak penduduk yang mendapatkan pendapatan sehingga distribusi pendapatan yang diterima oleh penduduk dapat lebih merata. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Tulus Tambunan (2007), bahwa secara rata-rata, terdapat perubahan dalam pendapatan penduduk dengan adanya berbagai investasi swasta yang dilakukan oleh PMA maupun PMDN.

Seperti halnya dengan investasi swasta (IS), investasi pemerintah (IP) dibidang infrastruktur juga tampak memperlihatkan pengaruh negatif seperti yang diharapkan terhadap distribusi pendapatan (ketimpangan). Isyarat penting dari temuan ini adalah bahwa peningkatan investasi pemerintah untuk infrastruktur,

akan menyebabkan distribusi pendapatan semakin baik atau ketimpangan semakin menurun. Temuan ini tampaknya konsisten dengan hasil empiris Blejer dan Guerrero (1990), Glomm dan Ravikumar (1992), Jha (1998), Ahmad Fahrezi Zali (1999), Siti Farhah (2006) dan Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2008), yang menyatakan bahwa investasi pemerintah (IP) dibidang infrastruktur dapat mendorong distribusi pendapatan makin baik.

Pengaruh investasi pemerintah yang dapat mendorong distribusi pendapatan makin baik disebabkan pengeluaran pemerintah dibidang infrastruktur, misalnya investasi pemerintah pada proyek listrik, jalan, irigasi dan fisik lainnya telah banyak dinikmati oleh banyak penduduk, sehingga dapat mendorong peningkatan distribusi pendapatan. Pengeluaran pemerintah dibidang infrastruktur publik dikatakan dapat mencapai target dengan baik (buruk) apabila manfaat yang dapat diterima oleh banyak penduduk (Afonso, Schuknecht dan Tanzi, 2008). Penyediaan infrastruktur membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih berkembang secara ekonomi, sehingga dengan adanya infrastruktur tersebut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah.

Kemudian, pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan (diukur oleh gini rasio). Seperti halnya pada investasi, pertumbuhan ekonomi juga tampak mempunyai pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan, yang mengisyaratkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan distribusi pendapatan semakin baik atau ketimpangan semakin menurun. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi mencerminkan makin meningkatnya sektor-sektor ekonomi dan mendorong

perbaikan distribusi pendapatan. Apabila pertumbuhan ekonomi meningkat, logikanya sektor-sektor ekonomi akan tumbuh dalam menyerap tenaga kerja dan setiap penduduk memiliki kesempatan untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan sehingga mencerminkan makin meratanya dan terdistribusinya pendapatan rata-rata penduduk. Namun demikian, kondisi tersebut tidak selamanya benar. Sebagai penegasan, tidak bisa dianggap pula bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, ketimpangan akan lebih kecil. Berdasarkan data diketahui bahwa walaupun Irian Jaya mempunyai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tetapi ketimpangan di propinsi tersebut pada tahun berjalan justru paling tinggi selama periode penelitian. Temuan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan dalam penelitian ini mempertegas kembali hasil studi empiris dari Blejer dan Guerrero (1990), Ahn (1997), Sarel (1997), Jha (1998), Ahmad Fahrezi Zali (1999), Bigsten dan Levin (2000), Siti Farhah serta Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2008), yang menyatakan bahwa peningkatan PDRB akan menyebabkan distribusi pendapatan semakin baik atau ketimpangan semakin menurun.

Berbeda dengan pengaruh yang diberikan oleh investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan investasi pemerintah terhadap distribusi pendapatan. Pengaruh tingkat inflasi terhadap distribusi pendapatan (gini rasio) memperlihatkan pengaruh yang positif terhadap distribusi pendapatan. Artinya, ketimpangan akan meningkat atau distribusi pendapatan kian memburuk ketika inflasi semakin meningkat, dan sebaliknya, ketimpangan akan menurun atau distribusi pendapatan kian membaik ketika inflasi kian menurun. Temuan ini sejalan studi empiris Blejer dan Guerrero (1990) dan Ahn (1997).

Ahn (1997) mengatakan inflasi dapat menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas, dengan kata lain nilai tukar kas tersebut menjadi lebih kecil karena secara nominal harus menghadapi harga komoditi per satuan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Sebaliknya, mereka yang banyak memiliki kekayaan dalam bentuk aktiva tetap/*aset non-likuid* (golongan menengah ke atas), justru diuntungkan dengan kenaikan harga tersebut. Dengan demikian inflasi akan membuat jurang kesenjangan pendapatan yang semakin lebar.

Secara implisit, temuan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kelompok penduduk berpendapatan tinggi dengan kelompok penduduk berpendapatan rendah dalam merespon perubahan inflasi. Kelompok penduduk berpendapatan rendah tampak jauh lebih sensitif ketimbang mereka yang berpendapatan tinggi. Implikasi lebih jauh dari situasi ini, kenaikan inflasi akan menyebabkan terjadinya pembengkakan jumlah penduduk yang berada pada kelompok pendapatan terendah, atau setidaknya, kualitas hidup mereka, yang sudah terlanjur berada pada kelompok berpendapatan terendah akan semakin terpuruk.

Hasil estimasi pengaruh pengangguran terhadap distribusi pendapatan menunjukkan koefisien yang positif. Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan tingkat pengangguran maka koefisien gini meningkat atau distribusi pendapatan makin buruk. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif antara tingkat pengangguran dengan distribusi pendapatan. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin meningkat apabila tingkat pengangguran semakin tinggi.

Efek tingkat pengangguran terhadap distribusi pendapatan sejalan dengan efek inflasi terhadap distribusi pendapatan. Temuan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Blejer dan Guerrero (1990) Ahn (1997) dan Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2008). Ahn (1997) menemukan bahwa tingkat pengangguran mempunyai efek buruk terhadap penduduk berpendapatan rendah maupun penduduk berpendapatan tinggi. Pengaruh tingkat pengangguran yang bersifat buruk bagi distribusi pendapatan menunjukkan bahwa dengan semakin banyak penganggur maka akan semakin banyak penduduk yang tidak menerima upah yang menyebabkan tingkat kesenjangan semakin lebar. Hilangnya lapangan pekerjaan (meningkatnya pengangguran) menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Peningkatan tingkat pengangguran ini mempunyai biaya sosial yang tinggi karena efek terbesar menimpa pekerja yang mempunyai keterampilan rendah. Mereka adalah orang pertama yang menjadi penganggur ketika tingkat pengangguran secara agregat meningkat. Adanya pengangguran juga menjadi beban bagi mereka yang bekerja, dimana pengangguran akan mereduksi pendapatan yang diterima oleh pekerja, karena pengangguran untuk sementara menjadi beban bagi anggota keluarga lainnya yang bekerja, sehingga pendapatan mereka menjadi menurun.

4.4. Temuan Penelitian dan Implikasi Kebijakan

Beberapa hasil temuan penelitian ini dan implikasi kebijakannya, terkait dengan hasil penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

4.4.1. Temuan Penelitian

Secara substansial, temuan penting penelitian ini dapat dipilih menjadi dua, yaitu temuan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu (teori), khususnya ilmu ekonomi pembangunan, dan temuan yang berkaitan pengembangan praktis (empiris), khususnya implementasi investasi swasta bagi pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan.

1. Temuan Penelitian untuk Pengembangan Ilmu

- a. Mengembangkan model faktor penentu investasi swasta untuk kasus Indonesia, yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (GRT), tingkat suku bunga (I), investasi pemerintah (IP), inflasi (INF), ketersediaan kredit investasi (CR) dan nilai tukar (ER).
- b. Sejumlah hasil studi empiris yang ada dalam literatur lebih fokus pada faktor penentu investasi swasta, sementara sejumlah studi empiris lainnya mengkaji dampak dari investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan. Penelitian ini mengelaborasi keempat aspek tersebut, yaitu mengkaji model faktor penentu investasi swasta untuk dikaji pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan, yang disesuaikan dengan konteks Indonesia.
- c. Temuan empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi yang berdampak negatif terhadap kesempatan kerja untuk kasus Indonesia. Temuan ini, bertentangan dengan teori klasik dan teori keynes yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan mendorong kearah kesempatan kerja yang

makin meningkat pula. Untuk kasus Indonesia, kondisi tersebut bertolak belakang dimana pertumbuhan ekonomi tidak mampu mendorong penciptaan kesempatan kerja yang lebih besar, sehingga terjadi *carry over* tenaga kerja yang tidak terserap semakin besar.

2. Temuan Penelitian terhadap Pengembangan Studi Empiris

- a. Model empiris yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil modifikasi dan reformulasi dari berbagai penelitian empiris sebelumnya, diantaranya dari; Chhibber dan Wijnberger (1988), Khan dan Reinhart (1990), Blejer dan Guerrero (1990), Glomm dan Ravikumar (1992), Strum, Kuper dan Haan (1996), Bromstrom dan Kokko (1997), Carruth, Dickirson dan Henley (1998), Fitzroy dan Funke (1999), Seruvatu dan Jayaraman (2001), Ribeiro dan Teixeira (2001), Acosta dan Roza (2005), Lesotlho (2006), Jongwanich dan Kohpaiboon (2006), M'Amanja dan Morrisey (2006), Khan dan Khan (2007), Schularick dan Steger (2007), Jayaraman dan Singh (2007) serta Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2008). Modifikasi dimaksud untuk mengembangkan model faktor penentu investasi swasta dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan yang disesuaikan dengan konteks Indonesia.
- b. Temuan hasil penelitian untuk persamaan faktor penentu investasi swasta, menunjukkan hasil yang mendukung (konsisten) dan tidak mendukung (tidak konsisiten) dibandingkan penelitian terdahulu, sebagaimana Tabel 4.23. berikut ini :

Tabel 4.23.
Konsisten atau Tidak Konsisten Hasil Penelitian Model Faktor
Penentu Investasi Swasta dibandingkan Penelitian Terdahulu

No.	Variabel	Arah	Konsisten dengan empiris	Tidak konsisten dengan empiris
1.	Investasi Pemerintah (IP)	+ (sig)	Chhibber dan Wijnbergen (1998), Seruvatu dan Jayaraman (2001), Ribeiro dan Teixeira (2001), Ouattara (2004), Khan dan Khan (2007) serta Dwi Tantiasti (2008)	Acosta dan Roza (2005), Lesotho (2006) serta Jongwanich dan Kohpaiboon (2006)
2.	Pertumbuhan Ekonomi (GRT)	+ (sig)	Carruth, Dickerson dan Henley (1997), Dehn (2000), Rebeiro dan Teixeira (2001), Ouattara (2004), Lesotho (2006), Jongwanich dan Kohpaiboon (2006)	
3.	Suku Bunga (I)	- (sig)	Chhibber dan Wijnbergen (1998), Carruth, Dickerson dan Henley (1997), Dehn (2000), Seruvatu dan Jayaraman (2001), Agrawal (2001), Susi Suwarsih (2004), Lesotho (2006), Khan dan Khan (2007), Wiwin Setyari dkk. (2008) serta Dwi Tantiasti (2008)	
4.	Inflasi (INF)	- (sig)	Seruvatu dan Jayaraman (2001), Ribeiro dan Teixeira (2001), Roberts (2003), Acosta dan Roza (2005), Lesotho (2006), Jongwanich dan Kohpaiboon (2006) dan Wiwin Setyari dkk. (2008)	
5.	Kredit Investasi (CR)	+ (sig)	Chhibber dan Wijnbergen (1988), Dehn (2000), Seruvatu dan Jayaraman (2001), Ribeiro dan Teixeira (2001), Ouattara (2004), Acosta dan Roza (2005), Lesotho (2006), dan Jongwanich dan Kohpaiboon (2006), Khan dan Khan (2007)	
6.	Nilai Tukar (ER)	+ (sig)	Agrawal (2001), Lesotho (2006), Jongwanich dan Kohpaiboon (2006).	Seruvatu dan Jayaraman (2001), Ribeiro dan Teixeira (2001), Acosta dan Roza (2005), Khan dan Khan (2007) serta Wiwin Setyari dkk. (2008)

Sumber : Studi empiris dan Hasil Penelitian

- c. Temuan hasil penelitian untuk persamaan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan hasil yang mendukung (konsisten) dan tidak mendukung (tidak konsisiten) dibandingkan penelitian terdahulu, sebagaimana Tabel 4.24. berikut ini :

Tabel 4.24.
Konsisten atau Tidak Konsisten Hasil Penelitian Persamaan
Pertumbuhan Ekonomi dibandingkan Penelitian Terdahulu

No	Variabel	Arah	Konsisten dengan empiris	Tidak konsisten dengan empiris
1.	Investasi Swasta (IS)	+ (sig)	Khan dan Reinhart (1990), Sturm, Kuper, dan Haan (1996), Lachler dan Aschauer (1998), Krishna (1997), M'Amanja dan Morrisey (2006)	
2.	Investasi Pemerintah (IP)	+ (sig)	Khan dan Reinhart (1990), Cullison (1993), Sturm, Kuper, dan Haan (1996), Lachler dan Aschauer (1998), M'Amanja dan Morrisey (2006),	
3.	Modal Manusia (HC)	+ (sig)	Lachler dan Aschauer (1998) serta Gylfason dan Zoega (2000)	
4.	Tenaga Kerja (TK)	+ (sig)	Khan dan Reinhart (1990), Sturm, Kuper, dan Haan (1996), Sinha dan Sinha (1997), Lachler dan Aschauer (1998) dan Sinha (1999)	

Sumber : Studi empiris dan Hasil Penelitian

- d. Temuan hasil penelitian untuk persamaan kesempatan kerja, menunjukkan hasil yang mendukung (konsisten) dan tidak mendukung (tidak konsisten) dibandingkan penelitian terdahulu, sebagaimana Tabel 4.25. berikut:

Tabel 4.25.
Konsisten atau Tidak Konsisten Hasil Penelitian Persamaan
Kesempatan Kerja dibandingkan Penelitian Terdahulu

No.	Variabel	Arah	Konsisten dengan empiris	Tidak konsisten dengan empiris
1.	Investasi Swasta (IS)	+ (sig)	Bromstrom dan Kokko (1997), Fitzroy dan Funke (1999) serta Jayaraman dan Singh (2007)	
2.	Pertumbuhan Ekonomi (GRT)	- (sig)		Walterskirchen (1999), Boyke T.H. Sitomorang (2005), Sri Roshidayati (2006), Choi (2007) serta Jayaraman dan Singh (2007)
3.	Upah (W)	- (sig)	Bromstrom dan Kokko (1997), Fitzroy dan Funke (1999), Bambang Setiaji dan Sudarsono (2004), Suedekum dan Blien (2005), Boyke T.H. Sitomorang (2005), Sri Roshidayati (2006) dan Choi (2007)	

Sumber : Studi empiris dan Hasil Penelitian

- e. Temuan hasil penelitian untuk persamaan distribusi pendapatan, menunjukkan hasil yang mendukung (konsisten) dan tidak mendukung (tidak konsisiten) dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana Tabel 4.26. berikut ini :

Tabel 4.26.
Konsisten atau Tidak Konsisten Hasil Penelitian Persamaan
Distribusi Pendapatan dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Variabel	Arah	Konsisten dengan empiris	Tidak konsisten dengan empiris
1.	Investasi Swasta (IS)	- (sig)	Glomm dan Ravikumar (1992), Hebbel, Serven dan Solimano (1996), Sarel (1997), dan Karbasi dan Mojarad (2008)	
2.	Pertumbuhan Ekonomi (GRT)	- (sig)	Blejer dan Guerrero (1990), Ahn (1997), Sarel (1997), Jha (1998), Ahmad Fahrezi Zali (1999), Bigsten dan Levin (2000), Siti Farhah (2006) serta Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2008)	
3.	Investasi Pemerintah (IP)	- (sig)	Blejer dan Guerrero (1990), Glomm dan Ravikumar (1992), Jha (1998), Ahmad Fahrezi Zali (1999), Siti Farhah (2006) serta Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2008)	
4.	Inflasi (INF)	+ (sig)	Blejer dan Guerrero (1990) dan Ahn (1997)	
5.	Pengangguran (UNEMP)	+ (sig)	Blejer dan Guerrero (1990) dan Ahn (1997) dan Afonso, Schuknecht dan Tanzi (2008)	

Sumber : Studi empiris dan Hasil Penelitian

4.4.2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya dapat dimunculkan implikasi pokok bagi pembuat kebijakan, sebagai berikut :

1. Hasil temuan empiris tentang pengaruh positif investasi pemerintah terhadap investasi swasta dan pertumbuhan ekonomi, serta pengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan merekomendasikan implikasi kebijakan untuk meningkatkan investasi pemerintah di sektor infrastruktur dan percepatan pembangunan infrastruktur yang lebih merata di wilayah Indonesia. Untuk itu, diperlukan alokasi pos belanja anggaran pemerintah yang lebih besar untuk bidang infrastruktur (barang modal) baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
2. Hasil temuan empiris tentang pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap investasi swasta merekomendasikan implikasi kebijakan untuk meningkatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui upaya untuk peningkatan nilai tambah di masing-masing sektor produksi.
3. Hasil temuan empiris tentang pengaruh negatif inflasi terhadap investasi swasta merekomendasikan implikasi kebijakan untuk menjaga tingkat inflasi dalam nilai yang wajar. Oleh karenanya, kebijakan menjaga stabilitas tingkat harga dalam rangka menjaga tingkat inflasi perlu terus dilakukan.
4. Hasil temuan empiris tentang pengaruh positif kredit investasi dan pengaruh negatif tingkat bunga pinjaman terhadap investasi swasta merekomendasikan implikasi kebijakan untuk mendorong sektor perbankan dan pasar modal untuk memainkan peranannya sebagai *intermediary* dan menjaga agar tingkat bunga kredit selalu berada pada tingkat yang “wajar” yang memudahkan bagi investor swasta untuk mendapatkan permodalan/ pembiayaan yang murah.

5. Hasil temuan empiris tentang pengaruh positif nilai tukar terhadap investasi swasta merekomendasikan implikasi kebijakan untuk mendorong nilai tukar rupiah pada posisi yang wajar. Upaya memperlemah nilai tukar dalam jangka panjang secara terus-menerus tidak dapat dilakukan karena dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas perekonomian secara keseluruhan.
6. Hasil temuan empiris tentang pengaruh positif investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, serta pengaruh negatif investasi swasta terhadap distribusi pendapatan merekomendasikan implikasi kebijakan untuk mendorong peningkatan investasi swasta dengan cara menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian. Langkah yang ditempuh dapat berupa pemberian insentif fiskal, reformasi kelembagaan yang lebih mendorong efisiensi birokrasi, kepastian hukum, dan lainnya.
7. Hasil temuan empiris tentang pengaruh negatif pertumbuhan ekonomi terhadap kesempatan kerja dan distribusi pendapatan merekomendasikan implikasi kebijakan bagi pemerintah, tidak hanya mempertahankan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, lebih dari itu perlunya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan).
8. Hasil temuan empiris tentang pengaruh positif modal manusia dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi merekomendasikan implikasi kebijakan bagi pemerintah untuk mendorong peningkatan modal manusia dengan cara meningkatkan kualitas, kemampuan dan keahlian tenaga kerja melalui jalur pendidikan.

9. Hasil temuan empiris tentang pengaruh negatif upah terhadap kesempatan kerja merekomendasikan implikasi kebijakan bagi pemerintah untuk menciptakan standar pengupahan yang wajar, rasional dan adil berdasarkan kaca mata tenaga kerja maupun pengusaha.
10. Hasil temuan empiris tentang pengaruh positif pengangguran terhadap distribusi pendapatan merekomendasikan implikasi kebijakan bagi pemerintah untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap tema penelitian, tentang determinan investasi swasta dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini :

1. Pengaruh variabel-variabel independen terhadap investasi swasta di Indonesia periode 1990 hingga 2007, sebagai berikut;
 - a. **Investasi Pemerintah** memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta. Semakin tinggi investasi pemerintah maka semakin tinggi investasi swasta, atau sebaliknya semakin rendah investasi pemerintah maka semakin rendah investasi swasta.
 - b. **Pertumbuhan Ekonomi** memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi investasi swasta, atau sebaliknya semakin rendah pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah investasi swasta.
 - c. **Tingkat Bunga** memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi swasta. Semakin tinggi tingkat bunga maka semakin rendah investasi swasta, atau sebaliknya semakin rendah tingkat bunga maka semakin tinggi investasi swasta.

- d. **Inflasi** memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi swasta. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah investasi swasta, atau sebaliknya semakin rendah inflasi maka semakin tinggi investasi swasta.
 - e. **Kredit investasi** memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta. Semakin tinggi kredit investasi maka semakin tinggi investasi swasta, atau sebaliknya semakin rendah kredit investasi maka semakin rendah investasi swasta.
 - f. **Nilai Tukar** memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta, namun arah koefisien *tidak sesuai* dengan hipotesis yang diajukan. Semakin depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar maka semakin tinggi investasi swasta, atau sebaliknya semakin apresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar maka semakin rendah investasi swasta.
2. Pengaruh variabel-variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 1990 hingga 2007, sebagai berikut;
- a. **Investasi swasta** memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi swasta maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya semakin rendah investasi swasta maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi.
 - b. **Investasi pemerintah** memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi investasi pemerintah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya semakin rendah investasi pemerintah maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi.

- c. **Modal manusia** (yang diukur dengan indeks pendidikan) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi modal manusia maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya semakin rendah modal manusia maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi.
 - d. **Tenaga kerja** (yang diukur dengan rasio angkatan kerja bekerja terhadap jumlah penduduk) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak tenaga kerja yang berkualitas maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, atau sebaliknya semakin sedikit tenaga kerja yang berkualitas maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi.
3. Pengaruh variabel-variabel independen terhadap kesempatan kerja di Indonesia periode 1990 hingga 2007, sebagai berikut;
- a. **Investasi swasta** memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Semakin tinggi investasi swasta maka semakin tinggi kesempatan kerja yang dapat diciptakan, atau sebaliknya semakin rendah investasi swasta, maka semakin sedikit kesempatan kerja yang dapat diciptakan.
 - b. **Pertumbuhan ekonomi** memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, namun serta arah koefisien *tidak sesuai* dengan hipotesis yang diajukan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah kesempatan kerja yang dapat diciptakan, atau sebaliknya semakin rendah pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi kesempatan kerja yang dapat diciptakan.

- c. **Upah** memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja. Semakin tinggi upah maka semakin rendah kesempatan kerja yang dapat diciptakan, atau sebaliknya semakin rendah upah, maka semakin tinggi kesempatan kerja yang dapat diciptakan.
4. Pengaruh variabel-variabel independen terhadap distribusi pendapatan di Indonesia periode 1990 hingga 2007, sebagai berikut;
 - a. **Investasi swasta** memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan (gini rasio). Semakin tinggi investasi swasta maka semakin rendah gini rasio sehingga distribusi pendapatan makin merata, atau sebaliknya semakin rendah investasi swasta, maka semakin tinggi gini rasio sehingga distribusi pendapatan makin tidak merata.
 - b. **Pertumbuhan Ekonomi** memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan (gini rasio). Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka semakin rendah gini rasio sehingga distribusi pendapatan makin merata, atau sebaliknya semakin rendah pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi gini rasio sehingga distribusi pendapatan makin tidak merata.
 - c. **Investasi pemerintah** memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan (gini rasio). Semakin tinggi investasi pemerintah maka semakin rendah gini rasio sehingga distribusi pendapatan makin merata, atau sebaliknya semakin rendah investasi pemerintah, maka semakin tinggi gini rasio sehingga distribusi pendapatan makin tidak merata.

- d. **Inflasi** memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan (gini rasio). Semakin tinggi inflasi maka semakin tinggi gini rasio sehingga distribusi pendapatan makin tidak merata, atau sebaliknya semakin rendah inflasi, maka semakin rendah gini rasio sehingga distribusi pendapatan makin merata.
- e. **Pengangguran** memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan (gini rasio). Semakin tinggi pengangguran maka semakin tinggi gini rasio sehingga distribusi pendapatan makin tidak merata, atau sebaliknya semakin rendah pengangguran, maka semakin rendah gini rasio sehingga distribusi pendapatan makin merata.

5.2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat diberikan saran-saran, sebagai berikut :

5.2.1. Saran Akademis

Terkait dengan pengembangan ilmu, terdapat beberapa saran yang diajukan, yaitu :

1. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan dalam model faktor penentu investasi swasta, seluruhnya adalah variabel ekonomi. Untuk memperluas kajian maka kepada peneliti berikutnya disarankan untuk memasukkan variabel non ekonomi untuk dikaji pengaruh terhadap investasi swasta. Beberapa variabel non ekonomi yang diduga memiliki pengaruh terhadap investasi swasta, diantaranya adalah risiko dan ketidakpastian hukum, faktor kelembagaan (birokrasi dan administrasi), kebijakan/regulasi (uu perpajakan, uu perburuhan), politik dan keamanan, budaya dan lainnya.

2. Penelitian ini hanya meneliti pengaruh investasi swasta yang diukur oleh realisasi investasi langsung dalam bentuk PMA dan PMDN, untuk dikaji pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan. Untuk mendapatkan pengaruh yang lebih menyeluruh dari investasi swasta terhadap ketiga faktor tersebut, maka kepada peneliti berikutnya disarankan untuk menambah cakupan investasi swasta yang lebih luas dengan cara memasukkan variabel investasi tidak langsung dalam bentuk *finansial asset* atau *portfolio investment* (investasi portofolio) sehingga diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dari pengaruh investasi swasta terhadap perekonomian Indonesia, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan.

5.2.2. Saran bagi Guna Laksana

Terkait dengan operasional kebijakan, beberapa saran yang dapat diajukan, sebagai berikut :

1. Perlunya upaya nyata dari pemerintah untuk terus mendorong investasi swasta dalam rangka menciptakan dan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi angkatan kerja. Terutama investasi swasta yang mengarah pada sektor primer dan pada industri padat tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan iklim investasi yang kondusif dan perangkat kebijakan yang mendorong perbaikan berbagai fasilitas, kemudahan dan insentif yang menguntungkan bagi investor. Misalnya pemberian insentif fiskal (*tax holiday*), dan lain sebagainya.

2. Pertumbuhan ekonomi hendaknya diarahkan pada pertumbuhan berkualitas, dengan mendorong lebih besar lagi peran/kontribusi dari berbagai sektor dalam ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja, hal ini terkait dengan tendensi makin dominannya peran sektor padat modal terhadap pertumbuhan dibandingkan sektor padat karya terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Pemerintah perlu terus mengupayakan untuk mendorong anggaran investasi pemerintah untuk infrastruktur yang lebih besar dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan infrastruktur yang memadai bagi aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ketersediaan infrastruktur terbukti berpengaruh pada investasi swasta, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan.
4. Pemerintah perlu terus mempertahankan anggaran pendidikan 20%, dalam upaya meningkatkan pendidikan penduduknya sebagai *human capital investment*. Sektor pendidikan hendaknya menjadi satu skala prioritas dalam kerangka perencanaan pembangunan. Tenaga kerja yang berkualitas dan peningkatan taraf hidup tenaga pendidikan menjadi modal utama dalam meningkatkan pembangunan pendidikan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
5. Pemerintah harus cermat dalam menetapkan kebijakan standar pengupahan (upah minimum regional) yang wajar, tepat, rasional dan adil, serta dapat diterima oleh semua pihak, baik tenaga kerja maupun pengusaha, karena dampak peningkatan upah yang “tidak tepat” dapat menurunkan kesempatan kerja dan mempengaruhi pengangguran.

6. Pemerintah perlu terus mengupayakan untuk menjaga dan mendorong nilai tukar rupiah pada posisi yang wajar. Nilai tukar rupiah yang wajar memiliki pengaruh dalam meningkatkan investasi swasta di Indonesia.
7. Perlunya upaya yang terus-menerus untuk menjaga tingkat inflasi karena penurunan tingkat inflasi berpengaruh kepada peningkatan investasi swasta dan membaiknya distribusi pendapatan. Oleh karenanya, kebijakan menjaga kestabilan tingkat harga perlu terus dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tony Prasetyantono. 2001. *Ada Geliat, Tetapi Krisis Rupiah Mencemaskan. Ekonomi 2001 dan Prospek 2002*. Kumpulan Artikel. Jakarta: PT Gramedia Indonesia.
- Acosta, Pablo. & Andres Roza. 2005. Sort and Long Run Determinants of Private Investment in Argentina. *Journal of Applied Economics Vol VIII*. pp. 389 – 406.
- Afonso, António. & Ludger Schuknecht. & Vito Tanzi. Income Distribution Determinants and Public Spending Policy. *Working Paper Series No. 861, January 2008*.
- Agrawal, P. 2001. Interest Rates and Investment Levels: An Empirical Evaluation of McKinnon, Stiglitz, and Neo-Structuralist Hypotheses. *Journal of Economic 0110. March*. pp. 1-29.
- Ahmad Fahrezi Zali, 1999. Distribusi Pendapatan Indonesia dan Faktor yang mempengaruhinya. Bandung: *Jurnal Kampus Vol. XXXII. Nomor 4*. Universitas Padjadjaran.
- Ahmadi Rilam. 1997. *Pengaruh Investasi Asing Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Periode 1969-1993*. Disertasi Tidak dipublikasikan.
- Ahn, Kookshin. 1997. Trends in and Determinants of Income Distribution in Korea. *Journal Of Economic Development. Volume 22. Number 2. December 1997*.
- Aulia Pohan. 2008. *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Koordinator Penanaman Modal. *Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Indonesia*. berbagai edisi.
- Badan Pusat Statistik. *Indikator Ekonomi Indonesia*. Berbagai edisi.
- . *Indonesia Dalam Angka*. Berbagai edisi.
- . *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia*. Berbagai edisi.
- . *Matrik Investasi Pemerintah*. Berbagai edisi.
- . *Nilai Tukar Valuta Asing di Indonesia*. Berbagai edisi.
- . *Statistik Upah*. Berbagai edisi.

- Bambang Setiaji & Sudarsono. 2004. Pengaruh Diferensiasi Upah Antar Propinsi Terhadap Kesempatan Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Vol. 117 Hal 117 – 127.
- Bank Indonesia. *Laporan Tahunan Bank Indonesia*. Berbagai edisi.
- . *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Berbagai edisi.
- Barro, Robert J. & Sala-i-Martin. 1992. Public Finance in Models of Economic Growth. *Review of Economic Studies*. 59 (201).
- Bhatta, Saurav Dev. 2001. Are Inequality and Poverty Harmful for Economic Growth: Evidence from the Metropolitan Areas of the United States. *Journal of Urban Affairs*. Volume 23. Number 34. pp. 335-359
- Bigsten, Arne & Jorgen Levin. 2000. Growth and Income Distribution. *Working Paper in Economics No. 3. November 2000*.
- Blanchard, Oliver. 2000. *Macroeconomics*. Second Edition. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Blejer, Mario I. & Isabel Guerrero. 1990. The Impact of Macroeconomic Policies on Income Distribution: An Empirical Study of the Philippines. *The Review of Economics and Statistics*, Aug. Vol. 72., No. 3. pp. 414-423.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi. Seri Sinopsis, Pengantar Ilmu Ekonomi No.4*. Yogyakarta : Penerbit BPFE-UGM.
- Boyke T. H. Situmorang. 2005. Elastisitas Kesempatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Suku Bunga di Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*, Volume 24 No. 1, Mei 2005. Hal. 59-94.
- Branson, H. William. 1989. *Macroeconomic Theory and Policy*. Third Edition. Happer and Row, Publisher. Singapore:
- Bromstrom, Magnus. & Ari Kokko. 1997. Private Investment, Employment and Wages in Swedish, *World Bank Policy Research Working Paper, No. 1432 (Washington: World Bank, March)*
- Carruth, Alan. & Andrew Dickerson. & Andrew Henley. 1997. Econometric Modelling of UK Aggregate Investment: The Role of Profits and Uncertainty. *NBER Working Papers Series Number 6950. July. pp. 1-34*.

- Chhibber, Ajay. & Sweder Van Wijnbergen. 1988. Public Policy and Private Investment in Turkey. *PPR Working Papers 120. October. pp. 1-29.*
- Choi, Chang Kon. 2007. The Employment Effect of Economic Growth: Identifying Determinants of Employment Elasticity. *The Economist 1454, December, pp. 35-36.*
- Cullison, William E. 1993. Public Investment and Economic Growth. *Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly Volume 79/4. pp. 19-53*
- Cziraky, Dorio. 2004. *Fiscal Policy & Growth: Theoretical Background*. Melalui http://www.policy.hu/cziraky/Rp_FT.pdf. [05/12/2003].
- Dehn, Jan, 2000. Private Investment in Developing Countries: The Effects of Commodity Shocks and Uncertainty. *WPS/2000-11. May. pp. 1-37.*
- Departemen Keuangan RI. *Nota Keuangan Indonesia*. berbagai edisi.
- Dorbusch, Rudiger. dan Stanley Fischer. 1994. *Macro Economics*. International Edition. McGraw-Hill Inc.
- Dwi Tantiasti. 2008. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi Indonesia. 45 (3). Hal. 28-53.*
- FitzRoy, Felix. & Michael Funke. 1999. Real Wages, Investment and Employment: New Evidence from West German Sectoral Data. *De Economist 164, 487-495, June 1999.*
- Galli, Rossana dan Rolph van der Hoeven. 2001. Is Inflation Bad for Income Inequality: The Importance of the Initial Rate of Inflation. *Employment Paper, 2001/29.*
- Glomm G. & Ravikumar B. 1992. Public and Private Investment; Implications for Income Distribution. *Journal of Political Economy. Vol.100-4. pp.818*
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics*. 4th Edition. Singapore: McGraw-Hill International Editions.
- Gylfason, Thorvaldur. & Gylfi Zoega. 2000. Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment. *CESIFO Working Paper No. 542. April. pp. 19-45.*
- Harvey Kusumah. 1988. Inflasi dan Kinerja Ekspor Impor Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi Indonesia. 25 (1). Hal. 1-37.*

- Hebbel, Klaus Schmidt. & Luis Serven. & Andres Solimano. 1996. Property Rights and Income Distribution. *World Bank Research, Vol. 11. No. 1 (February, 1996)*.
- Jayaraman, T.K. dan Baljeet Singh. 2007. Foreign Direct Investment and Employment Creation in Pacific Island Countries: An empirical study of Fiji. *Working Paper Series. No. 35. May. pp. 33 – 65*.
- Jha, Sailesh K. 1998. Fiscal Policy, Income Distribution, and Growth. Asian Development Bank. *EDRC Report Series. No. 67*.
- Jhingan, H.L. 2000. *Development Planning*. Singapore: The Mc.Graw-Hill Companies. Inc.
- Jongwanich, Juthathip. & Archanun Kohpaiboon. 2006. Private Investment: Trends and Determinants in Thailand. *Journal of Economics 0970. December. pp. 1-29*.
- Karbasi, A. & S. Mojarad. 2008. *Impact of Public Investment on Iran Rural Income Inequality. American-Eurasian Journal Agriculture and Environment Science. Vol. 2. pp. 131-134*
- Keiser, Norman F. 1995. *Macroeconomics*. New York: Random House, Inc.
- Khan, Mohsin S. & Carmen M. Reinhart. 1990. Private Investment and Economic Growth in Developing Countries. *World Development: Vol. 18, No. 1. pp. 19 – 27*
- Khan, Sajawal. & Muhammad Arshad Khan. 2007. What Determines Private Investment? The Case of Pakistan. *PIDE Working Papers. 2007:36*.
- Klaus, Peter Kriegsmann. 2003. *Asia Development Bank Report. Melalui <<http://www.adb.com>>*
- Krishna, K. L. 2004. Patterns and Determinants of Economic Growth in Indian States. *Working Paper No. 144. September. pp. 75-101*.
- Krugman, Paul R. & Obsfeld, Maurice. 2001. *The International Economic, Theory and Policy*. Addison- Wesley Publishing Company.
- Lachler, Ulrich. & David Alan Aschauer. 1998. Public Investment and Economic Growth in Mexico. *Policy Research Working Paper No. 1964. pp. 1 – 24*
- Lesotlho, Patrick. 2006. An Investigation of the Determinants of Private Investment: The Case of Botswana. *Policy Research Working Paper No. 2123. pp. 11 – 34*.

- M'Amanja, Daniel. & Oliver Morrissey. 2006. Foreign Aid, Investment, and Economic Growth in Kenya: A Time Series Approach. *CREDIT Research Paper No. 06/05*. pp. 19-47.
- Makmun. 2004. Pengaruh Ketersediaan Tenaga Kerja dan Pembentukan Nilai Tambah Terhadap Investasi di Sektor Industri (Studi Kasus Kota Batam). *Depkeu Jakarta: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Maret. Vol 8. No. 1.
- Mankiw, N. Gregory. 2001. *Macroeconomics*. 5th edition. New York: Worth Publishers.
- McGregor, Lanchlan. 2000. Economic Implications of Floating Exchange Rate. *Journal of Economic. Australia Monash University*. August 2000. pp. 1-15.
- Mendenhall, William. & Terry Sincich. 2003. *A Second Course in Statistics Regression Analysis*. Sixth Edition. USA: Pearson Education, Inc.
- Nachrowi D. Nachrowi dan Hardius Usman. 2008. *Pendekatan Populer dan Praktis, Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ouattara, Bazoumana. 2004. Modelling the Long Run Determinants of Private Investment in Senegal. *CREDIT Research Paper No. 04/05*. November. pp. 1-23.
- Record, Richard. & Simon Davies. 2007. Determinants and Impact of Private Sector Investment in Malawi: Evidence from the 2006 Investment Climate Survey. March 2007. *Papers of Centre for the Study of African Economies (CSAE) Conference on Economic Development in Africa at St. Catherine's College. Oxford: UK: 19-20th March*.
- Ribeiro, Marcio Bruno & Joanillio Rodolpho Teixeira. 2001. An Econometric Analysis of Private Sector Investment in Brazil. *CEPAL Review* 74. August. pp. 153 – 166.
- Roberts, M. John. 2003. Modeling Aggregate Investment: A Fundamentalist Approach. *Journal of Economic* 0922. March. pp. 1-41.
- Robinson, Joan. 2004. Growth Centres, Rural Development and National Urban Policy: A Defence. *International Regional Science Review* 3 (2): 134.
- Romer, David. 2006. *Advanced Macroeconomics*. McGraw Hill International Book Company.

- Sarel, Michael. 1997. How Macroeconomics Factors Affect Income Distribution: The Cross-Country Evidence. *IMF Working Paper*. Vol. 97. No. 152. November 1997.
- Schularick, Moritz. & Thomas M. Steger. 2007. Financial Integration, Investment, and Economic Growth. Evidence from Two Eras of Financial Globalization. *CESIFO Working Paper No. 1691*. April. pp. 69-85.
- Sekaran, Uma. 2000. *Research Method For Business: A Skill-Building Approach*, USA: Jhon Wiley & Sons.
- Seruvatu, Elenoa. & T. K. Jayaraman. 2001. Determinants of Private Investment in Fiji. *Working Paper 2001/02*. May. pp. 1 – 38.
- Sinha, Dipendra. 1999. Export Instability, Investment and Economic Growth in Asian Countries: a Time Series Analysis. *Center Discussion Paper No. 79*. pp. 33-65.
- Sinha, Dipendra & Tapen Sinha 1997. Openness, Investment and Economic Growth in Asia. *The Indian Economic Journal Volume 49. No.4*. pp. 15-68
- Siti Parhah. 2006. Pengaruh Variabel Makroekonomi Indonesia terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. Vol. XXXI, No. 12, Pebruari.
- Sri Roshidayati. 2006. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Riil terhadap Kesempatan Kerja. Bandung: *Jurnal Kampus*. Vol. LXI. Nomor 3. Universitas Padjadjaran.
- Sritua Arief. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Stiglitz, Joseph E. 2000. *Economics of the Public Sector*. Third Edition. New York/London: W.W.Norton and Company.
- Sturm, Jan-Egbert. & Gerard H. Kuper. & Jakob de Haan. 1996. Modelling Government Investment and Economic Growth on a Macro Level: a Review. *CCSO Series No. 29*. September. pp. 24-62
- Sudarsono, 2004. *Struktur Ketenagakerjan dan Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Suedekum, Jens & Uwe Blien. 2005. Wages and Employment Growth: Disaggregated Evidence for West Germany. *IZA DP No. 1128*, April 2004

- Susi Suwarsih. 2004. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10. No. 2, Desember 2004 Hal: 98 – 125*
- Sutoyo. 2005. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. UGM Press. Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith. 2003. *Economic Development*. Eighth Edition. The Addison-Wesley.
- Tulus Tambunan. 2007. *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Tutik Wursi Arliani. 2007. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: *Buletin Studi Ekonomi Indonesia. 43 (1). Hal. 78-102*.
- Valila, Timo. & Aaron Mehrotra. 2005. Evolution and Determinants of Public Investment in Europe. *Economic and Financial Report 2005/01*. pp. 1-37.
- Walterskirchen, Ewald. 1999. The Relationship Between Growth and Employment. *Austrian Institute of Economic Research. Vol. 45. No. 554. Vienna, September 1999*
- Winardi. 1995. *Teori Makro Ekonomi*. Tarsito Bandung.
- Wiwin Setyari. Lilis Dariani. & Firman Gunawan. 2008. Determinan Investasi Swasta di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi Indonesia. 44 (2). Hal. 51-80*.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
PENGUJIAN NORMALITAS
MENGGUNAKAN *JARQUE BERA*

PENGUJIAN NORMALITAS MODEL PERTAMA

	IS	GRT	IP	I	INF	CR	ER
Mean	2.069571	5.261399	0.199708	0.047470	12.42667	13.77290	6039.457
Median	0.180700	5.552831	0.097591	0.018453	8.505000	2.289500	7231.250
Maximum	47.09114	87.44791	5.382027	0.334354	97.79000	370.0750	10690.83
Minimum	0.000000	-53.95771	0.019164	0.002768	-1.010000	0.085000	1608.125
Std. Dev.	5.699815	8.382733	0.411611	0.064687	16.77015	39.92176	3354.860
Skewness	0.338763	0.992338	0.409761	0.907953	0.510740	0.993926	0.619170
Kurtosis	1.809875	3.195280	2.848861	2.656800	2.966630	2.628589	2.373988
Jarque-Bera Probability	23.89943 0.001314	65.74159 0.000041	34.98502 0.000810	44.53013 0.000122	39.34742 0.000696	44.43029 0.000137	12.08584 0.007427
Observations	468	468	468	468	468	468	468

PENGUJIAN NORMALITAS MODEL KEDUA

	GRT	IP	IS	HC	TK
Mean	5.261399	0.199708	2.069571	6.555885	44.46199
Median	5.552831	0.097591	0.180700	6.526529	43.55521
Maximum	87.44791	5.382027	47.09114	10.94751	81.43789
Minimum	-53.95771	0.019164	0.000000	3.371250	31.77918
Std. Dev.	8.382733	0.411611	5.699815	1.416731	6.444801
Skewness	0.992338	0.409761	0.338763	0.350987	0.775220
Kurtosis	3.195280	2.848861	1.809875	3.181234	2.791454
Jarque-Bera Probability	65.74159 0.000041	34.98502 0.000810	23.89943 0.001314	10.24947 0.005948	31.46876 0.001020
Observations	468	468	468	468	468

PENGUJIAN NORMALITAS MODEL KETIGA

	EMPL	IS	GRT	W
Mean	94.16140	2.069571	5.261399	0.481473
Median	94.80518	0.180700	5.552831	0.357271
Maximum	99.46865	47.09114	87.44791	1.739950
Minimum	82.75578	0.000000	-53.95771	0.063698
Std. Dev.	3.447641	5.699815	8.382733	0.355962
Skewness	0.867087	0.338763	0.992338	0.829074
Kurtosis	3.286764	1.809875	3.195280	2.859802
Jarque-Bera Probability	60.24706 0.000000	23.89943 0.001314	65.74159 0.000041	53.99764 0.000000
Observations	468	468	468	468

PENGUJIAN NORMALITAS MODEL KEEMPAT

	ID	IS	GRT	IP	INF	UNEMP
Mean	0.406766	2.069571	5.261399	0.199708	12.42667	5.838600
Median	0.365076	0.180700	5.552831	0.097591	8.505000	5.194822
Maximum	0.991868	47.09114	87.44791	5.382027	97.79000	17.24422
Minimum	0.138049	0.000000	-53.95771	0.019164	-1.010000	0.531354
Std. Dev.	0.186935	5.699815	8.382733	0.411611	16.77015	3.447641
Skewness	0.876858	0.338763	0.992338	0.409761	0.510740	0.867087
Kurtosis	3.045394	1.809875	3.195280	2.848861	2.966630	3.286764
Jarque-Bera Probability	60.01278 0.000000	23.89943 0.001314	65.74159 0.000041	34.98502 0.000810	39.34742 0.000696	60.24706 0.000000
Observations	468	468	468	468	468	468

LAMPIRAN 2
PENGUJIAN MULTIKOLINIERITAS
MENGGUNAKAN *MATRIK KORELASI*

PENGUJIAN MULTIKOLINIERITAS MODEL PERTAMA

	IP	I	GRT	INF	CR	ER
IP	1.000000	-0.432281	0.500427	-0.042131	0.547885	0.224360
I	-0.432281	1.000000	-0.267533	0.543328	-0.432543	0.411783
GRT	0.500427	-0.267533	1.000000	-0.012294	0.231086	0.131739
INF	-0.042131	0.543328	-0.012294	1.000000	0.028667	0.152117
CR	0.547885	-0.432543	0.231086	0.028667	1.000000	0.151488
ER	0.224360	0.411783	0.131739	0.152117	0.151488	1.000000

PENGUJIAN MULTIKOLINIERITAS MODEL KEDUA

	IS	IP	HC	TK
IS	1.000000	0.230040	0.307211	-0.106243
IP	0.230040	1.000000	0.444657	-0.065476
HC	0.307211	0.444657	1.000000	-0.052499
L	-0.106243	-0.065476	-0.052499	1.000000

MODEL KETIGA

	IS	GRT	W
IS	1.000000	-0.039195	0.216503
GRT	-0.039195	1.000000	-0.059008
W	0.216503	-0.059008	1.000000

MODEL KEEMPAT

	IS	GRT	IP	INF	UNEMP
IS	1.000000	0.691852	0.430040	0.011509	0.390371
GRT	0.491852	1.000000	0.300427	-0.012294	0.445053
IP	0.430040	0.300427	1.000000	-0.042131	0.407544
INF	0.011509	-0.012294	-0.042131	1.000000	-0.025316
UNEMP	0.390371	0.445053	0.407544	-0.025316	1.000000

LAMPIRAN 3

**PENGUJIAN SERIAL KORELASI MENGGUNAKAN *DURBIN WATSON*
DAN PERSAMAAN SIMULTAN MENGGUNAKAN DATA PANEL
*RANDOM EFFECT MODEL (REM)***

PENGUJIAN AUTOKOLASI DAN PERSAMAAN MODEL PERTAMA : Faktor Penentu Investasi Swasta

Dependent Variable: IS?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 08/13/09 Time: 01:09

Sample: 1990 2007

Included observations: 18

Cross-sections included: 26

Total pool (balanced) observations: 468

Instrument list: c hc? tk?

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-543.5611	205.4450	-2.645774	0.0092
GRT?	4.235180	1.263318	3.352426	0.0005
I?	-1.454267	0.341921	-4.253221	0.0000
IP?	4.722652	1.115303	4.234410	0.0000
INF?	-4.593288	2.009901	-2.285331	0.0171
CR?	2.723118	0.953566	2.855720	0.0059
ER?	0.842336	0.337700	2.494332	0.0145
DK?	-1.561189	-0.378652	-4.123019	0.0000
Random Effects (Cross)				
_NAD—C	-114.7212			
_SUMUT—C	-94.42900			
_SUMBAR—C	-33.96075			
_RIAU—C	141.9728			
_JAMBI—C	36.79471			
_SUMSEL—C	-56.66636			
_BENGKULU—C	26.99166			
_LAMPUNG—C	-5.209288			
_DKI—C	-379.3789			
_JABAR—C	1005.018			
_JATENG—C	-406.4100			
_DIY—C	144.0886			
_JATIM—C	-309.6914			
_BALI—C	85.56391			
_NTB—C	80.25354			
_NTT—C	43.35643			
_KALBAR—C	-30.96143			
_KALTENG—C	10.84793			
_KALSEL—C	1.538313			
_KALTIM—C	-1.553658			
_SULUT—C	17.38933			
_SULTENG—C	30.94783			
_SULSEL—C	-39.08313			
_SULTRA—C	33.69606			
_MALUKU—C	20.68224			
_IRJA—C	-53.26390			

Effects Specification

Cross-section random S.D. / Rho	5.544320	0.4766
Idiosyncratic random S.D. / Rho	4.600231	0.4221

Weighted Statistics

R-squared	0.782315	Mean dependent var	859.9672
Adjusted R-squared	0.779002	S.D. dependent var	4334.059
S.E. of regression	3122.634	Sum squared resid	4.23E+08
Durbin-Watson stat	2.051143	Instrument rank	3000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.675443	Mean dependent var	54.544389
Sum squared resid	1067721.	Durbin-Watson stat	2.044328

PENGUJIAN SERIAL KORELASI DAN PERSAMAAN MODEL KEDUA : Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Dependent Variable: GRT?
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
Date: 08/12/09 Time: 01:53
Sample: 1990 2007
Included observations: 18
Cross-sections included: 26
Total pool (balanced) observations: 468
Instrument list: c i? inf? cr? er?
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.327721	1.930602	2.241643	0.0192
IS?	0.001218	0.000499	2.438896	0.0154
IP?	0.031252	0.005031	6.211288	0.0000
HC?	2.218751	0.356208	6.228801	0.0000
TK?	2.166327	0.803497	2.696122	0.0082
DK?	-1.153821	0.911602	-1.265707	0.2063
Random Effects (Cross)				
_NAD--C	-6.870675			
_SUMUT--C	7.286895			
_SUMBAR--C	-11.10609			
_RIAU--C	3.724074			
_JAMBI--C	-16.40151			
_SUMSEL--C	-0.244708			
_BENGKULU--C	-16.92829			
_LAMPUNG--C	-8.172145			
_DKI--C	8.060056			
_JABAR--C	11.39358			
_JATENG--C	7.716484			
_DIY--C	-14.50158			
_JATIM--C	10.33708			
_BALI--C	-12.05971			
_NTB--C	-11.21099			
_NTT--C	-12.92505			
_KALBAR--C	-8.939480			
_KALTENG--C	-16.27318			
_KALSEL--C	-11.18901			
_KALTIM--C	9.955045			
_SULUT--C	-18.83006			
_SULTENG--C	-16.86623			
_SULSEL--C	-7.644750			
_SULTRA--C	-17.33525			
_MALUKU--C	-19.75331			
_IRJA--C	-8.321015			

Effects Specification

Cross-section random S.D. / Rho	37.11453	0.8520
Idiosyncratic random S.D. / Rho	12.32341	0.1322

Weighted Statistics

R-squared	0.941285	Mean dependent var	4.461276
Adjusted R-squared	0.940392	S.D. dependent var	22.12286
S.E. of regression	11.54236	Sum squared resid	65661.25
Durbin-Watson stat	1.981022	Instrument rank	5.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.872361	Mean dependent var	47.46959
Sum squared resid	1154331.	Durbin-Watson stat	1.976512

PENGUJIAN SERIAL KORELASI DAN PERSAMAAN MODEL KETIGA Kesempatan Kerja

Dependent Variable: EMPL?

Method: Pooled IV/Two-stage EGLS (Cross-section random effects)

Date: 08/12/09 Time: 02:01

Sample: 1990 2007

Included observations: 18

Cross-sections included: 26

Total pool (balanced) observations: 468

Instrument list: c i? ip? inf? cr? er? hc? tk?

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.83357	8.211083	10.45338	0.0000
IS?	0.063552	0.028225	2.251632	0.0185
GRT?	-0.105524	0.041020	-2.572514	0.0142
W?	-0.043442	0.007334	-5.923011	0.0000
DK?	-0.015324	0.020315	-0.754328	0.4672
Random Effects (Cross)				
_NAD--C	-1.742252			
_SUMUT--C	-3.285488			
_SUMBAR--C	-1.690482			
_RIAU--C	-1.901528			
_JAMBI--C	2.335724			
_SUMSEL--C	0.424426			
_BENGKULU--C	3.233702			
_LAMPUNG--C	-0.039006			
_DKI--C	-10.44133			
_JABAR--C	-9.422116			
_JATENG--C	-0.741174			
_DIY--C	1.846136			
_JATIM--C	-0.869472			
_BALI--C	4.176326			
_NTB--C	0.880556			
_NTT--C	6.686446			
_KALBAR--C	2.917956			
_KALTENG--C	4.006778			
_KALSEL--C	2.347652			
_KALTIM--C	-1.234568			
_SULUT--C	-4.142306			
_SULTENG--C	0.184198			
_SULSEL--C	-4.393530			
_SULTRA--C	1.779824			
_MALUKU--C	3.503986			
_IRJA--C	5.579538			
Effects Specification				
Cross-section random S.D. / Rho			1.728395	0.4291
Idiosyncratic random S.D. / Rho			1.993555	0.5709
Weighted Statistics				
R-squared	0.815461	Mean dependent var		24.70235
Adjusted R-squared	0.813867	S.D. dependent var		3.174533
S.E. of regression	1.953767	Sum squared resid		1771.184
Durbin-Watson stat	2.021774	Instrument rank		8.000000
Unweighted Statistics				
R-squared	0.776442	Mean dependent var		94.16140
Sum squared resid	3468.440	Durbin-Watson stat		2.015329

PENGUJIAN SERIAL KORELASI DAN PERSAMAAN MODEL

KEEMPAT : Distribusi Pendapatan

Dependent Variable: ID?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 08/12/09 Time: 02:12

Sample: 1990 2007

Included observations: 18

Cross-sections included: 26

Total pool (balanced) observations: 468

Instrument list: c i? cr? er? hc? tk?

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.382736	0.052441	7.298432	0.0000
IS?	-0.003422	0.001307	-2.617323	0.0074
GRT?	-0.017622	0.007490	-2.352881	0.0172
IP?	-0.163270	0.047442	-3.441433	0.0001
INF?	0.026299	0.013380	1.965511	0.0235
UNEMP?	0.003881	0.001299	2.988225	0.0031
DK?	0.043524	0.013246	3.285822	0.0012
Random Effects (Cross)				
_NAD--C	-0.101767			
_SUMUT--C	-0.098833			
_SUMBAR--C	0.007232			
_RIAU--C	-0.136245			
_JAMBI--C	-0.086381			
_SUMSEL--C	0.148766			
_BENGKULU--C	-0.196578			
_LAMPUNG--C	0.000741			
_DKI--C	0.042831			
_JABAR--C	0.228281			
_JATENG--C	0.397097			
_DIY--C	0.034888			
_JATIM--C	0.400106			
_BALI--C	-0.061095			
_NTB--C	-0.140172			
_NTT--C	-0.046298			
_KALBAR--C	0.070911			
_KALTENG--C	-0.176984			
_KALSEL--C	-0.193658			
_KALTIM--C	0.148497			
_SULUT--C	-0.113194			
_SULTENG--C	-0.221918			
_SULSEL--C	-0.178897			
_SULTRA--C	-0.200288			
_MALUKU--C	0.086920			
_IRJA--C	0.471693			

Effects Specification

Cross-section random S.D. / Rho	1.783227	0.4852
Idiosyncratic random S.D. / Rho	1.862383	0.5364

Weighted Statistics

R-squared	0.963211	Mean dependent var	21.48812
Adjusted R-squared	0.962893	S.D. dependent var	2.766411
S.E. of regression	1.956422	Sum squared resid	1625.043
Durbin-Watson stat	2.014472	Instrument rank	5.000000

Unweighted Statistics

R-squared	0.946218	Mean dependent var	94.16140
Sum squared resid	2362.033	Durbin-Watson stat	2.028810

LAMPIRAN 4
PENGUJIAN BIAS SIMULTAN (*HAUSMAN TEST*)

PENGUJIAN HAUSMAN :
Persamaan Faktor Penentu Investasi Swasta

Dependent Variable: IS
 Method: Least Squares
 Date: 08/13/09 Time: 20:54
 Sample: 1 468
 Included observations: 468

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	85.45123	9.750386	8.763882	0.0000
IP	4.132244	0.869154	4.754329	0.0000
GRT	0.954332	0.206020	4.632238	0.0000
I	-1.299537	0.246895	-5.263525	0.0000
INF	-34.24528	60.08534	-0.569944	0.5842
CR	3.552341	0.525053	6.765676	0.0000
ER	3.913945	8.883458	0.440588	0.6640
RESID_GRT	5.344526	12.33541	0.433267	0.6766
R-squared	0.926170	Mean dependent var		234553.2
Adjusted R-squared	0.925532	S.D. dependent var		243223.1
S.E. of regression	843.5842	Akaike info criterion		1.855313
Sum squared resid	15432543	Schwarz criterion		1.977535
Log likelihood	-314.6652	F-statistic		12.26272
Durbin-Watson stat	1.967794	Prob(F-statistic)		0.000000

PENGUJIAN HAUSMAN :
Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Dependent Variable: GRT
 Method: Least Squares
 Date: 08/13/09 Time: 20:54
 Sample: 1 468
 Included observations: 468

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	99.63357	13.87446	7.181076	0.0000
IS	0.210636	0.114290	1.842999	0.0660
IP	0.097350	0.459895	0.211680	0.8325
HC	0.463813	0.117868	3.935008	0.0001
TK	0.526762	0.260119	2.025075	0.0434
RESID_IS	0.046089	0.079324	0.581022	0.5615
R-squared	0.518620	Mean dependent var	4510305.	
Adjusted R-squared	0.416010	S.D. dependent var	3689123.	
S.E. of regression	36.11573	Akaike info criterion	3.304992	
Sum squared resid	60320.15	Schwarz criterion	3.310311	
Log likelihood	-7727.682	F-statistic	5.054151	
Durbin-Watson stat	1.985016	Prob(F-statistic)	0.000160	

PENGUJIAN HAUSMAN :**Persamaan Kesempatan Kerja**

Dependent Variable: EMPL

Method: Least Squares

Date: 08/13/09 Time: 20:55

Sample: 1 468

Included observations: 468

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9439364.	26474.58	356.5445	0.0000
IS	0.069708	0.009456	7.371546	0.0000
GRT	-0.014758	0.004569	-3.229769	0.0013
W	-0.240154	0.039902	-6.018576	0.0000
RESID_IS	0.017967	0.006716	2.675296	0.0077
RESID_GRT	0.013925	0.005793	2.403786	0.0166
R-squared	0.220302	Mean dependent var	9416140.	
Adjusted R-squared	0.211864	S.D. dependent var	344764.1	
S.E. of regression	306071.4	Akaike info criterion	2.811376	
Sum squared resid	4.33E+04	Schwarz criterion	2.816695	
Log likelihood	-6572.620	F-statistic	26.10740	
Durbin-Watson stat	2.011577	Prob(F-statistic)	0.000000	

PENGUJIAN HAUSMAN:**Persamaan Distribusi Pendapatan**

Dependent Variable: ID

Method: Least Squares

Date: 08/13/09 Time: 20:56

Sample: 1 468

Included observations: 468

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.330979	0.021772	15.20174	0.0000
IS	-2.38E-09	6.12E-09	-0.389609	0.6970
GRT	-1.334448	0.164738	-8.100415	0.0000
IP	-3.76E-08	2.20E-08	-1.709610	0.0880
INF	5.84E-10	2.44E-09	0.239161	0.8111
UNEMP	1.03E-09	3.02E-09	0.340646	0.7335
RESID_IS	1.32E-08	3.89E-09	3.340742	0.0008
RESID_GRT	1.27E-08	3.89E-09	4.243554	0.0000
R-squared	0.246703	Mean dependent var		0.406767
Adjusted R-squared	0.236899	S.D. dependent var		0.186935
S.E. of regression	0.163298	Akaike info criterion		0.771636
Sum squared resid	12.29313	Schwarz criterion		0.709586
Log likelihood	187.5629	F-statistic		25.16278
Durbin-Watson stat	2.094806	Prob(F-statistic)		0.000000

LAMPIRAN 5
PENGUJIAN ENDOGENITAS (*ENDOGENEITY TEST*)

PENGUJIAN ENDOGENITAS :**Persamaan Faktor Penentu Investasi Swasta**

Dependent Variable: IS

Method: Least Squares

Date: 08/13/09 Time: 21:54

Sample: 1 468

Included observations: 468

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	87.34698	9.466737	9.226725	0.0000
IP	3.482685	0.844438	4.124264	0.0000
GRT	0.731100	0.176000	4.153977	0.0000
I	-28.16429	5.836420	-4.825612	0.0001
INF	-67.27377	116.3059	-0.578421	0.5691
CR	2.291025	0.704545	3.251781	0.0010
ER	3.913945	8.883457	0.440588	0.6640
FITTED_GRT	6.778985	26.84340	0.252538	0.8043
R-squared	0.936048	Mean dependent var	233168.5	
Adjusted R-squared	0.920060	S.D. dependent var	261350.4	
S.E. of regression	875.5654	Akaike info criterion	1.512454	
Sum squared resid	14232687	Schwarz criterion	1.802765	
Log likelihood	-324.9514	F-statistic	14.30781	
Durbin-Watson stat	1.998270	Prob(F-statistic)	0.000000	

PENGUJIAN ENDOGENITAS :**Persamaan Pertumbuhan Ekonomi**

Dependent Variable: GRT

Method: Least Squares

Date: 08/13/09 Time: 21:02

Sample: 1 468

Included observations: 468

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10107689	1388098.	7.281683	0.0000
IS	0.103735	0.131229	0.790488	0.4296
IP	0.205383	0.502154	0.409005	0.6827
HC	0.439686	0.118916	3.697444	0.0002
TK	0.555922	0.260395	2.134917	0.0333
FITTED_IS	0.388349	0.259162	1.498481	0.1347
R-squared	0.557580	Mean dependent var	4510305.	
Adjusted R-squared	0.455390	S.D. dependent var	3689123.	
S.E. of regression	3604144.	Akaike info criterion	3.304580	
Sum squared resid	6.00E+05	Schwarz criterion	3.309899	
Log likelihood	-7726.718	F-statistic	5.456301	
Durbin-Watson stat	1.984724	Prob(F-statistic)	0.000068	

PENGUJIAN ENDOGENITAS :**Persamaan Kesempatan Kerja**

Dependent Variable: EMPL

Method: Least Squares

Date: 08/13/09 Time: 21:02

Sample: 1 468

Included observations: 468

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9098159.	76322.82	119.2063	0.0000
IS	0.012322	0.010161	1.212654	0.2259
GRT	-0.003425	0.003433	-0.997645	0.3190
W	-0.149658	0.035424	-4.224826	0.0000
FITTED_IS	0.206744	0.017666	11.70300	0.0000
FITTED_GRT	0.101870	0.016317	6.243281	0.0000
R-squared	0.413684	Mean dependent var	9416140.	
Adjusted R-squared	0.407339	S.D. dependent var	344764.1	
S.E. of regression	265415.0	Akaike info criterion	2.782871	
Sum squared resid	3.25E+06	Schwarz criterion	2.788190	
Log likelihood	6505.919	F-statistic	65.19418	
Durbin-Watson stat	1.978966	Prob(F-statistic)	0.000000	

PENGUJIAN ENDOGENITAS :**Persamaan Distribusi Pendapatan**

Dependent Variable: ID

Method: Least Squares

Date: 08/13/09 Time: 21:03

Sample: 1 468

Included observations: 468

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.326487	0.022337	14.61621	0.0000
IS	-4.06E-09	6.02E-09	-0.673982	0.5007
GRT	-1.421226	0.432572	-3.285528	0.0011
IP	-5.02E-08	2.20E-08	-2.288137	0.0226
INF	5.67E-10	2.55E-09	0.222278	0.8242
UNEMP	1.85E-09	3.14E-09	0.589092	0.5561
FITTED_IS	1.01E-08	3.31E-08	0.304900	0.7606
FITTED_GRT	1.20E-08	1.80E-09	6.666667	0.0000
R-squared	0.228072	Mean dependent var		0.406767
Adjusted R-squared	0.218025	S.D. dependent var		0.186935
S.E. of regression	0.165305	Akaike info criterion		0.747204
Sum squared resid	12.59717	Schwarz criterion		0.685154
Log likelihood	181.8458	F-statistic		22.70100
Durbin-Watson stat	2.178336	Prob(F-statistic)		0.000000

LAMPIRAN 6
DATA-DATA PENELITIAN

DAFTAR ISTILAH

Deskriptif adalah pendeskripsian terhadap data dari masing-masing variabel yang dilakukan secara terstruktur, faktual dan akurat.

Distribusi pendapatan memperlihatkan tingkat pemerataan pendapatan yang diterima oleh masyarakat pada masing-masing propinsi di Indonesia. Variabel distribusi pendapatan akan diukur menggunakan gini rasio. Satuannya dalam bentuk indeks.

Explanatory Research adalah metode eksplanatoris yang digunakan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan implikasi permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, aktual dan akurat

Inflation: merupakan besarnya tingkat kenaikan harga yang dihitung berdasarkan persentase IHK yang terjadi pada periode tertentu.

Investasi pemerintah adalah besarnya total nilai realisasi investasi pemerintah atau pengeluaran pemerintah propinsi untuk infrastruktur barang modal pada setiap periode.

Investasi swasta adalah besarnya total nilai realisasi investasi swasta berdasarkan propinsi di Indonesia yang terdiri dari PMA dan PMDN.

Kesempatan kerja adalah proporsi dari jumlah tenaga kerja bekerja terhadap angkatan kerja berdasarkan propinsi di Indonesia.

Kredit investasi untuk swasta adalah ketersediaan kredit investasi untuk sektor swasta dari lembaga keuangan dan perbankan berdasarkan Propinsi di Indonesia.

Modal manusia akan diproksi menggunakan indeks tingkat pendidikan angkatan kerja dari SD hingga Perguruan Tinggi. Variabel modal manusia diukur berdasarkan proporsi tingkat pendidikan yang ditamatkan angkatan kerja dikalikan dengan lamanya angkatan kerja menempuh pendidikan

Nilai tukar adalah besarnya nilai kurs riil rupiah terhadap dollar Amerika yang berlaku dimasing-masing ibu kota propinsi.

Panel data: merupakan penggunaan data dalam penelitian yang mengkombinasikan penggunaan data runtun waktu dengan data *cross section*

Pengangguran adalah penduduk berdasarkan propinsi yang masuk dalam usia angkatan kerja terhadap, tetapi tidak bekerja karena sedang mencari pekerjaan (menganggur).

Pertumbuhan ekonomi adalah besarnya nilai pertumbuhan PDRB Propinsi di Indonesia yang diukur berdasarkan harga konstan 2000.

Tenaga kerja adalah proporsi penduduk yang bekerja (tenaga kerja) terhadap jumlah penduduk berdasarkan propinsi di Indonesia.

Upah adalah besarnya rata-rata upah riil yang diterima oleh tenaga kerja sektor formal dalam masa satu bulan kerja pada masing-masing propinsi di Indonesia.

Verifikatif merupakan metode yang dilakukan untuk meneliti hubungan, keterkaitan dan pengaruh antara variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikat (*dependent variable*) yang diteliti yang dilakukan dengan pengujian statistik dan ekonometrik untuk memperoleh kesimpulan penelitian